



RANCANGAN AWAL

RPJMD

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

Kabupaten
**Biak
Numfor**
2025-2029





VISI PEMBANGUNAN BIAK NUMFOR 2025-2029:

**"Mewujudkan Kabupaten
Biak Numfor yang Sejahtera,
Berdaya Saing, Inklusif dan
Berkelanjutan Melalui
Masyarakat yang Cerdas,
Sehat dan Mandiri"**



MARKUS OKTOVIANUS MANSNEBRA, S.H., M.M.

Bupati Biak Numfor

JIMMY CARTER RUMBARAR KAPISSA

Wakil Bupati Biak Numfor



KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan.

RPJMD ini disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Biak Numfor, yaitu: "Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang Sejahtera, Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Masyarakat yang Cerdas, Sehat dan Mandiri". Visi ini menggambarkan pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, penguatan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi lokal, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta terjamin kesejahteraan sosialnya. Berdaya saing mencerminkan upaya daerah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan global maupun regional. Inklusif berarti pembangunan dirancang agar seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan Orang Asli Papua, mendapatkan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan. Sementara itu, berkelanjutan menegaskan

komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan sosial budaya masyarakat Biak Numfor. Dengan visi tersebut, RPJMD menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi wilayah.

Dalam semangat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), RPJMD ini menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek utama pembangunan, dengan memastikan adanya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kapasitas ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian budaya lokal. Otonomi Khusus menjadi instrumen penting dalam memperkuat keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Biak Numfor, khususnya OAP.

Penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan yang partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, akademisi, dunia usaha, masyarakat adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Diharapkan, dokumen ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RPJMD ini. Semoga dokumen ini menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang berkelanjutan, berkeadilan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat, khususnya Orang Asli Papua.

....., 2025

BUPATI BIAK NUMFOR

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA., SH., M.M



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I.1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I.3
1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN	I.7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD	I.9
1.5 TAHAP PENYUSUNAN RPJMD	I.10
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	I.11
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	 II.1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II.1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	II.3
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II.33
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	II.33
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II.38
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II.40
2.1.1.7 Demografi	II.51

2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.55
2.1.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II.55
2.1.2.2	Kesehatan untuk Semua	II.67
2.1.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II.78
2.1.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II.89
2.1.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II.91
2.1.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	II.99
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II.103
2.1.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II.103
2.1.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II.105
2.1.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II.112
2.1.3.4	Transformasi Digital	II.113
2.1.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II.117
2.1.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II.120
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	II.131
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II.133
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II.133
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II.135
2.1.4.3	Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II.137
2.2	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	II.138
2.2.1	Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024	II.139
2.2.1.1	Pendapatan Daerah	II.139
2.2.1.2	Belanja Daerah	II.143
2.2.1.3	Pembiayaan Daerah	II.146
2.2.1.4	Neraca Daerah	II.148
2.2.1.5	Proporsi Penggunaan Anggaran	II.149
2.2.1.6	Analisis Pembiayaan	II.151
2.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029	II.154

2.2.2.1	Pendapatan Daerah.....	II.154
2.2.2.2	Belanja Daerah	II.155
2.2.2.3	Pembiayaan Daerah	II.155
2.2.2.4	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	II.157
2.3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	II.158
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II.158
2.3.2	Isu Strategis Daerah	II.163
2.3.2.1	Isu Strategis Internasional	II.163
2.3.2.2	Isu Nasional	II.165
2.3.2.3	Isu Strategis Provinsi Papua.....	II.173
2.3.2.4	Isu Strategis Kabupaten Biak Numfor.....	II.175

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

		III.1
3.1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	III.1
3.1.1	Visi	III.1
3.1.2	Misi	III.3
3.1.3	Tujuan dan Sasaran	III.5
3.2	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III.16
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III.16
3.2.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah	III.30
3.2.3	Program-program Prioritas Daerah	III.33

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV.1
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	IV.1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV.53

BAB V PENUTUP

5.1	KAIDAH PELAKSANAAN.....	V.1
5.2	PENDANAAN DAN PENGANGGARAN.....	V.2
5.3	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	V.3
5.4	PERUBAHAN RPJMD	V.3
5.5	PARTISIPASI PUBLIK.....	V.4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025–2029 memiliki makna strategis sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pencapaian, program prioritas, kerangka pendanaan, serta indikator kinerja utama daerah. RPJMD berperan sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan selama masa jabatan kepala daerah. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kolaborasi antar berbagai pihak (*pentahelix*) diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029. Dalam hal ini, Bapak Markus Octovianus Mansnembra., SH., M.M dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor mengajak seluruh *stakeholders* di lingkungan Kabupaten Biak Numfor untuk berkolaborasi mencapai visi "*Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang Sejahtera, Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Masyarakat yang Cerdas, Sehat dan Mandiri*". Visi ini menggambarkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan Visi ini menggambarkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

dalam mewujudkan pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, hingga penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal. Pembangunan juga diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat secara fisik dan mental, serta cerdas dalam memanfaatkan peluang kemajuan zaman. Selain itu, visi tersebut menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, di mana setiap warga, termasuk kelompok rentan dan Orang Asli Papua, memiliki ruang partisipasi yang adil serta memperoleh manfaat nyata dari pembangunan. Dengan semangat keberlanjutan, pembangunan Kabupaten Biak Numfor akan dijalankan secara seimbang antara peningkatan kesejahteraan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Biak.

Pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari Provinsi Papua memiliki karakteristik wilayah yang khas, tantangan geografis yang kompleks, serta dinamika sosial-ekonomi yang perlu ditangani secara terencana dan kontekstual. Permasalahan mendasar seperti masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya capaian indikator pembangunan manusia, terbatasnya infrastruktur dasar, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan publik menjadi fokus utama yang harus diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sisi lain, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, serta kekayaan budaya lokal yang jika dikelola secara bijak dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks Otonomi Khusus, telah terdapat perkembangan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, meskipun belum banyak menyentuh permasalahan pembangunan Kabupaten Biak Numfor secara komprehensif dalam mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu perencanaan yang lebih mendalam guna perbaikan pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Biak Numfor

sehingga dapat lebih fokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*in-equity*) pembangunan dengan memperkuat aspek kemandirian Orang Asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terdapat tantangan dinamika global yang dapat berdampak pada pembangunan Kabupaten Biak Numfor, seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, krisis pangan dan energi, transformasi digital, hingga pergeseran ekonomi global. Seluruh dinamika ini berdampak langsung maupun tidak langsung baik dari sisi ketahanan ekonomi, ketangguhan sosial, maupun daya saing sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu merespon perubahan tersebut secara adaptif dan visioner melalui perencanaan pembangunan yang lebih antisipatif, resilien, dan inklusif. Kebijakan pembangunan Kabupaten Biak Numfor ke depan harus mampu memperkuat ketahanan lokal dalam menghadapi guncangan eksternal, seiring dengan tetap menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

Dalam proses penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja *money follow program*. Pendekatan ini memungkinkan perumusan perencanaan pembangunan yang tidak hanya berbasis data dan bukti, tetapi juga memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan antar sektor, antar wilayah, serta antarpelaku pembangunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 10) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 31) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2045.

1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

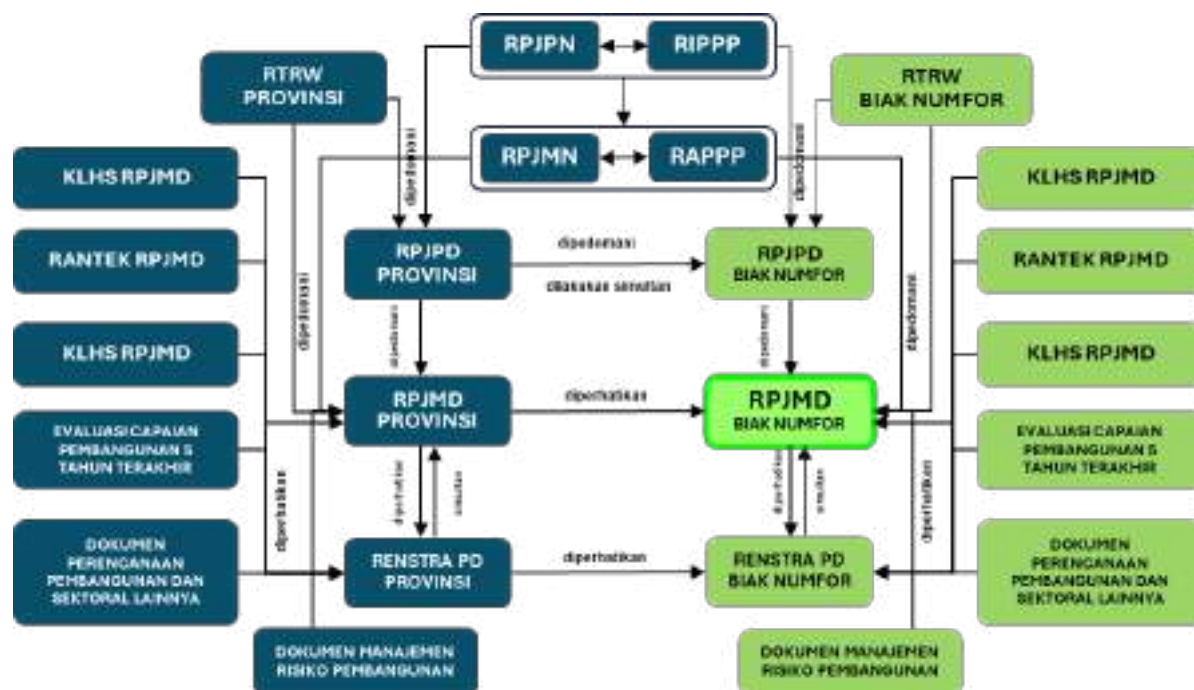
RPJMD Kabupaten Biak Numfor diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang berkeadilan, dengan menempatkan manusia sebagai objek (penerima manfaat) dan subjek (pelaku) pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Biak Numfor dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*bottom-up approach*) dan

bawah-atas (*top-down approach*), holistik-tematik, integratif, serta pendekatan spasial.

Dalam penyusunan dan implementasi dokumen RPJMD Kabupaten Biak Numfor terdapat hubungan antardokumen yang harus diperhatikan, yaitu:

- RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun dengan **mempedomani RPJMN** Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun dengan **mempedomani arahan pemanfaatan ruang dalam RTRWN, RTRW** Provinsi Papua, serta RTRW Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan selaras dengan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
- RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati yang disusun **berpedoman pada RPJPD** Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2045.

Gambar I.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
(Keterangan: dengan adanya penyesuaian berdasarkan arahan RIPP dan RAPP)

- d. RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun dengan **mempedomani Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)** Tahun 2025-2029 yang memuat pengaturan sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan.
- e. RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun dengan **memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD** Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029.
- f. RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun secara **simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah** Kabupaten Biak Numfor 2025-2029.
- g. RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun dengan **memperhatikan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam** serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**RPPLH**), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (**KLHS**) RPJMD Tahun 2025-2029.
- h. RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dokumen manajemen risiko pembangunan nasional di daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2025-2029 adalah memberikan menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029. Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. memberi gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Biak Numfor;

- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor serta dengan wilayah yang berbatasan;
- d. menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- e. menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial, serta terfokus, terukur dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- f. memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan pembangunan Kabupaten Biak Numfor dalam 5 tahun ke depan;
- g. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029.
- h. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan dalam RENSTRA-PD, RKPD, RENJA-PD, RKA dan APBD. Termasuk juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat distrik maupun kampung;
- i. menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap PD (Perangkat Daerah);
- j. menetapkan indikator kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah selama periode 2025–2029.

1.5 TAHAP PENYUSUNAN RPJMD

Penyusunan RPJMD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, serta disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah

- 1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra perangkat daerah;
- 2) Orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah;
- 3) Penyiapan agenda kerja; serta
- 4) Penyiapan data dan informasi.

b. Penyusunan Substansi RPJMD

- 1) Pembahasan visi dan misi secara teknokratis antara tim penyusun dengan Kepala Daerah terpilih;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD;

- 3) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD;
- 4) Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD;
- 5) Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; serta
- 6) Konsultasi Ranwal RPJMD untuk memperoleh masukan dari Kemendagri dan Bappenas dengan pertimbangan kesesuaian terhadap kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada perangkat daerah dan penyusunan Rancangan Renstra perangkat daerah;
- 8) Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- 9) Penyusunan Rancangan RPJMD, yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi Ranwal dan Rancangan Renstra perangkat daerah);
- 10) Musrenbang RPJMD untuk membahas Rancangan RPJMD, dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- 11) Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD, yang merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rankhir berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD; serta
- 12) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir.

c. Proses Penetapan RPJMD

- 1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD;
- 2) Pembahasan dengan DPRD;
- 3) Persetujuan bersama;
- 4) Evaluasi Ranperda RPJMD; serta
- 5) Penetapan Ranperda RPJMD menjadi Peraturan Daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mencakup 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Biak Numfor sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi subbab: (1) gambaran umum kondisi daerah; (2) gambaran keuangan daerah; serta (3) permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yang selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu, bab ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah, disertai indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 yang mencakup target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).



BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah implementasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Biak Numfor tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

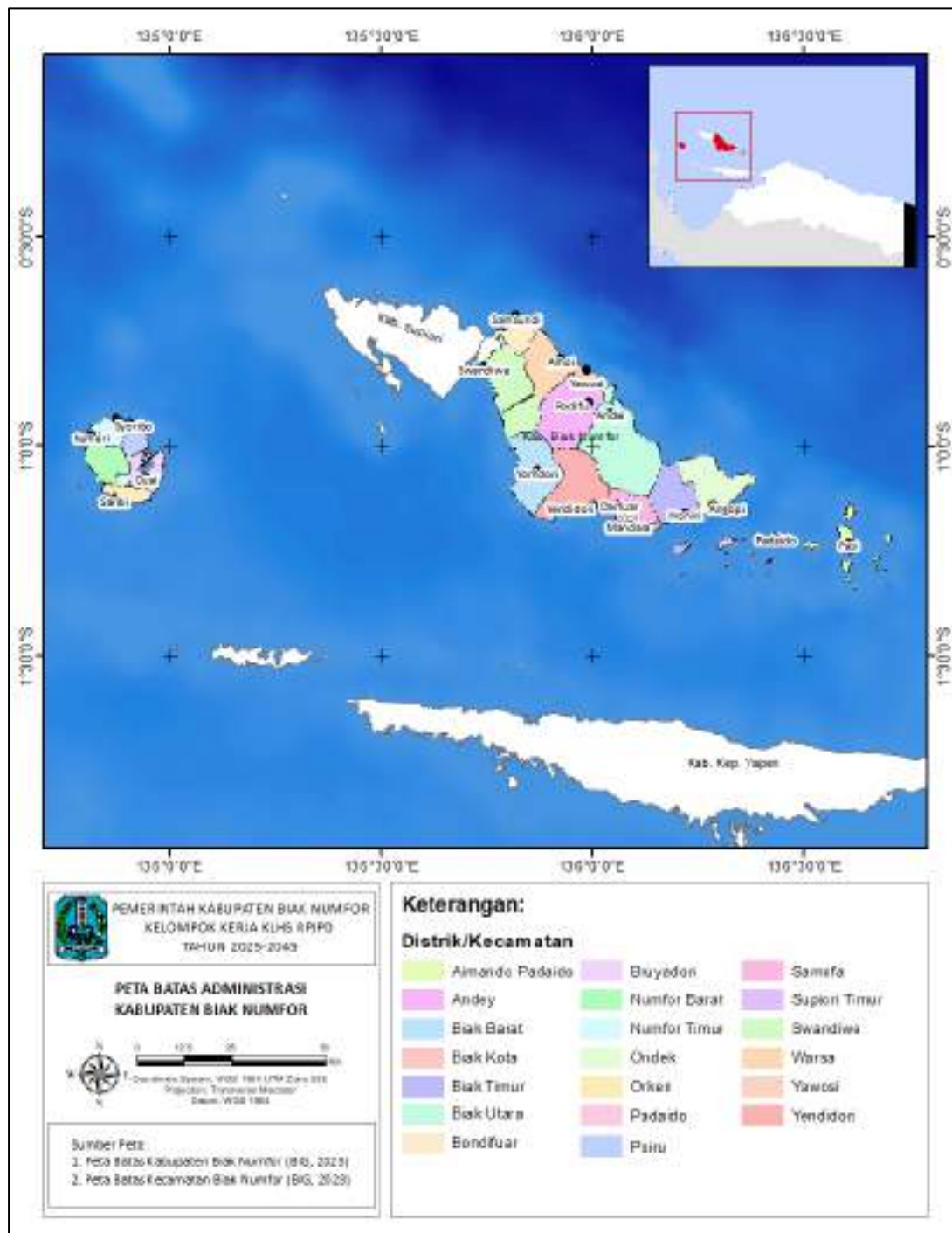
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Biak Numfor berada di sebelah utara Pulau Papua tepatnya pada 0°55"-1°27" Lintang Selatan dan 134°47" – 136° Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 2.254,01 km² atau 225.400,84 hektar (Luas ini telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori). Kabupaten Biak Numfor memiliki 2 Pulau Besar yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor serta kurang lebih 42 pulau-pulau kecil lainnya. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Biak Numfor antara lain:

Sebelah Utara	: Kabupaten Supiori dan Samudera Pasifik;
Sebelah Selatan	: Selat Yapen;
Sebelah Timur	: Samudera Pasifik; dan
Sebelah Barat	: Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 distrik. Lima distrik diantaranya ada di Pulau Numfor yaitu Numfor Barat, Numfor Timur, Orkeri, Poiru dan Bruyadori, 12 distrik lainnya di Pulau Biak yaitu Distrik Oridek, Biak Timur, Biak Kota, Samofa, Yendidori, Biak Utara, Yawosi, Andey, Bondifuar, Warsa, Biak Barat, dan Swandiwe. Adapun 2 distrik lainnya berada di kepulauan yaitu Distrik Padaido dan Aimando.

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Biak Numfor



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Pada Tabel II.1 dapat dilihat bahwa Distrik Biak Utara memiliki wilayah paling luas yaitu 34,407.88 ha, sedangkan Distrik Padaido merupakan distrik dengan wilayah paling kecil, yaitu 1,473.23 ha. Distrik dengan jarak tempuh paling jauh, dari ibu kota distrik ke ibukota kabupaten adalah Distrik Swandiwe, yaitu sekitar 80 km, sedangkan jarak tempuh paling dekat adalah Distrik Samofa dengan jarak sekitar 2 km.

Tabel II.1 Luas Area, Persentase, Ibu Kota dan Jumlah Kampung Menurut Distrik Tahun 2024

No	Distrik	Luas		Ibukota	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan
		ha	%			
1	Numfor Barat	10.203,04	4,53	Kameri	12	0
2	Numfor Timur	6.158,01	2,73	Yenburwo	9	0
3	Orkeri	5.189,05	2,30	Pakreki	9	0
4	Poiru	4.515,07	2,00	Andei	9	0
5	Bruyadori	6.932,26	3,08	Duai	10	0
6	Padaido	1.457,47	0,65	Pai	11	0
7	Aimando Padaido	4.006,50	1,78	Pasi	13	0
8	Oridek	16.308,15	7,24	Wadibu	14	0
9	Biak Timur	15.384,98	6,83	Bosnik	26	0
10	Biak Kota	2.430,56	1,08	Biak	16	7
11	Samofa	7.806,37	3,46	Darfuar	11	7
12	Yendidori	21.171,01	9,39	Yendidori	19	0
13	Biak Utara	34.366,47	15,25	Korem	16	0
14	Yawosi	2.560,98	1,14	Wasori	8	0
15	Andey	23.396,97	10,38	Roidifu	12	0
16	Bondifuar	6.475,81	2,87	Sansundi	5	0
17	Warsa	14.238,53	6,32	Ammoy	20	0
18	Biak Barat	20.084,50	8,91	Yomdori	21	0
19	Swandiwe	22.715,10	10,08	Wombrisauw	16	0
Jumlah		225.400,84	100,00		257	14

Sumber: Hasil analisa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2021

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Tutupan Lahan

Penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis tutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada tutupan lahan tersebut (BSN, 2020). Klasifikasi penutupan lahan adalah penggolongan objek penutupan lahan ke dalam kelas-kelas menurut batasan dan kriteria tertentu (KLHK, 2020). Standar klasifikasi tutupan lahan yang ada di Indonesia dikembangkan dari sistem klasifikasi tutupan lahan United Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO). Penggunaan sistem klasifikasi tutupan lahan memungkinkan terjadinya pemantauan dan pelaporan perubahan tutupan lahan pada suatu negara yang dapat diterima di tingkat internasional. Pada umumnya, kelas tutupan lahan dibagi menjadi dua bagian besar yakni daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi diturunkan dari pendekatan konseptual struktur fisiognomi yang konsisten bersumber dari bentuk tumbuhan, bentuk tutupan, tinggi tumbuhan, dan distribusi spasialnya. Sementara pada daerah tak bervegetasi, pendetailan kelas mengacu pada aspek permukaan tutupan, distribusi, atau kepadatan, dan ketinggian/kedalaman objek.

Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Kabupaten tahun 2022 yang dikeluarkan oleh KLHK pada tahun 2023, Kelas Penutupan Lahan yang mendominasi wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah Hutan Lahan Kering Primer seluas 100,387.05

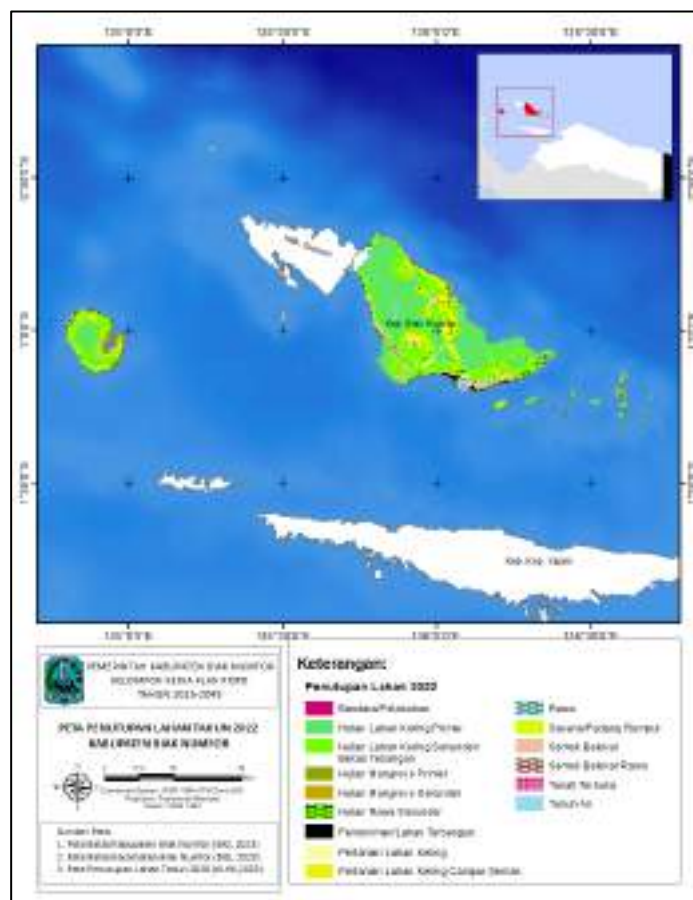
hektar atau sekitar 44.54 persen dan Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan seluas 69,162.94 atau sekitar 30.68 persen, sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.2 dan Tabel II.2.

Tabel II.2 Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (ha)	Luas (%)
1	Bandara/Pelabuhan	326.37	0.14
2	Hutan Lahan Kering Primer	100,387.05	44.54
3	Hutan Lahan Kering Sekunder/ Bekas Tebangan	69,162.94	30.68
4	Hutan Mangrove Primer	3,030.30	1.34
5	Hutan Mangrove Sekunder	1,003.27	0.45
6	Hutan Rawa Sekunder	983.06	0.44
7	Pemukiman/Lahan Terbangun	6,842.83	3.04
8	Pertanian Lahan Kering	4,382.46	1.94
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	27,969.59	12.41
10	Rawa	430.56	0.19
11	Savana/Padang Rumput	396.81	0.18
12	Semak Belukar	8,970.39	3.98
13	Semak Belukar Rawa	209.64	0.09
14	Tanah Terbuka	807.98	0.36
15	Tubuh Air	497.71	0.22
Luas Total		225,400,84	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Gambar II.2 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Biak Numfor



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Berdasarkan data luas penutupan lahan yang dikeluarkan oleh KLHK tahun 2020 sampai dengan 2022, terlihat bahwa luas kelas penutupan lahan yang mengalami penambahan tertinggi di tahun 2022 adalah semak belukar sebesar 1.892,97 hektar atau meningkat sebesar 21,10 persen dari tahun 2020. Selain itu, terdapat kelas Permukiman / Lahan terbangun yang mengalami peningkatan 959,42 hektar di tahun 2022 atau sekitar 14,02 persen dari tahun 2020. Kelas penutupan lahan yang mengalami penurunan luas terbesar adalah pertanian lahan kering seluas 552,69 hektar di tahun 2022 atau menurun sekitar 12,61 persen dari tahun 2020. Demikian juga dengan Luasan Hutan Mangrove Sekunder yang mengalami penurunan sebesar 100,61 persen di tahun 2022 atau menurun sekitar 10,03 persen dari tahun 2020. Tabel II.3 menunjukan luas perubahan penutupan lahan tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel II.3 Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020–2022

Kelas Penutupan Lahan	Luas Penutupan Lahan Tahun			Perubahan Penutupan Lahan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	hektar	%
Bandara/Pelabuhan	307.63	307.63	326.37	18.75	5.74
Hutan Lahan Kering Primer	98,450.66	98,450.70	100,387.05	1,936.39	1.93
Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	71,301.88	71,301.84	69,162.94	-2,138.94	-3.09
Hutan Mangrove Primer	3,012.99	3,012.99	3,030.30	17.31	0.57
Hutan Mangrove Sekunder	1,103.88	1,103.88	1,003.27	-100.61	-10.03
Hutan Rawa Sekunder	981.57	981.57	983.06	1.49	0.15
Pemukiman/Lahan Terbangun	5,883.42	5,883.42	6,842.83	959.42	14.02
Pertanian Lahan Kering	4,935.15	4,935.15	4,382.46	-552.69	-12.61
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	29,951.21	29,951.19	27,969.59	-1,981.62	-7.08
Rawa	441.28	441.28	430.56	-10.72	-2.49
Savana/Padang Rumput	389.38	389.38	396.81	7.43	1.87
Semak Belukar	7,077.42	7,077.42	8,970.39	1,892.97	21.10
Semak Belukar Rawa	203.81	203.81	209.64	5.84	2.78
Tanah Terbuka	860.71	860.71	807.98	-52.73	-6.53
Tubuh Air	500.03	500.03	497.71	-2.32	-0.47
Luas Total (hektar)	225,400,84	225,400,84	225,400,84		

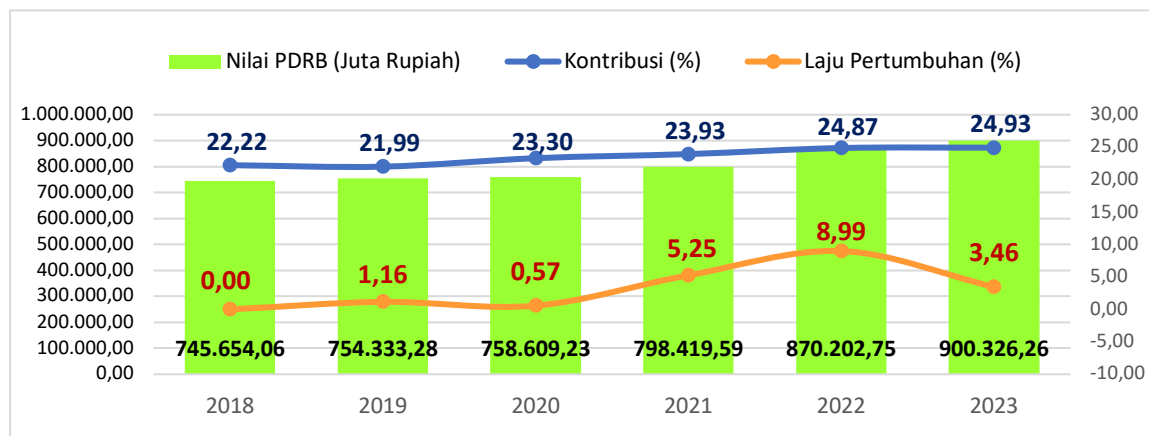
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor **menunjukkan tren pertumbuhan positif** dengan **kontribusi terhadap PDRB yang meningkat** dari 22,22% pada 2018 menjadi 24,93% pada 2023. Nilai PDRB sektor ini juga terus bertambah, mencapai Rp.900,33 miliar pada 2023, meskipun laju pertumbuhan mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 8,99%, didorong oleh pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas produksi, namun melambat menjadi 3,46% pada 2023 (lihat Gambar II.52). Hal ini

menunjukkan bahwa **sektor ini tetap menjadi pilar utama ekonomi** Biak Numfor, meskipun perlu strategi penguatan seperti peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ke depan.

Gambar II.3 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHK Biak Numfor 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "PDRB Biak Numfor Menurut Lapangan Usaha"

Tabel II.4 Peranan Subsektor terhadap Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	20,78	20,78	21,83	21,40	20,20	19,35
	a. Tanaman Pangan	6,01	6,13	6,16	5,88	5,42	5,20
	b. Tanaman Holtikultura Semusim	0,50	0,51	0,53	0,53	0,48	0,49
	c. Tanaman Perkebunan Semusim	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	d. Tanaman Holtikultura Tahunan	4,90	5,05	5,23	5,05	4,63	4,50
	e. Perkebunan Tahunan	1,32	1,36	1,37	1,28	1,21	1,20
	f. Peternakan	7,96	7,62	8,45	8,56	8,37	7,86
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,44	3,54	3,44	3,02	2,83	2,87
3	Perikanan	75,79	75,68	74,72	75,58	76,97	77,78
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "PDRB Biak Numfor Menurut Lapangan Usaha"

Berdasarkan data peranan subsektor terhadap nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2018-2023 (lihat Tabel II.4), subsektor perikanan memiliki kontribusi tertinggi mencapai 77,78% pada 2023 yang menunjukkan dominasi subsektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan ini mendorong sektor perikanan Biak Numfor mampu bersaing dengan produksi ikan dari daerah lain, dengan nilai tambah sebesar 1.044,60 miliar rupiah di tahun 2023. Sementara itu, subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mengalami sedikit penurunan dari 20,78% pada 2018 menjadi 19,35% pada 2023, dengan subsektor Peternakan sebagai penyumbang terbesar dalam kelompok ini, mencapai 7,86% pada 2023. Sektor

Kehutanan dan Penebangan Kayu berkontribusi kecil dengan angka yang cenderung menurun, dari 3,44% pada 2018 menjadi 2,87% pada 2023.

Berdasarkan data jumlah usaha pertanian menurut subsektor di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 (lihat Tabel II.5), total usaha pertanian yang tercatat sebanyak 14.095 unit. Sebagian besar usaha ini didominasi oleh usaha pertanian perorangan dengan jumlah 14.093 unit, sedangkan usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya masing-masing hanya berjumlah 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Biak Numfor masih berskala kecil dengan pola usaha yang bersifat tradisional atau informal.

Tabel II.5 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Subsektor di Kabupaten Biak Numfor (unit), 2023

Lapangan Usaha	Rumah Tangga Usaha Pertanian	Usaha Pertanian			
		Usaha Pertanian Perorangan	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya	TOTAL
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.397	14.093	1	1	14.095
a. Tanaman Pangan	8.769	8.996	-	-	8.996
• Padi	-	-	-	-	-
• Palawija	8.769	8.996	-	-	8.996
b. Holtikultura	7.083	7.258	1	-	7.259
c. Perkebunan	6.733	6.849	-	-	6.849
d. Peternakan	2.955	2.990	1	-	2.991
e. Perikanan	4.514	4.694	-	1	4.695
• Budidaya Ikan	121	121	-	1	122
• Penangkapan ikan	4.404	4.584	-	-	4.584
f. Kehutanan	347	350	-	-	350
g. Jasa Pertanian	31	32	-	-	32

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"

Pada tahun 2023, terdapat total 13.339 rumah tangga usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor, dengan mayoritas (9.000 rumah tangga atau 67,5%) sepenuhnya menggantungkannya pada sektor ini. Distrik dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbesar adalah Biak Kota (1.581 rumah tangga), Biak Timur (1.335 rumah tangga), dan Yendidori (1.425 rumah tangga), sementara yang terendah adalah Bruyadori (362 rumah tangga) dan Bondifuar (97 rumah tangga). Sebanyak 386 rumah tangga (2,9%) memperoleh kurang dari 25% pendapatannya dari pertanian, sedangkan 1.392 rumah tangga memiliki kontribusi pendapatan pertanian sebesar 26-50% dan 1.385 rumah tangga berada pada kisaran 51-75%. Data ini menunjukkan bahwa **sektor pertanian masih menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat** Biak Numfor, **meskipun ada kelompok rumah tangga yang memiliki sumber pendapatan tambahan di luar sektor pertanian**, sehingga diperlukan strategi

untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Tabel II.6 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Menurut Distrik dan Persentase Pendapatan Pertanian terhadap Total Pendapatan di Biak Numfor (rumah tangga), 2023

Distrik	Kelompok Persentase Pendapatan					Total
	0-25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%	
Numfor Barat	3	34	11	13	332	393
Orkeri	1	10	24	20	279	334
Numfor Timur	6	7	6	16	211	246
Bruyadori	-	32	4	3	323	362
Poiru	-	14	6	3	289	312
Padaido	-	13	7	12	451	483
Aimando Padaido	2	28	28	26	353	437
Biak Timur	33	165	246	218	673	1335
Oridek	15	156	72	119	506	868
Biak Kota	104	206	203	89	979	1581
Samofa	74	245	172	224	460	1175
Yendidori	7	86	178	48	1106	1425
Biak Utara	10	98	155	118	694	1075
Andey	-	13	9	25	371	418
Warsa	55	5	5	89	736	890
Yawosi	5	35	19	29	272	360
Bondifuar	19	2	2	6	76	105
Biak Barat	6	68	96	129	638	937
Swandiwe	46	175	142	47	251	661
Biak Numfor	386	1392	1385	1234	9000	13397

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"

Tabel II.7 Kondisi Manajemen Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Biak Numfor, 2023

Kategori		Rumah Tangga	%
Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	mendapatkan penyuluhan dari aparat/pihak dinas pertanian setempat	705 dari 13397	5,26
	menggunakan pupuk	2417 dari 13397	18,04
	menggunakan pestisida	1392 dari 13397	10,39
	melakukan penanaman/pemanfaatan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian lainnya/ peternakan/perikanan dalam satu bidang (agroforestri)	64 dari 13397	0,48
	mengikuti program perhutanan sosial dan menggunakan lahan dari perhutanan sosial	11 dari 13397	0,08
	menjadi anggota kelompok tani/kelompok peternak/kelompok nelayan	1068 dari 13397	7,97
	menjadi bagian dari kemitraan atau pertanian plasma	33 dari 13397	0,25
	mendapatkan bantuan untuk usaha pertanian (pupuk subsidi/sarana produksi/bibit/pakan/ lainnya)	707 dari 13397	5,28
	memiliki akses terhadap kredit usaha rakyat (KUR) pertanian	78 dari 13397	0,58
	memiliki perlindungan asuransi untuk usaha pertanian	34 dari 13397	0,25
Usaha Perkebunan	memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (STD-B)	15 dari 6733	0,22
Usaha Pertanian	melakukan usaha pertanian di lahan terbatas	1031 dari 2838	36,33
	menggunakan teknologi hidroponik, aquaponik, vertikulture, media terpal, dan sejenisnya	56 dari 2838	1,97

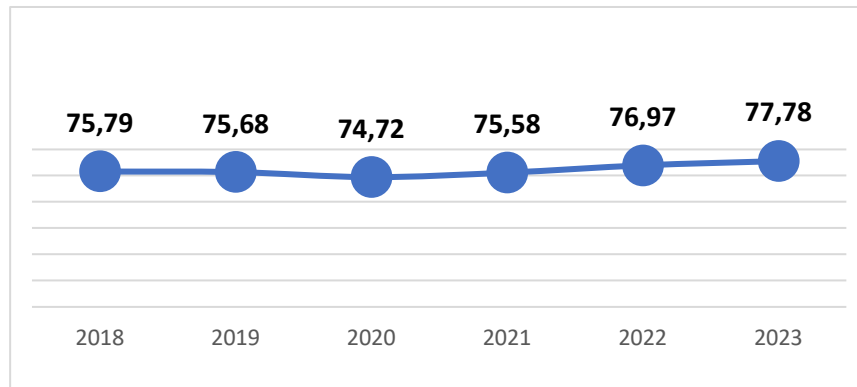
Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"

Pada tahun 2023, kondisi manajemen usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga usaha masih beroperasi secara tradisional dengan keterbatasan akses terhadap sarana pendukung. Hanya 5,26% rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan dari dinas pertanian setempat, sementara penggunaan pupuk dan pestisida masing-masing tercatat sebesar 18,04% dan 10,39%, yang menunjukkan masih rendahnya adopsi teknologi pertanian modern. Partisipasi dalam program agroforestri dan perhutanan sosial juga sangat minim, masing-masing hanya 0,48% dan 0,08%. Selain itu, hanya 7,97% rumah tangga yang tergabung dalam kelompok tani, peternak, atau nelayan, dan 5,28% yang menerima bantuan usaha pertanian seperti pupuk subsidi atau bibit. Akses terhadap fasilitas keuangan juga masih terbatas, dengan hanya 0,58% rumah tangga yang mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dan 0,25% yang memiliki asuransi pertanian. Di sektor perkebunan, hanya 0,22% yang memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STD-B), menunjukkan rendahnya legalitas usaha perkebunan. Sementara itu, dalam kategori usaha pertanian, sebanyak 36,33% rumah tangga mengelola usaha di lahan terbatas, tetapi adopsi teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan vertikultur masih sangat rendah (1,97%). Secara keseluruhan, data ini mencerminkan **perlunya peningkatan akses terhadap penyuluhan, sarana produksi, serta fasilitas pendukung lainnya guna memperkuat ketahanan dan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Biak Numfor.**

2.1.1.2.1.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan memiliki kedudukan yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dengan luas perairan mencapai 19.592 km², wilayah ini memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, menjadikannya sebagai sektor prioritas bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peran penting sektor perikanan tercermin dalam kontribusi subsektornya terhadap nilai tambah lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, yang mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2018-2023. Pada tahun 2018, kontribusi subsektor perikanan tercatat sebesar 75,79%, mengalami sedikit penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2020 sebesar 74,72%. Namun, sejak tahun 2021, kontribusi subsektor ini mulai meningkat kembali, mencapai 77,78% pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan adanya penguatan dalam aktivitas perikanan, baik dari sisi produksi maupun nilai tambah yang dihasilkan. Dengan kedudukan strategis dan potensi sumber daya yang melimpah, subsektor perikanan di Biak Numfor berpeluang untuk terus berkembang, memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Gambar II.4 Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Biak Numfor (%) 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Terdapat berbagai potensi ikan di Kabupaten Biak Numfor, antara lain ikan demersal 194.400 ton/tahun, pelagis besar 115.700 ton/tahun, pelagis kecil 325.100 ton/tahun, dan ikan karang 16.100 ton/tahun. Kabupaten Biak Numfor berada pada jalur migrasi ikan pelagis besar (*Yellowfin Tuna*) dengan jumlah produksi 6.278 ton/tahun. Selain itu, Kabupaten Biak Numfor memiliki taman karang laut (*coral reef*) yang berfungsi sebagai habitat ikan karang, nursery ikan karang dan sebagai daya tarik obyek wisata laut, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.8.

Tabel II.8 Potensi Produksi Perikanan Tangkap per Tahun

Jenis Ikan	Produksi Rata-rata (ton/tahun)
Ikan demersal	194.400
Pelagis besar	115.700
Pelagis kecil	325.100
Ikan Karang	16.100
Yellowfin Tuna	6.278
Total	657.578

Sumber : Dinas Perikanan Biak Numfor, 2022

Dari peluang jumlah Penangkapan yang diperbolehkan (JBT), ikan pelagis besar termasuk Yellow Fin Tuna yang merupakan kualitas ekspor di Wilayah WPP 717 adalah 52.748 Ton per Tahun. Realisasi Pemanfaatan Pada Tahun 2022 (Januari-September) hanya mencapai 20,75 ton. Artinya bahwa masih ada 52.727,25 ton merupakan peluang yang belum dimanfaatkan. Selama tahun 2022 Kabupaten Biak Numfor telah mengeksport produk hasil perikanan untuk sejumlah wilayah di tingkat regional nasional maupun internasional.

Tabel II.9 Rekapitulasi Pengiriman Komoditi Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022

JAKARTA	289,28	Ton	DENPASAR BALI	14,19	Ton
BITUNG	255,63	Ton	BANTEN	80,81	Ton
SURABAYA	664,80	Ton	JAWA TENGAH	0,03	Ton
MAKASSAR	20,62	Ton	JEPANG	53,93	Ton
MALUKU	330,01	Ton	TOTAL	1.709,29	Ton

Sumber: Karantina Perikanan Biak Numfor, 2022

Berdasarkan data jumlah rumah tangga perikanan budidaya dan perikanan tangkap menurut distrik di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023, terlihat bahwa aktivitas perikanan di wilayah ini didominasi oleh usaha perikanan tangkap. Dari total 4.404 rumah tangga perikanan, sebanyak 4.397 rumah tangga bergerak di subsektor perikanan tangkap, sementara hanya 121 rumah tangga yang menjalankan usaha perikanan budidaya, sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.10. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Biak Numfor masih lebih bertumpu pada eksploitasi hasil laut dibandingkan dengan kegiatan budidaya yang lebih berkelanjutan.

Tabel II.10 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Menurut Distrik di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Distrik	Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan						Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan		
	Pembesaran di Air Laut	Pembesaran di Air Payau	Pembesaran di Air Tawar	Pembenihan	Ikan Hias	TOTAL	Penangkapan Ikan di Laut	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	TOTAL
Numfor Barat	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Orkeri	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Numfor Timur	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Bruyadori	1	2	0	0	0	2	230	0	230
Poiru	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Padaido	1	0	0	0	0	1	478	0	478
Aimando Padaido	1	0	0	0	0	1	303	0	303
Biak Timur	0	4	6	1	1	10	371	0	371
Oridek	0	1	0	0	0	1	271	1	272
Biak Kota	1	1	6	1	0	9	714	0	714
Samofa	0	0	15	3	2	18	12	0	12
Yendidori	1	3	3	1	0	6	451	0	451
Biak Utara	0	0	17	0	1	17	143	5	147
Andey	0	1	40	0	0	40	0	0	0
Warsa	0	0	8	1	0	9	97	0	97
Yawosi	1	0	0	0	0	1	29	1	30

Distrik	Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan						Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan		
	Pembesaran di Air Laut	Pembesaran di Air Payau	Pembesaran di Air Tawar	Pembenihan	Ikan Hias	TOTAL	Penangkapan Ikan di Laut	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	TOTAL
Bondifuar	0	0	1	0	0	1	18	0	18
Biak Barat	0	0	1	2	0	3	198	1	199
Swandiwe	0	0	2	0	0	2	288	0	288
Biak Numfor	6	12	99	9	4	121	4.397	8	4.404

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"

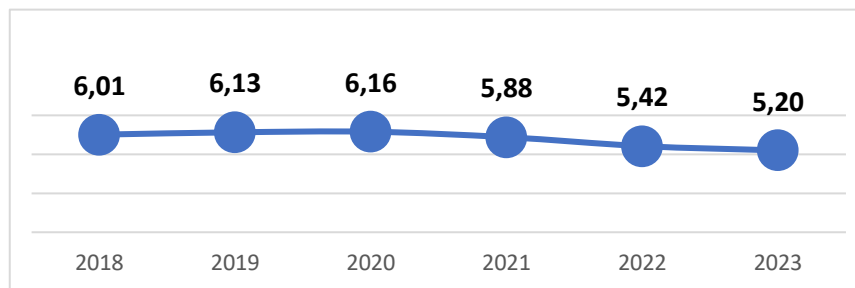
Distribusi rumah tangga perikanan tangkap juga menunjukkan konsentrasi yang tinggi di beberapa distrik, seperti Biak Kota (714 rumah tangga), Padaido (478 rumah tangga), dan Yendidori (451 rumah tangga), yang mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam penangkapan ikan di laut. Sementara itu, rumah tangga perikanan budidaya masih relatif terbatas, dengan jumlah terbesar berada di Distrik Andey (40 rumah tangga) dan Biak Utara (17 rumah tangga). Jenis usaha budidaya yang ada juga didominasi oleh pembesaran ikan di air tawar (99 rumah tangga), sedangkan budidaya di air laut dan air payau masih sangat minim.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, diperlukan intervensi kebijakan yang mendorong keseimbangan antara perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Saat ini, dominasi usaha perikanan tangkap yang mencapai 4.397 rumah tangga menunjukkan masih terbatasnya diversifikasi usaha perikanan di Biak Numfor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sektor perikanan budidaya dengan memberikan dukungan berupa penyediaan teknologi, bantuan sarana produksi, serta pelatihan bagi masyarakat agar dapat mengembangkan usaha budidaya ikan di air laut dan air payau yang saat ini masih rendah. Selain itu, pengelolaan perikanan tangkap yang lebih berkelanjutan juga harus diterapkan melalui penerapan kuota tangkap, pembentukan zona konservasi, serta pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan guna mencegah eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan. Untuk mendukung pengembangan kedua subsektor ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur perikanan seperti hatchery, cold storage, serta kemudahan akses pembiayaan bagi nelayan dan pembudidaya ikan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) atau pendanaan berbasis koperasi. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, sektor perikanan di Biak Numfor dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

2.1.1.2.1.2 Tanaman Pangan

Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap nilai tambah lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan tren menurun dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, kontribusi mencapai 6,01%, kemudian mengalami sedikit kenaikan hingga tahun 2020 dengan angka tertinggi 6,16%. Namun, sejak tahun 2021, kontribusi subsektor ini mengalami penurunan signifikan, dari 5,88% pada 2021 menjadi 5,42% pada 2022, dan akhirnya 5,20% pada 2023, sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.5. Penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa faktor, seperti perubahan pola penggunaan lahan, keterbatasan akses pasar, perubahan iklim, serta terbatasnya investasi dalam pengembangan pertanian tanaman pangan. Meskipun demikian, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian lahan kering, terutama di Distrik Oridek, Samofa, Biak Kota, Biak Utara, Biak Timur, Biak Barat, Warsa, dan Swandiwe. Sebagian besar kawasan potensial ini merupakan hutan, di mana budidaya tanaman pangan seperti sagu, pandanus, umbi-umbian, dan kacang-kacangan telah berkembang secara alami.

Gambar II.5 Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan Terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Biak Numfor (%) 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Tabel II.11 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan di Kabupaten Biak Numfor Menurut Distrik dan Kelompok Tanaman Pangan Tahun 2023

Distrik	Tanaman Pangan	Padi	Palawija						
			Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Talas	Kedelai
Numfor Barat	368	0	0	355	332	4	117	106	0
Orkeri	297	0	0	288	262	1	26	3	1
Numfor Timur	233	0	0	230	216	0	14	0	0
Bruyadori	319	0	2	317	310	1	88	0	0
Poiru	298	0	0	283	285	0	45	0	0
Padaido	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Aimando Padaido	189	0	0	174	166	0	0	8	1
Biak Timur	692	0	19	440	565	10	1	228	0
Oridek	523	0	6	208	333	1	1	376	0
Biak Kota	609	0	22	358	378	8	1	381	0
Samofa	581	0	2	352	358	3	0	275	0

Distrik	Tanaman Pangan	Padi	Palawija						
			Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Talas	Kedelai
Yendidori	919	0	2	488	602	31	1	777	0
Biak Utara	851	0	21	417	463	28	4	764	0
Andey	386	0	0	3	12	0	0	385	0
Warsa	755	0	0	307	374	0	1	658	0
Yawosi	300	0	1	51	65	1	2	292	0
Bondifuar	71	0	0	36	34	0	0	59	0
Biak Barat	872	0	17	641	656	16	6	720	0
Swandiwe	505	0	9	348	353	13	0	452	1
Biak Numfor	8769	0	101	5296	5764	117	307	5485	3

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"

(catatan: 1 rumah tangga usaha pertanian dapat memelihara lebih dari satu jenis ternak)

Tabel II.12 Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 (Ha)

Distrik	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Padi
Numfor Barat	...	...	...	6,0	6,0	14,0	...
Orkeri	...	...	...	...	...	...	...
Numfor Timur	...	...	...	...	...	...	...
Bruyadori	...	...	...	...	...	...	...
Poiru	...	...	...	...	...	...	...
Padaido	...	...	...	...	...	...	...
Aimando Padaido	...	...	...	...	...	...	...
Biak Timur	3,0	...	...	...	7,0	5,0	...
Oridek	6,0	...	...	...	7,0	1,0	...
Biak Kota	20,0	...	...	...	15,0	24,0	...
Samofa	33,0	...	...	...	22,0	27,0	...
Yendidori	47,0	...	...	...	29,0	38,0	...
Biak Utara	27,0	...	2,0	...	14,0	30,0	...
Andey	6,0	...	...	...	7,0	11,0	...
Warsa	28,0	...	...	...	15,0	13,0	...
Yawosi	2,0	...	...	...	7,0	12,0	...
Bondifuar	26,0	...	...	...	27,0	29,0	...
Biak Barat	1,0	...	1,0	1,0	18,0	32,0	...
Swandiwe	3,0	...	...	...	9,5	10,0	...
Biak Numfor	202,0	...	3,0	7,0	183,5	246,0	...

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2019, dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka"

(catatan: "..." berarti data tidak tersedia)

Untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang, kawasan budidaya tanaman pangan di Kabupaten Biak Numfor diarahkan ke Distrik Biak Timur, Biak Kota, Samofa, Biak Utara, dan Yendidori. Penetapan kawasan ini sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap perekonomian daerah serta mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun demikian, distrik-distrik dengan kontribusi besar dalam usaha tanaman pangan secara eksisting meliputi Yawosi, Biak Barat, Biak Utara, dan Yendidori. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan akses petani terhadap teknologi dan permodalan

agar subsektor tanaman pangan dapat kembali berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Biak Numfor.

Data jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 menunjukkan bahwa **mayoritas petani masih mengandalkan ubi kayu dan ubi jalar sebagai komoditas utama**. Dari total 8.769 rumah tangga usaha tanaman pangan, sebanyak 5.296 rumah tangga menanam ubi kayu, sementara 5.764 rumah tangga menanam ubi jalar. Di sisi lain, jagung hanya dibudidayakan oleh 101 rumah tangga, sedangkan kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai memiliki jumlah rumah tangga petani yang jauh lebih sedikit (lihat Tabel II.11). Kondisi ini sejalan dengan data luas panen tanaman pangan tahun 2018, yang menunjukkan bahwa ubi kayu dan ubi jalar memiliki luas panen yang lebih signifikan dibandingkan komoditas lainnya. Total luas panen ubi kayu mencapai 183,5 hektar, sementara ubi jalar memiliki luas panen 246 hektar. Sebaliknya, jagung hanya memiliki luas panen 202 hektar, sementara kedelai dan kacang tanah masing-masing hanya 3 dan 7 hektar (lihat Tabel II.12).

Secara umum, pola pertanian di Biak Numfor masih sangat bergantung pada tanaman pangan lokal yang dapat tumbuh di lingkungan hutan dan lahan kering. Kondisi agroekologi yang lebih cocok untuk tanaman umbi-umbian dibandingkan tanaman sereal seperti padi dan jagung. Untuk pengembangan pertanian ke depan, strategi diversifikasi tanaman dan peningkatan produktivitas perlu dilakukan, terutama dalam komoditas palawija yang saat ini masih memiliki cakupan luas panen dan jumlah rumah tangga petani yang terbatas.

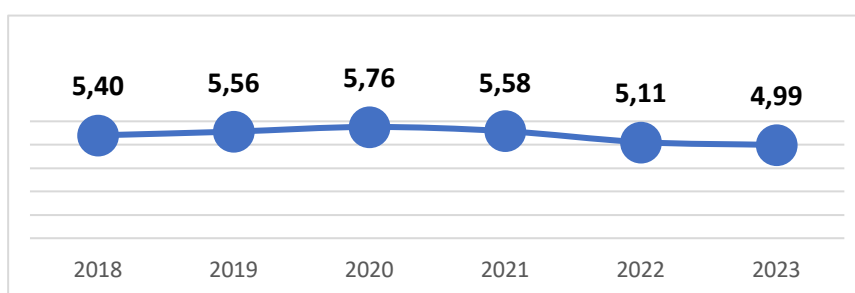
2.1.1.2.1.3 Hortikultura

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Tanaman hortikultura di Kabupaten Biak Numfor saat ini lebih banyak berupa hasil pekarangan atau tumbuh di kawasan hutan. Berdasarkan data kontribusi subsektor hortikultura terhadap nilai tambah lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di Kabupaten Biak Numfor periode 2018-2023, terlihat adanya fluktuasi kontribusi subsektor ini terhadap perekonomian daerah. Kontribusi hortikultura mengalami peningkatan dari 5,40% pada 2018 hingga mencapai puncaknya pada 2020 sebesar 5,76%, namun kemudian kontribusi subsektor hortikultura terus menurun hingga 4,99% pada 2023 (lihat Gambar II.6).

Penurunan kontribusi ini dapat dikaitkan dengan pola produksi hortikultura yang masih didominasi oleh hasil pekarangan dan tanaman yang tumbuh di kawasan

hutan tanpa sistem budidaya yang terstruktur. Berdasarkan data produksi hortikultura, komoditas sayuran yang banyak dihasilkan di Biak Numfor antara lain kacang panjang, kubis, tomat, dan petai. Sementara itu, produksi buah-buahan lebih beragam, dengan komoditas unggulan seperti pisang, pepaya, mangga, dan rambutan yang mengalami peningkatan produksi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.13. Meskipun demikian, produksi hortikultura di Kabupaten Biak Numfor masih berskala kecil dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, yang berpotensi memengaruhi nilai tambah sektor ini terhadap ekonomi daerah. Tanaman buah-buahan seperti pepaya dan pisang menunjukkan peningkatan produksi yang cukup baik, sementara produksi sayuran seperti cabai dan tomat cenderung tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hortikultura di Biak Numfor masih memerlukan optimalisasi, baik dari segi peningkatan luas panen, penerapan teknik budidaya yang lebih modern, maupun penguatan akses pasar bagi petani lokal.

Gambar II.6 Kontribusi Subsektor Holtikultura Terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Biak Numfor (%) 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Tabel II.13 Produksi Holtikultura Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Biak Numfor (Kuintal)

Jenis Tanaman		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SAYURAN								
1	Bawang Daun	143	345	...	...	...	...	19
2	Bawang Merah	...	...	...	...	166	...	27
3	Bawang Putih	...	...	...	...	...	...	...
4	Bayam	7210	1803	...	...	...	...	101
5	Buncis	1643	1170	...	...	...	...	40
6	Cabai besar	458	893	182	...	7542	...	164
7	Cabai rawit	1458	1877	634	...	6844	...	527
8	Cabai	1916	2770	...	...	...	...	...
9	Kacang panjang	2533	2531	795	...	17868	...	92
10	Kangkung	10608	3722	...	...	...	...	...
11	Ketimun	2093	2068	...	...	...	...	...
12	Kubis	...	875	310	...	5918	...	...
13	Labu siam	24	...	...	...	160	...	...
14	Petsai	4726	2408	...	...	8276	1455	250
15	Terung	1755	2089	...	...	5497	266	68
16	Tomat	2718	1449	427	...	11740	504	137
BUAH-BUAHAN								
1	Alpukat	489	378	...	...	431	144	803

Jenis Tanaman		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Belimbing	39	38	...	...	77	3	120
3	Duku/Langsar	5	1	...	...	112	16	200
4	Durian	112,0	2,0	14,5	...	476	26	1052
5	Jambu air	27	34	...	...	52	63	152
6	Jambu biji	143	239	...	...	184	...	181
7	Jeruk besar	106	101	...	...	78	17	35
8	Jeruk siam	385	243	...	...	186	81	30
9	Jeruk	491	344	34,9	...	...	...	...
10	Mangga	137,0	76,0	12,3	...	68	...	1411
11	Nangka/Cempedak	293	196	...	...	461	86	1638
12	Nanas	132	74	...	...	63	3	127
13	Pepaya	1146	1670	200,4	...	3025	...	4960
14	Pisang	741	989	156,7	...	2374	223	2344
15	Rambutan	58	7	...	...	552	57	1110
16	Semangka	16,0	22,5	...	...	3800	...	73
17	Sirsak	21	18	...	...	65	8	113
18	Sukun	69	99	...	...	126	10	71

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2018-2025, dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka"
(catatan: "..." berarti data tidak tersedia)

Tabel II.14 Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Semusim di Kabupaten Biak Numfor Menurut Distrik dan Kelompok Tanaman (rumah tangga) Tahun 2023

Distrik	Rumah Tangga Usaha Hortikultura Semusim	Kelompok Tanaman Hortikultura Semusim			
		Tanaman Buah-Buahan Semusim	Tanaman Sayuran Semusim	Tanaman Obat Semusim	Tanaman Hias Semusim
Numfor Barat	72	0	72	0	1
Orkeri	33	0	33	0	0
Numfor Timur	67	0	67	0	0
Bruyadori	74	0	74	0	0
Poiru	71	3	68	0	0
Padaido	1	0	1	0	0
Aimando Padaido	4	0	4	0	0
Biak Timur	694	10	685	12	5
Oridek	235	14	234	0	1
Biak Kota	510	3	503	20	9
Samofa	606	5	604	6	1
Yendidori	693	14	688	14	2
Biak Utara	739	1	735	49	0
Andey	385	0	385	1	0
Warsa	362	0	362	0	0
Yawosi	129	1	128	0	0
Bondifuar	39	0	39	0	0
Biak Barat	529	3	529	3	1
Swandiwe	287	0	287	1	0
Biak Numfor	5530	54	5498	106	20

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"
(catatan: 1 rumah tangga usaha pertanian dapat memelihara lebih dari satu jenis ternak)

Pada tahun 2023, terdapat 5.530 rumah tangga usaha hortikultura semusim di Kabupaten Biak Numfor, dengan mayoritas (5.498 rumah tangga) menanam sayuran semusim (lihat Tabel II.14). Distrik dengan jumlah usaha hortikultura tertinggi adalah Biak Utara (739 rumah tangga), Biak Timur (694 rumah tangga), dan Yendidori (693 rumah tangga). Sementara itu, budidaya tanaman buah-

buahan (54 rumah tangga) dan tanaman hias semusim (20 rumah tangga) masih minim. Kegiatan hortikultura semusim tersebar luas di berbagai distrik, dengan fokus utama pada tanaman sayuran semusim sebagai komoditas utama yang dibudidayakan.

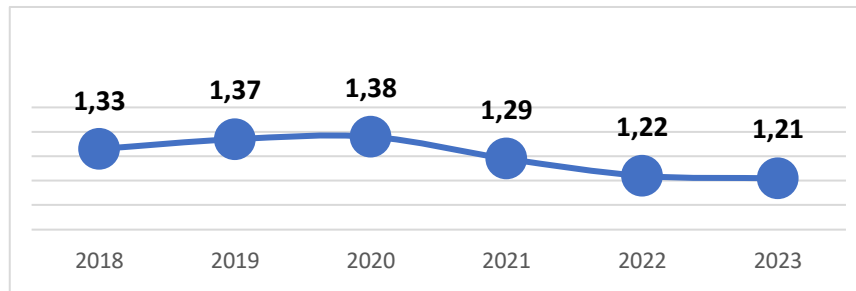
Intervensi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan subsektor hortikultura meliputi penguatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan terkait teknik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah juga dapat mendorong diversifikasi tanaman hortikultura, khususnya untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menanam tanaman buah-buahan dan tanaman hias semusim, yang masih relatif rendah. Selain itu, peningkatan akses terhadap pasar dan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, serta penyediaan bibit unggul juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Program subsidi pupuk dan sarana produksi pertanian dapat diberikan secara selektif untuk mendukung rumah tangga usaha yang berpotensi berkembang lebih lanjut. Dengan intervensi yang tepat, sektor hortikultura di Kabupaten Biak Numfor dapat lebih berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

2.1.1.2.1.4 Perkebunan

Subsektor perkebunan di Kabupaten Biak Numfor saat ini belum terlihat berkembang signifikan. Data kontribusi subsektor perkebunan terhadap nilai tambah lapangan usaha pertanian di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan tren penurunan dari 1,38% pada 2020 menjadi 1,21% pada 2023. Hal ini sejalan dengan data produksi perkebunan rakyat yang menunjukkan fluktuasi produksi pada beberapa komoditas utama seperti kelapa, kopi, tebu, pinang dan kakao, sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.15.

Berdasarkan data jumlah rumah tangga usaha tanaman perkebunan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kelapa dan tebu merupakan komoditas utama yang paling banyak diusahakan. Terdapat 2.407 rumah tangga yang membudidayakan kelapa, dengan jumlah tertinggi di Distrik Biak Kota, Biak Timur, dan Aimando Padaido. Sementara itu, tebu menjadi tanaman yang paling dominan dengan 5.814 rumah tangga yang mengusahakannya, terutama di Biak Barat, Biak Utara, dan Biak Timur. Komoditas lainnya seperti kopi hanya diusahakan oleh 19 rumah tangga, sedangkan pinang dan tembakau masing-masing hanya diusahakan oleh 2 dan 1 rumah tangga. Selain itu, kakao juga masih memiliki jumlah rumah tangga usaha yang sangat sedikit, yaitu hanya 19 rumah tangga yang tersebar di beberapa distrik. Pola distribusi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lahan, preferensi petani, kebijakan pemerintah, serta permintaan pasar.

Gambar II.7 Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Biak Numfor (%) 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Tabel II.15 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Biak Numfor (ton)

Jenis Tanaman		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa	951,40	953,50	952,00	952,00	3.200,00	932,18
2	Kopi	121,73	0,40	0,40	0,40	...	1,20
3	Kakao	11,66	27,66	11,66	11,66	50,00	3,30
4	Tembakau	...	...	...	...	0,72	...
5	Pinang	...	...	...	...	...	...

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2018-2025, dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka”
(catatan: “...” berarti data tidak tersedia)

Tabel II.16 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Perkebunan di Kabupaten Biak Numfor Menurut Distrik dan Jenis Tanaman Tahun 2023

Distrik	Kakao	Kelapa	Kopi	Pinang	Tebu	Tembakau
Numfor Barat	0	47	0	201	0	0
Orkeri	0	18	0	65	0	0
Numfor Timur	0	49	0	103	0	0
Bruyadori	0	0	0	33	0	0
Poiru	0	66	0	154	0	0
Padaido	0	77	0	0	0	0
Aimando Padaido	0	272	0	8	0	0
Biak Timur	1	329	0	779	0	0
Oridek	0	47	0	295	0	0
Biak Kota	2	494	0	537	0	0
Samofa	1	167	0	446	0	0
Yendidori	2	82	1	525	0	0
Biak Utara	7	201	0	653	0	0
Andey	1	2	0	347	0	0
Warsa	0	176	0	243	0	0
Yawosi	0	102	0	160	0	0
Bondifuar	0	53	0	61	0	0
Biak Barat	4	173	1	818	1	0
Swandiwe	1	52	0	386	0	0
Biak Numfor	19	2407	2	5814	1	0

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen “Hasil Sensus Pertanian 2023”
(catatan: 1 rumah tangga usaha pertanian dapat memelihara lebih dari satu jenis ternak)

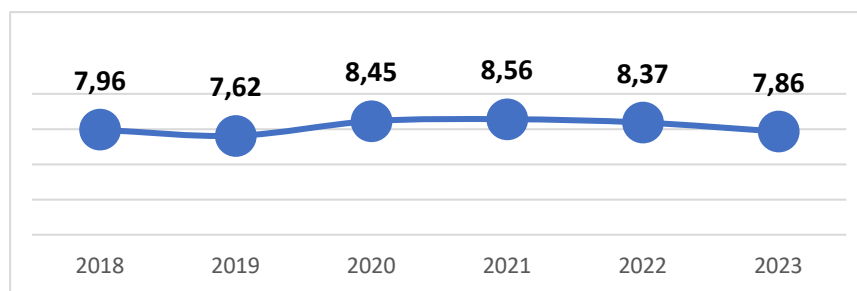
Meskipun berdasarkan potensi lahan hampir seluruh distrik memiliki kelayakan untuk budidaya perkebunan (seperti Oridek, Biak Timur, Samofa, Biak Kota, Biak Utara, Biak Barat, Warsa, Yendidori, Swandiwe, Bondifuar, dan Poiru), namun pengembangannya terhambat karena sebagian besar Kabupaten Biak Numfor

berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Kebijakan pembatasan lahan ini berdampak langsung pada terbatasnya ruang bagi ekspansi subsektor perkebunan, sehingga pemerintah hanya mengarahkan pengembangan budidaya perkebunan di Distrik Samofa dan Yendidori. Dalam hal ini, tidak semua jenis tanaman perkebunan dapat ditanam di hutan produksi, terutama jika berdampak pada fungsi ekologi hutan, serta perlu adanya mekanisme perizina yang sesuai regulasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi subsektor perkebunan, perlu ada strategi optimalisasi lahan yang tersedia dengan pendekatan budidaya yang berkelanjutan, seperti sistem agroforestri atau pemanfaatan lahan kritis yang tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. Selain itu, dukungan teknologi, infrastruktur, dan akses pasar juga menjadi kunci agar subsektor perkebunan di Biak Numfor dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

2.1.1.2.1.5 Peternakan

Subsektor peternakan memiliki peran yang cukup stabil dalam struktur ekonomi pertanian daerah, meskipun mengalami dinamika yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau faktor alam yang memengaruhi produktivitas peternakan. Berdasarkan data kontribusi subsektor peternakan terhadap nilai tambah lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di Kabupaten Biak Numfor selama periode 2018-2023, terlihat adanya fluktuasi. Pada tahun 2018, kontribusi subsektor ini tercatat sebesar 7,96%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 7,62% pada 2019. Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan pada 2020 sebesar 8,45% dan mencapai puncaknya di 2021 dengan kontribusi tertinggi sebesar 8,56%. Namun, pada 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 8,37%, dan tren menurun ini berlanjut pada 2023 dengan kontribusi sebesar 7,86%, sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.8.

Gambar II.8 Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Biak Numfor (%) 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Berdasarkan data jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023, jenis ternak yang paling banyak dipelihara adalah babi dengan total 1.773 ekor, diikuti oleh ayam kampung sebanyak 1.058 ekor. Dominasi kedua jenis ternak ini mencerminkan pola peternakan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Peternakan babi dan ayam kampung kemungkinan besar berkembang karena faktor budaya, permintaan pasar yang tinggi, daya tahannya yang lebih tinggi dan kemudahan dalam pemeliharaan. Dalam Tabel II.18 diketahui bahwa terdapat 2955 rumah tangga (80,65%) dari total 3664 rumah tangga yang memelihara ternak untuk dijual.

Tabel II.17 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Biak Numfor (ekor)

Jenis Tanaman		2018	2019	2020	2021
POPULASI TERNAK (EKOR)					
1	Sapi perah	0	0	0	0
2	Sapi potong	2.188	2.236	2.313	1.268
3	Kambing	2.985	3.099	3.214	2.102
4	Babi	15.543	16.414	17.131	17.324
TERNAK YANG DIPOTONG (EKOR)					
1	Sapi potong	408	446	487	...
2	Kambing	1.593	1.718	1.916	...
3	Babi	11.065	11.487	11.753	...
POPULASI UNGGAS (EKOR)					
1	Ayam kampung	83.849	87.214	91.070	78.302
2	Ayam petelur	31.200	48.792	73.880	85.605
3	Ayam pedaging	414.405	268.170	173.280	126.329
4	Itik	8.677	9.060	9.394	7.046
5	Itik manila	1.921	1.962	2.027	2.365

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2018-2025, dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka"

(catatan: "..." berarti data tidak tersedia)

Tabel II.18 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Biak Numfor Menurut Distrik dan Jenis Ternak yang Dipelihara Tahun 2023

Distrik	Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Memelihara Ternak			Jenis Ternak								
	Untuk Dijual	Tidak Untuk Dijual	Total	Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Ras	Ayam Kampung	Itik Petelur	Itik Pedaging	Itik Manila	Ayam Lokal Lainnya
Numfor Barat	75	4	79	0	1	59	0	17	0	0	0	0
Orkeri	60	14	74	0	0	41	1	17	0	0	0	1
Numfor Timur	85	4	89	0	0	78	0	11	0	0	0	0
Bruyadori	42	0	42	1	0	35	0	10	0	0	0	0
Poiru	105	9	114	0	0	92	0	23	0	0	0	0
Padaido	230	20	250	0	0	112	0	116	0	0	0	30
Aimando Padaido	54	6	60	0	0	28	0	38	0	0	0	0
Biak Timur	294	79	373	6	2	156	2	154	1	0	2	6
Oridek	27	30	57	1	0	16	0	18	0	0	0	0
Biak Kota	389	46	435	11	24	278	9	100	1	1	2	2
Samofa	402	17	419	11	18	290	17	83	3	0	7	5
Yendidori	212	86	298	30	42	53	4	114	1	0	3	0

Distrik	Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Memelihara Ternak			Jenis Ternak								
	Untuk Dijual	Tidak Untuk Dijual	Total	Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Ras	Ayam Kampung	Itik Petelur	Itik Pedaging	Itik Manila	Ayam Lokal Lainnya
Biak Utara	371	74	445	80	46	141	0	128	1	2	2	2
Andey	101	80	181	4	1	53	0	55	0	1	0	1
Warsa	150	2	152	5	14	121	0	17	0	0	0	0
Yawosi	63	16	79	5	1	58	0	9	0	0	0	0
Bondifuar	6	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Biak Barat	171	198	369	15	5	81	0	103	1	0	0	6
Swandiwe	118	24	142	6	5	75	0	45	2	0	0	0
Biak Numfor	2955	709	3664	175	159	1773	33	1058	10	4	16	53

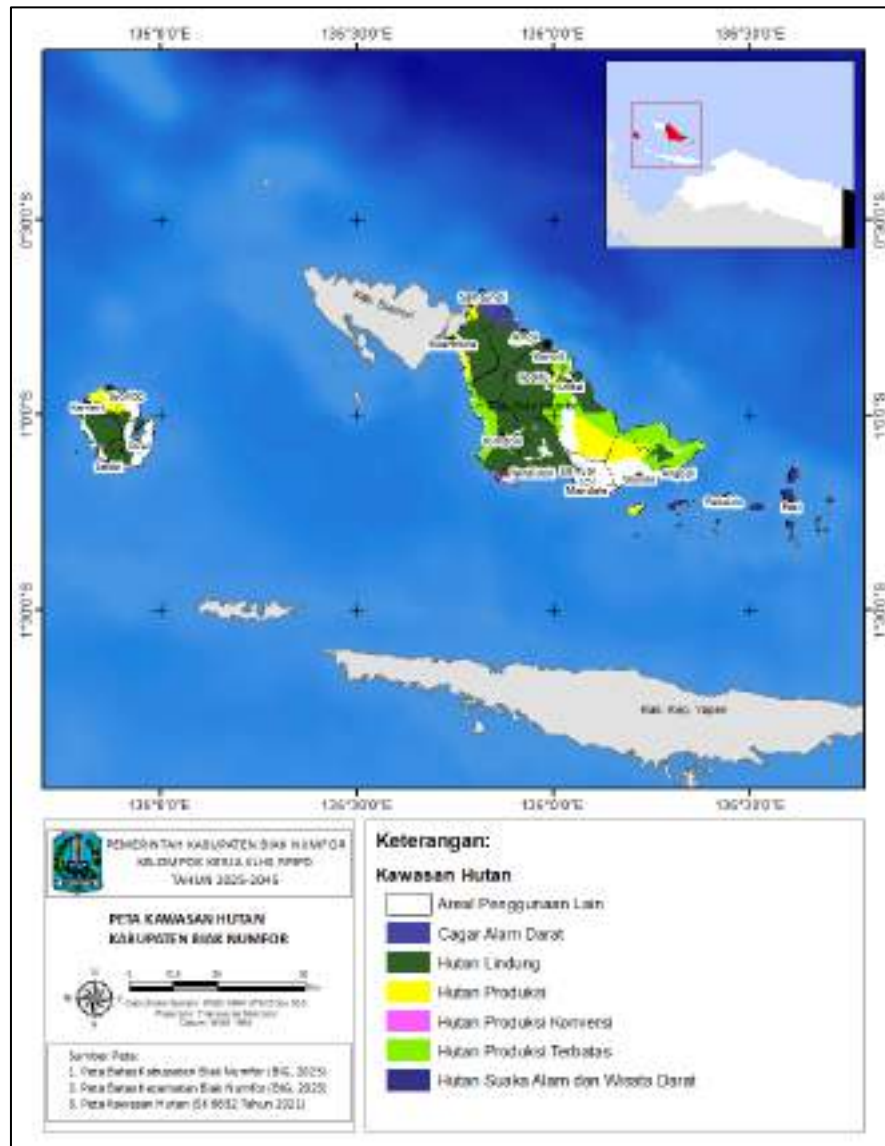
Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2023), dalam dokumen "Hasil Sensus Pertanian 2023"
(catatan: 1 rumah tangga usaha pertanian dapat memelihara lebih dari satu jenis ternak)

Intervensi kebijakan peternakan akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing subsektor peternakan. Pemerintah daerah akan mendorong program pengembangan bibit unggul dan pakan berkualitas untuk meningkatkan hasil ternak, khususnya bagi peternak babi dan ayam kampung yang menjadi komoditas utama. Selain itu, penguatan sistem distribusi dan pemasaran diperlukan agar hasil ternak dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk potensi ekspor ke wilayah lain. Di sisi lain, penurunan populasi sapi potong, kambing, dan ayam pedaging menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan ternak tersebut. Oleh karena itu, kebijakan insentif seperti subsidi pakan, pelatihan manajemen peternakan, serta kemudahan akses permodalan dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tarik peternakan jenis ternak lainnya. Dengan adanya intervensi yang tepat, sektor peternakan di Biak Numfor dapat lebih berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.

2.1.1.2.1.6 Kehutanan

Berdasarkan SK 6632 Tahun 2021, luas kawasan hutan yang masih mendominasi wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah Kawasan Hutan Lindung Hutan Lindung seluas 108,805.50 hektar atau sekitar 48.25 persen. Luas Area Penggunaan Lain di Kabupaten Biak saat ini sudah mencapai 21,34 persen atau sekitar 48,115.48 hektar, sementara hutan produksi yang meliputi hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan Hutan Produksi Terbatas seluas 58.433,67 hektar atau sekitar 25,91 persen. Sebaran kelas kawasan hutan di Biak Numfor dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** dan Gambar II.9.

Gambar II.9 Kawasan Hutan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

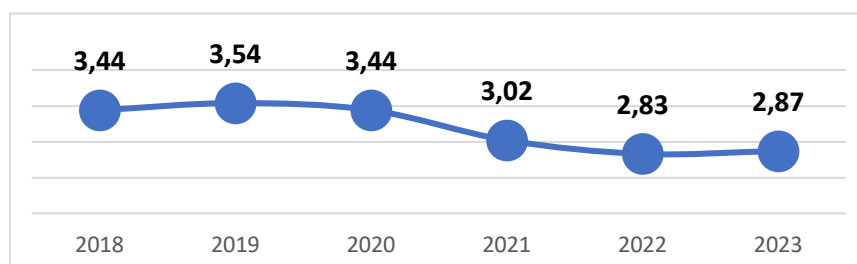
Tabel II.19 Sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

Distrik	Kawasan Hutan (SK 6632 Tahun 2021)							Luas Total (ha)
	Areal Penggunaan Lain	Cagar Alam Darat	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Komersial	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat	
Aimando Padaido	200.07		413.34				3,393.15	4,006.57
Andey	578.55		21,057.13	692.48		1,081.15		23,409.30
Biak Barat	1,435.42		12,612.79		253.49	5,794.32		20,096.02
Biak Kota	2,401.12					30.41		2,431.54
Biak Timur	8,002.03		47.73	5,551.64		1,789.17		15,390.57
Biak Utara	7,317.86		7,036.87	8,835.27		11,191.95		34,381.96
Bondifuar	134.05	3,266.93	1,644.14	1,437.21				6,482.33
Bruyadori	4,796.97		2,140.83					6,937.80
Numfor Barat	2,189.90		8,021.23					10,211.13
Numfor Timur	1,038.52		1,855.53	3,268.84				6,162.90
Oridek	1,570.48		1,819.02	633.85		12,289.10		16,312.45
Orkeri	2,489.24		2,703.94					5,193.19
Padaido	226.84		120.72				1,110.24	1,457.80

Distrik	Kawasan Hutan (SK 6632 Tahun 2021)							Luas Total (ha)
	Areal Penggunaan Lain	Cagar Alam Darat	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat	
Poiru	2,155.28		1,256.41	1,106.99				4,518.68
Samofa	7,330.42		336.86	37.01		105.47		7,809.75
Swandiwe	1,590.78		17,914.43	1,882.98		1,340.52		22,728.71
Warsa	1,184.49	2,394.45	10,665.55					14,244.49
Yawosi	465.89		2,038.90			57.48		2,562.26
Yendidori	3,007.57		17,120.08		514.81	539.53		21,181.99
Luas Total (ha)	48,115.48	5,661.39	108,805.50	23,446.27	768.30	34,219.09	4,503.39	225,400.84
Luas Total (%)	21.34	2.51	48.25	10.40	0.34	15.17	2.00	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Gambar II.10 Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap Nilai Tambah Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Biak Numfor (%) 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Sektor kehutanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi di Kabupaten Biak Numfor. Dengan luas total kawasan hutan sebesar 175.834 hektar dan 61,36% berupa hutan lindung. Sektor kehutanan tidak hanya menjadi sumber bahan baku industri kayu tetapi juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung kehidupan masyarakat lokal.

Berdasarkan Gambar II.10 diketahui bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap nilai tambah sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian terus mengalami penurunan, dari 3,44% pada tahun 2018 menjadi 2,83% pada tahun 2022, sebelum sedikit meningkat menjadi 2,87% pada tahun 2023. Penurunan ini **mencerminkan berbagai tantangan, termasuk kebijakan konservasi yang membatasi aktivitas penebangan kayu, serta luas kawasan hutan produksi yang relatif kecil** (hanya 12,88% untuk hutan produksi terbatas dan 1,95% untuk hutan produksi tetap). Meskipun demikian, kenaikan kecil pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya **upaya revitalisasi dalam pengelolaan hutan produksi.**

Tabel II.20 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten Biak Numfor

Kategori	Luas (ha)	%
Hutan Lindung	107.893	61,36
Suaka Alam dan Pelestarian Alam	10.222	5,81
Hutan Produksi Terbatas	22.639	12,88

Kategori	Luas (ha)	%
Hutan Produksi Tetap	3.431	1,95
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	770	0,44
Jumlah	175.834	100,00

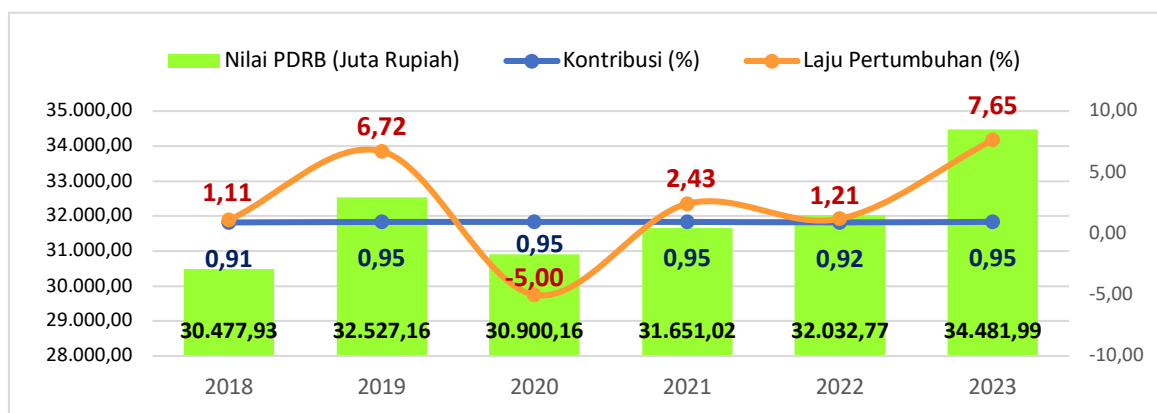
Sumber: BPS Provinsi Papua (2023), dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka"

Kawasan konservasi perairan di Kabupaten Biak Numfor yang mencakup ekosistem seperti hutan bakau dan terumbu karang, membuka **peluang diversifikasi ekonomi melalui ekowisata dan perikanan berkelanjutan**. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam, baik melalui pengelolaan hutan yang efisien maupun pengembangan sektor ekonomi alternatif. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Biak Numfor.

2.1.1.2.3 Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Biak Numfor termasuk sektor yang belum berkembang dan memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB ADHK (sekitar 0,91%-0,95% pada tahun 2018-2023). Sejauh ini kegiatan usaha pertambangan di Biak Numfor terbatas pada usaha pemenuhan bahan bangunan berskala kecil, berupa usaha pertambangan batuan seperti bahan batu gamping dan sirtu (pasir dan batu). Umumnya penambangan dilakukan oleh rakyat di beberapa kampung untuk kebutuhan lokal atau pembangunan rumah, serta pembangunan jalan oleh dinas terkait. Kawasan pertambangan batu gamping tersebar di beberapa distrik diantaranya: Distrik Yendidori, Samofa, Andey, Biak Utara, Biak Barat, Numfor Barat, dan Numfor Timur.

Gambar II.11 Nilai, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Biak Numfor 2018-2023

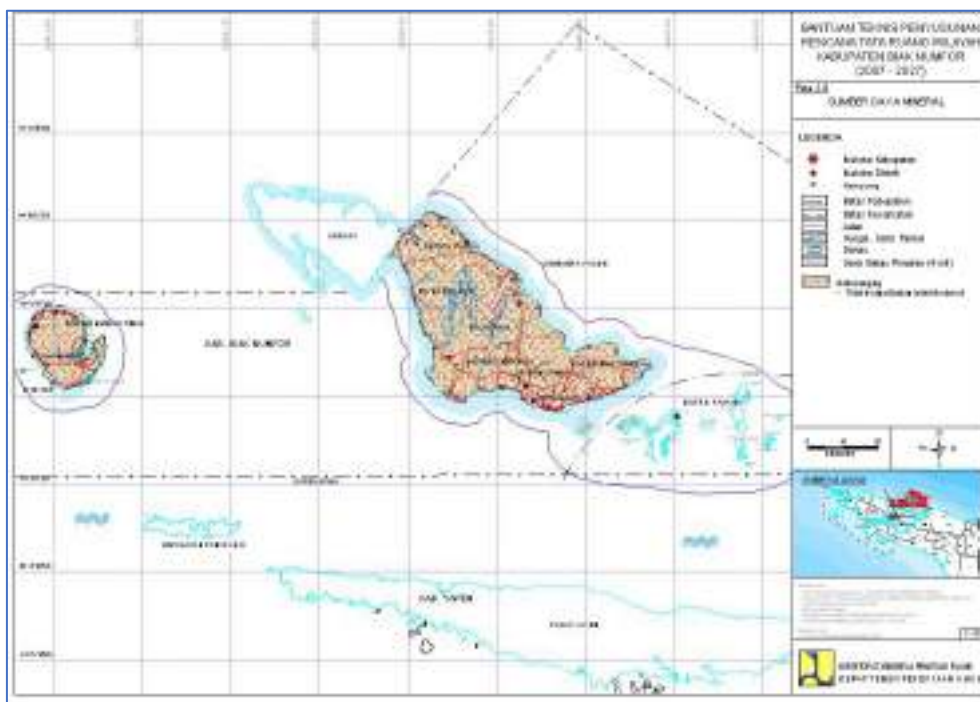


Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "PDRB Biak Numfor Menurut Lapangan Usaha"

Potensi sumber daya mineral utama yang dapat dijumpai di Kabupaten Biak Numfor terdiri dari bahan galian berupa:

- a. **Batu gamping:** tersebar di Pulau Biak. dengan ketebalan yang beragam hingga mencapai 300 m. Penyebaran ketersediaan batu gamping cukup melimpah terdapat di bagian Distrik Biak Barat dan Distrik Warsa Batuan ini dapat digunakan sebagai batuan keras yang dapat dimanfaatkan untuk pondasi, bahan urugan atau bahan bangunan lainnya. Hingga saat ini potensi batu gamping belum dilakukan pemanfaatan baik untuk penambangan rakyat maupun industri.
- b. **Pasir gampingan** : banyak dijumpai di daerah perbukitan landai dan sepanjang pantai Pulau Biak. terbentuk karena pelapukan dan endapan dari batu gamping yang banyak dijumpai di Pulau Biak. Pasir gampingan pada umumnya telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat menjadi bahan bangunan batako namun berkualitas kurang baik untuk beton. Kualitas batako di sekitar Biak cukup baik dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut mengingat cadangan pasir gampingan cukup melimpah.
- c. **Batuan beku** : batuan beku merupakan batuan keras yang sangat baik digunakan untuk bahan urugan dan pondasi bangunan hanya dijumpai di Distrik Biak Timur. Penyebaran batuan beku saat ini tidak disarankan untuk dieksploitasi karena tutupan permukaan merupakan hutan lindung.
- d. **Bahan semen** : berupa batugamping atau napal gampingan terdapat secara melimpah di bagian Timur dan selatan Pulau Biak.

Gambar II.12 Peta Sumber Daya Mineral



Sumber : RTRW Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011-2031

Salah satu tantangan utama sektor pertambangan di Biak Numfor adalah kurangnya investasi dan teknologi modern untuk eksplorasi dan pengolahan sumber daya. Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan membuka kawasan pertambangan secara terencana, pemerintah daerah dapat merangsang investasi swasta, membawa teknologi modern, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Langkah ini juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan nilai tambah pada produk tambang.

Pengembangan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Biak Numfor harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Dukungan dari masyarakat lokal juga menjadi faktor kunci keberhasilan, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan risiko kegiatan pertambangan. Dengan pendekatan yang tepat, sektor pertambangan dan penggalian di Biak Numfor memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

2.1.1.2.4 Pariwisata

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 (empat) sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.21.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHK Kabupaten Biak Numfor pada 2018-2023 berkisar antara 27% hingga 30%, dan **berperan yang signifikan dalam perekonomian daerah**. Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dominan dengan kontribusi tertinggi, mencapai 16,43% pada 2023, diikuti oleh transportasi dan pergudangan (6,83%). Sektor informasi dan komunikasi serta penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi yang lebih kecil, masing-masing sekitar 3,82% dan 0,81%. Meskipun sektor pariwisata di Kabupaten Biak Numfor mengalami kontraksi pada 2018-2020, terutama akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan positif mulai terjadi sejak 2021. Pemulihan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan dan transportasi di Biak Numfor. Dalam hal ini, sebagai intervensi kebijakan di masa depan, penguatan

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta informasi dan komunikasi dapat meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian daerah Biak Numfor.

Tabel II.21 Nilai, Laju Pertumbuhan, dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023 (%)

Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NILAI PDRB ADHK (MILIAR RUPIAH)						
PARIWISATA	1.021,19	1.018,67	890,22	910,05	957,48	996,23
Perdagangan Besar dan Eceran	524,71	549,18	523,93	541,16	572,74	593,42
Transportasi dan Pergudangan	343,71	315,91	207,97	209,98	223,05	241,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,52	26,99	23,75	26,90	28,17	29,85
Informasi dan Komunikasi	126,24	126,59	134,58	132,01	133,53	131,55
LAJU PERTUMBUHAN (%)						
PARIWISATA	-1,41	-0,25	-12,61	2,23	5,21	4,05
Perdagangan Besar dan Eceran	0,04	4,66	-4,60	3,29	5,84	3,61
Transportasi dan Pergudangan	-1,73	-8,09	-34,17	0,97	6,22	8,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	1,75	-12,02	13,30	4,71	5,98
Informasi dan Komunikasi	-6,65	0,28	6,32	-1,91	1,15	-1,48
KONTRIBUSI TERHADAP PDRB ADHK KABUPATEN (%)						
PARIWISATA	30,43	29,70	27,34	27,28	27,36	27,58
Perdagangan Besar dan Eceran	15,64	16,01	16,09	16,22	16,37	16,43
Transportasi dan Pergudangan	10,24	9,21	6,39	6,29	6,37	6,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,79	0,73	0,81	0,80	0,83
Informasi dan Komunikasi	3,76	3,69	4,13	3,96	3,82	3,64

Sumber: BPS Biak Numfor (2024), dalam dokumen "Produk Domestik Regional Bruto Biak Numfor"

Jumlah wisatawan di Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023 (lihat Tabel II.22), mencerminkan **pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi**. Tren positif ini juga menunjukkan bahwa pariwisata di Biak Numfor **semakin berkembang dan berpotensi menjadi sektor unggulan dalam perekonomian daerah**. Pada 2020, total wisatawan hanya 21.783 orang, didominasi wisatawan domestik sebanyak 21.755 orang, sementara wisatawan mancanegara hanya 28 orang. Seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan dan meningkatnya daya tarik wisata, jumlah wisatawan terus bertambah menjadi 32.888 orang pada 2021, lalu melonjak menjadi 54.727 orang pada 2022, dan mencapai 62.701 orang pada tahun 2024. Wisatawan domestik masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ini, meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam empat tahun, sedangkan wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, dari 28 orang pada 2020 menjadi 1.835 orang pada tahun 2023 dan 1.086 orang pada tahun 2024.

Tabel II.22 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Biak Numfor (orang)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Domestik	21.755	32.801	54.378	75.286	61.615
Wisatawan Mancanegara	28	87	349	1.835	1.086
Jumlah	21.783	32.888	54.727	77.121	62.701

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, 2024

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Biak Numfor harus menjadi lokomotif untuk menghela modal pembangunan lainnya. Dalam konteks daya saing, perlu ditentukan lokus, segmen dan kapasitas destinasi yang tepat dan fungsional yang ketika dikembangkan akan memberikan efek ganda dalam pembangunan di daerah. Dalam Tabel II.23 dapat diketahui terdapat atraksi wisata yang sangat besar di Kabupaten Biak Numfor yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah, maupun wisata budaya.

Gambar II.13 Beberapa Atraksi Wisata di Kabupaten Biak Numfor

Wisata Telaga Biru Samares Biak Timur



Wisata Kampung Samber Pasi Kepulauan Aimando



Pantai Anggopi, Distrik Oridek



Festival Sail Teluk Cenderawasih



Kondisi alam bawah laut di Kabupaten Biak Numfor yang sangat menawan karena terdapat berbagai jenis biota karang laut dan berbagai jenis ikan yang memberikan warna dan ciri tersendiri terhadap panorama laut sehingga membangkitkan kenikmatan tersendiri bagi para diver atau snorkler. Obyek wisata lain yang tidak kalah menariknya, salah satunya adalah wisata sejarah gua Jepang (*Japanese Cave*) atau yang diidentikkan dengan gua Binsari yang memiliki nilai historis tersendiri bagi para imperialis Jepang (Nippon).

Gugusan kepulauan Padaido merupakan lokus, segmen yang memiliki kapasitas destinasi prospektif. Pengembangan destinasi perlu dilakukan

dengan memperhatikan wilayah pengaruh (lingkungan strategis) dan kemampuan menjadi pusat bagi kawasan lainnya baik secara regional maupun nasional. Untuk itu khusus kepulauan padaido akan dikembangkan pengembangan wilayah terpadu atau di pusatkan pada kampung Samber Pasi dengan pelayanan di seluruh Distrik Padaido dan Aimando Padaido.

Perkotaan Biak berperan sebagai pusat jasa pariwisata, ditunjang dengan adanya bandara Frans Kaisiepo, pelabuhan Biak, hotel, serta pusat perbelanjaan. Perkotaan Biak juga berperan sebagai etalase pariwisata bagi Kabupaten Biak Numfor, serta wilayah potensi wisata lain di Provinsi Papua.

Tabel II.23 Daftar Nama Objek Wisata Menurut Jenis Objek Wisata dan Lokasi di Biak Numfor, 2024

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Lokasi Objek Wisata	
			Distrik	Kampung/Kelurahan
1	Monumen PD II Paray	Buatan/Sejarah PD. II	Biak Kota	Anggraidi
2	Water Basis	Alam Pantai		Kel. Waupnor
3	Dermaga EX-BMJ	Buatan		Samau
4	Dermaga Yenyabo	Buatan		Sorido
5	Kolam Biru Paray	Alam		Anggraidi
6	Gunung Putih	Alam		Anggraidi
7	Goa Inumaki	Alam/Sejarah PD. II		Sanumi
8	Goa Jepang/Binsari	Alam/Sejarah PD. II	Samofa	Kampung Wisata Binsari
9	Kolam Renang Korem	Buatan		Sumberkar
10	Pantai Tanjung Barari	Alam	Oridek	Mnurwar
11	Kawasan Wisata Kakur	Alam		Kakur
12	Kawasan Wisata Animi	Alam		Animi
13	Kawasan Wisata Anggaduber	Alam		Anggaduber
14	Pantai Anggopi	Alam		Anggopi
15	Pantai Makmakerbo	Alam		Makmakerbo
16	Pantai Sauri	Alam		Sauri
17	Kawasan Bird Watching	Alam		Makmakerbo
18	Pantai Saba	Alam		Saba
19	Pantai Marau	Alam		Saba
20	Pantai Yensama	Alam	Biak Timur	Opiaref
21	Pantai Soryar	Alam		Soryar
22	Pantai Inofi Segara Indah	Alam		Inofi-Bosnik
23	Pantai Samares	Alam		Sepse dan Imdi
24	Telaga Biru Samares	Alam		Sepse dan Imdi
25	Taman Burung dan Anggrek	Buatan		Ruar
26	Kawasan Wisata Manggrove	Alam		Ruar
27	Kawasan Wisata Pulau Owi	Alam		Pulau Owi
28	Taman Wisata Perairan	Alam Bawah Laut	Aimando	Aimando
29	Kawasan Wisata Samberpasi	Alam		Samberpasi
30	Kawasan Wisata Wamsoi	Alam		Pulau Wamsoi
31	Spot Diving Kapal Karam	Alam Bawah Laut		Pulau Rasi
32	Taman Wisata Perairan	Alam Bawah Laut	Padaido	Padaido
33	Kawasan Wisata Pulau Urbi	Alam		Pulau Urbi
34	Kawasan Wisata Pulau Auki	Alam		Pulau Auki
35	Kawasan Wisata Pulau Pai	Alam		Pulau Pai
36	Kawasan Wisata Pulau Undi	Alam		Pulau Undi
37	Spot Diving Gowa Bawah Laut	Alam Bawah Laut		Pulau Undi
38	Pantai Yendi	Alam	Yendidori	Yendidori
39	Dermaga Snudi 1	Buatan		Impendi

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Lokasi Objek Wisata	
			Distrik	Kampung/Kelurahan
40	Dermaga Snudi 2	Buatan		Impendi
41	Pantai Impendi	Alam		Impendi
42	Pulau Raja Tiga	Alam		Adoki
43	Tanjung Sirwei	Alam		Adoki
44	Teater Apen Beyeren	Buatan		Adoki
45	Pantai Doibebrin Urfu	Alam		Urfu
46	Kuburan Tua Padwa	Sejarah		Padwa Pantai
47	Negeri Dongeng	Alam		Padwa Sup
48	Pantai Samber-Binyeri	Alam		Samber dan Binyeri
49	Air Terjun Wapsdori	Alam	Biak Barat	Yomdor
50	Kali Wardo	Alam		Marisen
51	Wardo Rest Area	Buatan		Marisen
52	Situs Mananmakeri	Sejarah		Sopendo
53	Pantai Mamoribo	Alam	Swandiwe	Mamoribo
54	Air Terjun Napdo	Alam		Napdo
55	Air Terjun Krisdo	Alam	Biak Utara	Krisdo
56	Telaga Hijau Kawoidifu	Alam		Mambesak
57	Pantai Warbon	Alam		Warbon
58	Pantai Korem	Alam		Korem
59	Tugu Tsunami Biak 1996	Buatan		Koren
60	Pantai Yobdi	Alam		Yobdi
61	Pantai Wanai Wari	Alam		Wari dan Waromi
62	Kampung Tua Wouna	Budaya	Andei	Wouna
63	Air Terjun Warawaf	Alam		Warawaf
64	Air Terjun Wodu	Alam		Wodu
65	Teater Apen Beyeren	Budaya		Bosnabraid
66	Pantai Sakyori	Alam		Madirai
67	Tanjung Saruri Batu Pecah	Alam		Wasori dan Fanindi
68	Air Terjun Karmon	Alam		Karmon
69	Spot Surfing Pantai Aman	Alam		Aman
70	Pantai Yeruboi	Alam	Warsa	Yeruboi
71	Air Terjun Wafsarak Warsa	Alam		Imbari
72	Hutan Gaharu Warsa	Alam		Imbari
73	Pantai Sansundi	Alam	Bondifuar	Sansundi
74	Pantai Asaibori	Alam	Numfor Barat	Kameri
75	Telaga Air Asin Namber	Alam		Namber
76	Pantai Amberimasi	Alam		Amberimasi
77	Pantai Yenburwo	Alam		Yenburwo

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor (2024)

Dalam rangka meningkatkan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Biak Numfor, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan merupakan prasyarat utama untuk mendukung hal tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan data jumlah akomodasi di Kabupaten Biak Numfor pada 2022 dan 2023, fasilitas perhotelan masih didominasi oleh hotel non-bintang yang berjumlah 23 unit, sementara hotel berbintang masih sangat terbatas (terdapat 1 unit hotel bintang tiga dan 3 unit hotel bintang satu). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat akomodasi bagi wisatawan, kualitas dan jumlah hotel berbintang masih perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan, terutama dari segmen menengah ke atas dan wisatawan mancanegara yang umumnya mencari fasilitas dengan standar lebih tinggi. Oleh karena itu,

pengembangan infrastruktur akomodasi yang lebih variatif dan berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut.

Tabel II.24 Jumlah Akomodasi/Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kabupaten Biak Numfor

Klasifikasi Hotel	2022	2023
Bintang lima	0	0
Bintang empat	0	0
Bintang tiga	1	1
Bintang dua	0	0
Bintang satu	3	3
Non bintang	23	23

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka”

Tabel II.25 Jumlah Akomodasi/Hotel dan Rumah Makan/Restoran Menurut Distrik di Biak Numfor

Distrik	Hotel/Akomodasi		Rumah Makan/Restoran			
	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Numfor Barat	1	1	2	2	2	2
Orkeri	0	0	0	0	0	0
Numfor Timur	1	1	4	4	4	4
Bruyadori	0	0	0	0	0	0
Poiru	0	0	0	0	0	0
Padaido	1	1	0	0	0	0
Aimando Padaido	3	3	0	0	0	0
Biak Timur	1	1	3	3	3	3
Oridek	1	1	0	0	0	0
Biak Kota	18	18	23	25	27	30
Samofa	1	1	25	27	31	35
Yendidori	0	0	1	1	1	1
Biak Utara	0	0	3	3	3	3
Andey	0	0	0	0	0	0
Warsa	0	0	1	1	1	1
Yawosi	0	0	0	0	0	0
Bondifuar	0	0	0	0	0	0
Biak Barat	0	0	0	0	0	0
Swandiwe	0	0	0	0	0	0
Biak Numfor	27	27	62	66	72	79

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka”

Distribusi akomodasi dan rumah makan/restoran di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan konsentrasi yang tinggi di Distrik Biak Kota dan Samofa. Pada 2022 dan 2023, jumlah hotel di kabupaten Biak Numfor sebanyak 27 unit, dengan mayoritas berada di Biak Kota (18 unit), sementara distrik lainnya hanya memiliki 1 hingga 3 hotel. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas akomodasi masih terpusat di ibu kota kabupaten, sementara wilayah lainnya belum berkembang secara signifikan dalam penyediaan hotel. Sementara itu, jumlah rumah makan/restoran di Biak Numfor mengalami peningkatan dari 62 unit pada 2020 menjadi 79 unit pada 2023. Pertumbuhan jumlah rumah makan ini didominasi di wilayah Distrik Samofa dan Biak Kota, yang masing-masing memiliki 35 dan 30 rumah

makan/restoran pada 2023. Distrik lain memiliki jumlah rumah makan yang jauh lebih sedikit, bahkan di beberapa distrik tidak terdapat fasilitas rumah makan/restoran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata masih perlu diperluas untuk meningkatkan pemerataan dan daya tarik wisata di seluruh wilayah Biak Numfor.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup *(dalam proses penyusunan)*

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Ketahanan Energi

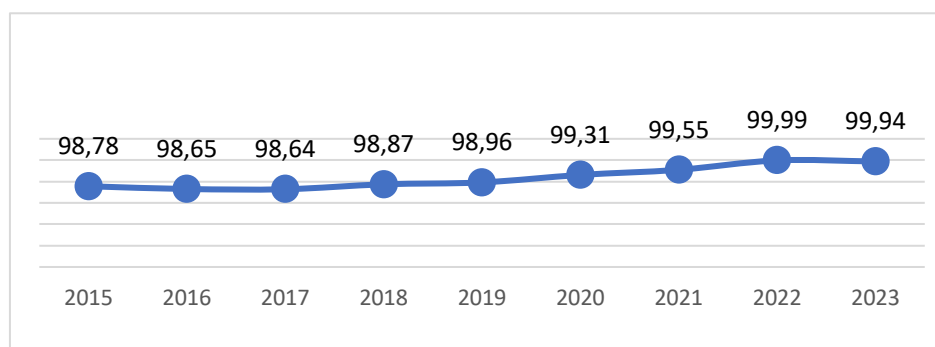
Perkembangan ketahanan energi di Kabupaten Biak Numfor merupakan bukti transformasi infrastruktur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat tonggak bersejarah dalam pengoperasian pembangkit listrik di Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan pasokan listrik yang lebih stabil, handal dan merata, diantaranya:

- a. **PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)** yang memberikan penerangan di Distrik Aimando, Padaido, Biak Timur, dan Bondifuar, khususnya untuk wilayah pulau-pulau kecil dan terpencil di Biak Numfor. Kehadiran PLTS menjadi langkah awal dalam upaya pemerataan akses listrik berbasis energi terbarukan untuk penerangan rumah yang sebelumnya jauh dari jangkauan jaringan PLN, dengan biaya operasional yang lebih rendah.
- b. **PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Numfor**, yang beroperasi sejak Mei 2017 dan melayani 49 kampung di lima distrik di Pulau Numfor. Beroperasinya PLTD ini memungkinkan masyarakat Pulau Numfor menikmati listrik selama 24 jam sehari, yang sebelumnya sulit dicapai. Sebelum tahun 2017, akses listrik di wilayah ini masih terbatas karena sebagian besar daerah hanya memiliki listrik yang menyala selama kurang dari 12 jam sehari, dengan ketergantungan pada generator diesel kecil yang tersebar di beberapa wilayah.
- c. **PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Urfu**, yang beroperasi sejak Agustus 2019. Berlokasi di Distrik Yendidori, PLTMG ini memiliki kapasitas total 25 MW, dengan Unit 1 menghasilkan 15 MW dan Unit 2 menghasilkan 10 MW. Pembangkit ini tidak hanya menggunakan bahan bakar gas, tetapi juga solar, memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi. Kehadirannya memperkuat pasokan listrik untuk wilayah Biak Numfor, termasuk area perkotaan yang membutuhkan listrik stabil untuk mendukung perkembangan ekonomi.

- d. **PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Nusowi** yang beroperasi sejak Februari 2023 Dengan kapasitas daya mampu sebesar 1.320 kW, pembangkit ini mendukung keandalan listrik di lima distrik utama. Kehadiran PLTD Nusowi memastikan akses listrik yang lebih stabil untuk wilayah yang sebelumnya masih menghadapi keterbatasan.

Transformasi sektor kelistrikan di Kabupaten Biak Numfor juga tercermin dengan adanya **peningkatan akses listrik rumah tangga**. Pada tahun 2015, sebanyak 98,78% rumah tangga telah memiliki akses listrik (PLN dan nonPLN). Angka ini meningkat menjadi 99,31% pada tahun 2020, dan hampir seluruh rumah tangga, yaitu 99,99%, telah menikmati akses listrik pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,94%, capaian ini tetap menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan akses listrik (lihat Gambar II.14).

Gambar II.14 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik di Kabupaten Biak Numfor (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2024, dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan tren peningkatan dari 27.956 pelanggan pada 2018 menjadi 42.344 pelanggan pada tahun 2023. Distrik dengan jumlah pelanggan terbesar adalah Biak Kota, yang meningkat dari 10.656 pelanggan pada 2018 menjadi 13.320 pelanggan pada 2023, diikuti oleh Distrik Samofa yang bertambah dari 7.272 menjadi 13.112 pelanggan dalam periode yang sama. Sementara itu, distrik dengan jumlah pelanggan lebih kecil seperti Orkeri dan Poiru juga mengalami pertumbuhan meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah pelanggan listrik ini mencerminkan adanya perkembangan infrastruktur kelistrikan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap listrik di berbagai distrik, meskipun laju pertumbuhannya bervariasi di setiap distrik.

Tabel II.26 Jumlah Pelanggan Listrik (PLN) di Kabupaten Biak Numfor

Distrik	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numfor Barat	312	826	830	836	841	856
Orkeri	219	160	172	194	205	224
Numfor Timur	219	749	760	773	790	804

Distrik	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bruyadori	253	215	220	258	266	278
Poiru	229	282	289	297	307	325
Padaido	603	489	501	521	528	534
Aimando Padaido	320	430	456	605	616	620
Biak Timur	1.826	2.278	2.290	2.370	2.424	2.465
Oridek	1.177	1.375	1.390	1.436	1.487	1.513
Biak Kota	10.656	11.902	12.003	12.577	12.995	13.320
Samofa	7.272	11.619	11.878	12.352	12.723	13.112
Yendidori	1.775	1.873	1.690	1.709	2.064	2.132
Biak Utara	144	131	1.678	1.730	1.660	1.899
Andey	519	513	517	520	574	581
Warsa	1.047	1.185	1.190	1.197	599	885
Yawosi	436	412	390	397	584	588
Bondifuar	107	112	113	114	108	207
Biak Barat	107	1.275	1.287	1.301	1.104	1.479
Swandiwe	735	794	796	797	516	522
Biak Numfor	27.956	36.620	38.450	39.984	40.391	42.344

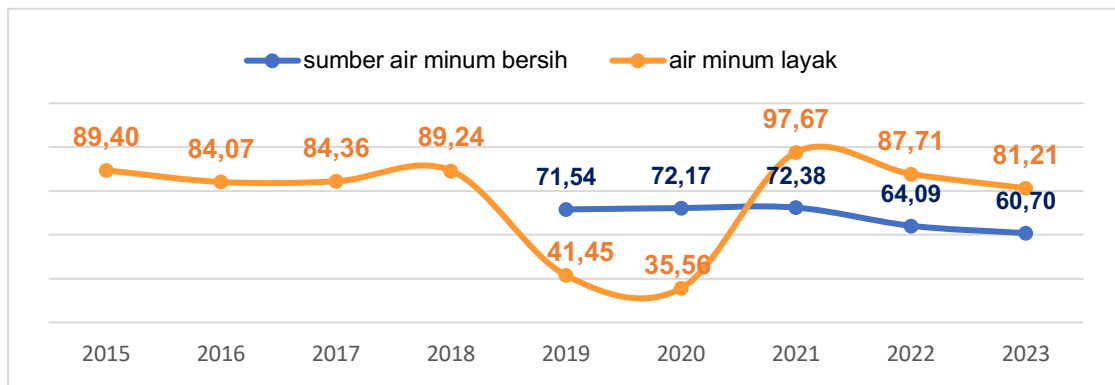
Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka”

Peningkatan akses listrik di Kabupaten Biak Numfor membuka peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan listrik yang tersedia sepanjang waktu, peralatan rumah tangga dapat digunakan tanpa gangguan, dan usaha kecil menengah (UMKM) memiliki kesempatan untuk berkembang lebih pesat. Melalui kolaborasi solid antara pemerintah dan penyedia energi, perjalanan kelistrikan di Kabupaten Biak Numfor menjadi cerminan nyata dari bagaimana infrastruktur dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui elektrifikasi yang lebih merata dan penggunaan energi alternatif berkelanjutan yang dapat diberdayakan seperti potensi air terjun, sumber panas bumi serta biomassa.

2.1.1.4.2 Ketahanan Air

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Secara umum, sumber-sumber air bersih di Kabupaten Biak Numfor cukup tersedia, namun yang akan menjadi tantangan adalah pengelolaan air bersih dengan baik untuk menunjang kehidupan di Kabupaten Biak Numfor. Adapun air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Gambar II.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Biak Numfor



Sumber: BPS Papua, 2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua"

Gambar II.15 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan air minum layak di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2015-2023. Berdasarkan Gambar II.15 diketahui bahwa meskipun memiliki sumber air bersih yang melimpah, terdapat penurunan akses air minum layak di Kabupaten Biak Numfor dari 97,67% pada tahun 2021 menjadi 81,21% pada tahun 2023. Sebagai salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian cakupan akses air minum layak di Kabupaten Biak Numfor belum memenuhi standar SPM air minum.

Kinerja Badan Pengelola Air Minum Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih

PT. War Besrendi (Badan Pengelola Air Minum Daerah) menjual air bersih pada tahun 2017 sebanyak 2.144.648.648 m³ kepada 9.870 pelanggan aktif dengan lokasi pelanggan hanya pada dua distrik yaitu Distrik Samofa dan Distrik Biak Kota. Jumlah air terjual ini meningkat 87.03% dari tahun 2016 sebanyak 1.146.648 m³. Jumlah pelanggan air bersih terus meningkat dari 7.437 pelanggan pada tahun 2016 menjadi 9.870 pelanggan pada tahun 2017 atau meningkat 32.71% dari tahun 2016.

Tabel II.14 Rasio Penduduk yang mendapatkan Air Bersih yang disalurkan oleh PT. WAR Besrendi Tahun 2019-2023

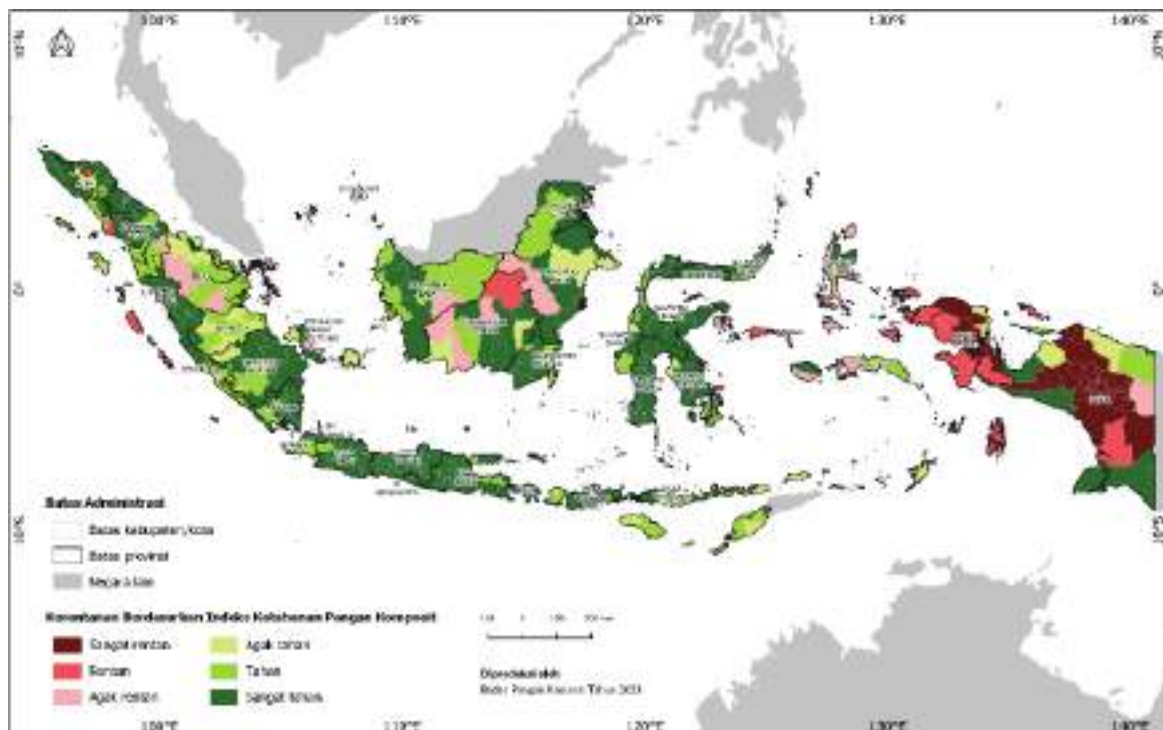
Tahun	Air Bersih Disalurkan (m ³)	Jumlah Pelanggan Aktif	Rasio Penduduk yang Menggunakan Air Bersih
2019	2.860.665	8.068	5,29
2020	2.512.565,99	8.344	5,72
2021	2.225.208	8.283	5,67
2022	185.759	9.094	6,70
2023	1.971.094	7.516	5,10

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor 2024

2.1.1.4.3 Kemandirian Pangan

Urusan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan Biak Numfor karena pertumbuhan penduduk yang bertambah memberikan konsekuensi pada peningkatan kebutuhan pangan dan energi. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Gambar II.16 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2023

Tabel II.27 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Biak Numfor

Uraian	2020	2021	2022	2023
IKP (indeks)	48,51	49,07	48,16	49,81
Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
Interpretasi	Tingkat kerentanan pangan sangat tinggi			
a. Indeks Ketersediaan (IK)	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Indeks Keterjangkauan	67,80	68,43	67,44	69,81
c. Indeks Pemanfaatan (IP)	70,43	71,35	69,82	72,17

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021 (data diolah)

Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur ketahanan pangan suatu daerah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Berdasarkan IKP tahun 2020-2021 diketahui bahwa terdapat peningkatan IKP di Biak Numfor dari 48,51 pada tahun 2020 menjadi 48,16 pada tahun 2022. Meskipun demikian, Biak Numfor masih termasuk **wilayah rentan pangan prioritas 2** yang sangat bergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain atau sentra produksi pangan (lihat Tabel II.27). Hal ini mengindikasikan besarnya kebutuhan penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Biak Numfor melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas pangan bergizi, penguatan lumbung pangan di kampung-kampung, diversifikasi jenis makanan pokok lokal, serta peningkatan kapasitas petani dalam meningkatkan produktivitas komoditas.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki tujuan meningkatkan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yang meningkat dapat dilihat dari meningkatnya beberapa indikator, diantaranya: 1) indeks kualitas lingkungan hidup; 2) indeks kualitas tutupan lahan; 3) indeks kualitas udara; dan 4) indeks kualitas air. Perkembangan nilai Indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel II.28.

Tabel II.28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	75,63	76,89	77,67	78,18	79,18	62,00
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	87,94	88,24	88,55	95,65	94,66	95,71
Indeks Kualitas Udara (IKU)	74,81	74,81	75,94	95,89	95,89	95,23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,81	79,05	79,29	79,52	79,76	82,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

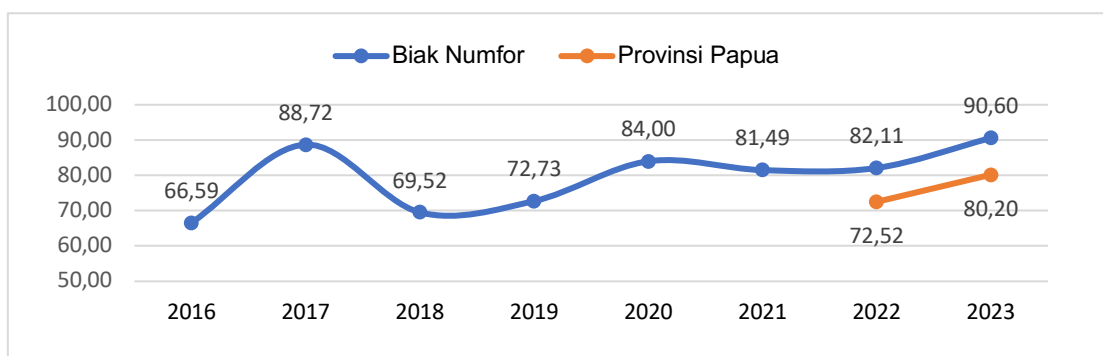
Berdasarkan Tabel II.28, diketahui bahwa indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks kompositnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun nilainya kecil. IKLH tahun 2018 adalah 78,81 menurun 0,44 persen menjadi 78,37 pada tahun 2022. IKA tahun 2018 adalah 75,63 menurun menjadi 50,00 pada tahun 2022. IKU tahun 2018 adalah 74,81 naik menjadi 95,89 pada tahun 2022. IKTL tahun 2018 adalah 87,94 naik 6,72 persen menjadi 94,66 pada tahun 2022. Meningkatnya nilai indeks di atas menunjukkan bahwa kinerja program-program perbaikan kualitas lingkungan hidup semakin baik hingga tahun 2022.

Bahaya geologi yang berpotensi tinggi terjadi di Kabupaten Biak Numfor adalah gempa bumi dan tsunami, sedangkan tanah longsor hanya memiliki kemungkinan kecil terjadi di Biak Numfor. Bahaya iklim yang kemungkinan dapat terjadi di Kabupaten Biak Numfor adalah badai tropis dan banjir. Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi merusak (gempa kuat) dan gempa bumi merusak sedang (gempa sedang). Bentuk antisipasi terhadap bencana alam geologi di Kabupaten Biak Numfor perlu dilakukan melalui upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini diantaranya adalah dengan memanfaatkan dan mempertahankan fungsi hutan bakau sebagai penahan gelombang dan abrasi pantai. Penyelenggaraan penanggulangan bencana (tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana). Peningkatan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan optimalisasi rehabilitasi paska bencana. Indeks risiko bencana kabupaten Biak Numfor termasuk dalam kelas risiko sedang sejak tahun 2018-2023.

2.1.1.5.2 Akses Sanitasi Layak

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sistem sanitasi mencakup pengolahan air limbah dan persampahan perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Sampah dan limbah manusia (urine dan feses) serta limbah rumah tangga dapat menjadi sumber masalah kesehatan apabila tidak dikelola dalam sistem yang baik.

Gambar II.17 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Secara umum, akses sanitasi layak di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2017-2023 jauh lebih tinggi dari Provinsi Papua dari 66,59% pada tahun 2016 menjadi 90,60% pada tahun 2023, meskipun demikian akses sanitasi ini berada di bawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 01PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah rawan bencana sebagai konsekuensi kondisi geologis dan geografisnya. Berdasarkan BNPB (2023), Kabupaten Biak Numfor memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) kategori “**sedang**” sebesar **138,40**. Apabila ditinjau berdasarkan jenis bencana, pada tahun 2023 Kabupaten Biak Numfor memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana banjir, gempa bumi (skor: 14,40), tsunami (skor: 24,00), kebakaran hutan dan lahan (25,20), gelombang ekstrim dan abrasi (skor: 20,00), serta kekeringan (skor: 31,20), sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.29, berikut:

Tabel II.29 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2015-2023

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
1	Jayapura	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	Tinggi
2	Sarmi	171,60	171,60	171,60	166,98	166,98	166,98	166,98	169,63	172,50	Tinggi
3	Mamberamo Raya	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	Tinggi
4	Waropen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	Sedang
5	Biak Numfor	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	Sedang
6	Keerom	127,20	127,20	127,20	127,20	127,20	127,20	127,20	127,20	127,20	Sedang
7	Kota Jayapura	156,80	155,59	155,59	143,94	143,94	143,94	128,86	114,40	114,40	Sedang
8	Kepulauan Yapen	117,20	85,00	85,00	83,48	83,48	83,48	83,48	93,60	93,60	Sedang
9	Supiori	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	Sedang

Catatan: nilai indeks yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: BNPB, 2023 dalam dokumen “Indeks Risiko Bencana Indonesia”

Gambar II.18 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2023



Sumber: BNPB, 2023 dalam dokumen “Indeks Risiko Bencana Indonesia”

Tabel II.30 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
IRB	138,40	138,40	138,40	138,40
	sedang	sedang	sedang	sedang
IRB Banjir	n.a	n.a	n.a	n.a
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Gempa Bumi	14,40	14,40	14,40	14,40
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Tsunami	24,00	24,00	24,00	24,00
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Kebakaran Hutan dan Lahan	25,20	25,20	25,20	25,20
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Tanah Longsor	16,80	16,80	16,80	16,80
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Gelombang Ekstrem dan Abrasi	20,00	20,00	20,00	20,00
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Kekeringan	31,20	31,20	31,20	31,20
	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
IRB Cuaca Ekstrem	6,80	6,80	6,80	6,80
	sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber: BNPB, 2020-2023 dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia"

2.1.1.6.1 Kerentanan Terhadap Banjir

Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75-150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019). Tabel II.31 dan Gambar II.19 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Biak Numfor didominasi oleh wilayah bebas potensi banjir. Distrik yang bebas dari potensi Banjir adalah Distrik Aimando Padaido dan Distrik Padaido. Kejadian banjir di kabupaten Biak Numfor lebih banyak terjadi diakibatkan meluapnya air dari sungai. Salah satu kejadian banjir akibat luapan air sungai adalah kejadian banjir bulan februari tahun 2023 yang disebabkan oleh meluapnya sungai Armnu, yang berdampak pada Kampung Armnu Distrik Andey.

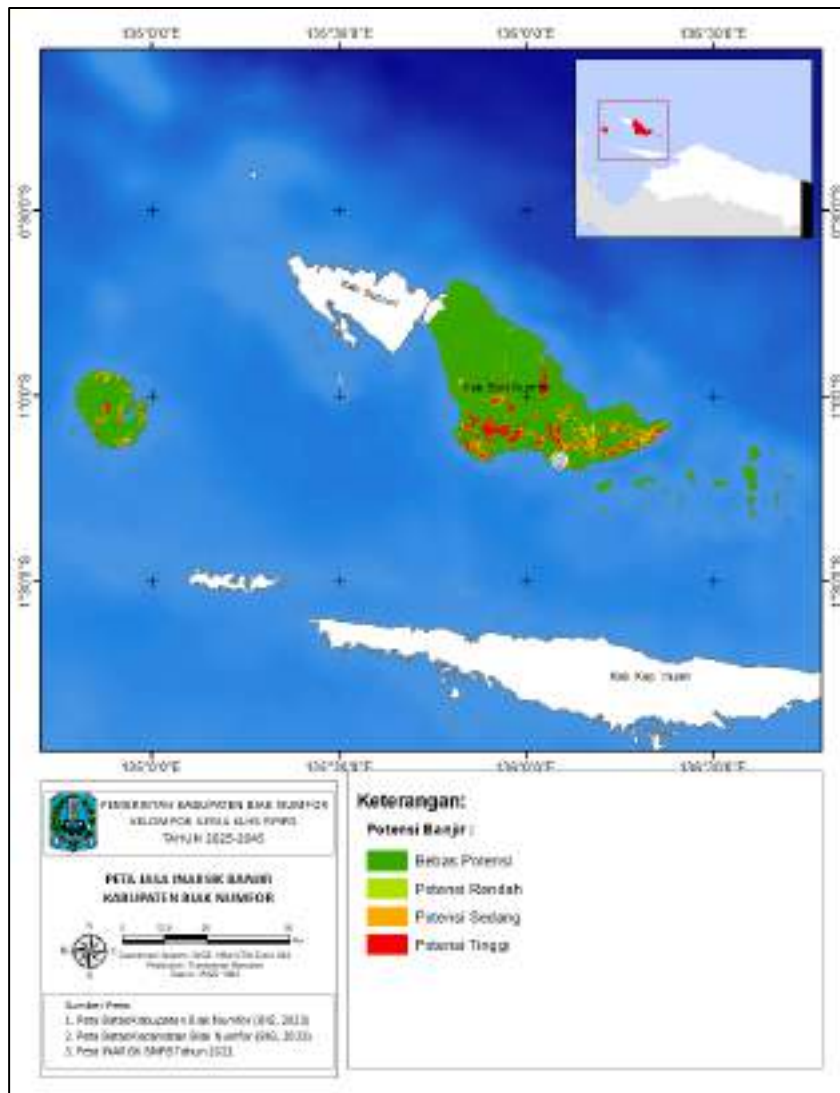
Tabel II.31 Sebaran Potensi Bencana Banjir Berdasarkan Distrik

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Aimando Padaido	3,998.23				3,998.23
Andey	22,591.18	65.53	481.94	270.65	23,409.30
Biak Barat	15,707.56	168.88	1,217.68	2,998.41	20,092.53
Biak Kota	2,018.89	56.40	223.07	131.92	2,430.29
Biak Timur	11,058.90	873.37	2,064.23	1,390.04	15,386.54
Biak Utara	30,240.24	319.48	1,367.40	2,451.70	34,378.82
Bondifuar	6,434.27	5.76	18.79	23.26	6,482.09

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Bruyadori	5,951.02	264.14	504.47	205.34	6,924.98
Numfor Barat	9,103.58	94.73	498.28	510.43	10,207.02
Numfor Timur	5,271.25	259.17	457.73	173.05	6,161.20
Oridek	11,691.81	813.16	2,260.14	1,543.15	16,308.26
Orkeri	4,384.49	168.94	447.59	187.93	5,188.94
Padaido	1,452.73				1,452.73
Poiru	4,003.94	143.97	259.66	108.97	4,516.53
Samofa	5,454.00	213.91	890.57	1,251.29	7,809.77
Swandiwe	22,323.63	67.35	176.24	159.40	22,726.61
Warsa	14,115.54	30.75	33.24	62.99	14,242.52
Yawosi	2,494.68	43.23	20.75	2.00	2,560.67
Yendidori	15,564.69	167.09	1,528.67	3,917.34	21,177.78
Luas (ha)	193,860.64	3,755.86	12,450.43	15,387.88	225,400.84
Luas (%)	85.99	1.67	5.52	6.83	100.00

Sumber: KLHS RJPJD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Gambar II.19 Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Biak Numfor

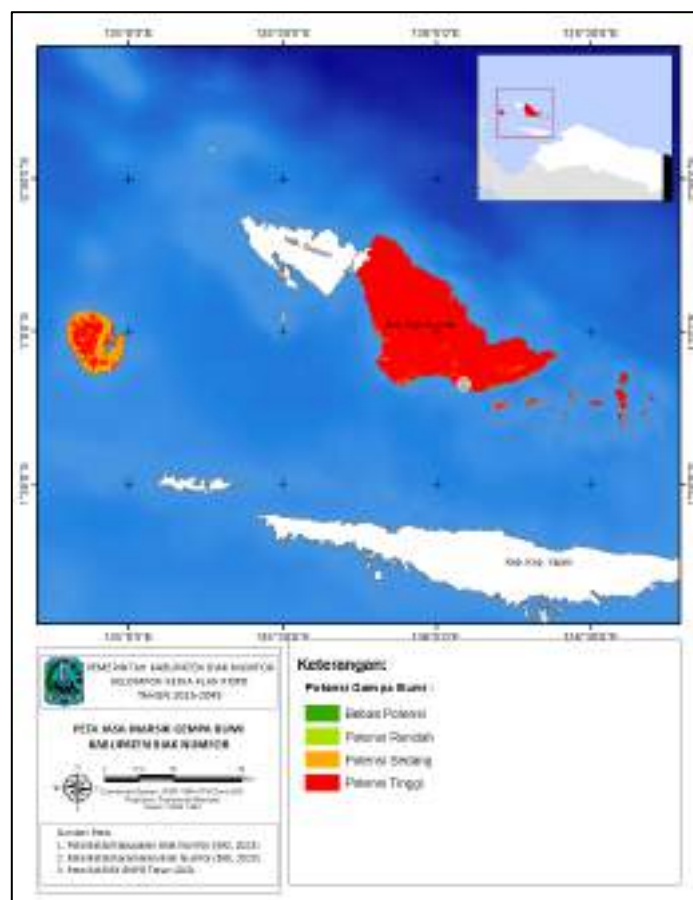


Sumber: KLHS RJPJD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.6.2 Kerentanan Terhadap Gempa Bumi

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki Seismisitas atau persebaran titik-titik gempa bumi yang sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan karna banyaknya struktur geologi (pataha) yang melewati daerah ini. Salah satu struktur geologi yang cukup besar adalah patahan yang berarah barat laut – tenggara di sebelah utara pulau Biak yang merupakan daerah penujaman antara lempeng pasifik dan lempeng irian jaya. Dari catatan seismogram, kejadian gempa paling sering terjadi di daerah pulau biak hingga ke pulau supiori dengan skala bervariasi. Beberapa kejadian gempa di kabupaten biak dengan skala yang cukup tinggi pernah terjadi di tahun 1914 dengan kekuatan 7,9 SR, tahun 1979 dengan kekuatan 7,9 SR dan di tahun 1996 dengan skala 7,0 SR yang kemudian disertai dengan kejadian tsunami yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, orang hilang dan luka-luka. Berdasarkan data Inarisk BNPB Tahun 2021, terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah distrik di Kabupaten Biak berada dalam kategori gempa dengan potensi Tinggi dan sangat berpotensi disertai tsunami. Tabel II.32 dan Gambar II.20 menunjukkan sebaran potensi gempa bumi di Kabupaten Biak tahun 2021.

Gambar II.20 Peta Zona Gempa Kabupaten Biak Numfor dan Sekitarnya



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Tabel II.32 Sebaran Potensi Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Distrik di Biak Numfor

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Aimando Padaido	61.73		548.24	3,388.27	3,998.23
Andey				23,409.30	23,409.30
Biak Barat	21.80		693.87	19,376.86	20,092.53
Biak Kota	17.65		104.05	2,308.59	2,430.29
Biak Timur	28.69		791.64	14,566.21	15,386.54
Biak Utara	36.88		85.84	34,256.11	34,378.82
Bondifuar	11.96			6,470.12	6,482.09
Bruyadori	64.22	6.73	5,364.76	1,489.26	6,924.98
Numfor Barat	24.90	7.74	3,707.27	6,467.11	10,207.02
Numfor Timur	12.40		3,253.41	2,895.40	6,161.20
Oridek	43.74		425.57	15,838.94	16,308.26
Orkeri	15.99	65.53	3,406.82	1,700.60	5,188.94
Padaido	40.06		618.18	794.50	1,452.73
Poiru	10.36		2,688.88	1,817.29	4,516.53
Samofa			209.91	7,599.85	7,809.77
Swandiwe	29.22		44.93	22,652.46	22,726.61
Warsa	10.50			14,232.02	14,242.52
Yawosi	5.84			2,554.82	2,560.67
Yendidori	25.13		679.47	20,473.18	21,177.78
Luas (ha)	461.05	80.00	22,622.86	202,290.89	225,400.84
Luas (%)	0.20	0.04	10.03	89.73	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.6.3 Kerentanan Terhadap Tanah Longsor

Kejadian tanah longsor di kabupaten Biak Numfor sering juga disebabkan akibat banjir Rob dan kegagalan struktur dinding penahan dalam menahan arus longsor tanah. Berdasarkan data Inarsik BNPB Tahun 2021, terdapat beberapa wilayah dalam Distrik Biak Utara, Bondifuar, Warsa dan Yawosi yang termasuk dalam kategori potensi tinggi. Tabel II.33 dan Gambar II.21 menunjukkan sebaran wilayah potensi Bencana Tanah Longsor per distrik Tahun 2021.

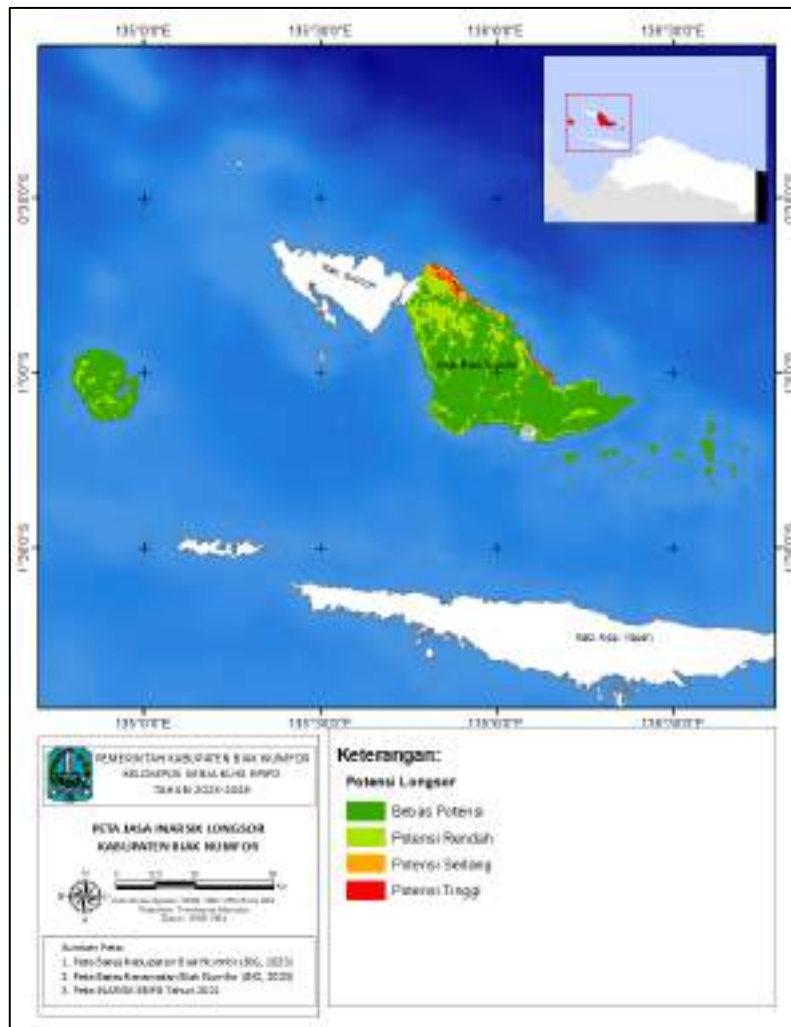
Tabel II.33 Sebaran Potensi Bencana Tanah Longsor per Distrik

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Aimando Padaido	3,945.31	52.92			3,998.23
Andey	18,505.04	4,904.26			23,409.30
Biak Barat	17,653.99	2,438.54			20,092.53
Biak Kota	2,121.20	309.09			2,430.29
Biak Timur	13,502.36	1,884.17			15,386.54
Biak Utara	28,809.05	4,403.51	597.50	568.77	34,378.82
Bondifuar	642.28	3,209.17	1,711.34	919.30	6,482.09
Bruyadori	6,249.58	675.39			6,924.98
Numfor Barat	8,542.44	1,664.58			10,207.02
Numfor Timur	5,711.25	449.95			6,161.20
Oridek	14,659.02	1,649.24			16,308.26
Orkeri	4,671.97	516.97			5,188.94
Padaido	1,452.73				1,452.73
Poiru	4,299.60	216.93			4,516.53
Samofa	7,231.51	578.25			7,809.77
Swandiwe	12,122.63	10,603.98			22,726.61
Warsa	5,854.91	5,075.65	2,188.38	1,123.57	14,242.52

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Yawosi	1,407.46	185.97	948.94	18.29	2,560.67
Yendidori	19,458.85	1,718.93			21,177.78
Luas (ha)	176,841.19	40,537.53	5,446.15	2,629.93	225,400.84
Luas (%)	78.44	17.98	2.42	1.17	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Gambar II.21 Peta Resiko Bencana Tanah Longsorg di Kabupaten Biak Numfor



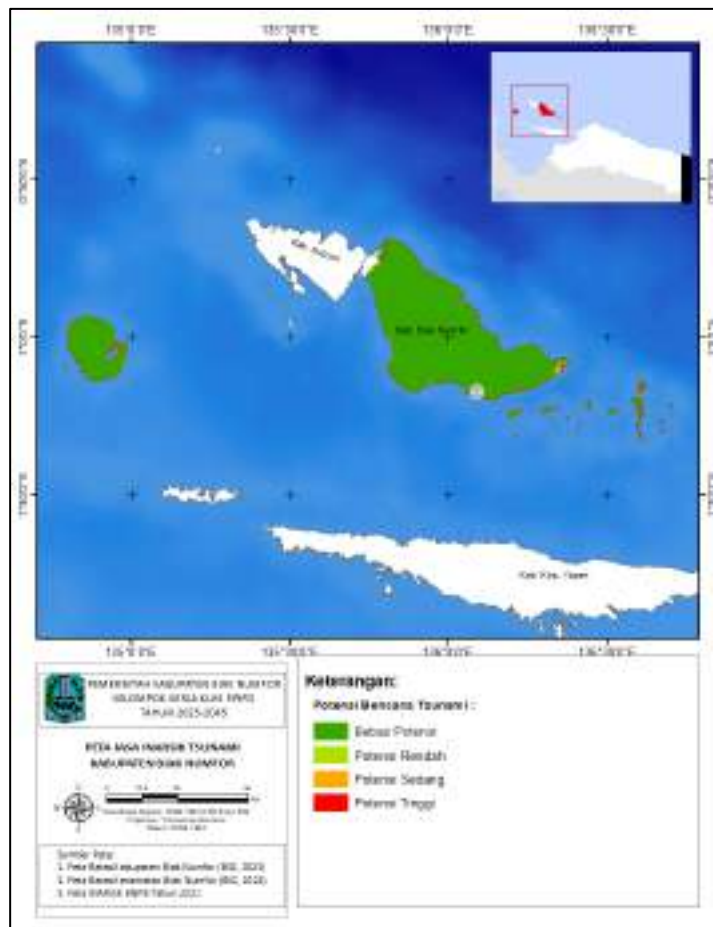
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.6.4 Kerentanan Terhadap Tsunami

Secara empiris tsunami dapat terjadi oleh gempa tektonik dengan kekuatan lebih dari 6,5 Skala Richter dan pusat gempa berada pada kedalaman kurang 60 km dari dasar laut, menghasilkan perubahan dasar laut secara vertikal lebih dari 2 meter. Kejadian Tsunami yang hingga saat ini masih menjadi trauma bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor yaitu kejadian guncangan gempa bumi dengan skala 7,5 SR pada tahun 1996 yang menyebabkan berbagai bangunan setempat rata dengan tanah, dan kemudian disusul dengan gelombang pasang

(tsunami) yang diperkirakan setinggi pohon kelapa sehingga berdampak pada kurang lebih 10 kampung di Distrik Biak Utara dan Kawasan Pesisir Timur. Kondisi ini menyebabkan banyaknya korban jiwa meninggal, hilang dan luka berat cukup, dan kurang lebih sekitar 2.100 orang kehilangan tempat tinggal. Data Inarsik BNPB tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan terdapat beberapa areal di setiap distrik yang masuk dalam kategori potensi tinggi kecuali Distrik Andey dan Samofa. Tabel II.34 dan Gambar II.22 menunjukkan sebaran daerah potensi Tsunami Berdasarkan Distrik tahun 2021.

Gambar II.22 Peta Resiko Bencana Tsunami di Kabupaten Biak Numfor



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Tabel II.34 Sebaran Potensi Bencana Tsunami per Distrik

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Aimando Padaido	2,503.23	34.09	181.64	1,279.27	3,998.23
Andey	23,409.30				23,409.30
Biak Barat	19,598.76	17.95	48.53	427.28	20,092.53
Biak Kota	2,109.52	3.00	20.70	297.07	2,430.29
Biak Timur	14,828.02	10.00	55.91	492.61	15,386.54
Biak Utara	33,803.70	16.00	45.46	513.67	34,378.82
Bondifuar	6,004.57		20.25	457.26	6,482.09

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Bruyadori	6,117.31	36.11	155.53	616.03	6,924.98
Numfor Barat	9,708.10	1.88	26.07	470.97	10,207.02
Numfor Timur	5,831.50	13.88	28.20	287.63	6,161.20
Oridek	14,813.18	348.57	366.82	779.69	16,308.26
Orkeri	4,724.67	25.61	107.41	331.25	5,188.94
Padaido	827.94	18.62	56.69	549.48	1,452.73
Poiru	4,346.15	6.00	29.60	134.78	4,516.53
Samofa	7,809.77				7,809.77
Swandiwe	22,221.07		1.00	504.55	22,726.61
Warsa	13,988.84			253.68	14,242.52
Yawosi	2,411.64			149.03	2,560.67
Yendidori	20,814.49	7.19	40.78	315.32	21,177.78
Luas (ha)	215,871.72	538.90	1,184.60	7,859.58	225,400.84
Luas (%)	95.75	0.24	0.53	3.49	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.6.5 Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrem

Menurut BMKG, cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrem dapat berpotensi menimbulkan bencana. Beberapa potensi bencana alam yang dapat terjadi di tengah kondisi cuaca ekstrem, antara lain 1) hujan lebat; 2) hujan disertai angin kencang; 3) kilat, dan/atau petir; 4) angin kencang; 5) angin puting beliung; 6) hujan es; 7) jarak pandang mendatar ekstrem; 8) suhu udara ekstrem; 9) kebakaran hutan dan lahan; dan 10) siklon tropis. Data Inarisk BNPB Tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan terdapat beberapa areal di setiap distrik yang masuk dalam kategori potensi tinggi kecuali Distrik Andey.

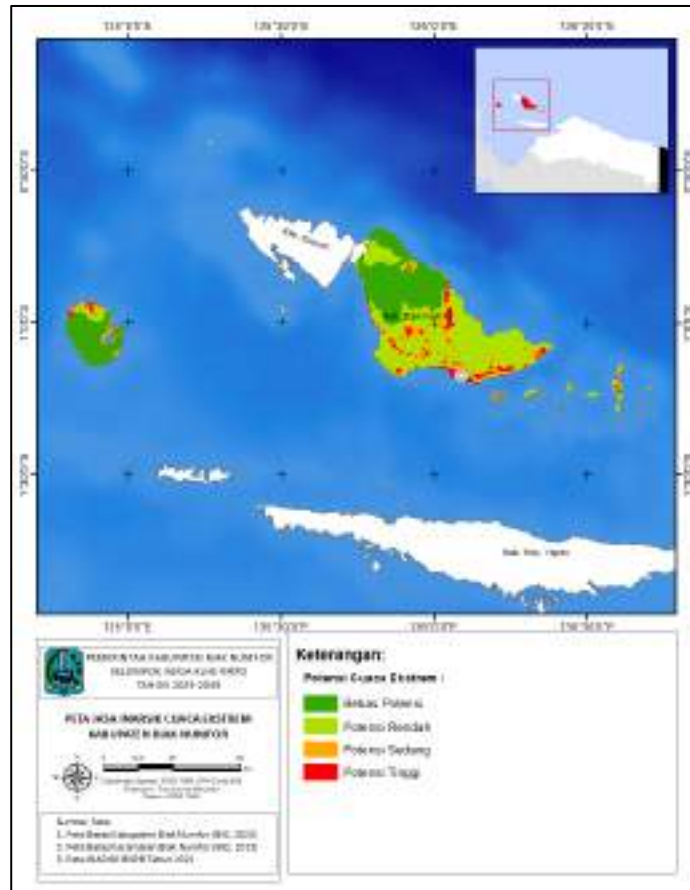
Tabel II.35 Sebaran Potensi Bencana Cuaca Ekstrem Berdasarkan Distrik di Kabupaten Biak Numfor

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Aimando Padaido	51.37	2,555.85	1,034.35	356.66	3,998.23
Andey	17,543.29	5,613.73	252.28		23,409.30
Biak Barat	2,904.04	13,946.15	2,224.10	1,018.23	20,092.53
Biak Kota	10.78	434.40	261.86	1,723.25	2,430.29
Biak Timur	21.79	11,153.97	2,398.31	1,812.47	15,386.54
Biak Utara	2,215.51	25,484.50	4,432.32	2,246.49	34,378.82
Bondifuar	4,505.42	1,971.30	2.87	2.50	6,482.09
Bruyadori	5,198.47	64.01	1,590.12	72.37	6,924.98
Numfor Barat	9,911.33	69.92	115.79	109.98	10,207.02
Numfor Timur	2,178.05	1,864.82	1,107.71	1,010.62	6,161.20
Oridek	37.22	13,492.03	1,939.51	839.50	16,308.26
Orkeri	5,011.94	3.37	171.32	2.32	5,188.94
Padaido	42.00	1,059.73	226.30	124.70	1,452.73
Poiru	2,306.57	1,585.68	565.03	59.25	4,516.53
Samofa		4,725.57	1,142.71	1,941.49	7,809.77
Swandiwe	17,500.43	4,652.62	289.38	284.18	22,726.61
Warsa	10,051.14	3,407.06	469.28	315.03	14,242.52
Yawosi	2,324.61	96.77	120.71	18.58	2,560.67

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Yendidori	25.12	14,323.47	4,693.37	2,135.82	21,177.78
Luas (ha)	81,839.10	106,504.94	23,037.32	14,073.44	225,400.84
Luas (%)	36.30	47.24	10.22	6.24	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Gambar II.23 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Biak Numfor



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.6.6 Kerentanan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan

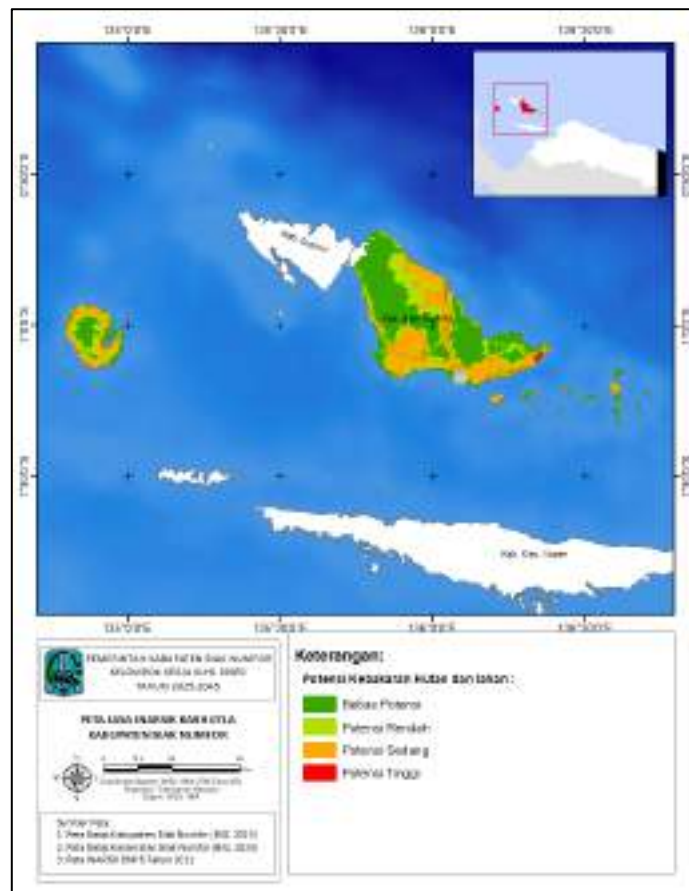
Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Cuaca ekstrem yang terjadi saat ini dengan suhu udara yang sangat panas akan menyebabkan rumput, ilalang dan pohon-pohonan menjadi kering, sehingga berpotensi untuk terjadinya kebakaran, termasuk di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi. Data Inarisk BNPB Tahun 2021 menunjukkan bahwa bahwa hampir beberapa wilayah distrik berada dalam kategori Potensi Rendah seluas kurang lebih 17,71% dan Potensi Sedang sekitar 30,78%. Selain itu terdapt juga beberapa areal di Distrik Oridek dan Yendidori yang masuk dalam kategori potensi tinggi.

Tabel II.36 Sebaran Potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Distrik

Distrik	Sebaran Potensi Bencana (ha)				Luas (ha)
	Bebas Potensi	Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
Aimando Padaido	2,913.19	50.01	1,035.03		3,998.23
Andey	10,573.08	7,498.36	5,337.86		23,409.30
Biak Barat	9,723.31	2,652.03	7,717.19		20,092.53
Biak Kota	1,835.18	302.47	292.64		2,430.29
Biak Timur	5,103.12	2,497.48	7,785.94		15,386.54
Biak Utara	22,039.56	3,564.50	8,774.75		34,378.82
Bondifuar	5,947.91	534.18			6,482.09
Bruyadori	2,918.32	1,304.60	2,702.05		6,924.98
Numfor Barat	5,062.83	2,822.88	2,321.31		10,207.02
Numfor Timur	2,072.20	1,461.87	2,627.13		6,161.20
Oridek	9,545.22	2,468.34	3,757.86	536.83	16,308.26
Orkeri	1,223.56	1,188.79	2,776.59		5,188.94
Padaido	1,224.15	178.28	50.30		1,452.73
Poiru	1,174.73	1,608.03	1,733.78		4,516.53
Samofa	2,928.07	487.92	4,393.77		7,809.77
Swandiwe	20,435.42	1,420.02	871.17		22,726.61
Warsa	5,333.91	6,107.82	2,800.80		14,242.52
Yawosi	204.03		2,356.63		2,560.67
Yendidori	5,341.45	3,775.95	12,055.44	4.93	21,177.78
Luas (ha)	115,599.26	39,923.55	69,390.24	541.76	225,400.84
Luas (%)	51.27	17.71	30.78	0.24	100.00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Gambar Il.24 Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Biak Numfor

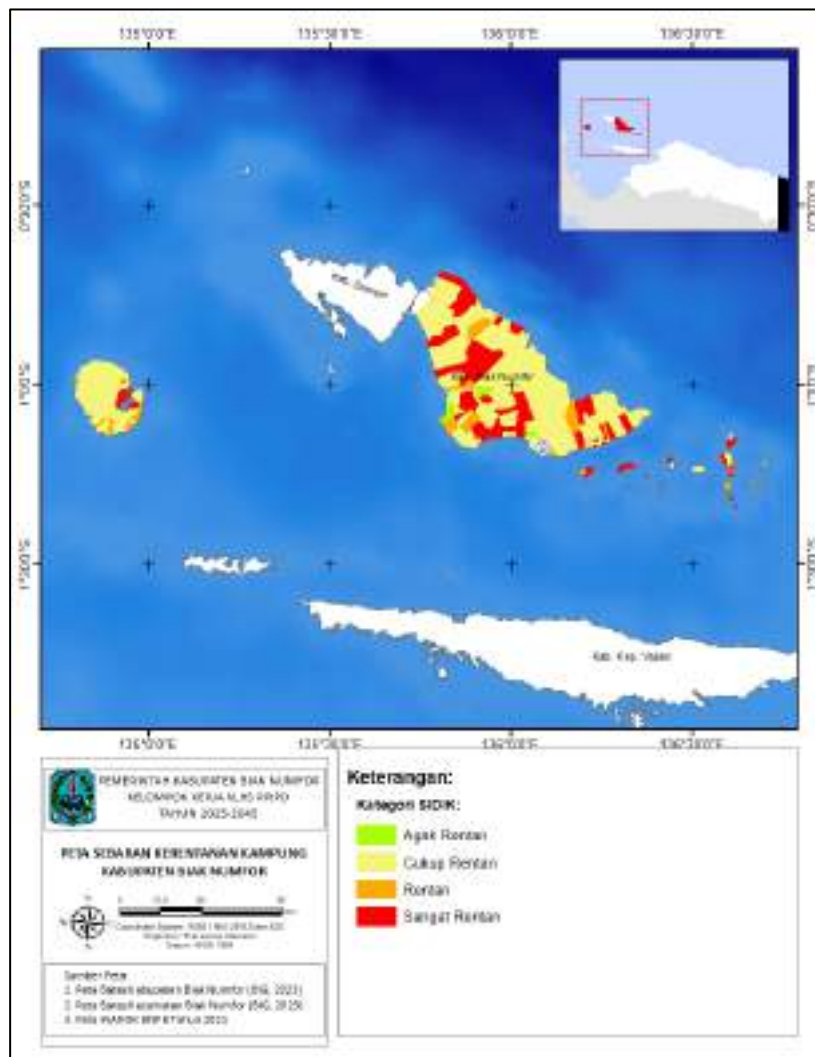


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.1.6.7 Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator- indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensi vitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia.

Gambar II.25 Sebaran Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Berdasarkan Kampung di Biak Numfor



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim. Berdasarkan Data SIDIK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, dari 264 kampung di Kabupaten Biak Numfor terdapat 1 kampung yang masuk dalam kategori agak rentan, 176 kampung masuk dalam kategori cukup rentan, 21 kampung masuk dalam kategori rentan dan 64 kampung masuk dalam kategori sangat rentan.

2.1.1.7 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2010 hingga tahun 2022 terus meningkat. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Biak Numfor tercatat sebanyak 127.779 jiwa. Jumlah penduduk terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 16,81% per tahun pada periode 2010-2018, dan 0,33% per tahun pada periode 2020-2023. Penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,33% pada tahun 2020-2023 dipengaruhi oleh kelahiran atau fertilitas dan Mobilitas penduduk. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat sebanyak 3.283 bayi lahir pada Tahun 2018. Sedangkan data migrasi penduduk baik yang keluar dan masuk kabupaten Biak Numfor serta jumlah kematian belum diketahui secara pasti jumlahnya pada tahun 2018. Namun dari pencatatan penerbitan akte kematian pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sebanyak 329 penerbitan akte kematian.

Tabel II.37 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Biak Numfor, 2008-2022

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2008	62.251	57.956	120.207
2009	63.321	58.954	122.275
2010	66.108	61.671	127.779
2011	67.108	62.981	130.089
2012	68.389	64.003	132.392
2013	69.582	65.498	135.080
2014	69.908	65.923	135.831
2015	71.906	67.265	139.171
2016	73.228	68.573	141.801
2017	74.794	69.903	144.697
2018	76.286	72.118	148.404
2019	78.101	74.300	152.401
2020	69.060	65.590	134.650
2021	69.249	65.982	135.231
2022	69.432	66.364	135.796
2023	74.977	72.426	147.403

Sumber : Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Dari Tabel II.37 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 adalah 147.403 jiwa yang terdiri dari 74.977 jiwa penduduk laki-laki dan 72.426 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022 berada pada dua distrik yakni Distrik Biak Kota sebesar 44.208 jiwa dan Distrik Samofa sebesar 34.796 jiwa. Hal ini disebabkan karena kedua distrik tersebut merupakan distrik perkotaan dimana semua pusat perkantoran, perdagangan dan perekonomian.

Tabel II.38 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Biak Numfor

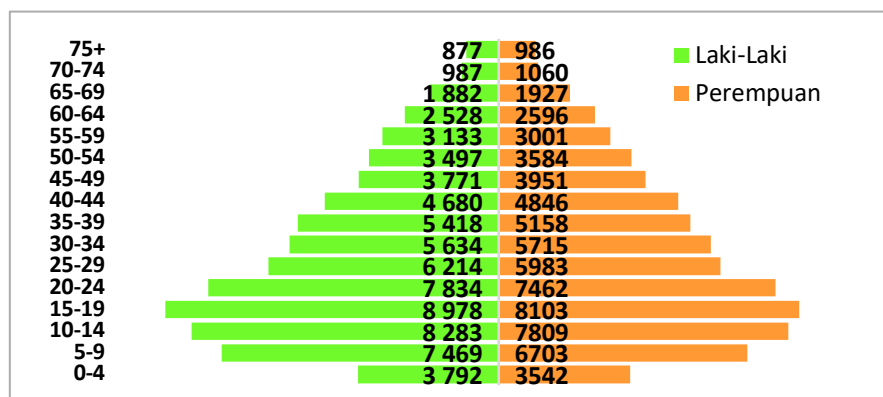
No	Distrik	Jumlah Penduduk (000)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2020	2021	2022	2023	2010-2018	2020-2023
1	Numfor Barat	1.600	1.601	1.602	2.413	17,54	3,24
2	Orkeri	1.633	1.634	1.640	1.932	18,52	-0,55
3	Numfor Timur	1.671	1.683	1.693	1.831	17,15	1,44
4	Bruyadori	2.077	2.086	2.093	2.233	19,1	1,25
5	Poiru	1.344	1.345	1.350	1.891	16,13	1,10
6	Padaido	1.963	1.964	1.972	2.343	17,88	2,95
7	Aimando Padaido	2.196	2.197	2.206	2.527	17,89	1,29
8	Biak Timur	6.898	6.899	6.926	8.384	16,75	0,90
9	Oridek	4.987	4.988	5.008	5.625	15,63	2,38
10	Biak Kota	43.724	43.976	44.208	43.230	15,71	-0,82
11	Samofa	34.414	34.613	34.796	35.503	15,53	-0,19
12	Yendidori	8.610	8.632	8.640	9.149	15,8	1,11
13	Biak Utara	3.685	3.710	3.731	7.867	16,82	1,45
14	Andey	1.766	1.767	1.768	2.812	17,67	2,95
15	Warsa	5.107	5.120	5.125	5.798	16,25	1,76
16	Yawosi	2.143	2.148	2.149	2.295	16,65	0,59
17	Bondifuar	452	453	453	555	14,95	1,36
18	Biak Barat	5.994	6.015	6.028	6.639	16,62	-0,34
19	Swandiwe	4.386	4.400	4.408	4.376	16,84	2,25
Biak Numfor		134.650	135.231	148.404	147.403	16,81	0,33

Sumber : BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024

Gambar II.26 memberikan gambaran bahwa komposisi penduduk di Biak Numfor termasuk kategori piramida penduduk muda (*expansive*) yaitu angka kelahiran lebih besar dari angka kematian sehingga menyebabkan banyaknya penduduk yang berusia muda dan produktif. Meningkatnya komposisi usia produktif 15-64 tahun mengidentifikasi adanya bonus demografi yang perlu diberdayakan dengan peningkatan kemampuan dan daya saing penduduk usia produktif, disertai peningkatan penyerapan tenaga kerja berbasis sektor dan komoditi unggulan lokal. Selain itu, diperlukan peningkatan daya saing ekonomi serta akses pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil, dari total 91.110 jiwa penduduk OAP, mayoritas bermukim di 257 kampung, 14 kelurahan, dan 19 distrik.

Dalam hal pekerjaan, OAP paling dominan bekerja sebagai petani, nelayan, serta pedagang pinang sirih dan sayur-mayur di pasar.

Gambar II.26 Piramida Penduduk Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 (jiwa)

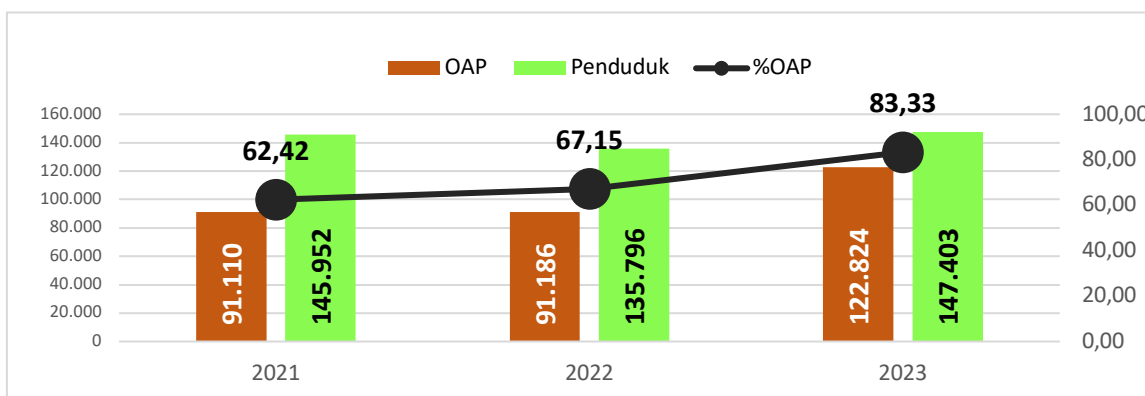


Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024 (diolah)

Komposisi Penduduk OAP

Berdasarkan data penduduk OAP dari Kabupaten Biak Numfor yang ditunjukkan pada tabel dan grafik diatas menunjukkan jumlah total penduduk mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, jumlah total penduduk adalah 91.186 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 122.824 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang cukup besar di wilayah tersebut. Persentase penduduk OAP dari total penduduk Biak juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2022, persentase penduduk OAP adalah 67,15%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83,33%. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan jumlah penduduk asli Papua dalam komposisi total penduduk di Biak Numfor.

Gambar II.27 Komposisi Penduduk OAP dan Non OAP di Kabupaten Biak Numfor



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (data diolah)

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa distrik dengan jumlah penduduk asli Papua tertinggi pada tahun 2022 adalah Biak Kota dengan 22.209 jiwa, diikuti oleh Samofa dengan 13.303 jiwa. Pada tahun 2023, Biak Kota tetap menjadi distrik dengan jumlah penduduk asli Papua tertinggi dengan 32.675 jiwa, diikuti oleh Samofa dengan 23.123 jiwa. Komposisi Penduduk OAP di Kabupaten Biak Numfor ditampilkan dalam Gambar II.27 dan Tabel II.39.

Tabel II.39 Sebaran Penduduk Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor

No	Distrik	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		OAP			Penduduk	OAP			Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Biak Kota	11.091	11.118	22.209	44.208	16.416	16.259	32.675	43.230
2	Biak Utara	2.833	2.731	5.564	3.731	3.585	3.476	7.061	7.867
3	Biak Timur	3.548	3.362	6.910	6.926	4.205	3.997	8.202	8.384
4	Numfor Barat	1.044	888	1.932	1.602	1.230	1.118	2.348	2.413
5	Numfor Timur	824	699	1.523	1.693	936	835	1.771	1.831
6	Biak Barat	3.196	2.880	6.076	6.028	3.441	3.199	6.640	6.639
7	Warsa	2.467	2.309	4.776	5.125	2.952	2.829	5.781	5.798
8	Padaido	1.030	928	1.958	1.972	1.224	1.168	2.392	2.343
9	Yendidori	3.549	3.338	6.887	8.640	4.378	4.154	8.532	9.149
10	Samofa	6.778	6.525	13.303	34.796	11.867	11.256	23.123	35.503
11	Yawosi	956	945	1.901	2.149	1.197	1.155	2.352	2.295
12	Andey	1.099	1.025	2.124	1.768	1.432	1.336	2.768	2.812
13	Swandiwe	2.009	1.810	3.819	4.408	2.337	2.165	4.502	4.376
14	Brutadori	1.035	954	1.989	2.093	1.150	1.046	2.196	2.233
15	Orkeri	943	808	1.751	1.640	1.007	903	1.910	1.932
16	Poiru	856	717	1.573	1.350	1.016	865	1.881	1.891
17	Aimando Padaido	1.171	1.092	2.263	2.206	1.374	1.227	2.610	2.527
18	Oridek	2.053	2.068	4.121	5.008	2.805	2.717	5.522	5.625
19	Bondifuar	272	235	507	453	303	264	567	555
Kab. Biak Numfor		46.754	44.432	91.186	135.796	62.855	59.969	122.824	147.403

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Analisis jumlah penduduk laki-laki dan perempuan OAP menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah laki-laki adalah 46.754 jiwa dan perempuan 44.432 jiwa. Pada tahun 2023, jumlah laki-laki meningkat menjadi 62.855 jiwa dan perempuan menjadi 59.969 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang penting untuk memastikan inklusivitas dalam kebijakan afirmasi OAP. Dengan pertumbuhan yang seimbang ini, kebijakan afirmasi dapat lebih efektif dalam mencakup kebutuhan dan potensi kedua gender, memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pertumbuhan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kelahiran, migrasi, atau perubahan dalam pencatatan data penduduk. Faktor-faktor ini berkontribusi pada perubahan demografis yang signifikan di wilayah Biak Numfor, menunjukkan dinamika populasi yang terus berkembang. Data ini penting bagi pembuat kebijakan untuk merencanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan

kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi penduduk asli, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perkembangan daerah.

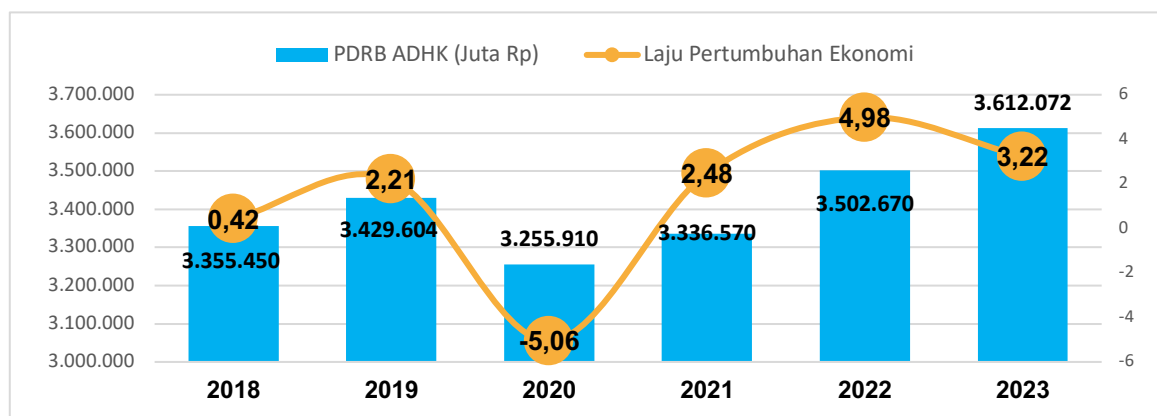
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Biak Numfor tahun 2018-2023 menunjukkan kondisi fluktuatif namun mengalami trend positif secara umum. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor periode 2018–2023, terlihat bahwa secara umum PDRB mengalami tren peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018, PDRB Kabupaten Biak Numfor tercatat sebesar 3.355.450 juta rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,42%. Tren pertumbuhan berlanjut hingga 2019 dengan kenaikan PDRB menjadi 3.429.604 juta rupiah dan laju pertumbuhan mencapai 2,21%. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi signifikan sebesar -5,06%, menyebabkan PDRB turun menjadi 3.255.910 juta rupiah. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi.

Gambar II.28 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023



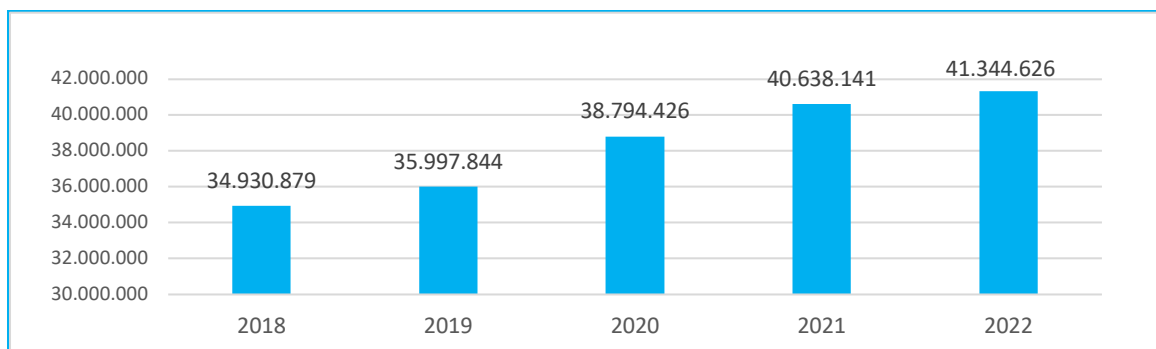
Sumber Data: BPS Papua Tahun 2010-2023, diolah

Pasca tahun 2020, ekonomi Kabupaten Biak Numfor mulai menunjukkan pemulihan dengan PDRB yang meningkat menjadi 3.336.570 juta rupiah pada 2021 dan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,48%. Pemulihan semakin kuat pada 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,98%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini, serta peningkatan PDRB menjadi 3.502.670 juta rupiah. Namun,

pada 2023 laju pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan menjadi 3,22%, meskipun PDRB tetap meningkat ke 3.612.072 juta rupiah, sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.28.

Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi Kabupaten Biak Numfor adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB Perkapita Kabupaten Biak Numfor adalah Rp.34.930.879,39 dan mengalami peningkatan menjadi Rp.41.344.626 pada tahun 2023 (lihat Gambar II.29). Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata.

Gambar II.29 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2021 (Rupiah per Jiwa per Tahun)



Sumber: BPS Biak Numfor 2023, data diolah

Peningkatan PDRB per kapita mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, atau adanya peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam perekonomian daerah. Namun, meskipun secara angka terjadi peningkatan, perlu dianalisis lebih lanjut apakah kenaikan ini telah berdampak merata bagi seluruh masyarakat atau hanya terpusat pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, serta tingkat inflasi juga menjadi faktor penting dalam menilai sejauh mana peningkatan PDRB per kapita benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor tetap perlu diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

ⁱGambar II.30 Tipologi Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber: Analisis Tipologi Klassen (2024), terhadap PDRB ADHK Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Apabila meninjau kontribusi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor dan kabupaten lainnya dalam konstelasi regional di Provinsi Papua pada tahun 2019-2023, Kabupaten Biak Numfor termasuk dalam daerah relatif tertinggal atau kuadran IV. Laju pertumbuhan ekonomi negatif (-0,80%), menunjukkan adanya kontraksi ekonomi. Kontribusi sektor ekonomi Biak Numfor terhadap total wilayah Provinsi Papua juga rendah (-3,84%), yang berarti Kabupaten Biak Numfor mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran ekonomi dibandingkan daerah lain di Papua. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada kondisi ini adalah keterbatasan infrastruktur, minimnya diversifikasi ekonomi, kurangnya investasi dan daya saing, serta kualitas SDM dan teknologi. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, investasi, dan peningkatan SDM. Biak Numfor dapat bergerak ke arah yang lebih baik dan keluar dari status sebagai daerah relatif tertinggal.

Kabupaten Biak Numfor perlu mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta kapasitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan pada sektor-sektor

tertentu perlu dikurangi dengan memperkuat sektor ekonomi yang memiliki daya tahan lebih tinggi dalam jangka panjang. Gambar II.31 menunjukkan tipologi sektor ekonomi di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2016-2023 berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Tipologi Klassen. Hasil analisis tipologi sektor ekonomi Kabupaten Biak Numfor ini dapat menjadi pertimbangan intervensi/kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Biak Numfor. Hal ini menjadi penting karena diperlukan upaya untuk mendorong pengetahuan dan keterampilan penduduk **-terutama OAP-** untuk berpartisipasi aktif dalam perkembangan sektor ekonomi tersebut. Berdasarkan analisis tipologi Klassen sektor ekonomi Kabupaten Biak Numfor, terdapat empat kuadran yang mencerminkan dinamika pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi daerah.

Gambar II.31 Tipologi Sektor Ekonomi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016-2023



Sumber: Analisis Tipologi Klassen, 2024

a. **Kuadran I (Sektor Maju dan Cepat Tumbuh)**

Sektor Pertanian dan Administrasi Pemerintahan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan administrasi pemerintahan merupakan penggerak utama ekonomi Biak Numfor. Sebagai implikasi kebijakan, pertanian

di Kabupaten Biak Numfor perlu diperkuat dengan program hilirisasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. Adapun administrasi pemerintahan sebagai sektor yang dominan perlu dioptimalkan agar dapat mendorong sektor swasta dan investasi daerah.

b. Kuadran II (Sektor Maju tetapi Tertekan)

Sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran tergolong sebagai sektor maju namun mengalami tekanan dalam pertumbuhannya. Sektor-sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, namun pertumbuhannya lebih lambat dibanding rata-rata sektor lain. Faktor penghambat bisa berasal dari regulasi yang ketat, infrastruktur yang kurang memadai, atau daya beli masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, seperti insentif bagi pelaku usaha, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, serta penguatan daya saing perdagangan dengan membuka akses pasar lebih luas bagi produk lokal.

c. Kuadran III (Sektor Berkembang tetapi Belum Dominan)

Beberapa sektor seperti jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pengadaan air dan pengelolaan sampah mengalami pertumbuhan yang tinggi, tetapi kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut jika didukung dengan kebijakan yang tepat. Peningkatan infrastruktur digital dan telekomunikasi, penguatan sektor kesehatan melalui investasi tenaga medis dan fasilitas, serta optimalisasi sektor energi dan pertambangan dengan kebijakan berkelanjutan dapat mendorong sektor-sektor ini menjadi lebih signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

d. Kuadran IV (Sektor Terbelakang dan Lambat Tumbuh)

Sektor real estate, jasa keuangan, pendidikan, industri pengolahan, dan jasa lainnya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dengan pertumbuhan yang rendah dan kontribusi yang kecil terhadap ekonomi. Sektor industri pengolahan yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah masih belum berkembang dengan optimal. Begitu pula dengan sektor jasa keuangan dan real estate yang belum mampu berperan sebagai katalis investasi daerah. Untuk itu, intervensi kebijakan harus difokuskan pada peningkatan daya saing sektor ini, seperti penyediaan akses permodalan bagi UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta

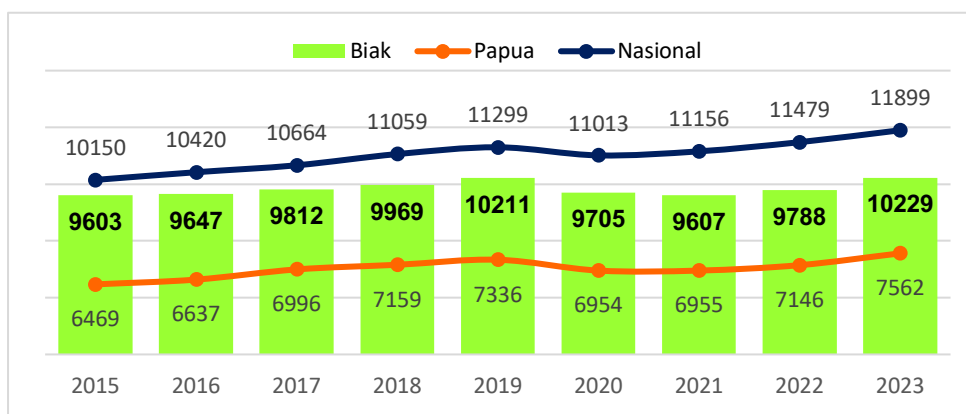
kebijakan insentif bagi investasi industri lokal. Dengan langkah-langkah strategis ini, sektor-sektor yang tertinggal dapat diperkuat agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Biak Numfor.

2.1.2.1.2 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Berdasarkan Gambar II.32 diketahui secara umum pengeluaran per kapita penduduk Biak Numfor masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional, meskipun demikian telah lebih tinggi dari angka Provinsi Papua.

Selama Tahun 2015-2019 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita di Biak Numfor dari 9603 ribu rupiah/orang/tahun pada 2015, menjadi 10.211 ribu rupiah/orang/tahun pada 2019. Pengeluaran per kapita sempat mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, namun kembali meningkat pada 2022-2023 hingga mencapai 11.899 ribu/orang/tahun. Penurunan pada tahun 2020-2021 merupakan dampak ekonomi adanya pandemi covid-19, dan kondisi berangsur membaik pada 2022-2023 sejalan dengan teratasinya pandemi dan adanya upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah.

Gambar II.32 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024)

2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023).

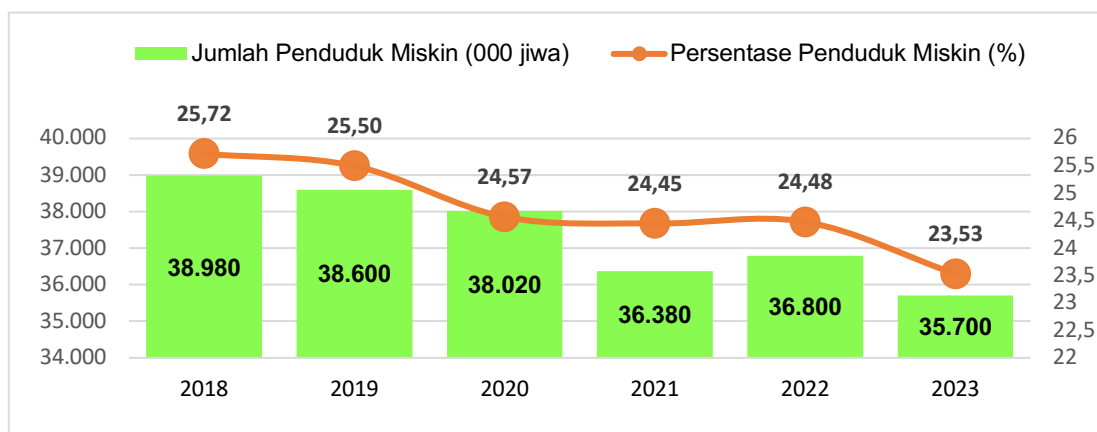
Berbagai kebijakan pembangunan daerah telah dilakukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu dengan mengalokasikan anggaran publik untuk mengurangi proporsi penduduk yang berada pada kondisi rentan di bawah garis kemiskinan atau kondisi hidup layak. Jumlah, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel II.40.

Tabel II.40 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, serta Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 (%)	Indeks Keparahannya Kemiskinan P2 (%)	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln)
2018	37,93	25,72	6,16	2,04	528.498
2019	38,60	25,50	5,15	1,48	543.971
2020	38,02	24,57	6,33	2,43	574.402
2021	36,38	24,45	6,01	2,05	606.931
2022	36,80	24,48	5,24	1,45	627.921
2023	35,70	23,53	5,60	1,83	657.182

Sumber: BPS Biak Numfor 2024, data diolah.

Gambar II.33 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, data diolah

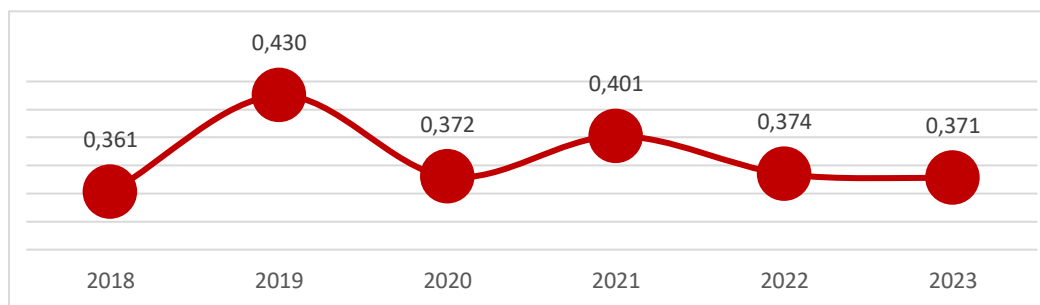
Berdasarkan Gambar II.33, diketahui bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2018 adalah 25,72%. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 25,50% dan kembali mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 menjadi

24,48%, dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 5,24% dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 1,45%. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan semakin membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat, dengan garis kemiskinan Rp.627.921 per kapita per bulan. Tahun 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 35,70 ribu jiwa atau 23,53%, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023, dengan garis kemiskinan yang mencapai Rp.657.182 per kapita per bulan.

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Rasio Gini berguna untuk melihat ketimpangan pendapatan/ pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini Kabupaten Biak Numfor tahun sepanjang tahun 2018-2022 cukup fluktuatif, yang dapat dilihat pada Gambar II.34.

Gambar II.34 Indeks Gini Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023



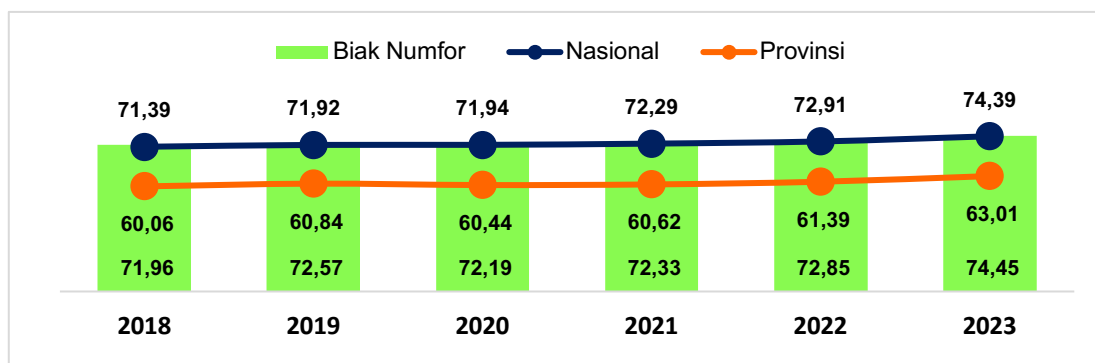
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023, data diolah

Gambar II.34 menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Biak Numfor, yang diukur dengan Gini Rasio adalah sebesar 0,372. Angka ini menurun sebesar 0,058 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,430, namun meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 0,401. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,374 yang berarti menurunnya ketimpangan dan naiknya kesetaraan, namun nilai tersebut masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Sementara pada data 2023 menjadi 0,371, yang berarti menurunnya ketimpangan dan naiknya kesetaraan.

2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor, sebagai dampak dari implementasi pembangunan. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Perkembangan IPM di Kabupaten Biak Numfor pada awal perencanaan jangka menengah pada tahun 2018 adalah 71,96. Nilai ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 72,57 namun menurun lagi pada tahun 2020. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Biak Numfor tercermin pada angka IPM tahun 2020 yang mencapai angka 72,19. Pencapaian angka IPM pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 72,33 dan 74,45 pada tahun 2023.

Gambar II.35 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2023



Sumber : Biak Numfor Dalam Angka 2024

IPM Kabupaten Biak Numfor sebesar 74,45 pada tahun 2023 termasuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia "tinggi" dengan angka pencapaian IPM antara 70,0 sampai 79,9. Kabupaten Biak Numfor menempati peringkat ke-3 Kabupaten dengan nilai IPM tertinggi di Provinsi Papua. Bila dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Papua, maka Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 sebesar 18,16% lebih tinggi di atas IPM Provinsi Papua dan 0,08% di atas IPM Nasional.

2.1.2.1.6 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Seperti yang dikatakan pada hukum Engle bahwa akan terjadi sebuah pergeseran dari proporsi pengeluaran konsumen untuk produk makanan saat pendapatan meningkat, artinya pada titik dimana pemenuhan kebutuhan makanan sudah tercukupi saat pendapatan meningkat maka peningkatan pendapatan tersebut

digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau disimpan sebagai tabungan/investasi.

Tabel II.41 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Biak Numfor 2018-2023

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan	Rupiah	466.343	554.307	562.055	465.922	465.922	493.149
	%	49,52	49,92	50,44	50,42	50,42	47,32
Bukan Makanan	Rupiah	475.394	556.072	552.327	458.146	458.146	549.090
	%	50,48	50,08	49,56	49,58	49,58	52,68
Jumlah	Rupiah	941.737	1.110.379	1.114.382	924.068	924.068	1.042.239
	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua 2024

Tabel II.41 menampilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2021. Berdasarkan Tabel II.41 diketahui adanya perubahan pola konsumsi masyarakat Biak Numfor. Hingga tahun 2022, persentase pengeluaran untuk makanan relatif stabil di kisaran 49,52-50,44%, sementara pengeluaran bukan makanan berada di sekitar 49,56% - 50,48%. Namun, pada tahun 2023 terjadi pergeseran signifikan, di mana pengeluaran untuk makanan turun menjadi 47,32%, sementara pengeluaran bukan makanan meningkat menjadi 52,68%. **Peningkatan pengeluaran bukan makanan ini terutama didorong oleh sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga**, yang mencapai 33,54% pada tahun 2023 (lihat Tabel II.42). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin banyak mengalokasikan dana untuk kebutuhan tempat tinggal, listrik, air, dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Tabel II.42 Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Biak Numfor

Komoditas		2018		2023	
		Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	%	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	%
MAKANAN		466.343	49,52	493.149	47,32
1	Padi-padian	60.299	6,40	61.109	5,86
2	Umbi-umbian	17.020	1,81	22.560	2,16
3	Ikan/udang/cumi/kerang	67.002	7,11	67.847	6,51
4	Daging	12.802	1,36	17.142	1,64
5	Telur dan susu	27.352	2,90	24.283	2,33
6	Sayur-sayuran	47.057	5,00	52.067	5,00
7	Kacang-kacangan	8.687	0,92	7.648	0,73
8	Buah-buahan	17.085	1,81	21.431	2,06
9	Minyak dan kelapa	14.130	1,50	16.999	1,63
10	Bahan minuman	15.883	1,69	15.662	1,50
11	Bumbu-bumbuan	10.435	1,11	9.012	0,86
12	Konsumsi lainnya	6.160	0,65	8.792	0,84
13	Makanan dan minuman jadi	104.743	11,12	106.637	10,23
14	Rokok	57.687	6,13	61.960	5,94
BUKAN MAKANAN		475.394	50,48	549.090	52,68

Komoditas		2018		2023	
		Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	%	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)	%
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	273.133	29,00	349.566	33,54
2	Aneka barang dan jasa	91.402	9,71	107.553	10,32
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	17.560	1,86	14.706	1,41
4	Barang tahan lama	49.083	5,21	15.990	1,53
5	Pajak, pungutan dan asuransi	28.849	3,06	56.192	5,39
6	Keperluan pesta dan upacara	15.368	1,63	5.083	0,49
JUMLAH		941.737	100,00	1.042.239	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka"

Penurunan pengeluaran untuk makanan dan meningkatnya proporsi pengeluaran perumahan dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari meningkatnya biaya tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga. Kemungkinan lainnya adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memprioritaskan aspek hunian dan kenyamanan dibandingkan belanja makanan. Dalam teori ekonomi, semakin kecil porsi pengeluaran untuk makanan, semakin tinggi daya beli masyarakat. Namun, jika peningkatan pengeluaran perumahan lebih disebabkan oleh kenaikan harga, maka ini dapat menjadi tantangan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Untuk mengatasi perubahan pola konsumsi ini, pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui beberapa kebijakan, seperti mengendalikan biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga agar tetap terjangkau, misalnya dengan mengevaluasi tarif listrik, air, serta harga sewa rumah. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan subsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dapat membantu mengurangi beban biaya perumahan. Pemerintah juga perlu menjaga ketahanan pangan dengan memastikan akses pangan yang stabil dan terjangkau, terutama bagi kelompok rentan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah perubahan pola pengeluaran ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan atau justru menambah beban ekonomi bagi masyarakat.

2.1.2.1.7 Lapangan Pekerjaan Utama

Apabila meninjau lapangan pekerjaan utama penduduk di Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa mayoritas (36,47% atau 21.121 orang) penduduk bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain lapangan usaha pertanian, terdapat penduduk Kabupaten Biak Numfor yang bekerja di lapangan usaha perdagangan (21,45% atau 12.426 orang), serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (9,86% atau 5.710 orang) (lihat Tabel II.43).

Tabel II.43 Karakteristik Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.004	9.117	21.121	36,47
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0,00
Industri Pengolahan	1.545	1.209	2.754	4,75
Pengadaan listrik dan gas	105	81	186	0,32
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0	0	0	0,00
Konstruksi	2.853	0	2.853	4,93
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	4.411	8.015	12.426	21,45
Transportasi dan Pergudangan	3.554	127	3.681	6,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	361	311	672	1,16
Informasi dan Komunikasi	0	189	189	0,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	696	285	981	1,69
Real Estate	0	0	0	0,00
Jasa Perusahaan	423	178	601	1,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	4.305	1.405	5.710	9,86
Jasa Pendidikan	1.307	2.012	3.319	5,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290	787	1.077	1,86
Lainnya	1.143	1.206	2.349	4,06
Jumlah	32.997	24.922	57.919	100,00

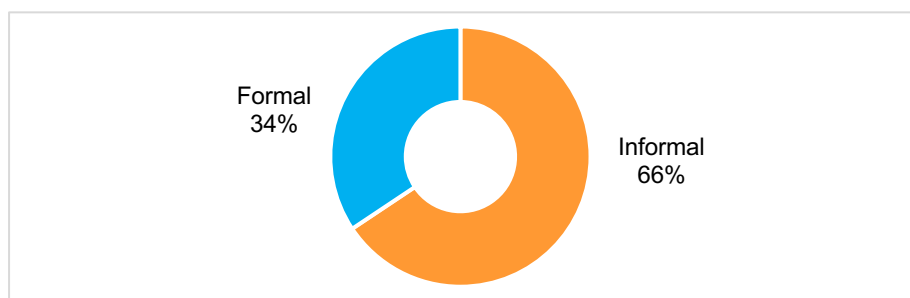
Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024 dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka"

Tabel II.44 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Berusaha sendiri	8.908	5.793	14.701	25,38
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	5.525	3.441	8.966	15,48
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	155	54	209	0,36
Buruh/karyawan/pagawai	13.130	6.560	19.690	34,00
Pekerja bebas	1.796	441	2.237	3,86
Pekerja keluarga / tidak dibayar	3.483	8.633	12.116	20,92
Jumlah	32.997	24.922	57.919	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024 dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka"

Gambar II.36 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024 dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka"

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/ karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan

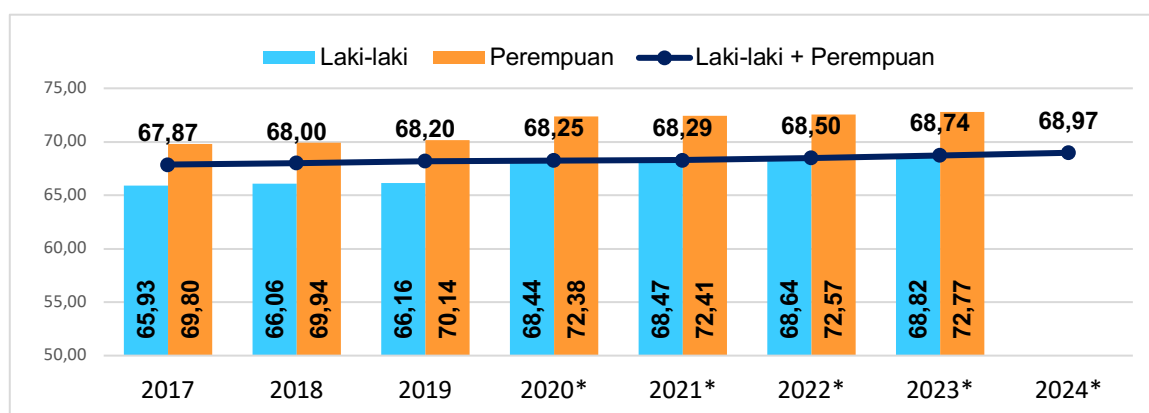
informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Biak Numfor yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 38.020 orang (66%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 19.899 orang (34%), sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.36.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1 Umur Harapan Hidup

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Dalam rangka menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif salah satu faktor pendukung adalah manusia yang sehat sesuai siklus kehidupan mulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Untuk mewujudkan manusia yang sehat, maka tujuan pembangunan kesehatan di arahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan yang berkontribusi dalam pencapaian salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat.

Gambar II.37 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Biak Numfor



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah) (*UHH tahun 2020-2024 menggunakan UHH hasil SP2020 LF)

Berdasarkan data UHH Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2017 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan secara konsisten baik untuk laki-laki, perempuan, maupun total populasi. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya akses layanan kesehatan, perbaikan gizi, serta kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Biak Numfor mencapai 68,97 tahun (lihat Gambar II.37), menunjukkan bahwa Kabupaten Biak Numfor terus mengalami perkembangan dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tren

ini berlanjut, maka di masa mendatang angka harapan hidup di wilayah ini dapat terus meningkat seiring dengan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan signifikan antara UHH laki-laki dan perempuan, di mana perempuan selalu memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Usia harapan hidup (UHH) laki-laki di Kabupaten Biak Numfor lebih rendah dibandingkan perempuan, sebagaimana terjadi di banyak wilayah lain di Indonesia dan dunia. Pada tahun 2023, UHH Laki-laki di Biak Numfor mencapai 68,82 tahun, sedangkan UHH perempuan mencapai 72,77 tahun (selisih 3,95 tahun). Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini:

- a. **Faktor Biologis:** Secara alami, perempuan memiliki keunggulan biologis dalam hal daya tahan tubuh dan proses penuaan yang lebih lambat dibandingkan laki-laki. Hormon estrogen pada perempuan diketahui memiliki efek protektif terhadap penyakit kardiovaskular, sementara laki-laki lebih rentan terhadap penyakit ini sejak usia yang lebih muda.
- b. **Pola Hidup dan Kebiasaan:** Laki-laki cenderung memiliki kebiasaan yang lebih berisiko terhadap kesehatan dibandingkan perempuan, seperti merokok, konsumsi alkohol, serta pola makan yang kurang sehat. Kebiasaan ini meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, dan kanker.
- c. **Tingkat Keterpaparan Risiko Pekerjaan:** Banyak laki-laki bekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi, seperti perikanan, pertanian, atau pekerjaan fisik berat lainnya. Pekerjaan ini meningkatkan kemungkinan cedera atau penyakit akibat lingkungan kerja yang keras.
- d. **Tingkat Kematian Akibat Kecelakaan dan Kekerasan:** Laki-laki umumnya lebih banyak terlibat dalam aktivitas yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan, baik di jalan raya maupun dalam lingkungan kerja. Selain itu, jika ada konflik sosial atau kekerasan di suatu wilayah, laki-laki lebih sering menjadi korban dibandingkan perempuan.
- e. **Akses dan Perilaku terhadap Layanan Kesehatan:** Laki-laki cenderung lebih jarang mengakses layanan kesehatan secara preventif dibandingkan perempuan. Mereka sering kali baru mencari pengobatan ketika penyakit sudah dalam kondisi yang lebih parah, sehingga peluang untuk sembuh menjadi lebih kecil.

2.1.2.2.2 Kesehatan Ibu dan Anak

Pemerintah melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir, melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pencegahan komplikasi dan keluarga berencana oleh bidan. Sebagai upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), telah dilaksanakan berbagai pelatihan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di antaranya Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang merupakan standar pertolongan persalinan dan pendampingan persalinan dukun bayi oleh tenaga kesehatan, Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) serta yang lainnya. Upaya-upaya tersebut mampu mengurangi angka kematian Ibu setiap tahunnya.

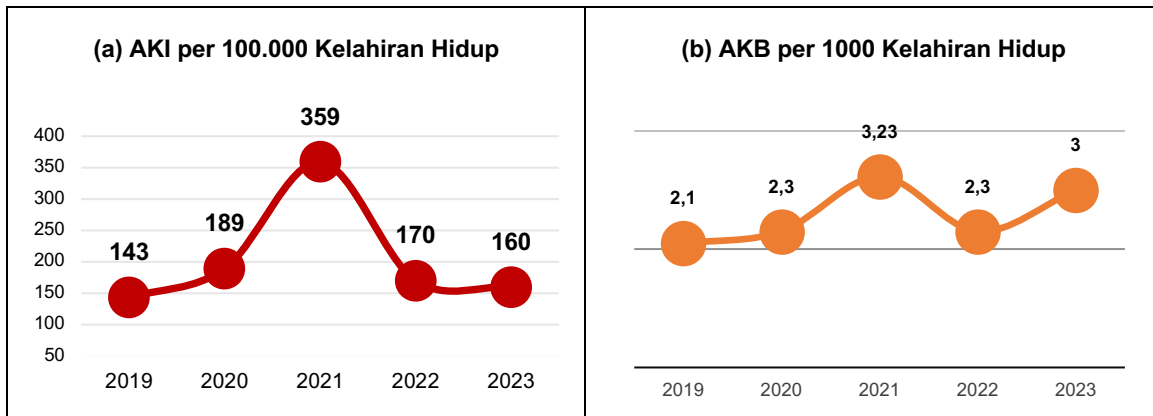
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2023 ditampilkan dalam Gambar II.38 poin (a). Berdasarkan data diketahui terdapat fluktuasi signifikan jumlah kematian ibu. Pada tahun 2019, AKI tercatat sebanyak 143 kasus, kemudian mengalami peningkatan menjadi 189 kasus pada tahun 2020. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2021, di mana angka kematian ibu mencapai 359 kasus, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah puncaknya di tahun 2021, AKI mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 170 kasus dan kembali turun sedikit menjadi 160 kasus pada tahun 2023.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 ditampilkan dalam Gambar II.38 poin (b). Berdasarkan data diketahui terdapat fluktuasi tren kematian bayi. Pada tahun 2019, AKB tercatat sebesar 2,1, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,3 pada tahun 2020. AKB tertinggi terjadi pada tahun 2021 B mencapai 3,23, sebelum kembali menurun ke angka 2,3 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, AKB kembali meningkat menjadi 3,0.

Peningkatan AKI dan AKB yang signifikan pada tahun 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi Covid-19 yang menghambat akses pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan pascapersalinan. Selama pandemi, banyak fasilitas kesehatan mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga medis, ketersediaan alat kesehatan maupun pelayanan optimal bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Faktor gizi, infeksi, serta keterlambatan penanganan komplikasi pada bayi juga dapat berkontribusi

terhadap peningkatan AKB. Selain itu, mobilitas masyarakat yang terbatas dapat memperlambat akses ibu hamil ke layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Gambar II.38 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Biak Numfor



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor 2023, diolah

Meskipun AKI dan AKB Kabupaten Biak Numfor menurun setelah 2021, namun angka pada tahun 2022 dan 2023 masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Biak Numfor. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan tentang kehamilan sehat, serta peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani komplikasi persalinan, penguatan layanan kesehatan neonatal, peningkatan cakupan imunisasi, edukasi gizi bagi ibu hamil, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani risiko kesehatan pada bayi baru lahir. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan angka kematian ibu dan bayi dapat terus menurun di masa mendatang.

2.1.2.2.3 Angka Kesakitan

Tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor secara umum dapat ditinjau dari indikator keluhan sakit dilaporkan di layanan kesehatan/angka kesakitan (morbiditas). Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Semakin banyak penduduk yang

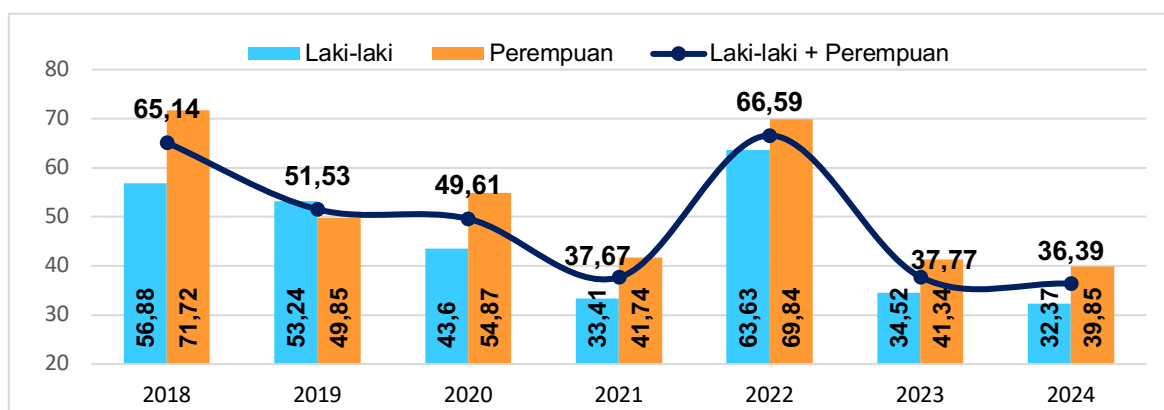
mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Tabel II.45 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan (Morbiditas) di Kabupaten Biak Numfor

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir	Laki-laki	15,67	11,50	10,55	10,57	12,08	15,79	16,83
	Perempuan	20,55	12,23	12,87	11,35	11,36	14,67	20,58
	Laki-laki + Perempuan	18,06	11,86	11,67	10,96	11,72	15,23	18,66
Angka Kesakitan (morbiditas)	Laki-laki	8,88	6,21	5,99	7,16	6,69	8,28	7,54
	Perempuan	12,96	6,22	7,77	8,40	5,81	8,27	10,91
	Laki-laki + Perempuan	10,88	6,22	6,85	7,77	6,26	8,27	9,18

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Gambar II.39 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir (%) di Kabupaten Biak Numfor



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2023 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.45 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan angka kesakitan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2024. Berdasarkan Tabel II.45 diketahui persentase penduduk Biak Numfor yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dalam kondisi yang fluktuatif. Meskipun demikian, pada tahun 2018 dan 2024 terdapat persentase penduduk mempunyai keluhan kesehatan yang relatif tinggi, yaitu 18,06% pada tahun 2018 dan 18,66% pada tahun 2024. Berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa persentase penduduk perempuan yang memiliki keluhan kesehatan pada tahun 2024 sebesar 20,58% dan lebih tinggi dari laki-laki dengan persentase 16,83%. Begitupula dengan angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki pada tahun 2024.

Tabel II.46 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Tetapi Tidak Berobat Jalan Berdasarkan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Biak Numfor

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak Punya Biaya Berobat	1,26	0	0,67	0	0	0	0
2	Tidak Ada Biaya Transportasi	0	7,63	1,06	0,68	0	1,17	0
3	Tidak Ada Sarana	0	0,33	0	0,80	0	1,03	0
4	Waktu Tunggu	0	0	0	0	0	0	0
5	Mengobati Sendiri	60,53	29,57	33,17	58,15	79,06	69,04	66,05
6	Tidak Ada yang Mendampingi	0	1,64	0,19	0	0	0,88	0
7	Merasa Tidak Perlu	32,11	45,09	59,68	22,61	13,86	26,31	27,65
8	Lainnya	6,09	15,74	5,23	17,76	0	1,57	0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Perilaku atau upaya kesehatan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu yang menginginkan dirinya untuk menjadi sehat, dalam upaya pencegahan penyakit atau ketika terdeteksi menderita suatu penyakit. Perilaku kesehatan tersebut dapat dibedakan menjadi perilaku yang bersifat preventif dan perilaku yang dilakukan ketika sakit/ kuratif. Dalam hal ini, upaya kesehatan kuratif dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu mengobati sendiri, rawat jalan dan rawat inap. Gambar II.39 menunjukkan persentase penduduk Kabupaten Biak Numfor yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan. Berdasarkan Gambar II.39 diketahui terdapat penurunan persentase penduduk di Kabupaten Biak Numfor yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dari 65,14% pada tahun 2018 menjadi 36,39% pada tahun 2024.

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi penurunan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan adalah persepsi masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Berdasarkan Tabel II.46 diketahui bahwa pada tahun 2024 mayoritas penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor namun tidak berobat jalan beralasan karena memilih untuk mengobati sendiri (66,05%), dan merasa tidak perlu (27,65%). Hal ini, dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, untuk dapat merangkul masyarakat dan memberikan pemahaman secara berkesinambungan sehingga adanya kesadaran masyarakat untuk dapat memeriksa keluhan sakit kepada pusat layanan kesehatan di Biak Numfor.

2.1.2.2.4 Pengendalian Penyakit

Kabupaten Biak Numfor telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengendalian beberapa penyakit menular pada beberapa tahun terakhir, terutama dalam penurunan kasus malaria dan diare. Berdasarkan Tabel II.47 pada tahun 2017, tercatat 21.676 kasus malaria di Kabupaten Biak Numfor, dan terjadi penurunan drastis menjadi 1.361 kasus pada pengendalian malaria di Kabupaten

Biak Numfor, terutama dengan adanya: (1) peningkatan distribusi kelambu berinsektisida; (2) pengobatan yang lebih cepat dan efektif bagi penderita malaria; serta (3) kampanye edukasi masyarakat tentang pencegahan malaria. Selain itu, jumlah kasus diare di Kabupaten Biak Numfor pun mengalami penurunan signifikan dari 3.097 kasus pada tahun 2017 menjadi 1.132 kasus pada 2022. Hal ini dapat berkaitan dengan: (1) peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi; (2) program edukasi tentang kebersihan dan pola makan sehat; serta (3) peningkatan pelayanan kesehatan, terutama dalam deteksi dan penanganan dini kasus diare.

Tabel II.47 Jumlah Kasus Penyakit Berdasarkan Jenis Penyakit di Kabupaten Biak Numfor

No	Penyakit	2017	2021	2022
1	Malaria (Suspek)	21.676	1.361	1.361
2	TB Paru	205	460	460
3	Pneumonia	1.616	310	310
4	Kusta	171	140	28
5	Diare	3.097	797	1.132
6	DBD Dengue	51	1	48
7	AIDS			
	a. Kasus baru	n.a	n.a	85
	b. Kasus kumulatif	n.a	6.296	1.516
8	IMS (Infeksi Menular Seksual)	n.a	n.a	28

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021, 2022, 2023 dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka"

Meskipun pengendalian penyakit malaria dan diare di Kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan signifikan, namun pengendalian penyakit menular di Kabupaten Biak Numfor masih membutuhkan perhatian dan upaya pengendalian yang lebih intensif. Pada tahun 2022 tercatat 310 kasus pneumonia, 1361 kasus malaria, 460 kasus TB paru, 1132 kasus diare, 48 kasus DBD dengue, 1516 kasus AIDS dan 28 kasus IMS (infeksi menular seksual). Dalam hal ini, diperlukan pendekatan berkelanjutan melalui peningkatan layanan kesehatan, edukasi masyarakat, serta penguatan fasilitas kesehatan agar pengendalian penyakit ini dapat terus ditingkatkan. Langkah pengendalian penyakit yang perlu diperkuat antara lain: (1) Meningkatkan cakupan imunisasi, terutama vaksin pneumokokus (PCV); (2) edukasi mengenai pentingnya lingkungan bersih dan bebas polusi dalam rumah tangga; (3) penyuluhan mengenai pencegahan HIV/AIDS dan IMS, terutama pada kelompok berisiko tinggi; (4) meningkatkan akses ke layanan tes dan pengobatan antiretroviral (ARV); serta (5) mendorong praktik hubungan seksual yang aman dan peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko IMS.

2.1.2.2.5 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat khususnya kelompok yang menjadi target utama

layanan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor. Tersedianya fasilitas yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan kesehatan. Distribusi penyebaran fasilitas kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan Tabel II.48 diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 1 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Khusus, 6 puskesmas rawat inap, 15 puskesmas non-rawat inap, 2 klinik pratama dan 296 posyandu di Kabupaten Biak Numfor. Mempertimbangkan luas wilayah dan kondisi geografis yang menantang, jumlah penduduk yang besar dan akses wilayah yang sulit di beberapa wilayah, maka diperlukan percepatan peningkatan layanan kesehatan diantaranya:

- a. penambahan puskesmas dan apotek terutama di kampung yang jauh dan terpencil dari pusat kabupaten Biak Numfor;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana rumah sakit, maupun penambahan jumlah rumah sakit;
- c. pelatihan kader posyandu yang lebih insentif serta ketersediaan alat kesehatan;
- d. peningkatan infrastruktur, transportasi dan logistik kesehatan yang memadai menjangkau seluruh kampung; serta
- e. penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang berkualitas dan memadai di seluruh fasilitas kesehatan.

Tabel II.48 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Biak Numfor

No	Fasilitas Kesehatan	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum	1	1
2	Rumah Sakit Khusus	2	2
3	Puskesmas Rawat Inap	6	6
4	Puskesmas Non Rawat Inap	15	15
5	Klinik Pratama	6	2
6	Posyadu	297	296

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, 2023 (dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka 2023)

2.1.2.2.6 Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kunci dalam pembangunan kesehatan. Peran SDM kesehatan antara lain meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebut bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Tabel II.49 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021-2023

Indikator		Standar*	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (orang)			135.276	135.796	147.403
Jumlah Tenaga Kesehatan					
1	Dokter		52	56	19
2	Dokter Gigi		7	10	5
3	Perawat		609	708	244
4	Bidan		323	396	193
5	Tenaga Kefarmasian		51	69	17
6	Ahli Gizi		42	41	23
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat		59	69	23
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan		31	31	16
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik		45	60	26
Rasio Tenaga Kesehatan : Penduduk					
1	Dokter	1 : 2500	1 : 2293	1 : 2058	1 : 6142
2	Perawat	1 : 855	1 : 222	1 : 192	1 : 604
3	Bidan	1 : 1000	1 : 419	1 : 343	1 : 764

*berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2022-2024 (dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka")

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, diketahui standar rasio tenaga dokter per penduduk (1:2500), rasio bidan terhadap penduduk (1:1000), serta rasio perawat terhadap penduduk (1:855). Tabel II.49 menunjukkan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021-2023. Berdasarkan Tabel II.49 dapat diketahui bahwa meskipun pada tahun 2021-2022 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Biak Numfor telah sesuai standar pengadaan tenaga kesehatan, namun pada tahun 2023 tenaga kesehatan di Kabupaten Biak Numfor sangat jauh di bawah standar karena adanya pengurangan jumlah tenaga kesehatan secara signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder kesehatan mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten Biak Numfor terhadap pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan dapat diakses seluruh wilayah.

2.1.2.2.7 Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pada tahun 2024 sebagian besar penduduk Kabupaten Biak Numfor telah memiliki jaminan kesehatan, sedangkan yang belum memiliki jaminan kesehatan sebesar 14,65%. Jaminan kesehatan yang

paling banyak dimiliki penduduk Biak Numfor adalah BPJS PBI/Non PBI sebesar 75,07% pada tahun 2024, sedangkan di posisi kedua adalah Jamkesda sebesar 9,44% (lihat Tabel II.50).

Tabel II.50 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Biak Numfor

No	Jaminan Kesehatan	2022	2023	2024
1	BPJS PBI/Non PBI	67,07	79,35	75,07
2	Jamkesda	10,43	14,02	9,44
3	Asuransi Swasta	0,67	0	0
4	Asuransi Perusahaan	0,11	0	0,85
5	Tidak Punya	21,82	11,28	14,65

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi"

Tabel II.51 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Kabupaten Biak Numfor

No	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-laki	72,12	70,80	65,75	71,03	100,00	100,00
2	Perempuan	75,79	77,00	72,47	84,95	87,57	98,77
Laki-laki + Perempuan		73,91	74,45	69,56	81,48	90,81	99,49

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Upaya peningkatan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi layanan. Berdasarkan Tabel II.51 diketahui bahwa hampir seluruh (99,49%) penduduk Kabupaten Biak Numfor yang memiliki jaminan kesehatan melakukan berobat jalan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tingginya kebutuhan masyarakat serta mulai adanya kesadaran masyarakat dalam penggunaan jaminan kesehatan untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga Pemerintah Daerah perlu memastikan peningkatan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor.

2.1.2.2.8 Gizi

Pemenuhan gizi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nutrisi yang cukup tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga kecerdasan, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan anak jangka panjang. Kekurangan gizi dapat menyebabkan stunting (pertumbuhan terhambat) yang berdampak pada kesehatan anak seumur hidup. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (sejak kehamilan hingga usia 2 tahun).

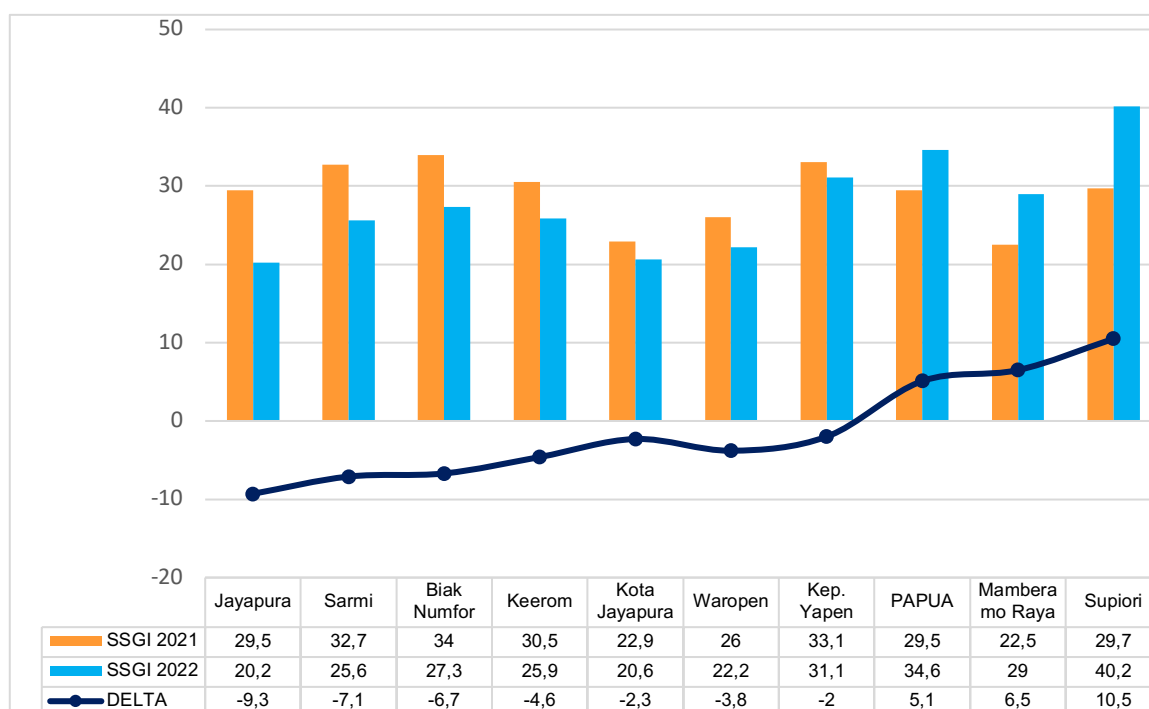
Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 HPK. Anak

tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan, pada masa awal setelah bayi lahir, namun kondisi stunting baru tampak setelah bayi berumur 2 tahun. Kondisi stunting bisa membuat anak berisiko lebih tinggi menderita penyakit tidak menular saat dewasa seperti diabetes melitus, kanker, jantung, hipertensi, dan lain-lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya stunting adalah:

- a. pemenuhan kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 HPK
- b. pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil
- c. konsumsi protein pada menu harian untuk balita usia di atas 6 bulan dengan kadar protein sesuai dengan usianya
- d. menjaga kebersihan sanitasi dan memenuhi kebutuhan air bersih
- e. rutin membawa balita ke Posyandu minimal satu bulan sekali.

Berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 dan 2022, terlihat adanya penurunan dari 34% menjadi 27,3%, atau mengalami penurunan sebesar 6,7 poin persentase. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Biak Numfor, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan intervensi gizi, program kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi.

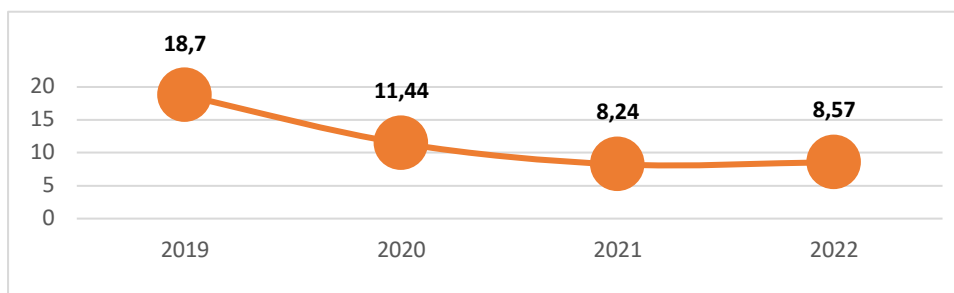
Gambar II.40 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021 dan 2022 (%)



Sumber: Data Prevalensi Stunting SSGI Tahun 2021 dan 2022

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Papua, Biak Numfor termasuk dalam kelompok daerah yang mengalami penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan, meskipun tidak sebesar Jayapura (-9,3) atau Sarmi (-7,1). Sementara itu, terdapat beberapa daerah yang justru mengalami peningkatan prevalensi stunting, seperti Mamberamo (+6,5) dan Supiori (+10,5), yang menunjukkan adanya tantangan dalam upaya penurunan stunting di Biak Numfor. Secara keseluruhan, tren penurunan stunting di Biak Numfor merupakan indikasi positif yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat terus memperkuat program penanganan stunting, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita, edukasi gizi bagi ibu hamil, serta peningkatan layanan kesehatan di tingkat desa.

Gambar II.41 Cakupan Prevalensi Stunting Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2022



Sumber : Data E-PPBGM, 2023

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten, prevalensi Stunting Kabupaten Biak Numfor sudah di bawah 10% ditinjau berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (E-PPBGM), seperti laporan Dinas Kesehatan di Gambar II.41. Berdasarkan Gambar II.41 angka prevalensi stunting Kabupaten Biak Numfor sudah di bawah target nasional pada 2024 yaitu sebesar 14%.

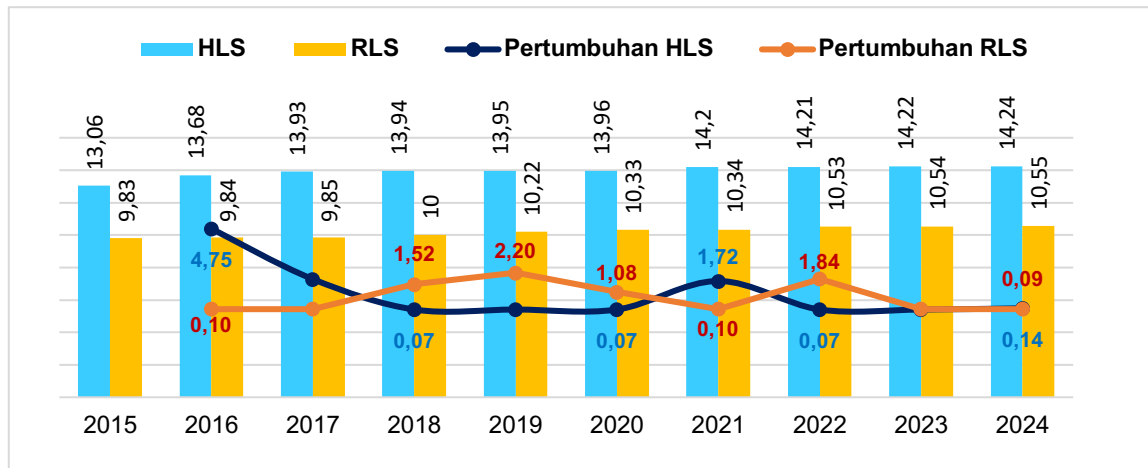
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menyusun dimensi pengetahuan. RLS mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh individu yang berusia 25 tahun ke atas. RLS menjadi indikator untuk mengukur kualitas pendudukan yang dimiliki oleh penduduk di suatu daerah. Sementara itu, HLS merupakan harapan lamanya tahun pendidikan yang akan dijalani oleh seorang anak berusia 7 tahun di masa yang akan datang. HLS memberikan gambaran tentang perkembangan sistem pendidikan di berbagai

tingkatan, yang diukur melalui jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan bisa diselesaikan oleh anak-anak di Biak Numfor.

Gambar II.42 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Biak Numfor (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

Rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024 mencapai 10,55 tahun. Angka ini berarti bahwa rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kabupaten Biak Numfor menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) kelas XI. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan sebesar 0,72 tahun atau sebesar 7,32% (RLS Biak Numfor tahun 2015 sebesar 9,83 tahun), sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.42.

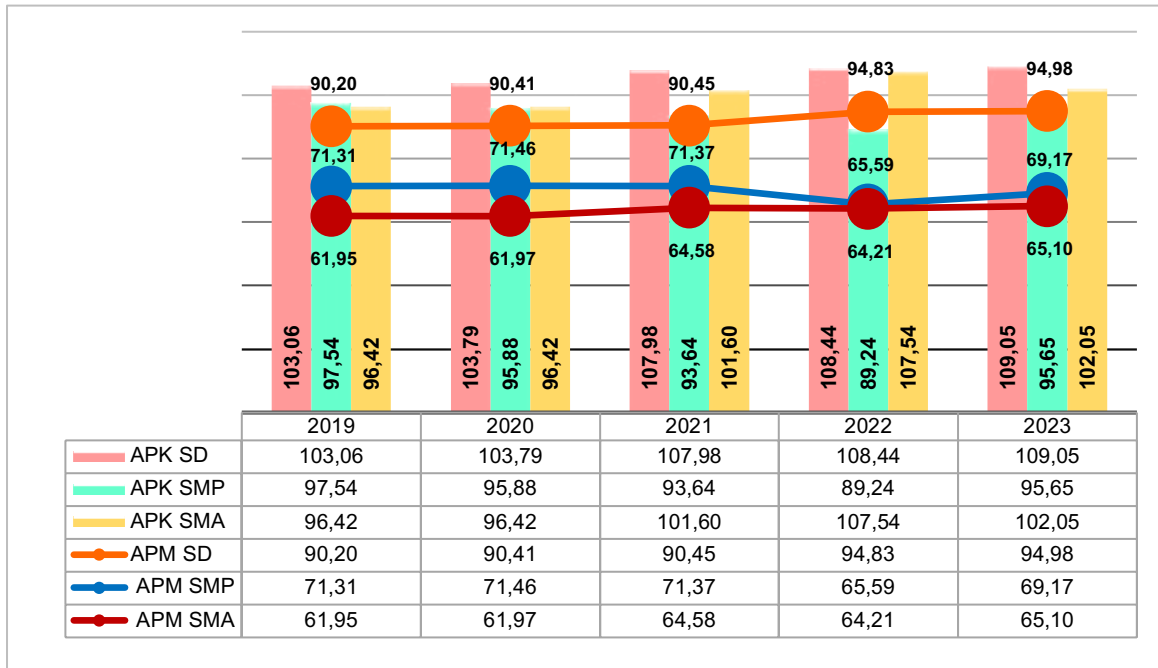
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024 mencapai 14,24 tahun. Hal ini berarti anak berusia 7 tahun diharapkan dapat bersekolah selama 14,24 tahun atau sampai dengan jenjang perguruan tinggi tahun kedua. HLS Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 1,18 tahun atau 9,03% (HLS Biak Numfor tahun 2015 sebesar 13,06 tahun).

2.1.2.3.2 Partisipasi Sekolah

Pendidikan memainkan peran kunci dalam pembangunan suatu wilayah. Peningkatan urusan pemerintahan yang tepat dalam sektor pendidikan, wilayah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, berfokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu fondasi utama keberhasilan pembangunan wilayah. Untuk mengetahui seberapa banyak

penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, diantaranya melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Gambar II.43 APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Biak Numfor mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Pada umumnya semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai APK memiliki kecenderungan semakin mengecil. Berdasarkan Gambar II.43 diketahui pada tahun 2018 nilai APK SD sebesar 95,15%, APK SMP sebesar 84,87%, dan APK SMA/SMK sebesar 92,23%. Nilai ini mengalami tren peningkatan yang positif setiap

tahunnya, sehingga pada tahun 2023 nilai APK SD sebesar 109,05%, APK SMP sebesar 95,65%, dan APK SMA/SMK sebesar 102,05%.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Perbandingan APM dan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar II.43. Berdasarkan Gambar II.43 diketahui bahwa pada tahun 2023 APM SD sebesar 94,98%, APM SMP sebesar 69,17% dan APM SMA/SMK sebesar 65,10%. Terdapat ketimpangan nilai APK yang jauh lebih tinggi terhadap nilai APM di Kabupaten Biak Numfor yang mengindikasikan bahwa cukup banyak anak usia sekolah yang bersekolah di luar usia sekolah. Dalam hal ini, makin banyak anak usia sekolah di Kabupaten Biak Numfor yang bersekolah belum sesuai dengan arahan usia resmi di jenjang pendidikan tertentu, terutama untuk menempuh pendidikan SMP dan SMA.

2.1.2.3.3 Pengentasan Putus Sekolah

Fenomena anak putus sekolah dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama dalam aspek daya saing sumber daya manusia. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah cenderung memiliki keterbatasan dalam keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, sehingga dalam jangka panjang dapat berdampak pada: (1) rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal, sehingga daerah sulit bersaing dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi berbasis pengetahuan; serta (2) tingginya tingkat pengangguran dan pekerjaan informal, karena individu yang tidak memiliki pendidikan cukup sulit bersaing dalam pasar kerja formal. Di sisi lain, Kabupaten Biak Numfor masih menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi, sehingga keterbatasan SDM dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperpanjang siklus kemiskinan dalam jangka panjang. Upaya pengurangan angka putus sekolah harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan daerah agar Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka panjang.

Tabel II.52 Peserta Didik Putus Sekolah di Kabupaten Biak Numfor

Tingkat Pendidikan	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023	2023/2024
SD	203	139	98	122	115
SMP	69	154	33	19	59
SMA	17	55	3	10	24

Tingkat Pendidikan	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023	2023/2024
SMK	53	99	7	2	7
SLB	n.a	n.a	0	2	0
Total	342	447	141	155	205

Sumber: Kemendikbud, 2019 dan 2024 dalam dokumen “Neraca Pendidikan Daerah”

Tabel II.52 menunjukkan jumlah peserta didik putus sekolah di Kabupaten Biak Numfor pada tahun ajaran 2018/2019 hingga 2023/2024. Berdasarkan Tabel II.52 diketahui terdapat penurunan peserta didik putus sekolah di tingkat SD dari 203 anak pada tahun ajaran 2018/2019 menjadi 115 anak pada tahun 2023/2024 (penurunan 43,35%). Peserta didik putus sekolah di tingkat SMP mengalami penurunan dari 154 anak pada tahun ajaran 2019/2020 menjadi 59 anak pada tahun 2023/2024 (penurunan 61,69%). Peserta didik putus sekolah di tingkat SMA mengalami penurunan dari 55 anak pada tahun ajaran 2019/2020 menjadi 24 anak pada tahun 2023/2024 (penurunan 56,36%). Selain itu terjadi penurunan peserta didik putus sekolah di tingkat SMK dari 99 anak pada tahun ajaran 2019/2020 menjadi 7 anak pada tahun 2023/2024 (penurunan 92,93%). Penurunan jumlah anak putus sekolah menunjukkan berkurangnya tantangan dalam mempertahankan anak-anak bersekolah di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi dalam peningkatan jumlah anak putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK diantaranya:

- Aksesibilitas pendidikan: Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah dengan kondisi geografis sulit, di mana akses ke sekolah masih terbatas.
- Faktor ekonomi dan sosial: banyak keluarga yang masih mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak-anak cenderung membantu keluarga dalam mencari nafkah daripada melanjutkan sekolah.
- Ketersediaan tenaga pendidik dan sarana pendidikan: Kekurangan guru dan fasilitas pendidikan yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan angka putus sekolah, terutama di tingkat dasar dan menengah pertama.

2.1.2.3.4 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat khususnya kelompok umur sekolah yang menjadi target utama layanan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Sekolah merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang akan menunjang kualitas dan mutu masyarakat. Tersedianya sekolah yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas utama. Distribusi penyebaran sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 70 Taman Kanak-kanak (TK), 166 Sekolah Dasar (SD), 55 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 19 Sekolah Menengah Atas (SMA), 8 Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) dan 3 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.53.

Error! Reference source not found. menunjukkan data jumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor menurut distrik tahun 2024 menurut Kemendikbud, 2024. Berdasarkan data jumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, distribusi sekolah di setiap distrik menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Distrik Samofa memiliki jumlah sekolah terbanyak di semua jenjang dengan total 53 sekolah, menjadikannya pusat pendidikan utama di Biak Numfor. Selain itu, distrik Biak Kota dan Biak Barat juga memiliki jumlah sekolah yang relatif tinggi dibandingkan distrik lainnya. Sebaliknya, distrik-distrik perdesaan seperti Poiru, Orkeri, dan Ainandao Padaido memiliki jumlah sekolah yang sangat terbatas, bahkan beberapa hanya memiliki sekolah dasar atau menengah pertama saja.

Tabel II.53 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Taman Kanak-kanak (TK)	28	46	51	64	70
2	Sekolah Dasar (SD)	165	165	166	166	166
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	53	53	54	54	55
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	19	19	19	19	19
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	7	7	7	7	8
6	Sekolah Luar Biasa (SLB)	3	3	3	3	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2020-2024 dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka

Ketersediaan sekolah menengah atas dan kejuruan juga masih sangat terbatas. Dari total 20 SMA dan 8 SMK yang ada, sebagian besar terkonsentrasi di distrik perkotaan seperti Biak Kota dan Samofa. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan menengah bagi masyarakat di distrik terpencil masih sangat terbatas. Selain itu, keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) juga masih minim, dengan hanya tiga sekolah yang semuanya berada di wilayah perkotaan, sehingga anak berkebutuhan khusus di daerah lain menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, distribusi sekolah di Kabupaten Biak Numfor masih belum merata, dengan konsentrasi sekolah yang lebih banyak di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, diperlukan kebijakan yang mendorong pembangunan sekolah di distrik-distrik terpencil, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan. Selain itu, perlu ada upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah perdesaan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa harus berpindah ke kota.

Tabel II.54 Jumlah Sekolah di Kabupaten Biak Numfor Menurut Distrik Tahun 2024

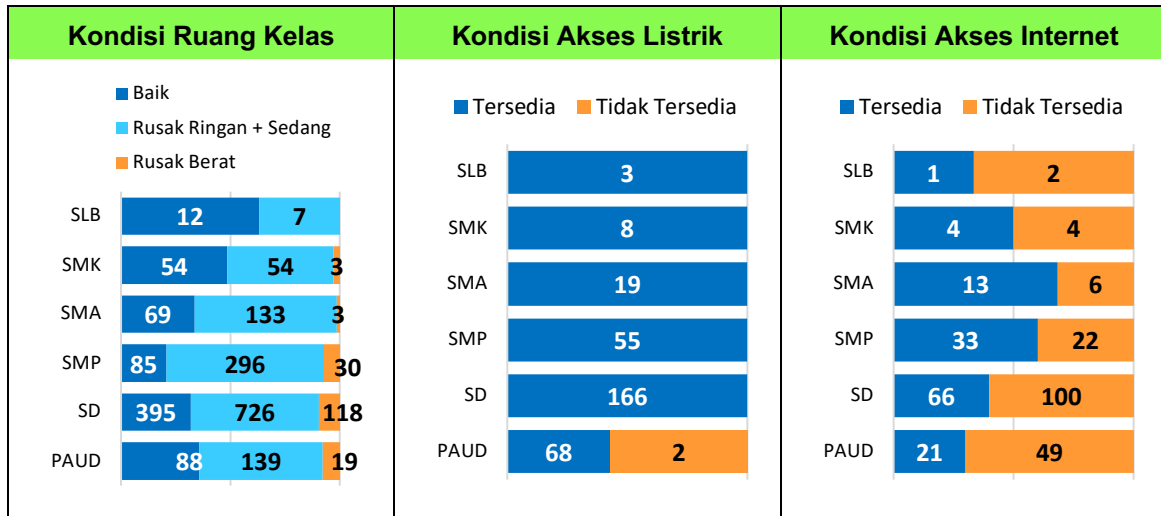
Distrik		TK			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
1	Biak Kota	0	8	8	9	15	24	5	3	8	3	1	4	0	2	2	1	0	1
2	Biak Utara	0	1	1	9	3	12	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Biak Timur	1	0	1	7	5	12	4	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	Numfor Barat	0	0	0	1	3	4	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Numfor Timur	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Biak Barat	0	0	0	7	4	11	3	1	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	Warsa	0	0	0	4	3	7	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Padaido	0	1	1	2	3	5	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Yendidori	0	0	0	8	6	14	4	0	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0
10	Samofa	1	8	9	10	13	23	3	8	11	0	5	5	1	2	3	0	2	2
11	Yawosi	0	0	0	2	2	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Andey	0	0	0	4	2	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Swandiwe	0	0	0	4	5	9	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	Bruyandori	0	1	1	1	4	5	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15	Orkeri	0	0	0	2	4	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Poiru	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
17	Ainando Padaido	0	0	0	1	6	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Oridek	0	0	0	4	6	10	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
19	Bondifuar	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biak Numfor		2	19	21	79	88	167	43	13	56	13	7	20	4	4	8	1	2	3

Sumber: Kemendikbud, 2024 dalam <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/2/250200> (diakses pada Oktober 2024)

(keterangan: N = negeri ; S = swasta)

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur sekolah, termasuk kondisi ruang kelas, akses listrik, dan akses internet. Ketiga faktor ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta mendukung akses terhadap sumber pembelajaran modern. Berdasarkan Gambar II.44 diketahui bahwa masih terdapat sekolah di Kabupaten Biak Numfor yang memiliki ruang kelas tidak layak akibat keterbatasan pembangunan dan pemeliharaan bangunan. Kondisi ini meliputi: (1) bangunan yang rusak atau tidak memadai (atap bocor, dinding rapuh, lantai tanah); (2) kekurangan ruang kelas, sehingga satu kelas diisi melebihi kapasitas ideal; serta (3) minimnya fasilitas pendukung, seperti meja, kursi, dan papan tulis. Jumlah ruang kelas rusak di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 sebanyak 158 ruang kelas di PAUD, 844 ruang kelas di SD, 326 ruang kelas di SMP, 136 ruang kelas di SMA, 57 ruang kelas di SMK, serta 7 ruang kelas di SLB.

Gambar II.44 Kondisi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023



Sumber: Kemendikbud, 2023 dalam dokumen "Neraca Pendidikan Daerah"

Berdasarkan kondisi akses listrik, masih terdapat 2 PAUD di Kabupaten Biak Numfor yang belum memiliki akses listrik memadai pada tahun 2023. Keterbatasan akses listrik ini berdampak pada: (1) terbatasnya penggunaan alat bantu pembelajaran modern, seperti proyektor, komputer, atau peralatan laboratorium yang memerlukan Listrik; (2) kendala dalam operasional sekolah, termasuk administrasi, pencatatan nilai, dan pengelolaan dokumen yang memerlukan perangkat elektronik; serta (3) sulitnya mengimplementasikan program pembelajaran berbasis teknologi, yang semakin penting dalam kurikulum pendidikan modern.

Akses internet sekolah di Kabupaten Biak Numfor juga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam era digital saat ini. Akses internet menjadi penting terutama dalam: (1) mengakses bahan ajar dan sumber pembelajaran digital, termasuk e-book, video edukatif, dan materi interaktif; (2) pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, karena banyak materi pelatihan kini tersedia secara daring; serta (3) mendukung administrasi sekolah yang lebih efisien, termasuk pengisian data pendidikan dalam sistem pemerintah seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Meskipun demikian, masih banyak sekolah di Biak Numfor yang belum memiliki akses internet stabil karena keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, jaringan seluler yang lemah atau tidak tersedia, maupun biaya akses internet yang mahal. Pada tahun 2023, terdapat 49 PAUD, 100 SD, 22 SMP, 6 SMA, 4 SMK dan 2 SLB yang tidak memiliki akses internet, sehingga berdampak pada:

- a. guru dan siswa tertinggal dalam akses informasi dan inovasi pendidikan dibandingkan daerah lain yang lebih maju;

- b. terbatasnya implementasi kurikulum berbasis digital, yang seharusnya menjadi bagian dari standar pendidikan nasional; serta
- c. sulitnya pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau kondisi keamanan yang tidak stabil.

2.1.2.3.5 Tenaga Pendidik

Sebagai bagian dari kesatuan sistem pendidikan yang utuh, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor juga sangat dipengaruhi kondisi tenaga pendidik. Dalam hal ini, salah satu indikator kinerja pelayanan pendidikan yang penting adalah rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru, yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru, diketahui bahwa pada jenjang SD, SMP dan SMA idealnya 1 guru bertanggungjawab terhadap 20 murid, sedangkan pada jenjang SMK idealnya 1 guru bertanggungjawab terhadap 15 murid.

Tabel II.55 menunjukkan rasio guru:murid di Kabupaten Biak Numfor pada setiap jenjang pendidikan tahun 2019-2023. Secara umum diketahui terdapat penurunan rasio murid-guru di seluruh jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan beban kerja guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang dapat berimplikasi pada meningkatnya mutu pengajaran di Kabupaten Biak Numfor. Apabila mengacu pada arahan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, dapat diketahui bahwa rasio guru:murid di Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, juga perlu mempertimbangkan distribusi/sebaran guru agar dapat merata antar sekolah dan antar distrik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Biak Numfor.

Tabel II.55 Jumlah Guru dan Murid serta Rasio Guru-Murid di Kabupaten Biak Numfor

Indikator	No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
GURU	1	PAUD	34	-	211	223	240
	2	SD	68	75	1.164	1.194	1.266
	3	SMP	71	85	596	615	682
	4	SMA	62	68	368	375	380
	5	SMK	26	30	177	171	187
	6	SLB	1	3	11	16	15
MURID	1	PAUD	1.747	2.344	2.204	2.857	3.193
	2	SD	22.236	20.308	20.877	20.604	20.387

Indikator	No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
RASIO GURU : MURID	3	SMP	9.257	9.641	9.675	9.711	9.718
	4	SMA	5.862	6.180	6.126	5.990	6.127
	5	SMK	2.163	2.226	2.240	2.183	2.242
	6	SLB	70	86	92	83	84
	1	PAUD	1 : 52	-	1 : 11	1 : 13	1 : 13
	2	SD	1 : 21	1 : 19	1 : 18	1 : 17	1 : 16
	3	SMP	1 : 16	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 14
	4	SMA	1 : 16	1 : 15	1 : 17	1 : 16	1 : 16
	5	SMK	1 : 13	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 12
	6	SLB	1 : 6	1 : 5	1 : 8	1 : 15	1 : 6

Sumber: Kemendikbud, 2023 dalam dokumen "Neraca Pendidikan Daerah"

Kondisi tenaga pendidik di Kabupaten Biak Numfor juga dapat dilihat berdasarkan status kepegawaian (PNS atau non-PNS), tingkat pendidikan guru, serta sertifikasi yang dimiliki memiliki dampak besar terhadap mutu pendidikan, tingkat partisipasi siswa, dan efektivitas pembelajaran. Berdasarkan Gambar II.45 dapat diketahui bahwa **banyak sekolah di Kabupaten Biak Numfor yang bergantung pada guru non-PNS (honorer atau kontrak)**, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pelatihan dan kesejahteraan, sehingga berdampak pada kualitas pengajaran. Guru non-PNS (honorer atau kontrak) sering kali lebih fleksibel dan bersedia mengajar di daerah terpencil, tetapi memiliki tantangan dalam kesejahteraan karena gaji yang lebih rendah dan tidak memiliki jaminan pekerjaan jangka panjang. Tenaga pendidik non-PNS di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 sebanyak 92,9% di tingkat PAUD; 62,2% di tingkat SD; 51,9% di tingkat SMP; 46,3% di tingkat SMA; 55,1% di tingkat SMK; serta 86,7% di SLB. Selain itu, tingginya tingkat absensi guru PNS yang ditempatkan di daerah terpencil menjadi masalah serius. Beberapa guru PNS lebih memilih tetap di kota atau daerah yang lebih mudah diakses, menyebabkan sekolah kekurangan tenaga pengajar tetap. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah strategis yaitu:

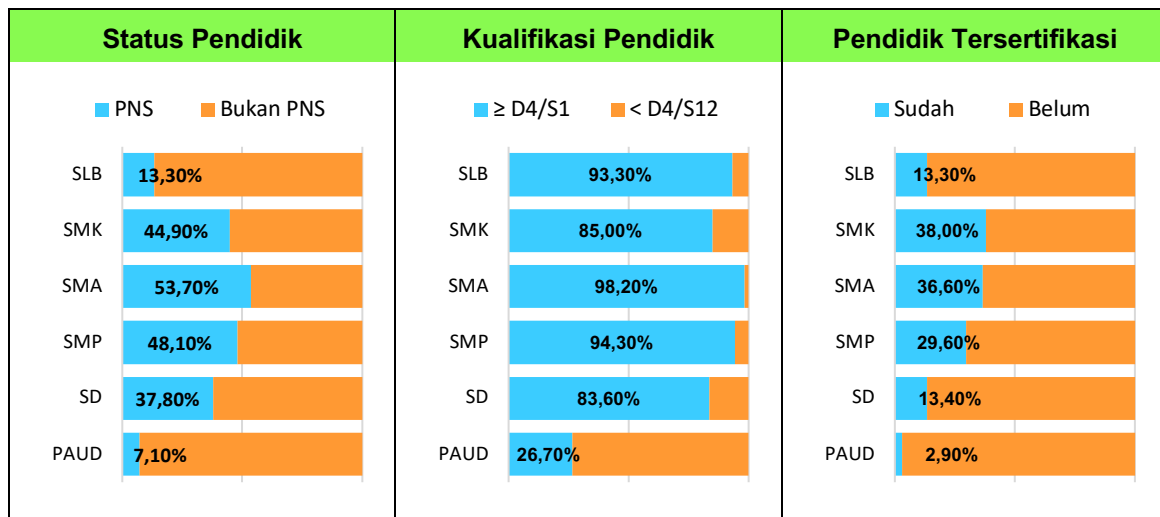
- meningkatkan insentif bagi guru PNS yang bersedia mengajar di daerah terpencil, seperti tunjangan khusus atau skema rotasi dengan masa tugas yang lebih fleksibel;
- meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer yang telah lama mengabdikan agar mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas.

Apabila meninjau kondisi kualifikasi pendidik di Kabupaten Biak Numfor, dapat diketahui bahwa masih terdapat tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan di bawah D4/S1 (belum sesuai standar nasional). **Keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi calon guru di Biak Numfor juga menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.** Tenaga pendidik di Kabupaten Biak Numfor dengan kualifikasi <D4/S1 sebanyak 73,30% di tingkat PAUD; 16,40% di

tingkat SD; 5,70% di tingkat SMP; 1,80% di tingkat SMA; 15% di tingkat SMK; serta 6,70% di SLB. Di sisi lain, tenaga pendidik dengan pendidikan yang lebih tinggi (S1 atau lebih) diharapkan memiliki pemahaman lebih baik tentang metode pengajaran yang efektif, serta diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menekan angka putus sekolah. Meskipun dalam implementasinya, tingkat pengalaman guru mengajar juga sangat mempengaruhi keterampilan guru dalam menerapkan metode pengajaran. Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah strategis yaitu:

- meningkatkan program pelatihan bagi guru yang belum memenuhi standar pendidikan minimal, terutama dalam bidang pedagogi dan literasi numerasi.
- menyediakan beasiswa pendidikan bagi calon guru lokal agar lebih banyak tenaga pendidik berkualitas yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor.

Gambar II.45 Kondisi Tenaga Pendidik di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023



Sumber: Kemendikbud, 2023 dalam dokumen "Neraca Pendidikan Daerah"

Sertifikasi tenaga pendidik juga merupakan salah satu aspek penting yang berdampak besar terhadap mutu pendidikan, tingkat partisipasi siswa, dan efektivitas pembelajaran di Kabupaten Biak Numfor. Tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikasi umumnya mendapatkan tunjangan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini mendorong peningkatan motivasi mengajar dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Namun di Kabupaten Biak Numfor tidak semua guru memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan sertifikasi, baik karena keterbatasan pelatihan maupun kendala administratif. Berdasarkan Gambar II.45 diketahui mayoritas guru belum tersertifikasi yaitu sebanyak 97,10% di PAUD, 86,60% di tingkat SD; 70,40% di tingkat SMP; 63,40% di tingkat SMA; 62,00% di tingkat SMK; serta 86,70% di SLB. Minimnya akses pelatihan dan uji sertifikasi bagi guru di Kabupaten Biak Numfor membuat banyak

guru non-PNS dan honorer sulit mendapatkan status guru bersertifikat. Di sisi lain, kesenjangan antara guru bersertifikat dan non-sertifikat dapat menyebabkan perbedaan dalam motivasi kerja dan kesejahteraan, di mana guru yang belum bersertifikat merasa kurang dihargai secara finansial. Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah perlu melakukan langkah strategis yaitu:

- a. mempermudah akses sertifikasi bagi guru di daerah terpencil melalui program sertifikasi berbasis daring atau melalui kerja sama dengan universitas lokal.
- b. mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja, yang tidak hanya memberi insentif bagi guru bersertifikat, tetapi juga kepada guru dengan dedikasi tinggi meskipun belum bersertifikat.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004). Jaminan sosial (*social security*) merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial (*social welfare system*) dan diberikan kepada masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko ketuaan, kematian, ketidakmampuan dan pengangguran. Persentase rumah tangga yang memiliki/menerima jaminan sosial dan bantuan sosial dari di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2018-2024 ditampilkan dalam Tabel II.56.

Tabel II.56 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menerima Jaminan dan Bantuan Sosial di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2024

Kategori		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JAMINAN SOSIAL								
1	Jaminan Pensiun	16,98	16,42	23,82	18,11	18,68	20,59	22,99
2	Jaminan Hari Tua	2,86	8,92	14,66	13,29	11,09	13,18	17,30
3	Asuransi Kecelakaan Kerja	5,28	7,64	14,33	13,27	9,48	14,69	16,03
4	Jaminan Asuransi Kematian	5,88	7,68	14,47	12,68	9,19	11,07	12,64
5	Pesangon PHK	1,76	1,49	1,62	1,26	1,15	2,95	1,82
BANTUAN SOSIAL								
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	6,25	9,03	8,50	12,58	19,82	21,01	14,89
2	Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	17,97	10,69	10,79	8,28	19,44	11,63	6,08
3	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	n.a	n.a	0,40	19,67	12,92	8,04	34,32

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua"

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan dan bantuan sosial di Kabupaten Biak Numfor selama periode 2018-2024, terlihat adanya tren peningkatan dalam kepesertaan jaminan sosial. Jaminan Pensiun mengalami kenaikan dari 16,98% pada 2018 menjadi 22,99% pada 2024, menunjukkan semakin banyaknya rumah tangga yang memiliki perlindungan di

masa tua. Hal serupa terjadi pada Jaminan Hari Tua yang meningkat signifikan dari 2,86% menjadi 17,3% dalam periode yang sama, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada 2022. Asuransi Kecelakaan Kerja dan Jaminan Asuransi Kematian juga mengalami pertumbuhan partisipasi, masing-masing meningkat dari 5,28% dan 5,88% pada 2018 menjadi 16,03% dan 12,64% pada 2024. Sementara itu, Pesangon PHK menunjukkan tren yang lebih berfluktuasi, dengan angka relatif kecil yang berkisar antara 1,15% hingga 2,95%, menandakan bahwa hanya sedikit rumah tangga yang menerima kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja.

Apabila meninjau kondisi bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan peningkatan signifikan dari 6,25% pada 2018 hingga mencapai puncaknya di 2023 dengan 21,01%, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 14,89% pada 2024. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya penyaringan ulang penerima manfaat atau perbaikan ekonomi di beberapa kelompok masyarakat. Sementara itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mengalami tren menurun dari 17,97% pada 2018 menjadi hanya 6,08% pada 2024, yang dapat mencerminkan pergeseran kebijakan bantuan sosial atau perubahan status kesejahteraan rumah tangga. Sebaliknya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami lonjakan signifikan sejak diperkenalkan, dari hanya 0,4% pada 2020 menjadi 34,32% pada 2024, menunjukkan bahwa program ini semakin menjadi andalan dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial serta dinamika penerimaan bantuan sosial di Kabupaten Biak Numfor. Pertumbuhan signifikan pada beberapa program, seperti BPNT dan PKH, menandakan peran penting kebijakan sosial dalam mendukung masyarakat rentan. Meskipun demikian, secara umum rumah tangga yang memiliki/menerima jaminan dan bantuan sosial di Kabupaten Biak Numfor sangat kecil selama tahun 2018-2024. Hal ini mengindikasikan kebutuhan masyarakat Biak Numfor terhadap jaminan dan bantuan sosial yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui program dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam mengisi gap akses jaminan dan bantuan sosial tersebut, khususnya afirmasi jaminan dan bantuan sosial untuk OAP.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan unik. Masyarakat Biak dikenal sebagai penjelajah laut yang tangguh, dengan sejarah panjang interaksi budaya dengan suku-suku lain di Papua dan sekitarnya. Salah satu tradisi yang masih bertahan adalah tradisi **Wor**, yang merupakan rangkaian upacara ritual yang mencakup lagu dan tari tradisional. Tradisi ini mencerminkan kepercayaan animisme lokal sebelum masuknya agama Kristen ke Papua. Selain itu, masyarakat Biak juga memiliki tradisi **lyakyaker**, yaitu pemberian maskawin yang melibatkan berbagai barang berharga seperti hewan ternak, manik-manik, dan guci, piring dan lainnya. Budaya Biak juga terlihat dalam seni ukir, seni tari, dan seni musik yang kaya, serta dalam penggunaan bahasa Biak yang masih dipertahankan oleh penduduk setempat. Budaya di Kabupaten Biak tidak hanya menjadi identitas lokal tetapi juga menjadi karakteristik wilayah yang membedakannya dari daerah lain. Hubungan budaya ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari sistem sosial hingga ekonomi. Misalnya, tradisi Farkawawin dalam pernikahan yang melibatkan kesepakatan keluarga dan pembayaran maskawin, menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Selain itu, masyarakat Biak juga dikenal dengan kemampuan maritim mereka yang kuat, yang telah membentuk hubungan perdagangan dan politik dengan suku-suku lain di sekitar Teluk Cenderawasih. Interaksi ini tidak hanya memperkaya budaya lokal tetapi juga menciptakan akulturasi yang memperkuat identitas budaya Biak.

Dalam konteks pembangunan, masyarakat adat Biak telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka aktif berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan daerah, seperti yang terlihat dalam kontribusi mereka pada Festival Munara Wampasi yang mempromosikan budaya lokal dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga mengakui peran penting masyarakat adat dalam pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program strategis. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal perlindungan hak ulayat dan tradisi adat di tengah perkembangan modernisasi dan proyek-proyek besar seperti pembangunan bandar antariksa. Upaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan pembangunan modern menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan budaya dan kesejahteraan masyarakat adat Biak.

Menurut mite moyang orang Biak berasal dari satu daerah yang terletak di sebelah timur, tempat matahari terbit. Moyang pertama datang ke daerah kepulauan ini dengan menggunakan perahu. Ada beberapa versi ceritera kedatangan moyang pertama itu. Salah satu versi mite itu menceritakan bahwa moyang pertama dari orang Biak terdiri dari sepasang suami isteri yang dihanyutkan oleh air bah di atas

sebuah perahu dan ketika air surut kembali terdampar di atas satu bukit yang kemudian diberi nama oleh kedua pasang suami isteri itu Sarwombo. Bukit tersebut terdapat di bagian timur laut pulau Biak (di sebelah selatan kampung Korem sekarang). Dari bukit Sarwombo, moyang pertama itu bersama anak-anaknya berpindah ke tepi sungai Korem dan dari tempat terakhir inilah mereka berkembang biak memenuhi seluruh Kepulauan Biak-Numfor.

Asal usul orang Biak melalui kontak dengan orang lain dapat ditelusuri melalui sejarah panjang penjelajahan laut dan interaksi budaya yang kaya. Suku Biak dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajahi lautan dari Kepulauan Biak di Teluk Cenderawasih hingga ke Maluku, Sulawesi, dan bahkan Semenanjung Malaka, sampai saat ini saja di Todore terdapat komunitas biak yang masih mengakui bahwa mereka adalah marga-marga perantau dari byak ke Tidore dan Ternate pada abad 15 lalu saat misi perdagangan. Penjelajahan yang dilakukan orang byak ini didorong oleh kebutuhan ekonomi dan persaingan antar suku, serta kondisi geografis Biak yang kurang subur. Bukti kekuasaan dan pengaruh suku Biak dapat dilihat dari penamaan beberapa kota di pesisir utara Papua, seperti Manokwari dan Sorong, yang berasal dari bahasa Biak.

Gambar Il.46 Peta Pelayaran dan Perdagangan Orang Biak Numfor di Teluk Cenderawasih Abad XIX



Sumber: Rumbekwan (2014) dalam Waromi

Orang Biak-Numfor memainkan peran penting dalam dinamika perdagangan di sekitar Teluk Cenderawasih dengan menguasai jalur perdagangan dan menjalankan praktik barter yang melibatkan berbagai suku di wilayah tersebut (lihat peta jalur pelayaran pada gambar diatas). Mereka dikenal menjalankan ekspansi, perdagangan, bahkan merompak wilayah-wilayah sekitar, mendominasi sektor perdagangan dan politik di sana. Jaringan dagang ini memperluas jangkauan mereka hingga melibatkan hubungan dagang dengan para pelaut dari

Ternate, Tidore, Halmahera, hingga ke Sulawesi, Buton, serta pelaut dari Cina dan Eropa. Sistem perdagangan mereka dibangun berdasarkan kemitraan yang disebut “manibobi”, yaitu kerja sama antarsahabat yang saling berbagi peran dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan.

Komoditas utama yang diperdagangkan oleh orang Biak-Numfor meliputi hasil-hasil alam dari wilayah mereka sendiri, seperti sagu, kulit kayu massoi, burung cenderawasih, hingga budak. Dalam aktivitas barter dengan wilayah Kepulauan Yapen-Waropen, Teluk Wondama, hingga Manokwari, mereka juga memperoleh barang-barang baru, termasuk porselin Cina, manik-manik, parang, tombak, gelang besi, serta kain dari para pelaut luar seperti Ternate-Tidore, Makassar, dan pedagang Eropa. Motivasi utama pelayaran dan perdagangan orang Biak adalah persaingan (“korfandi”), serta didorong oleh tantangan lingkungan geografis dan konflik antarsuku. Mereka menggunakan perahu tradisional, seperti ‘wairon’, ‘waimansusu’, dan ‘waipapan’, yang dipandu oleh pengetahuan ilmu perbintangan, terutama bintang Orion (Sawakoi) dan Scorpio (Romanggwandi).

Kemampuan orang Biak-Numfor dalam melayari hingga ke wilayah Ternate-Tidore memberi mereka berbagai gelar kehormatan seperti ‘Mambri’, ‘Sangaji’, ‘Korano’, dan ‘Dimara’. Perjalanan



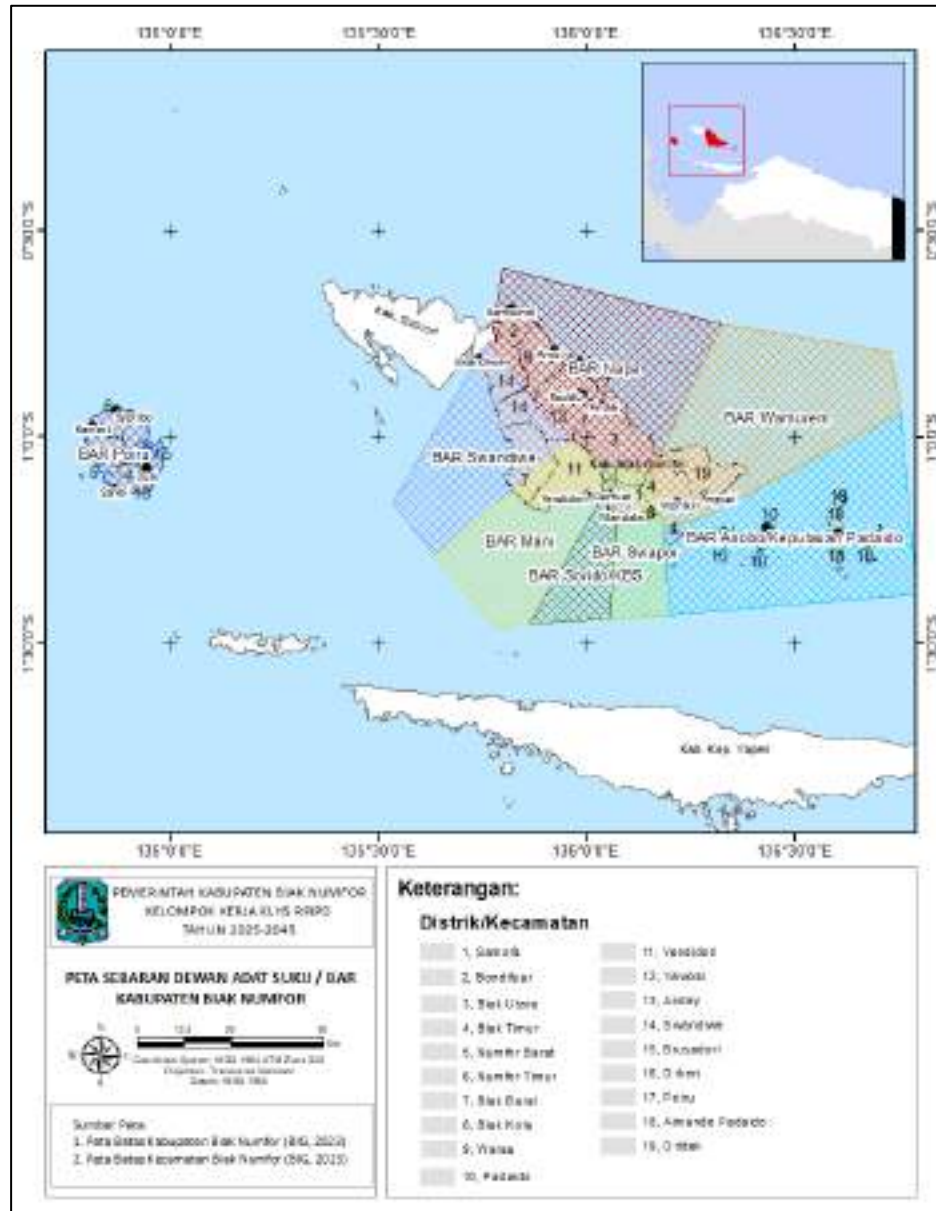
Perahu Wairon, Suara Papua

dan interaksi perdagangan ini memperkaya budaya orang Biak-Numfor dengan pengaruh dari budaya luar, menciptakan akulturasi yang signifikan. Hubungan dagang dan perkawinan dengan masyarakat di wilayah Yapen-Waropen, Teluk Wondama, dan Manokwari turut mempererat koneksi budaya dan menciptakan warisan budaya yang saling melengkapi antara masyarakat Biak-Numfor dan suku-suku di sekitarnya.

Bahasa Biak, yang termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia dan sub grup South Halmahera West New Guinea, menunjukkan hubungan linguistik yang kuat dengan bahasa-bahasa di wilayah Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa ini digunakan oleh para migran Biak dan mencerminkan keragaman budaya mereka. Terdapat beberapa dialek dalam bahasa Biak, seperti Aimando, Betew, dan Kafdaron, yang mencerminkan keragaman sub-suku di wilayah tersebut. Seiring waktu, fonem dalam bahasa Biak mengalami perubahan, seperti perubahan fonem [v] menjadi [b], yang terlihat dalam evolusi nama dari “Wiak” menjadi “Biak”.

Perubahan ini menunjukkan dinamika dan adaptasi bahasa Biak dalam menghadapi perkembangan zaman.

Gambar II.47 Sebaran Wilayah Masyarakat Hukum Adat (BAR)



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari tetapi juga dalam berbagai upacara adat dan tradisi lisan yang kaya. Terdapat sepuluh dialek di Kepulauan Biak-Numfor antara lain dialek Sander, Wadibu, Sorido, Manwor, Soweik, Sopen, Wombonda atau Sawias, Urmbor, Numfor dan Mokmtt (Steinhauer, 1985:464,483). Kamma sendiri membedakan sembilan dialek di daerah Biak Numfor (Kamma, 1972:8). Ketiga dialek di daerah migrasi adalah dialek Roon, Dore dan Betew atau Beser (Kamma, 1972:8; Steinhauer, 1985), di pulau Numfor selain terdapat dialek Numfor (biasa disebut Numfor baun artinya

Numfor asli), juga terdapat tiga dialek lain yaitu dialek Manwor, dialek Sopen dan dialek Samber.

Cerita lisan dan mitos juga memainkan peran penting dalam memahami asal usul orang Biak. Salah satu cerita populer menyebutkan bahwa nenek moyang orang Biak berasal dari sepasang suami istri yang terdampar di Pulau Aimando setelah air bah besar. Nama “Byak” sendiri diyakini berasal dari kata “v’iak” yang berarti “ia muncul lagi,” merujuk pada pulau yang terlihat kembali setelah air surut. Cerita-cerita ini tidak hanya memperkaya sejarah dan budaya Biak tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Biak terhadap warisan leluhur mereka. Di Kabupaten Biak Numfor, terdapat delapan wilayah budaya/adat yang dikenal sebagai “BAR” atau Dewan Adat Suku. Nama-nama wilayah adat tersebut yaitu: Napa/Biak Utara, Sorido/KBS, Poiru/Numfor, Wamurem/Biak Timur, Swapor/KBS, Swandiwe, Mani, dan Anobo/Padaido. Setiap wilayah Budaya adat ini memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta adat istiadat masyarakat Biak.

Tabel II.57 Distribusi Distrik dan Kampung Utama Dalam Wilayah BAR di Kabupaten Biak Numfor

No	Nama Wilayah Bar	Distrik	Kampung Utama
1	NAPA	Biak Utara	Inswanbesi, Yomdori, Ainsiba
		Warsa	Warbor, Yawosi
		Andey	Mandori
		Bondifuar	Napdori, Yenusi, Rim, Yobdi
		Yawosi	Duber, Samber, Makmaker
2	SORIDO	Biak Kota	Sorido, Fandoi, Samber, Mandouw
		Samofa	Snerbo, Anggraidi, Mandender
3	POIRU	Numfor Barat	Poiru, Inden, Nungdey
		Poiru	Poiru
		Bruyadori	Sanbesi, Maudori, Duber, Napan
		Numfor Timur	Yemburwo, Duber
		Orkeri	Numfor, Karnindi
4	WAMUREM	Biak Timur	Soryar, Yenusi, Opiaref, Karsuwer
		Oridek	Wafdori, Oridek, Yenusi Timur
5	SWAPOR	Biak Kota/KBS	Mandouw, Fandoi, Samber
		Samofa	Insrom, Anggraidi, Adoki
6	SWANDIWE	Swandiwe	Korido, Sunyar, Manswan, Ildi, Waroi, Roswara
7	MANI	Biak Barat	Marau, Samber, Imbuan
		Yendidori	Sopen, Yendidori, Kababur
8	ANOBO	Padaido	Padaido, Ruar, Yenmanu, Anjain, Pai, Amano, Meos Manggara

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

2.1.2.5.1 Adat dan Tradisi

Adat dan tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang dapat berupa bahasa, seni, religi, kearifan lokal dan peralatan. Tabel II.58 menyajikan hubungan antara unsur budaya masyarakat Biak dengan nilai-nilai kearifan lokal mereka. Masyarakat Biak sangat menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, spiritual, dan alam. Sistem religi mereka, seperti ‘Snop Mnu’, melibatkan tempat-tempat keramat yang dihormati, sementara sistem organisasi kemasyarakatan, yang dikenal dengan ‘Bar’, menciptakan

struktur sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nilai-nilai pengetahuan yang terkait dengan ‘Sasi Laut’ mencerminkan kepedulian mereka terhadap kelestarian alam dan laut. Selain itu, bahasa Biak dan alat musik tradisional seperti ‘Kwer’ memainkan peran penting dalam upacara adat dan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masyarakat Biak juga sangat bergantung pada alat dan peralatan tradisional dalam kehidupan mereka, seperti ‘Kora-kora’ (perahu tradisional) dan “Noken Biak” (anyaman tas). Mata pencaharian utama mereka berasal dari perikanan, pertanian, dan berburu, dengan hasil seperti “Mnu kwari” (sagu bakar) dan “Tepawer” (ikan laut) yang menjadi bagian penting dari budaya makan mereka. Upacara adat seperti “Wor” menggabungkan unsur seni, musik, dan tarian untuk menghormati leluhur dan alam, dengan “Mbui” sebagai pantangan adat yang menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Semua elemen ini saling terkait dalam kehidupan masyarakat Biak, mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Tabel II.58 Unsur Budaya Masyarakat Biak

Unsur Budaya	Nama dalam Bahasa Biak	Penjelasan	Tempat, Kejadian, Alat, atau Bahan Terkait
Sistem Religi	Snop Mnu	Tempat yang diyakini memiliki kekuatan spiritual, sering kali berupa tempat keramat di hutan atau pesisir yang dihormati dan dianggap sebagai kediaman roh leluhur.	Snop Mnu: Tempat keramat di alam yang dianggap suci. Upacara adat seperti Wor dilakukan untuk menghormati roh leluhur di tempat-tempat ini.
Sistem Organisasi Kemasyarakatan	Bar	Struktur sosial berdasarkan wilayah adat (bar), di mana setiap bar memiliki kepala suku yang berperan penting dalam pengambilan keputusan.	Bar Napa, Sorido, Poiru, dll: Setiap bar memiliki peran dalam organisasi sosial dan pengambilan keputusan adat serta pengelolaan sumber daya.
Sistem Pengetahuan	Sasi Laut	Pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya kelestarian laut, dengan sistem Sasi Laut yang melibatkan aturan untuk melarang penangkapan ikan di area tertentu pada waktu tertentu.	Sasi Laut: Larangan adat yang dikeluarkan untuk melindungi ekosistem laut, yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis masyarakat tentang keberlanjutan sumber daya alam.
Bahasa	Bahasa Biak	Bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Terdapat variasi dialek di setiap kampung. Merupakan bahasa dari rumpun Austronesia	Bahasa Biak: Digunakan dalam upacara adat seperti Wor , komunikasi antar bar, dan dalam kehidupan sehari-hari.
Seni	Kwer	Alat musik tradisional berupa tifa yang dimainkan dalam upacara adat.	Kwer: Tifa atau drum tradisional yang digunakan dalam Wor , sebagai bagian dari ekspresi seni dalam upacara adat dan perayaan.
Sistem Mata Pencaharian	Mnu kwari	Makanan pokok yang dibuat dari sagu yang dibakar, sering disajikan dalam perayaan dan upacara adat.	Mnu kwari: Sagu bakar yang menjadi makanan utama masyarakat, terutama pada upacara adat. Selain itu, mata pencaharian utama adalah pertanian, perikanan, dan perburuan .

Unsur Budaya	Nama dalam Bahasa Biak	Penjelasan	Tempat, Kejadian, Alat, atau Bahan Terkait
Sistem Teknologi dan Peralatan	Kora-kora	Perahu tradisional yang digunakan untuk melaut dan menangkap ikan.	Kora-kora: Perahu tradisional yang digunakan untuk penangkapan ikan dan perjalanan antar pulau, simbol teknologi laut masyarakat Biak.
Upacara Adat	Wor	Upacara adat yang melibatkan nyanyian, tarian, dan persembahan untuk menghormati leluhur dan alam.	Wor: Upacara adat yang menyatukan berbagai elemen budaya, termasuk Kwer , tarian adat, dan ritual pemanggilan roh leluhur.
Pantangan Adat	Mbuai	Larangan atau pantangan adat yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan adat, seperti waktu dan tempat untuk menangkap ikan.	Mbuai: Larangan adat untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati leluhur dengan menghindari aktivitas tertentu di waktu tertentu.
Alat Musik Tradisional	Kwer	Drum tradisional yang dimainkan dalam berbagai upacara adat.	Kwer: Drum yang digunakan dalam upacara adat Wor , menciptakan irama yang mengiringi tarian dan nyanyian adat untuk menghormati leluhur.
Perahu Tradisional	Kora-kora	Perahu tradisional Biak yang digunakan untuk perjalanan laut dan penangkapan ikan.	Kora-kora: Perahu tradisional yang menjadi alat utama masyarakat Biak dalam beraktivitas di laut, baik untuk transportasi maupun penangkapan ikan.
Jenis Ikan	Tepawer	Jenis ikan yang menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat pesisir, dan sering dijadikan bahan makanan utama.	Tepawer: Ikan laut yang menjadi sumber utama pangan masyarakat Biak, serta bagian dari kebiasaan berburu dan pemanfaatan sumber daya laut.
Peralatan Anyaman	Noken Biak	Tas tradisional yang dianyam dengan teknik khusus, digunakan untuk membawa barang hasil bumi.	Noken Biak: Anyaman tradisional dari serat alami yang digunakan untuk membawa barang hasil pertanian, berburu, dan hasil laut.
Hutan Keramat	Asda	Hutan yang dianggap keramat dan dilarang untuk dieksploitasi sembarangan.	Asda: Hutan keramat yang tidak boleh ditebang atau diganggu untuk melindungi alam dan keseimbangan ekosistem.

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Biak Numfor 2025-2045

Totem di Biak adalah simbol religiusitas yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap realitas tertinggi atau Dewa penolong. Totem ini juga menjadi simbol identitas dan solidaritas dalam masyarakat, mengintegrasikan anggota klan melalui kepercayaan bersama. Setiap klan memiliki totemnya sendiri, seperti gurita, anjing, ular, dan tumbuhan, yang dianggap suci dan memiliki nilai keramat. Totem ini tidak hanya melambangkan solidaritas klan tetapi juga berperan dalam upacara-upacara klan dan memberikan identitas kepada klan tersebut.

Kepercayaan terhadap totem di Biak sangat kompleks, mencerminkan hubungan yang erat antara komunitas dan totem mereka. Totem dianggap mampu melindungi dan bahkan menghancurkan, tergantung pada konteksnya. Menurut Durkheim, totem berfungsi sebagai lambang kesatuan sosial, dan kepercayaan terhadap totem ini dapat mengintegrasikan atau mensegregasikan masyarakat. Totem dianggap suci karena adanya ikatan yang dibangun antara komunitas dan

totem, yang mungkin berasal dari jasa yang dilakukan oleh totem atau keyakinan bahwa mereka adalah keturunan dari totem tersebut.

2.1.2.5.2 Kelembagaan Adat

Struktur pemerintahan tradisional masyarakat Biak, yang dikenal dengan “Kelembagaan Adat” (Institusi Adat), sangat berakar pada nilai-nilai pelestarian budaya, kepemimpinan, dan kohesi komunitas. Sistem ini berlandaskan pada “pranata adat” (norma adat), yang mengatur hubungan sosial dan aktivitas ekonomi. Kearifan leluhur masyarakat Biak tercermin dalam cara mereka mengelola tanah, yang sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Kesatuan sosial dan tempat tinggal, baik pada waktu lampau maupun masa kini. Kesatuan sosial yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat orang Biak adalah keret, atau klen kecil. Suatu keret terdiri dari sejumlah keluarga batih yang disebut sim. Sistem “keret” atau klan kecil, beserta “mananwir” (pemimpin klan) yang memimpinnya, merupakan tulang punggung struktur pemerintahan ini, memastikan bahwa keputusan-keputusan komunitas selaras dengan pengetahuan tradisional dan tantangan zaman, terutama dalam pengelolaan tanah dan aktivitas ekonomi lokal.

Di pusat struktur ini terdapat “Dewan Adat Biak Kain Karkar”, yang terdiri dari wakil-wakil dari delapan wilayah budaya “bar”. Dewan ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur tatanan sosial, tetapi juga aktivitas ekonomi seperti pengelolaan sumber daya dan penyelesaian konflik. Kepemimpinan mereka merupakan perpaduan antara hak warisan, sistem perwakilan dan seleksi berbasis prestasi, dengan pemimpin diharapkan mampu menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi dan tuntutan pemerintahan modern. “Dewan Adat” bertindak sebagai pelindung hak-hak masyarakat Biak, terutama terkait dengan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam, serta memberikan platform penting untuk diskusi komunitas mengenai proyek pembangunan dan investasi eksternal.

Kepemimpinan dalam “keret” ditandai oleh kombinasi unik antara sifat otoritatif dan karismatik. Pemimpin, khususnya “mananwir”, tidak hanya dipilih berdasarkan hubungan keluarga, tetapi diharapkan menunjukkan kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan untuk menjaga keteraturan sosial. Peran ganda ini sebagai pemimpin dan juru sita dalam klan memastikan bahwa keputusan dibuat dengan menghormati kebutuhan komunitas dan hukum adat. “Mananwir” juga bertanggung jawab untuk memediasi perselisihan dan melindungi kepentingan komunitas, terutama ketika menghadapi ancaman eksternal seperti perampasan tanah atau eksploitasi sumber daya lokal. Proses pengambilan keputusan dalam “keret” dan “Dewan Adat” Biak mengikuti hierarki yang terstruktur dari bawah ke atas, dimulai

dari tingkat kampung dan meluas ke tingkat keret dan perwakilan wilayah budaya atau bar. Kepala kampung, atau “mananwir mnu”, merupakan tokoh kunci dalam memastikan pelestarian nilai-nilai budaya sambil memfasilitasi inisiatif pembangunan. Sistem ini mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap “pranata adat”, di mana keputusan diambil secara kolektif, dengan penekanan kuat pada keterlibatan komunitas dalam pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Kepemimpinan dilihat bukan sebagai perintah dari atas ke bawah, tetapi sebagai tanggung jawab untuk melayani dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, “Kelembagaan Adat” Biak merupakan contoh dari sistem pemerintahan yang partisipatif dan harmonis di mana kepemimpinan, pengelolaan ekonomi, dan kohesi sosial saling terkait erat. Perpaduan “pranata adat” dengan mekanisme pemerintahan modern memungkinkan institusi tradisional Biak tetap relevan dan efektif dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Dengan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan pembangunan, sistem pemerintahan Biak memastikan kelangsungan identitas budaya mereka dan perlindungan terhadap tanah mereka, sambil beradaptasi dengan tuntutan dunia modern.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Biak Numfor dihitung dengan menggunakan satuan per 1000 perempuan pada satu periode. TFR pada tahun 2019 sebesar 30 berarti bahwa pada tahun 2019, ada 30 kelahiran anak dari per 1000 perempuan usia reproduktif (usia 15-49 tahun). Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 28 kelahiran per 1000 perempuan. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, nilai TFR sebesar 32 kelahiran per 1.000 perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keberhasilan pemerintah dalam mengintervensi angka kelahiran melalui berbagai program kegiatan baik program keluarga berencana maupun program edukasi kesehatan lainnya telah berhasil mencapai target yang diharapkan.

Tabel II.59 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Menurut Distrik di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Distrik		Jumlah PUS	Peserta KB Aktif								Pencapaian Terhadap PUS
			IUD	MOP	MOW	Implan	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah	
1	Numfor Barat	489	2	4	0	43	76	56	37	218	44,58
2	Orkeri	381	1	2	0	41	63	40	30	177	46,46
3	Numfor Timur	411	2	4	0	55	55	39	33	188	45,74

Distrik		Jumlah PUS	Peserta KB Aktif								Pencapaian Terhadap PUS
			IUD	MOP	MOW	Implan	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah	
4	Bruyadori	423	0	2	0	33	65	62	39	201	47,52
5	Poiru	432	1	2	0	57	62	43	31	196	45,37
6	Padaido	482	1	4	2	37	77	55	40	216	44,81
7	Aimando Padaido	554	1	5	0	46	72	73	50	247	44,58
8	Biak Timur	1.599	7	27	10	281	207	155	71	758	47,40
9	Oridek	1.058	1	9	6	170	163	109	49	507	47,92
10	Biak Kota	8.210	204	315	107	985	1.395	1.305	453	4764	58,03
11	Samofa	6.124	225	279	99	561	1.205	953	155	3477	56,78
12	Yendidori	1.512	12	29	6	320	160	120	68	715	47,29
13	Biak Utara	1.494	5	35	11	219	234	141	63	708	47,39
14	Andey	508	0	5	4	65	69	68	39	250	49,21
15	Warsa	957	2	9	5	110	163	99	61	449	46,92
16	Yawosi	447	1	3	3	46	78	49	29	209	46,76
17	Bondifuar	230	0	2	0	27	32	26	18	105	45,65
18	Biak Barat	1109	3	3	0	117	158	138	58	477	43,01
19	Swandiwe	740	1	3	3	85	99	99	49	339	45,81
TOTAL	2023	27.160	469	742	256	3.298	4.433	3.630	1.373	14.201	52,29
	2022	27.062	470	733	341	3.179	4.399	3.627	1.382	14.131	52,22
	2021	26.889	470	733	341	3.126	4.419	3.599	1.362	14.050	52,25
	2020	24.189	462	697	315	2.657	4.069	3.203	1.206	12.609	52,12
	2019	25.846	442	341	758	3.198	4.049	3.889	1.030	13.707	53,03

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024 (dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka")

Tabel II.59 menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB aktif menurut distrik di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023. Berdasarkan Tabel II.59 diketahui bahwa dari total 27.160 pasangan pada tahun 2023, sebanyak 14.201 pasangan (52,29%) telah berpartisipasi dalam program KB. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah PUS di Kabupaten Biak Numfor telah menjadi peserta KB aktif. Distrik dengan cakupan peserta KB tertinggi adalah Biak Kota (58,03%) dan Samofa (56,78%), yang juga memiliki jumlah PUS terbesar, yaitu masing-masing 8.210 dan 6.124 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa program KB lebih efektif atau lebih diterima di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebaliknya, distrik dengan cakupan KB terendah adalah Biak Barat (43,01%), di mana dari 1.109 pasangan, hanya 477 pasangan yang menjadi peserta KB aktif. Rendahnya cakupan KB di beberapa distrik, seperti Bondifuar dan Poiru, menunjukkan adanya kemungkinan kendala dalam akses layanan KB, tingkat kesadaran masyarakat, atau faktor sosial-budaya yang memengaruhi keputusan pasangan untuk mengikuti program KB.

Berdasarkan data penggunaan jenis kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023, terlihat bahwa metode kontrasepsi suntik merupakan yang paling banyak digunakan, dengan total 4.433 pengguna. Selanjutnya, metode pil juga cukup populer dengan 3.630 pengguna, diikuti oleh implan dengan 3.298 pengguna. Metode kontrasepsi non-hormonal seperti kondom memiliki 1.373 pengguna, sedangkan metode medis operasi pria (MOP) dan wanita (MOW) digunakan oleh 742 dan 256 pasangan masing-masing. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) masih relatif rendah dengan 469 pengguna. Metode jangka panjang seperti MOP dan MOW masih jarang digunakan, kemungkinan karena keterbatasan akses terhadap prosedur medis atau preferensi masyarakat yang lebih memilih metode non-permanen. Penggunaan MOP tertinggi tercatat di Biak Kota (315 pengguna) dan Samofa (279 pengguna), sedangkan MOW lebih banyak digunakan di Biak Kota (107 pengguna) dan Samofa (99 pengguna).

Secara umum, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023, partisipasi KB di Kabupaten Biak Numfor masih bisa ditingkatkan, mengingat masih ada sekitar 47,71% PUS yang belum menjadi peserta KB aktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut, terutama di distrik dengan cakupan rendah, melalui peningkatan sosialisasi, akses terhadap layanan KB, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dalam mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga. Dengan demikian, program KB di Kabupaten Biak Numfor dapat lebih merata dan berkontribusi dalam pembangunan keluarga yang lebih sejahtera.

Tabel II.60 Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB Modern Berdasarkan Tempat Memperoleh Alat KB Modern di Kabupaten Biak Numfor

No	Tempat Memperoleh Alat KB Modern	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit	11,88	18,01	11,14	15,45
2	Puskesmas/Pustu/Klinik	55,26	68,05	72,83	62,91
3	TKBK/TMK/Muyan	0,00	0,00	0,00	n.a
4	Polindes/Poskesdes	7,74	0,67	0,00	n.a
5	Posyandu/Pos KB/ PPKBD	8,05	5,49	12,83	n.a
6	Apotek/ toko obat	4,14	5,03	3,19	n.a
7	Praktik dokter umum	12,94	2,76	0,00	n.a
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tinggi rendahnya tingkat penggunaan KB oleh PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah khususnya para aparaturnya yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan Tabel II.60 diketahui bahwa pada tahun 2024, 62,91% perempuan di

Kabupaten Biak Numfor yang menggunakan alat KB memperoleh alat KB dari puskesmas/pustu/klinik, sedangkan mayoritas perempuan lainnya memperoleh alat KB dari rumah sakit atau Posyandu/Pos KB/ PPKBD.

2.1.2.6.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. IPG Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu 2017-2023, dari 89,80 pada tahun 2017 menjadi 90,96 pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Papua, IPG Kabupaten Biak Numfor berada di atas capaian Provinsi Papua namun masih lebih rendah dari capaian nasional.

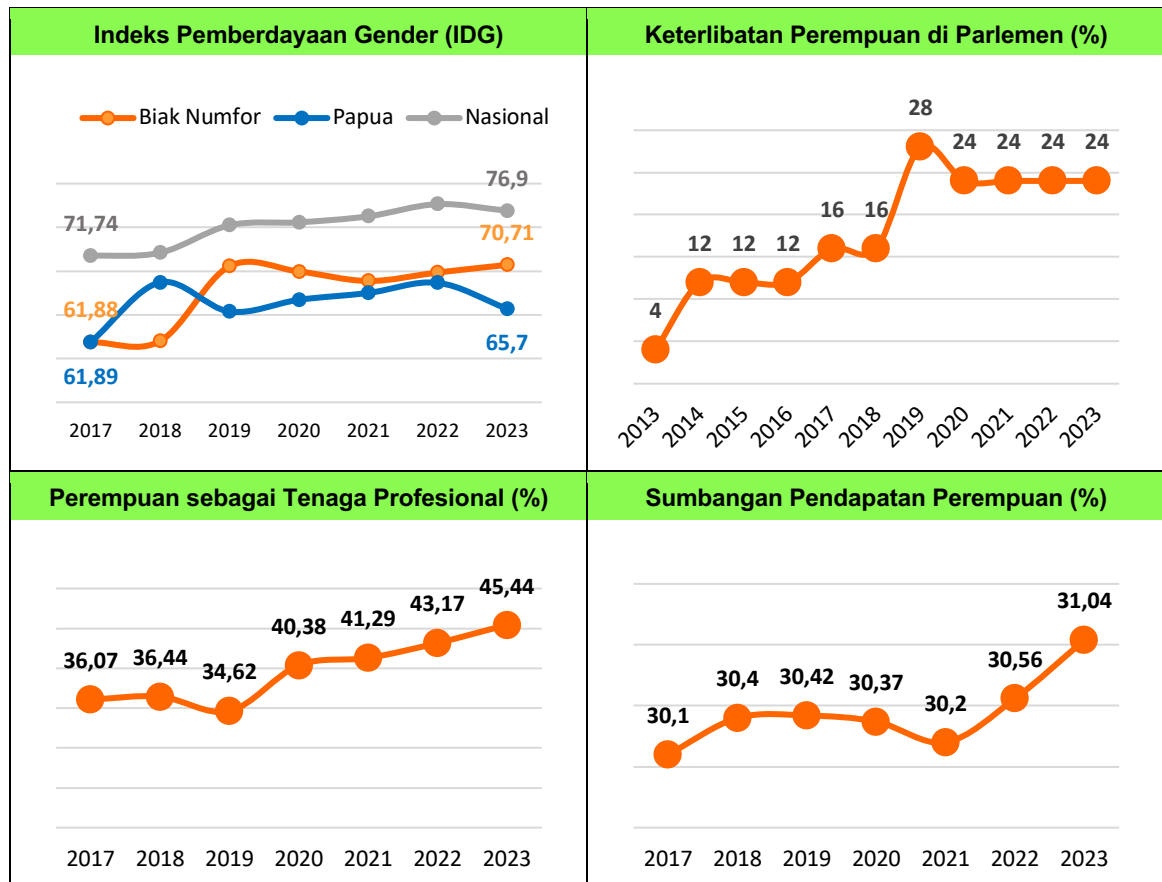
Tabel II.61 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua dan Nasional

Tahun	Biak Numfor	Provinsi Papua	Nasional
2017	89,80	79,38	90,96
2018	90,10	80,11	90,99
2019	90,01	80,05	91,07
2020	90,15	79,59	91,06
2021	90,25	80,16	91,27
2022	90,79	81,04	91,63
2023	90,96	81,64	91,85

Sumber: Biak Numfor Dalam Angka 2023

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pembangunan gender di Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari berbagai upaya pemberdayaan gender. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di Kabupaten Biak Numfor digunakan indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Gambar II.48 Kondisi Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Biak Numfor



Sumber: BPS Nasional, 2024

Berdasarkan Gambar II.48, diketahui bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Biak Numfor **mengalami peningkatan**, berada di atas capaian Provinsi Papua, meskipun masih di bawah capaian Nasional. Pada tahun 2017, IDG Kabupaten Biak Numfor sebesar 61,88 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 70,71 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan relatif meningkatnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Biak Numfor, khususnya meningkatnya peran perempuan sebagai tenaga profesional, keterlibatan perempuan di parlemen, serta sumbangan pendapatan perempuan terhadap ekonomi keluarga.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kesuksesan pemberdayaan dan pembangunan ketenagakerjaan di Biak Numfor tidak terlepas dari kualitas angkatan kerja sebagai penggerak ekonomi yang tercermin melalui pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan. Tabel II.62 menunjukkan karakteristik penduduk Biak Numfor berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2020 dan 2023. Secara umum diketahui

bahwa pada tahun 2023 mayoritas (39,31% atau 22.770 orang) penduduk memiliki tingkat pendidikan SMA. Adapun penduduk bekerja yang telah menamatkan perguruan tinggi (diploma/sarjana) pada tahun 2023 sangat kecil yaitu 16,84% atau 9.751 orang. Hal ini mengindikasikan kualitas, keahlian dan keterampilan tenaga kerja di Biak Numfor belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sehingga diperlukan upaya peningkatan keterampilan melalui pendidikan informal sejalan dengan peningkatan akses pendidikan formal.

Tabel II.62 Karakteristik Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2023	
	orang	%	orang	%
SD ke bawah	18.736	29,93	16.261	28,08
SMP	10.952	17,49	9.137	15,78
SMA	24.039	38,40	22.770	39,31
Perguruan Tinggi	8.876	14,18	9.751	16,84
Jumlah	62.603	100,00	57.919	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024 dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka"

2.1.3.1.2 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

Tabel II.63 Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor

Tingkat Pendidikan	2020				2023			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
SD	28	3	31	0,75	23	3	26	0,63
SMP	94	27	121	2,93	81	24	105	2,54
SMA	905	716	1.621	39,28	755	589	1.344	32,54
D1/ D2	120	240	360	8,72	88	149	237	5,74
D3/ D4	173	325	498	12,07	225	405	630	15,25
S1/ S2/ S3	787	709	1.496	36,25	836	942	1778	43,05
TOTAL	2107	2.020	4.127	100,00	2.017	2.113	4.130	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka"

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumber daya

aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumberdaya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Tabel II.63 menunjukkan persentase pegawai negeri sipil menurut tingkat pendidikan di Biak Numfor tahun 2020 dan 2023. Berdasarkan Tabel II.63 diketahui mayoritas Pegawai Negeri Sipil di Biak Numfor berpendidikan S1/S2/S3 (43,05%) dan SMA/ sederajat (32,54%). Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, terdapat peningkatan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh pendidikan tinggi S1/S2/S3 dari 36,25% pada tahun 2020 menjadi 43,05% pada tahun 2023, serta pendidikan D3/D4 dari 12,07% pada tahun 2020 menjadi 15,25% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas SDM pegawai negeri sipil di Biak Numfor, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, hal ini juga mengisyaratkan perlunya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil yang berpendidikan menengah agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi secara efektif dalam pemerintahan daerah.

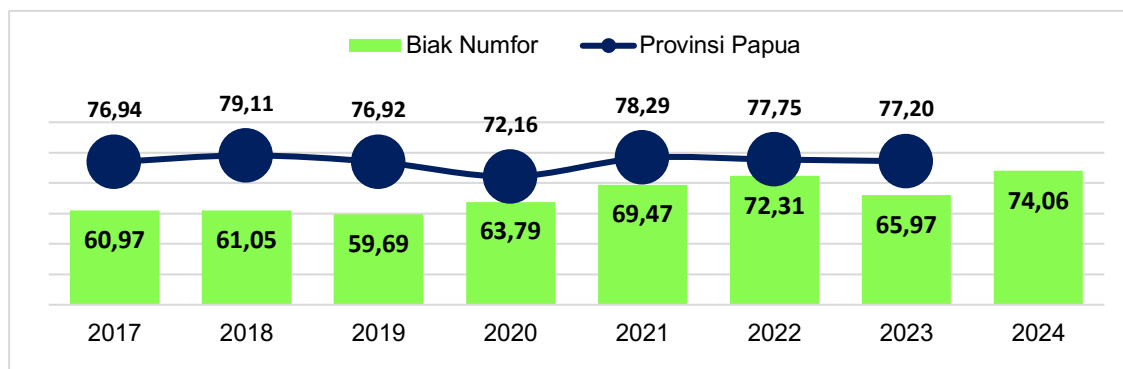
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK merupakan angka persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua dari tahun 2017 hingga 2024, diketahui bahwa TPAK di Biak Numfor mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan dalam jangka panjang. Pada tahun 2017, TPAK Biak Numfor tercatat sebesar 60,97% dan sempat menurun pada 2019 menjadi 59,69%. Namun, sejak 2020 angka ini mulai meningkat signifikan hingga mencapai 72,31% pada 2022, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada 2023 (65,97%) sebelum kembali naik tajam menjadi 74,06% pada 2024. Sementara itu, TPAK di Provinsi Papua relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, di mana angka tertinggi terjadi pada 2018 (79,11%) dan angka terendah pada 2020 (72,16%). Setelah itu, TPAK kembali meningkat hingga 2021 (78,29%) dan tetap berada di kisaran 77-78% pada tahun-tahun berikutnya.

Selama tahun 2017-2023, TPAK Kabupaten Biak Numfor lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Papua, tetapi selisihnya semakin menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, perbedaannya mencapai sekitar 16%, sementara pada 2024 selisih ini menurun menjadi sekitar 3%, menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja di Biak Numfor terjadi lebih pesat dibandingkan rata-rata provinsi. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tenaga kerja. Di sisi lain, fluktuasi TPAK di tingkat provinsi dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan ketenagakerjaan, serta faktor sosial dan demografi. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan perbaikan yang cukup positif dalam keterlibatan angkatan kerja di Kabupaten Biak Numfor, meskipun masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

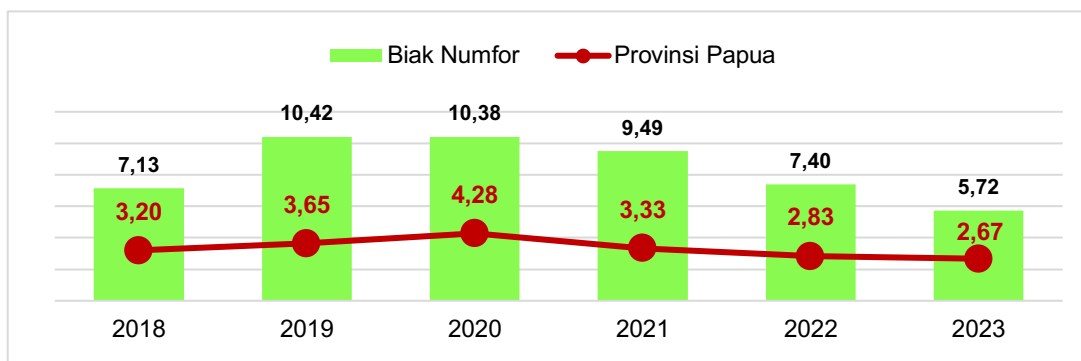
Gambar II.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2024 (data diolah)

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, atau bisa dikatakan adalah penduduk yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Adapun kegunaan dari indikator ini adalah dapat mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perkembangan TPT di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Gambar II.50. Berdasarkan Gambar II.50 diketahui bahwa TPT Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 adalah 5,72%, artinya terdapat lebih dari 6 orang yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Biak Numfor. Jumlah penduduk yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan tahun 2023 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2020. Tahun 2018 TPT Biak Numfor sebesar 10,38% kemudian menurun hingga mencapai 5,72%.

Gambar II.50 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2024 (data diolah)

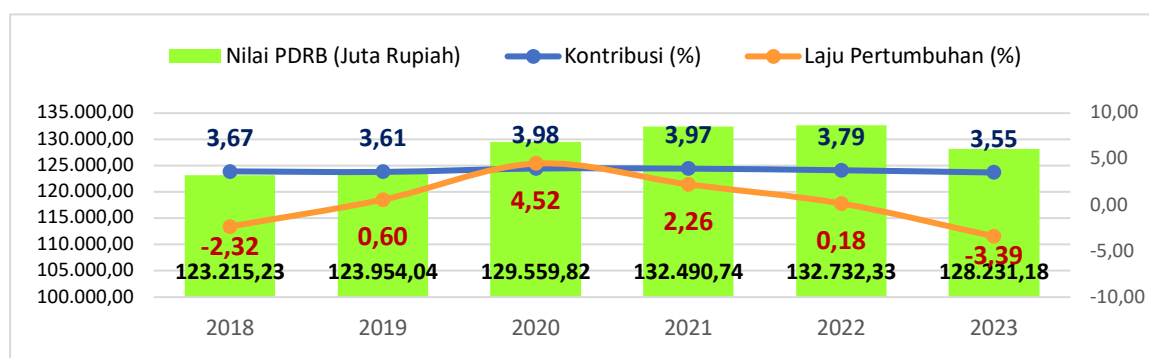
2.1.3.2.2 Perindustrian

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Biak Numfor, meskipun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil (berkisar antara 3,55% hingga 3,98%). Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi, dengan tren pertumbuhan yang tidak stabil, sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.51. Pada tahun 2018, nilai PDRB sektor industri sebesar 123.215,23 juta rupiah dengan laju pertumbuhan negatif (-2,32%), namun pada tahun 2019 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan 0,60%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020, mencapai 4,52% dengan nilai PDRB meningkat menjadi 129.559,82 juta rupiah. Pertumbuhan masih berlanjut di tahun 2021 dan 2022 meskipun dengan laju yang lebih rendah, masing-masing 2,26% dan 0,18%. Pada tahun 2023, sektor ini mengalami kontraksi signifikan dengan laju pertumbuhan -3,39%, yang menyebabkan penurunan nilai PDRB menjadi 128.231,18 juta rupiah. Secara umum, sektor industri pengolahan di Biak Numfor mengalami ketidakstabilan dalam pertumbuhannya. Penurunan kontribusi pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan dari sisi produksi maupun daya saing industri. Oleh karena itu, **diperlukan strategi penguatan industri pengolahan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di masa mendatang.**

Industri di Kabupaten Biak Numfor terdiri dari industri besar dan sedang serta industri mikro dan kecil, dengan dinamika **jumlah perusahaan serta jumlah tenaga kerja yang berfluktuasi pada tahun 2018-2023**. Terdapat peningkatan jumlah industri besar dan sedang dari 3 industri pada tahun 2018 menjadi 4 industri pada tahun 2021. Adapun jumlah tenaga kerja di industri besar dan sedang mengalami penurunan dari 625 orang pada 2018 menjadi 408 orang pada 2019. Sementara itu, industri mikro dan kecil di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan perubahan yang lebih signifikan. Jumlah industri mikro dan kecil mengalami kenaikan dari 2106 unit pada 2018 menjadi 2.542 unit pada 2019, namun mengalami penurunan hingga mencapai 1.983 unit pada tahun 2023. Meskipun

jumlah perusahaan mengalami fluktuasi, jumlah tenaga kerja di industri mikro dan kecil mengalami tren yang cenderung meningkat dari 4.129 tenaga kerja pada tahun 2018 menjadi 4.224 tenaga kerja pada tahun 2023.

Gambar II.51 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Berdasarkan data jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri, dapat diketahui bahwa industri mikro dan kecil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja di Biak Numfor. Meskipun demikian, fluktuasi jumlah perusahaan dan tenaga kerja menunjukkan **terdapat ketidakstabilan sektor industri, baik dalam aspek keberlanjutan usaha maupun ketersediaan lapangan kerja**. Penurunan jumlah perusahaan pada 2023, terutama di sektor industri mikro dan kecil, dapat menjadi indikasi adanya tantangan ekonomi atau regulasi yang mempengaruhi keberlangsungan usaha di Kabupaten Biak Numfor.

Tabel II.64 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri di Kabupaten Biak Numfor, 2017-2023

Kategori		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Besar dan Sedang	Perusahaan (unit)	3	3	3	4	4	n.a
	Tenaga Kerja (orang)	625	408	452	411	431	n.a
Industri Mikro dan Kecil	Perusahaan (unit)	2106	2542	2366	2166	3024	1983
	Tenaga Kerja (orang)	4129	4230	4499	3053	6992	4224

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka 2024"

Sektor industri mikro dan kecil di Biak Numfor masih berskala kecil dengan keterbatasan modal dan kelembagaan, sehingga diperlukan dukungan dalam bentuk akses pembiayaan, legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas agar lebih berkembang. Industri pengolahan mikro dan kecil di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022 didominasi oleh usaha dengan jumlah pekerja kecil, modal terbatas, dan status hukum yang tidak berbadan hukum. Sebagian besar usaha memiliki 2-4 pekerja (68,06%). Dari sisi modal, hampir seluruh industri memiliki modal di bawah 1 miliar rupiah (99,83%), dengan hanya 5 usaha yang memiliki modal di kisaran 15-19 miliar rupiah. Selain itu, mayoritas usaha tidak berbadan

hukum (99,70%), dengan hanya 9 usaha yang berbentuk CV. Dari segi pendapatan, sekitar 33,60% usaha memiliki pendapatan tahunan 10-24,9 juta rupiah, sementara hanya 0,07% yang berpendapatan lebih dari 1 miliar rupiah sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.65.

Tabel II.65 Kondisi Industri Pengolahan Mikro dan Kecil di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022

Kategori	Jenis	Jumlah	Persentase
Berdasarkan Jumlah Kelompok Pekerja	1	956	31,61
	2-4	2058	68,06
	5-9	5	0,17
	10-14	5	0,17
	15-19	0	0,00
	TOTAL	3024	100,00
Berdasarkan Modal Usaha	1 miliar	3019	99,83
	2-4 miliar	0	0,00
	5-9 miliar	0	0,00
	10-14 miliar	0	0,00
	15-19 miliar	5	0,17
	TOTAL	3024	100,00
Berdasarkan Status Badan Hukum	PT	0	0,00
	CV	9	0,30
	Koperasi	0	0,00
	Yayasan	0	0,00
	Tidak Berbadan Hukum	3015	99,70
	TOTAL	3024	100,00
Berdasarkan Pendapatan Setahun (rupiah)	< 5 juta	5	0,17
	5 – 9,9 juta	185	6,12
	10 – 24,9 juta	1016	33,60
	25 – 49,9 juta	792	26,19
	50 – 99,9 juta	703	23,25
	100 – 999,9 juta	321	10,62
	> 1 miliar	2	0,07
	TOTAL	3024	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 dalam dokumen “Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua”

Pengusaha industri pengolahan mikro dan kecil di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan mayoritas berusia 25-44 tahun (52,02%) dan 45-64 tahun (43,19%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar pengusaha berpendidikan SMA (39,78%), diikuti oleh lulusan SD (24,47%) dan SMP (15,38%). Sementara itu, jumlah pengusaha yang menamatkan pendidikan tinggi (D4/S1/S2/S3) hanya 9,29%. Data ini menunjukkan bahwa pengusaha industri mikro dan kecil di Biak Numfor mayoritas berasal dari jenjang pendidikan menengah ke bawah, yang dapat menjadi tantangan dalam hal adopsi teknologi, manajemen bisnis, serta akses terhadap peluang usaha yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan sektor industri di Kabupaten Biak Numfor.

Tabel II.66 Kondisi Pengusaha Industri Pengolahan Mikro dan Kecil di Biak Numfor Tahun 2022

Kategori		Jumlah	Persentase
Berdasarkan Umur Pengusaha	< 20 tahun	0	0,00
	20 – 24 tahun	0	0,00
	25 – 44 tahun	1573	52,02
	45 – 64 tahun	1306	43,19
	65+ tahun	145	4,79
	TOTAL	3024	100,00
Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha	Tidak tamat SD	181	5,99
	SD	740	24,47
	SMP	465	15,38
	SMA	1203	39,78
	SMK	150	4,96
	Diploma I/II/III	4	0,13
	D4/S1/S2/S3	281	9,29
	TOTAL	3024	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 dalam dokumen “Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua”

Tabel II.67 Kondisi Pekerja Industri Pengolahan Mikro dan Kecil di Biak Numfor Tahun 2022

Kategori	Jenis	Jumlah	Persentase
Berdasarkan Kelompok Umur Pekerja	< 15 tahun	559	7,99
	15 – 24 tahun	1777	25,41
	25 – 64 tahun	4511	64,52
	65 tahun ke atas	145	2,07
	TOTAL	6992	100,00
Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pekerja	Tidak tamat SD	181	2,59
	SD	1856	26,54
	SMP	1125	16,09
	SMA	2987	42,72
	SMK	539	7,71
	D1 / D2 / D3	4	0,06
	D4 / S1 / S2 / S3	300	4,29
	TOTAL	6992	100,00
Berdasarkan Balas Jasa Pekerja	Dibayar	644	9,21
	Tidak Dibayar	6348	90,79
	TOTAL	6992	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 dalam dokumen “Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua”

Pekerja industri pengolahan mikro dan kecil di Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 didominasi oleh kelompok usia produktif 25-64 tahun (64,52%), diikuti oleh usia 15-24 tahun (25,41%). Dari sisi pendidikan, mayoritas pekerja berpendidikan SMA (42,72%) dan SD (26,54%), sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi sangat sedikit (4,29%). Sebanyak 90,79% pekerja tidak menerima upah, yang menunjukkan bahwa mayoritas merupakan pekerja keluarga atau tenaga kerja informal tanpa perlindungan sosial (lihat Tabel II.67). Untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja, diperlukan kebijakan yang mendorong pelatihan keterampilan berbasis industri, regulasi yang menjamin hak-

hak pekerja, serta insentif bagi pengusaha agar dapat memberikan upah layak. Selain itu, dukungan permodalan bagi industri mikro dan kecil juga penting agar mereka mampu berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Biak Numfor, pengembangan kawasan industri besar di Biak Numfor direncanakan di Kawasan Urfu (17 km dari kota, seluas 1.500 Ha), di Distrik Biak Kota, Yendidori dan Kawasan Oridek seluas (500 Ha), akan dikembangkan pada masa mendatang dengan aktivitas pelabuhan (menempati lahan 300 ha) dan kawasan industri (1.200 ha). Kawasan ini direncanakan sebagai pengganti kawasan pelabuhan Biak bilamana kapasitasnya dan kenyamanannya sudah tidak dapat dipenuhi lagi dengan baik, termasuk di dalamnya adalah Kawasan Industri Export Processing Zone/EPZ. Kawasan EPZ (383 Ha), meliputi wilayah barat Distrik Biak Kota sampai ke Distrik Yendidori. Saat ini telah berjalan aktivitas pengalengan ikan, pembuatan fishmill/pakan ternak ikan (dengan bahan baku kedelai dari Nabire, Yapen dan Waropen), maupun penangkapan ikan (pada perairan dangkal dekat pantai oleh rakyat dan perairan dalam oleh pengusaha swasta besar). Kawasan EPZ ini akan dikembangkan lebih lanjut, seperti pengolahan CPO yang ada di hinterland terutama dari Manokwari, Yapen, Waropen, Supiori, Jayapura dan Nabire. Di samping itu juga perlu dikembangkan industri pengolahan ikan tuna ataupun daging yang didatangkan dari *hinterland*.

2.1.3.2.3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dapat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu daerah, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat sektor usaha kecil, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sebagai lembaga yang berbasis kebersamaan dan gotong royong, koperasi dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal apabila dikelola dengan baik, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya.

Pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Biak Numfor mencapai 271 unit, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 262 unit, sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.68. Distrik dengan jumlah koperasi terbanyak adalah Biak Kota (111 koperasi) dan Samofa (87 koperasi), sementara beberapa distrik seperti Andey, Warsa, Bondifuar, dan Swandiwe hanya memiliki

satu hingga tiga koperasi aktif. Dari jenis koperasi yang ada, koperasi dengan kategori "lainnya" mendominasi dengan 207 unit, sementara jenis koperasi seperti Koperasi Unit Desa /KUD (17 unit), Koperasi Pegawai Republik Indonesia /KPRI (43 unit), Koperasi Karyawan /KOPKAR (23 unit), dan Koperasi Pedagang Pasar /KOPPPAS (2 unit) masih tergolong minim. Keberadaan koperasi yang cukup banyak di distrik tertentu menunjukkan peran penting koperasi dalam perekonomian masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Meskipun demikian, pemerataan dan penguatan koperasi di distrik dengan jumlah minim perlu dilakukan dan didukung manajemen pengelolaan yang baik, agar manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh koperasi dapat dirasakan secara lebih luas di seluruh Kabupaten Biak Numfor.

Tabel II.68 Jumlah Koperasi Aktif dan Jenis Koperasi Menurut Distrik di Kabupaten Biak Numfor

Distrik	Koperasi Aktif		Jenis Koperasi (2023)					
	2020	2023	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPPAS	Lainnya	Jumlah
Numfor Barat	2	1	1	0	0	0	0	1
Orkeri	1	1	0	0	0	0	1	1
Numfor Timur	4	3	1	0	0	0	2	3
Bruyadori	0	1	0	0	0	0	1	1
Poiru	2	2	0	0	0	0	2	2
Padaido	3	4	2	0	0	0	2	4
Aimando Padaido	3	4	1	0	0	0	3	4
Biak Timur	22	24	2	2	0	0	20	24
Oridek	9	8	1	0	0	0	7	8
Biak Kota	104	111	1	19	20	2	89	111
Samofa	85	87	1	21	2	0	63	87
Yendidori	6	7	2	0	1	0	4	7
Biak Utara	9	9	2	0	0	0	7	9
Andey	2	0	0	0	0	0	0	0
Warsa	4	3	1	0	0	0	2	3
Yawosi	1	1	0	0	0	0	1	1
Bondifuar	0	0	0	0	0	0	0	0
Biak Barat	4	4	1	1	0	0	2	4
Swandiwe	1	1	1	0	0	0	1	1
Biak Numfor	262	271	17	43	23	2	207	271

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka"

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Biak Numfor menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap selaras dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan dengan kekayaan laut, hutan, dan ekosistemnya, Kabupaten Biak Numfor memiliki modal alam yang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga

pembangunan tidak hanya mendorong peningkatan PDRB, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi.

Dalam kerangka ekonomi hijau, transformasi diarahkan pada pengelolaan sumber daya darat secara berkelanjutan melalui penguatan pertanian organik, agroforestri, rehabilitasi lahan kritis, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS dan mikrohidro. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi porsi EBT dalam bauran energi primer daerah, sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil yang berisiko tinggi terhadap emisi. Sementara itu, pada sektor perikanan dan kelautan, penerapan ekonomi biru diwujudkan melalui penangkapan ikan ramah lingkungan, perlindungan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, dan lamun), serta pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat. Dengan penerapan ekonomi hijau dan biru, Kabupaten Biak Numfor dapat memastikan transformasi ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pentingnya integrasi pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan.

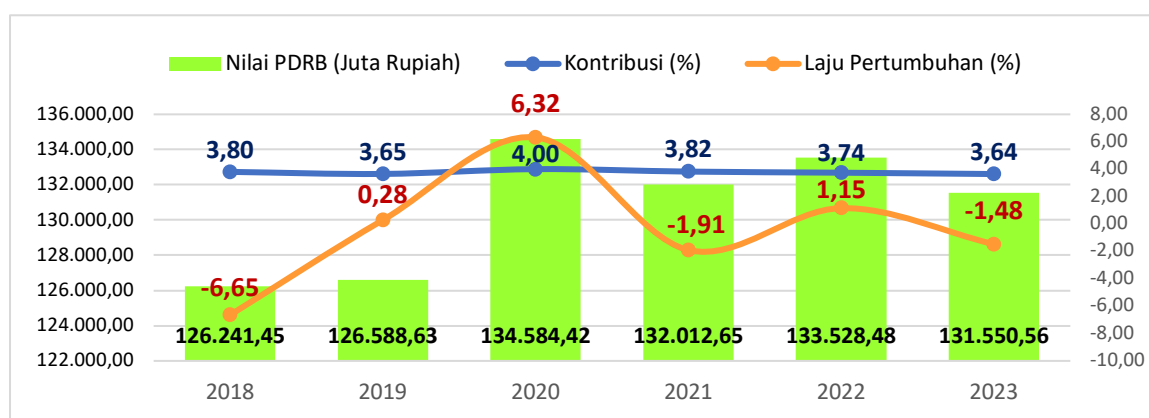
2.1.3.4 Transformasi Digital

Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting saat ini untuk memudahkan interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Gambar II.52 menunjukkan nilai dan kontribusi lapangan usaha komunikasi dan informasi terhadap PDRB ADHK Biak Numfor tahun 2018-2023. Berdasarkan Gambar II.52 dapat diketahui terdapat peningkatan nilai PDRB ADHK lapangan usaha komunikasi dan informasi dari 126.241,45 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 131.550,56 juta rupiah pada tahun 2023. Meskipun demikian, meningkatnya nilai absolut ini belum diiringi dengan peningkatan kontribusi karena cenderung stagnan dari 3,8% pada tahun 2018 menjadi 3,64% pada tahun 2023.

Sebagai salah satu alternatif media komunikasi, fungsi jasa pos saat ini masih tetap dimanfaatkan di Kabupaten Biak Numfor terutama untuk memberikan jasa pelayanan giro cek pos, wesel pos, surat biasa, dan surat tercatat. Adapun sarana komunikasi yang telah berkembang signifikan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2018-2024 adalah keberadaan BTS, akses sinyal telepon seluler, akses internet, akses program TV dan radio, serta keberadaan warnet sebagai salah satu sarana komunikasi (lihat Tabel II.69). Berdasarkan Tabel II.69 diketahui terdapat peningkatan signifikan jumlah kampung/kelurahan yang memiliki BTS dari 39 kampung/kelurahan pada tahun 2018 menjadi 132 kampung/kelurahan pada tahun

2024. Peningkatan juga terjadi pada keberadaan sarana komunikasi lainnya seperti warnet yang telah tersedia di 44 kampung/kelurahan pada tahun 2024. Hingga tahun 2024, peningkatan ketersediaan sarana komunikasi di Kabupaten Biak Numfor beriringan dengan peningkatan akses sinyal internet 5G/4G/LTE di 251 kampung/kelurahan, serta peningkatan akses sinyal telepon seluler kuat dan sangat kuat di 221 kampung/kelurahan, meskipun masih terdapat kampung/kelurahan dengan sinyal internet dan telepon seluler yang lemah.

Gambar II.52 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB ADHK Biak Numfor 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2024

Tabel II.69 Banyaknya Kampung/Kelurahan di Kabupaten Biak Numfor Menurut Keberadaan BTS, Kekuatan Sinyal Telepon, Akses Internet, Akses Program TV, Akses Program Radio, serta Keberadaan Sarana Komunikasi

No	Uraian	2018		2021		2024	
		Kampung/ Kelurahan	%	Kampung/ Kelurahan	%	Kampung/ Kelurahan	%
1	Keberadaan BTS	39	14,89	57	21,27	132	48,71
2	Kekuatan Sinyal Telepon Seluler						
	a. Sangat kuat	26	9,92	77	28,73	76	28,04
	b. Kuat	74	28,24	76	28,36	145	53,51
	c. Lemah	91	34,73	75	27,99	50	18,45
	d. Tidak Ada Sinyal	71	27,10	40	14,93	0	0,00
3	Akses Sinyal Internet GSM / CDMA						
	a. 5G/4G/LTE	18	6,87	149	55,60	251	92,62
	b. 3G/H/H+	42	16,03	10	3,73	12	4,43
	c. 2G/E/GPRS	63	24,05	30	11,19	2	0,74
	d. Tidak ada sinyal internet	68	25,95	39	14,55	6	2,21
4	Akses Program TV						
	a. TVRI	256	97,71	246	91,79	266	98,15
	b. TVRI Daerah	245	93,51	229	85,45	261	96,31
	c. TV swasta	253	96,56	232	86,57	263	97,05

No	Uraian	2018		2021		2024	
		Kampung/ Kelurahan	%	Kampung/ Kelurahan	%	Kampung/ Kelurahan	%
	d. TV luar negeri	253	96,56	227	84,70	254	93,73
	e. Tidak ada program televisi yang dapat diterima	5	1,91	19	7,09	4	1,48
5	Akses Program Radio						
	a. RRI	183	69,85	174	64,93	197	72,69
	b. RRI Daerah	173	66,03	166	61,94	194	71,59
	c. Radio swasta/komunitas	107	40,84	123	45,90	160	59,04
6	Keberadaan Sarana Komunikasi						
	a. Warnet	12	4,58	32	11,94	44	16,24
	b. Kantor Pos/ Pos Pembantu / Rumah Pos	21	8,02	11	4,10	5	1,85
	c. Pos Keliling	38	14,50	15	5,60	7	2,58
	d. Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta	13	4,96	8	2,99	6	2,21

*nilai persentase merupakan persentase terhadap seluruh kampung/Kelurahan di Kabupaten Biak Numfor (tahun 2018: 262 kampung/kelurahan; tahun 2021: 268 kampung/kelurahan; dan tahun 2024: 271)
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018, 2021, 2024 dalam dokumen "Statistik Potensi Desa"

Tabel II.70 menunjukkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler, komputer dan pernah mengakses internet di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan Tabel II.70 diketahui terdapat peningkatan penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon dan internet di Biak Numfor tahun 2019-2024. Penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler meningkat dari 60,15% pada tahun 2019 menjadi 66,03% pada tahun 2024. Penduduk yang menggunakan komputer cenderung stagnan dari 10,68% pada tahun 2019 menjadi 9,53% pada tahun 2024. Adapun penduduk yang menggunakan akses internet mengalami peningkatan signifikan dari 34,30% pada tahun 2019 menjadi 52,81% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Tabel II.70 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer dan Pernah Mengakses Internet di Kabupaten Biak Numfor

Penggunaan Media Komunikasi dan Informatika		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk +5 tahun yang menggunakan telepon seluler untuk keperluan komunikasi	60,15	68,67	67,44	67,58	66,33	66,03
2	Penduduk +5 tahun yang menggunakan komputer (PC/dekstop, laptop/ notebook, tablet)	10,68	13,16	9,97	7,54	10,30	9,53
3	Penduduk +5 tahun yang pernah mengakses internet (termasuk media sosial)	34,30	39,12	43,61	47,84	50,55	52,81

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.71 menunjukkan jenis media yang digunakan, tempat akses dan tujuan pemanfaatan internet penduduk Kabupaten Biak Numfor yang menggunakan internet. Dapat diketahui bahwa jenis media yang paling banyak digunakan penduduk untuk mengakses internet adalah ponsel yaitu sebesar 98,31% pada tahun 2024. Tempat akses internet yang paling banyak digunakan penduduk Biak Numfor adalah rumah sendiri (94,35%), dan tempat umum (42,80%). Adapun tujuan pemanfaatan internet mayoritas penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah untuk mencari informasi/berita (79,49%), untuk menggunakan media sosial (75,76%), serta hiburan (90,76%).

Tabel II.71 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet Berdasarkan Jenis Media yang Digunakan, Tempat Akses dan Tujuan Pemanfaatan Internet

Kategori Penduduk +5 tahun yang Pernah Mengakses Internet			2020	2022	2024
Berdasarkan jenis media yang digunakan	1	mengakses internet menggunakan PC	3,17	2,25	1,75
	2	mengakses internet menggunakan laptop	13,98	6,50	10,54
	3	mengakses internet menggunakan ponsel	97,30	99,33	98,31
	4	mengakses internet menggunakan media lainnya	0,00	0,08	n.a
Berdasarkan Tempat Akses Internet	1	rumah sendiri	77,75	94,64	94,35
	2	bukan rumah sendiri	10,89	15,86	26,39
	3	kantor	23,92	22,94	19,52
	4	sekolah/kampus	10,04	10,40	12,96
	5	tempat umum (gratis)	14,24	40,60	42,80
	6	tempat umum (berbayar)	10,74		
	7	kondisi bergerak	17,28	19,56	17,54
Tujuan Pemanfaatan Internet	1	Informasi/berita	63,34	85,75	79,49
	2	pembelajaran online	26,09	8,08	5,74
	3	email	17,15	8,99	7,06
	4	media sosial	82,08	73,56	75,76
	5	membeli barang/jasa	12,43	5,08	5,13
	6	menjual barang/jasa	3,63	2,95	1,26
	7	hiburan	70,93	88,13	90,76
	8	finansial	10,36	3,25	6,73
	9	informasi barang dan jasa	8,05	13,62	4,85
	10	Pembuatan konten digital	0	1,63	n.a
	11	lainnya	3,17	17,05	4,03

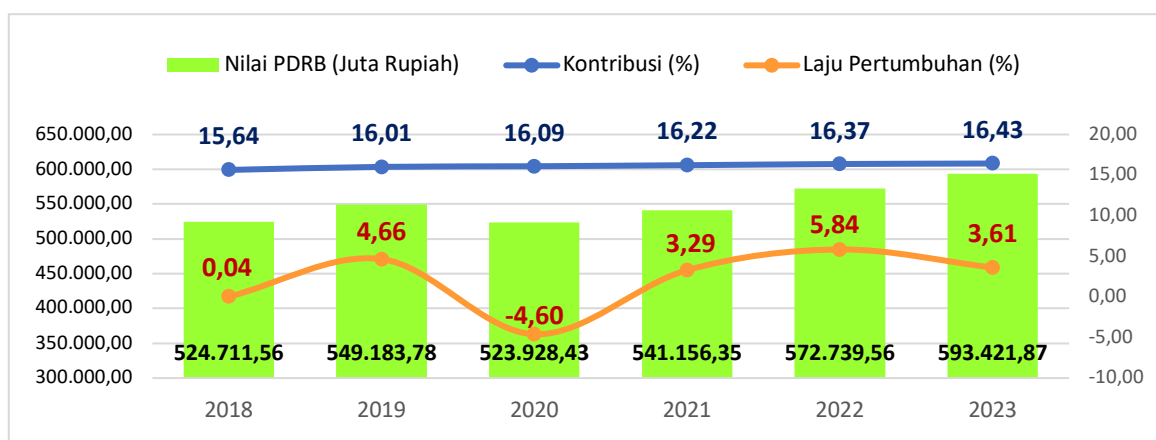
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Biak Numfor, baik sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, penyedia barang dan jasa bagi masyarakat, maupun integrasi ekonomi domestik dan global. Perkembangan sektor ini mencerminkan dinamika konsumsi, distribusi, serta daya beli masyarakat, yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan data PDRB ADHK Kabupaten Biak Numfor tahun 2018-2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan **kontribusi yang relatif stabil terhadap total PDRB, berkisar antara 15,64% hingga 16,43%** (lihat Gambar II.53).

Nilai PDRB sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama tahun 2018-2023. Pada tahun 2019, sektor ini tumbuh sebesar 4,66%, namun mengalami kontraksi pada 2020 dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -4,60% sebagai dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pasca penurunan tersebut, sektor ini menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 3,29%, kemudian meningkat lebih signifikan pada 2022 sebesar 5,84%, dan melanjutkan tren positif pada 2023 dengan pertumbuhan sebesar 3,61%. Tren pertumbuhan sektor perdagangan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan perbaikan kendaraan di wilayah Biak Numfor. Stabilitas dan pertumbuhan sektor perdagangan ini menunjukkan peranannya yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar II.53 Nilai, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHK Biak Numfor Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

Sarana perdagangan di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan distribusi yang tidak merata di setiap distrik. Dari 271 kampung/kelurahan di Kabupaten Biak Numfor, sebanyak 247 kampung/kelurahan (91,14%) tidak memiliki kelompok pertokoan maupun pasar, yang mencerminkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas perdagangan formal di Biak Numfor. Keberadaan toko atau warung kelontong menjadi yang paling dominan dengan sebaran di 226 kampung/kelurahan, menunjukkan bahwa pola perdagangan di Biak Numfor masih didominasi oleh usaha kecil dan tradisional.

Tabel II.72 Banyaknya Kampung/Kelurahan di Kabupaten Biak Numfor Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan, Kelompok Pertokoan, Pasar dan Toko/Kios Sarana Produksi Pertanian Tahun 2024

Distrik	Minimarket /swalayan / supermarket	Restoran /rumah makan	Warung/kedai makanan minuman	Toko/warung kelontong	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	Pasar tanpa Bangunan	Tidak Ada Kelompok Pertokoan dan Pasar
Numfor Barat	-	-	1	12	-	-	1	-	11
Orkeri	-	-	-	9	-	-	-	-	9
Numfor Timur	-	-	3	9	-	-	1	-	8
Bruyadori	-	-	-	9	-	-	-	-	10
Poiru	-	-	-	9	-	-	-	-	9
Padaido	-	-	-	11	-	-	-	-	11
Aimando Padaido	-	-	-	13	-	-	-	-	13
Biak Timur	1	-	2	20	-	2	-	-	24
Oridek	-	-	-	11	-	-	-	-	14
Biak Kota	8	5	11	22	4	1	2	1	19
Samofa	5	5	13	18	4	1	2	-	12
Yendidori	-	-	-	18	-	-	-	-	19
Biak Utara	-	2	2	16	-	-	2	1	13
Andey	-	-	-	4	-	-	-	-	12
Warsa	-	-	-	3	-	2	3	1	14
Yawosi	-	-	1	8	-	1	-	-	7
Bondifuar	-	-	-	3	-	-	-	-	5
Biak Barat	-	-	-	15	-	-	-	-	21
Swandiwe	-	-	-	16	-	-	-	-	16
Biak Numfor	14	12	33	226	8	7	11	3	247

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "Statistik Potensi Desa"

Minimarket atau swalayan/supermarket hanya terdapat di 14 kampung/kelurahan (5,17%), terutama terkonsentrasi di distrik dengan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi seperti Biak Kota dan Samofa. Selain itu, terdapat restoran atau rumah makan yang tersebar di 12 kampung/kelurahan, serta warung atau kedai yang

tersebar di 33 kampung/kelurahan. Keberadaan pasar juga cukup terbatas, dengan hanya 7 pasar berbangunan permanen, 11 pasar dengan bangunan semi permanen, dan 3 pasar tanpa bangunan. Sebagian besar pasar ini berada di distrik perkotaan seperti Biak Kota dan Samofa, yang merupakan pusat ekonomi di Biak Numfor. Kondisi ini menunjukkan bahwa **akses terhadap sarana perdagangan formal masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan yang masih mengandalkan perdagangan skala kecil**. Perlu adanya upaya pengembangan infrastruktur perdagangan yang lebih merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari.

Tabel II.73 Banyaknya Kampung/Kelurahan di Kabupaten Biak Numfor Menurut Keberadaan Produk Barang Unggulan dan Diekspor ke Negara Lain Tahun 2024

Distrik	Produk Barang Unggulan		Produk Unggulan Diekspor ke Negara Lain	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Numfor Barat	-	12	-	-
Orkeri	-	9	-	-
Numfor Timur	-	9	-	-
Bruyadori	-	10	-	-
Poiru	-	9	-	-
Padaido	2	9	-	2
Aimando Padaido	8	5	-	8
Biak Timur	4	22	-	4
Oridek	-	14	-	-
Biak Kota	3	20	-	3
Samofa	-	18	-	-
Yendidori	3	16	-	3
Biak Utara	-	16	-	-
Andey	-	12	-	-
Warsa	2	18	-	2
Yawosi	-	8	-	-
Bondifuar	-	5	-	-
Biak Barat	-	21	-	-
Swandiwe	-	16	-	-
Biak Numfor	22	249	0	22

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor (2024), dalam dokumen "Statistik Potensi Desa"

Selain berperan dalam penyedia barang dan jasa bagi masyarakat, sektor perdagangan juga berperan dalam penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu faktor pendukung berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Biak Numfor adalah ketersediaan produk barang unggulan, serta produk unggulan yang diekspor ke negara lain. Berdasarkan data tahun 2024, sebagian besar kampung/kelurahan di Kabupaten Biak Numfor belum memiliki produk barang unggulan yang dapat dikembangkan sebagai komoditas ekonomi. **Dari total 271 kampung/kelurahan, hanya 22 kampung/kelurahan (8,12%) yang memiliki**

produk unggulan, sementara 249 kampung/kelurahan lainnya (91,88%) tidak memiliki produk unggulan yang teridentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal masih belum tergalai secara optimal atau belum mendapatkan dukungan dalam pengembangan sektor unggulan.

Lebih lanjut, tidak ada satu produk unggulan yang diekspor ke negara lain, meskipun terdapat kampung/kelurahan yang memiliki produk unggulan. Pada tahun 2024 sebanyak 22 kampung/kelurahan yang memiliki produk unggulan pun belum mampu menembus pasar ekspor, yang mengindikasikan **masih terbatasnya akses pasar, infrastruktur, serta nilai tambah produk yang dapat bersaing di tingkat internasional.** Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempromosikan potensi ekonomi lokal agar dapat meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memberikan pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas agar produk unggulan dari Biak Numfor dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah, bahkan hingga ke pasar ekspor.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

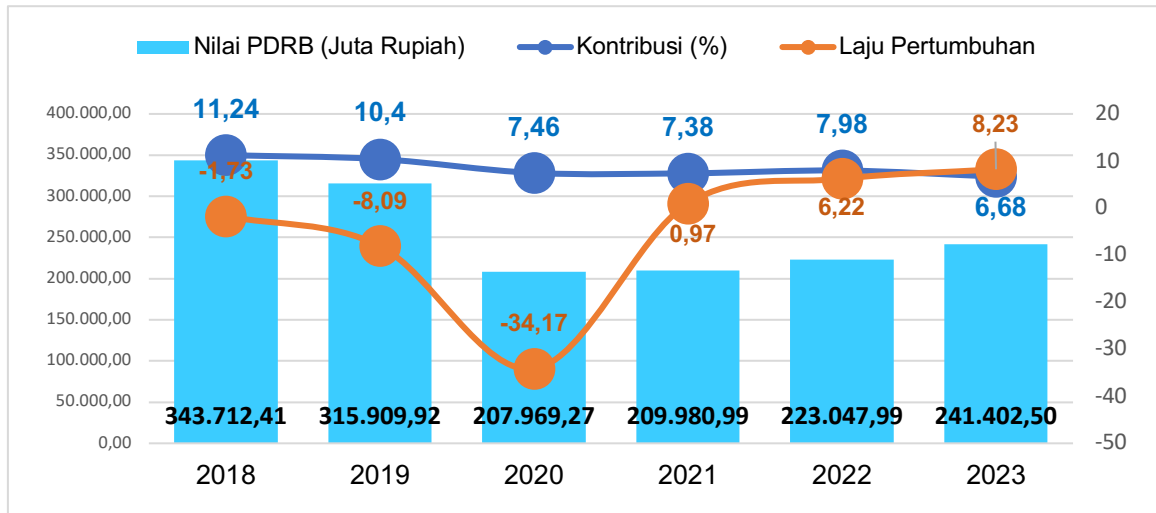
2.1.3.6.1 Konektivitas

Sebagai wilayah kepulauan yang terletak di jalur pelayaran strategis, Biak Numfor membutuhkan sistem transportasi yang andal untuk menghubungkan Biak Numfor dengan wilayah lain di Papua, Maluku, Sulawesi, dan bahkan internasional. Transportasi laut dan udara menjadi tulang punggung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu, kebijakan di bidang perhubungan harus diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan bandara, memperluas jaringan transportasi, serta memastikan kelancaran arus barang dan jasa.

Akses transportasi yang efisien berkontribusi pada ketahanan pangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, terutama karena sebagian besar pasokan logistik masih bergantung pada transportasi laut dan udara. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur transportasi akan membuka peluang investasi, mempercepat distribusi hasil perikanan dan komoditas unggulan, serta mendorong sektor pariwisata bahari yang potensial di Kabupaten Biak Numfor. Keamanan dan keselamatan transportasi juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan, termasuk pengawasan terhadap operasional kapal dan pesawat, mitigasi risiko kecelakaan, serta peningkatan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Dengan kebijakan perhubungan

yang tepat, Kabupaten Biak Numfor dapat semakin berkembang sebagai pusat logistik dan transportasi yang mendukung kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar II.54 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2023

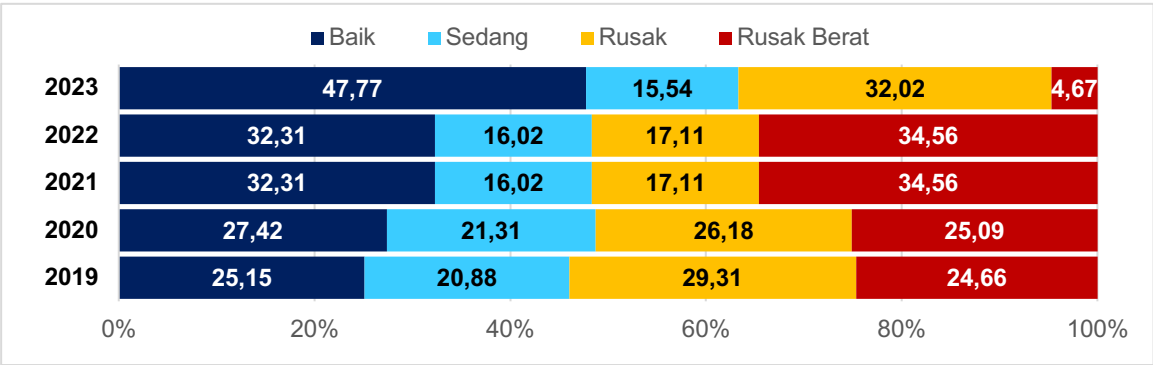
Gambar II.54 menunjukkan nilai dan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2018-2023. Berdasarkan Gambar II.54 dapat diketahui terdapat penurunan nilai PDRB ADHK lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kabupaten Biak Numfor dari 343,71 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 241,40 miliar rupiah pada 2023. Penurunan nilai ini juga diiringi penurunan kontribusi lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian daerah dari 11,24% pada tahun 2018 menjadi 6,68% pada tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan sektor lainnya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan termasuk dalam **sektor maju namun tertekan** (lihat Gambar II.31). Sektor transportasi dan pergudangan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB namun mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan sektor lainnya. Dalam mengatasi hal ini dan mendorong sektor transportasi dan pergudangan agar kembali berkembang, diperlukan beberapa intervensi kebijakan yang tepat, diantaranya: (1) peningkatan infrastruktur transportasi; (2) optimalisasi konektivitas dan jaringan transportasi; (3) insentif dan subsidi bagi sektor transportasi dan logistik; (4) digitalisasi dan inovasi dalam transportasi dan logistik; serta (5) penguatan SDM dan kapasitas manajemen transportasi.

2.1.3.6.1.2 Transportasi Darat

Transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang di dalam wilayah kepulauan ini. Sebagai daerah yang sebagian besar terdiri dari Pulau Biak, sistem transportasi darat di wilayah ini bergantung pada jaringan jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, fasilitas umum, pelabuhan, dan bandara. Meskipun transportasi darat di Biak Numfor telah mengalami perbaikan, masih terdapat tantangan dalam hal konektivitas, kualitas infrastruktur jalan, serta ketersediaan transportasi umum yang terjangkau dan efisien. Gambar II.55 menunjukkan kondisi permukaan jalan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2023. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 47,77% (237,31 km) jalan di Kabupaten Biak Numfor berada dalam kondisi baik, 15,54% (77,21 km) berada dalam kondisi sedang, 32,02% (159,07 km) dalam kondisi rusak, dan 4,67% (23,18 km) dalam kondisi rusak berat. Terdapat peningkatan kondisi jalan baik di Kabupaten Biak Numfor dari 25,15% (198,07 km) pada tahun 2019 menjadi 47,77% (237,31 km) pada tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan peningkatan akses transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor pada 2019-2023.

Gambar II.55 Kondisi Jalan di Kabupaten Biak Numfor (%) Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor 2024

Tabel II.74 Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Kecelakaan dan Kerugian Material yang Diakibatkan oleh Kecelakaan Tercatat pada Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Bulan	Banyaknya Kecelakaan	Korban Kecelakaan	Kerugian Material
Januari	25	39	39.500.000
Februari	23	35	37.500.000
Maret	21	41	145.600.000
April	24	29	68.900.000
Mei	31	37	41.800.000
Juni	17	23	20.000.000

Bulan		Banyaknya Kecelakaan	Korban Kecelakaan	Kerugian Material
Juli		29	37	73.800.000
Agustus		23	29	55.000.000
September		20	30	30.000.000
Oktober		21	30	30.000.000
November		13	15	21.000.000
Desember		22	27	60.000.000
Total	2023	269	372	623.100.000
	2022	207	381	480.300.000
	2021	187	328	410.400.000
	2018	182	336	501.300.000

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2020-2024 (dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka")

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023, tercatat sebanyak 269 kasus kecelakaan dengan 372 korban serta kerugian material mencapai Rp 623,1 juta. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kecelakaan dan kerugian material pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, yang dapat dikaitkan dengan kondisi jalan di Biak Numfor.

Kondisi jalan yang kurang optimal, terutama yang mengalami kerusakan, kemungkinan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kecelakaan. Jalan yang rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena permukaan yang tidak rata, berlubang, serta minimnya rambu lalu lintas dan penerangan di beberapa titik. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal, terutama di daerah dengan lalu lintas padat atau jalur yang menghubungkan pusat kota dengan daerah pinggiran. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap perilaku pengendara, termasuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas, serta kesadaran terhadap pentingnya perawatan kendaraan. Dengan perbaikan kondisi jalan dan peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas, diharapkan angka kecelakaan di Kabupaten Biak Numfor dapat ditekan, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih aman dan efisien.

2.1.3.6.1.3 Transportasi Udara

Aktivitas penerbangan di Bandara Frans Kaisiepo Kabupaten Biak Numfor mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam jumlah pesawat dan penumpang, meskipun sektor kargo mulai menunjukkan pemulihan. Jumlah pesawat yang datang dan berangkat terus menurun dari 3.477 dan 3.484

unit pada 2018 menjadi hanya 1.652 dan 1.656 unit pada 2023. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya frekuensi penerbangan yang kemungkinan besar disebabkan oleh rendahnya permintaan transportasi udara. Hal ini sejalan dengan jumlah penumpang yang juga mengalami penurunan drastis. Jika pada 2018 jumlah penumpang yang datang mencapai 198.629 orang dan yang berangkat sebanyak 209.803 orang, maka pada 2023 angka tersebut menurun menjadi 108.472 dan 110.186 penumpang. Penurunan paling tajam terjadi pada periode 2020-2022 akibat pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat dan menekan industri penerbangan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penumpang masih jauh di bawah angka sebelum pandemi.

Di sisi lain, jumlah kargo menunjukkan tren yang lebih positif. Setelah mengalami penurunan pada 2020 dan 2021, aktivitas bongkar-muat kargo di bandara mulai meningkat pada 2023, dengan jumlah kargo yang dibongkar mencapai 972.041 kg dan yang dimuat sebesar 840.685 kg. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penerbangan dan penumpang menurun, transportasi barang melalui udara mulai pulih, yang dapat didorong oleh meningkatnya perdagangan dan distribusi barang di wilayah Papua.

Tabel II.75 Produksi Angkutan Udara Bandara Frans Kaiseipo Tahun 2023

Bulan		Jumlah Pesawat		Jumlah Penumpang		Jumlah Kargo (kg)	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Bongkar	Muat
Januari		143	143	8.307	10.026	86.789	86.030
Februari		126	127	7.436	7.527	75.590	59.316
Maret		143	143	8.712	9.177	78.601	69.473
April		123	124	7.737	9.627	66.069	74.237
Mei		121	121	9.373	8.447	81.744	61.776
Juni		125	125	8.310	9.334	68.601	71.246
Juli		129	129	9.552	8.673	77.621	59.603
Agustus		154	154	8.658	8.472	68.644	59.272
September		157	158	8.202	7.803	67.454	53.509
Oktober		139	140	8.880	8.892	78.806	59.878
November		140	140	10.834	10.897	83.757	73.081
Desember		152	152	12.471	11.311	138.365	113.264
Total	2023	1.652	1.656	108.472	110.186	972.041	840.685
	2022	1.862	1.863	59.474	61.213	431.312	122.307
	2021	2.109	2.112	71.499	72.664	535.331	243.568
	2020	2.738	2.742	125.056	132.300	723.324	569.724
	2018	3.477	3.484	198.629	209.803	912.209	407.568

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2020-2024 (dalam dokumen "Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka")

Melihat kondisi ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kembali aktivitas penerbangan di Bandara Frans Kaisiepo. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan konektivitas penerbangan ke kota-kota besar di Indonesia, mendorong sektor pariwisata dengan promosi wisata Biak Numfor, serta mengembangkan potensi kargo udara, terutama untuk mendukung ekspor komoditas unggulan seperti hasil perikanan dan pertanian. Selain itu, insentif bagi maskapai untuk membuka kembali rute-rute yang sebelumnya ditutup akibat pandemi juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan. Dengan pendekatan yang tepat, Bandara Frans Kaisiepo dapat kembali menjadi pusat transportasi udara yang strategis di Papua serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.6.1.4 Transportasi Laut

Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan untuk mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi, terutama untuk wilayah Biak Numfor. Berdasarkan data kunjungan kapal menurut jenis pelayaran di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023, terlihat bahwa mayoritas kunjungan kapal di Biak Numfor berasal dari dalam negeri. Kunjungan kapal luar negeri tercatat terjadi pada tahun 2020 (4 kunjungan), tahun 2021 (1 kunjungan), dan tahun 2023 (6 kunjungan). Sementara itu, kunjungan kapal dalam negeri menunjukkan tren yang lebih stabil meskipun mengalami fluktuasi. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 (hanya 609 kunjungan), yang kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid-19. Namun, jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi 786 pada 2021, dan melonjak menjadi 927 kunjungan pada tahun 2023, menunjukkan adanya pemulihan aktivitas pelayaran. Kenaikan signifikan kunjungan kapal luar negeri pada tahun 2023 juga mengindikasikan peningkatan aktivitas perdagangan atau pariwisata internasional.

Tabel II.76 Banyaknya Kunjungan Kapal Menurut Jenis Pelayaran di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Bulan	Luar Negeri	Dalam Negeri
Januari	0	136
Februari	0	70
Maret	0	73
April	1	74
Mei	0	74
Juni	0	71
Juli	0	75
Agustus	1	60

Bulan		Luar Negeri	Dalam Negeri
September		0	65
Oktober		4	92
November		0	55
Desember		0	82
Total	2023	6	927
	2022	0	791
	2021	1	786
	2020	4	609
	2019	0	771

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor, 2020-2024 (dalam dokumen “Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka”)

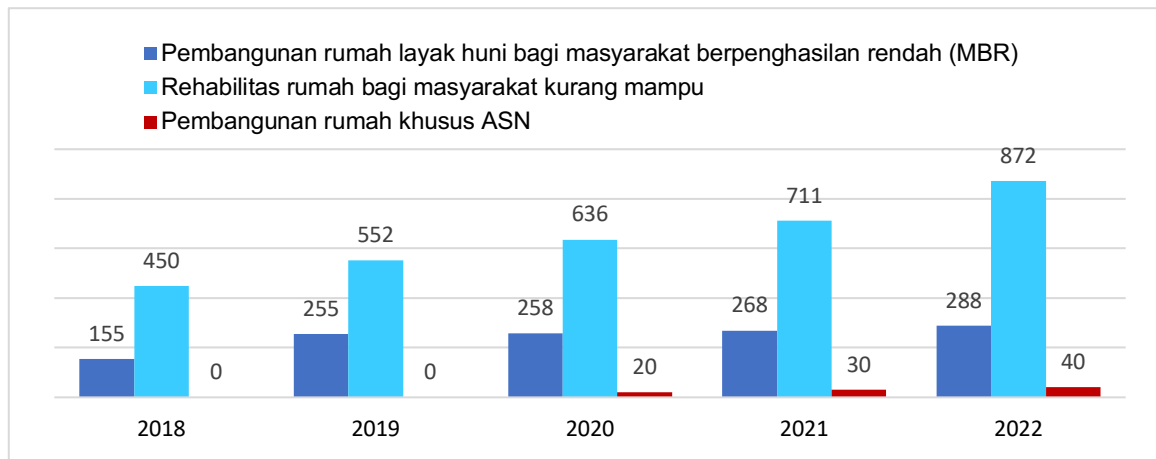
Dalam mengembangkan transportasi laut di Kabupaten Biak Numfor, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah dan terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah penguatan infrastruktur pelabuhan dengan meningkatkan kapasitas dan fasilitas Pelabuhan Biak agar dapat menampung lebih banyak kapal, baik domestik maupun internasional. Modernisasi dermaga, gudang logistik, dan fasilitas bongkar muat juga perlu dilakukan guna mempercepat distribusi barang dan penumpang. Selain itu, peningkatan konektivitas dan rute pelayaran menjadi faktor penting, seperti pembukaan rute baru atau peningkatan frekuensi pelayaran agar Biak lebih terhubung dengan pelabuhan utama di Papua, Maluku, dan Sulawesi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi bagi kapal perintis untuk mendukung wilayah terpencil serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

2.1.3.6.2 Akses Hunian Layak

Pembangunan rumah layak huni juga merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana guna pengembangan wilayah. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Jumlah pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Biak Numfor hingga tahun 2018 adalah sebanyak 155 unit dengan rehabilitasi rumah sebanyak 450 unit. Jumlah unit rumah tersebut mengalami peningkatan pembangunan pada tahun 2022 menjadi 288 unit dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat kurang mampu sehingga menjadi 872 unit dan pembangunan khusus rumah ASN sebanyak 40 unit rumah. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Biak Numfor terus meningkat, ditunjukkan oleh tren kenaikan.

Gambar II.56 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Biak Numfor Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Biak Numfor 2023

2.1.3.6.3 Kawasan Kumuh

Salah satu permasalahan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di Kampung. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografi di kawasan kumuh (Slum) seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan prasarana sosial budaya. Secara sosiologi permukiman kumuh adalah suatu permukiman tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah permukiman yang tinggal atau berada di dalam suatu lingkungan yang rendah kualitasnya dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Tabel II.77 Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Biak Numfor

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi	Tingkat Kekumuhan
1	Belakang Bempo– Yenures	29.69	Distrik Biak Kota	Kumuh berat
2	Belakang Hadi/Patina	13.57	Distrik Biak Kota	Kumuh berat
3	Kampung Baru– Snerbo	21.03	Distrik Samofa	Kumuh sedang
4	Belakang pasar Inpres-Waupnor	10.46	Distrik Biak Kota	Kumuh sedang
Total		74.75		

Sumber: RP2KPKP Kabupaten Biak Numfor, 2016

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 2 tahun 2006 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, air limbah, persampahan, proteksi kebakaran. Untuk Kabupaten Biak Numfor yang memiliki kriteria dimaksud serta merujuk pada Surat Keputusan Bupati Nomor 050.1/18/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Biak Numfor adalah seperti Tabel II.77.

2.1.3.6.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru pembangunan yang terfokus pada masyarakat dan institusi lokal daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Kabupaten Biak Numfor dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten. IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam 5 (lima) status sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.78. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya fasilitasi pemajuan kampung di Kabupaten Biak Numfor menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel II.78 Klasifikasi Kampung Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
1	kampung sangat tertinggal	$0,270 \leq \text{IDM} \leq 0,491$
2	kampung tertinggal	$0,491 < \text{IDM} \leq 0,599$
3	kampung berkembang	$0,599 < \text{IDM} \leq 0,707$
4	kampung maju	$0,707 < \text{IDM} \leq 0,815$
5	kampung mandiri	$0,815 < \text{IDM} \leq 0,920$

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021

Tabel II.79 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2023

Uraian	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata IDM Kabupaten Biak Numfor	0,5254	0,5244	0,5249	0,5446	0,5638	0,5709
Status IDM Kabupaten	Tertinggal					

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam dokumen "Status IDM Indeks Desa Membangun Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Tahun 2015-2023"

Berdasarkan Tabel II.79 diketahui bahwa terdapat peningkatan IDM Kabupaten Biak Numfor dari 0,5254 pada tahun 2015 menjadi 0,5709 pada tahun 2023, meskipun masih dalam kategori “tertinggal”. Apabila melihat Tabel II.80 diketahui bahwa dari 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor, terdapat 1 distrik yang termasuk kategori maju dengan capaian IDM 0,70909 pada tahun 2023 yaitu Numfor Timur. Terdapat 3 distrik yang termasuk kategori “berkembang” pada tahun 2023 yaitu Distrik Biak Kota (0,61829), Distrik Samofa (0,63100), dan Distrik Biak Utara (0,60068). Meskipun demikian, terjadi penurunan status Distrik Bondifuar dari “distrik berkembang” pada tahun 2021 menjadi “distrik tertinggal” pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terdapat perbaikan signifikan dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung di Kabupaten Biak Numfor.

Tabel II.80 Indeks Desa Membangun (IDM) 19 Distrik di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Distrik	Jumlah Kampung	2019		2021		2023	
			IDM	Status	IDM	Status	IDM	Status
1	Numfor Barat	12	0,5145	Tertinggal	0,5234	Tertinggal	0,59389	Tertinggal
2	Numfor Timur	9	0,5361	Tertinggal	0,5813	Tertinggal	0,70909	Maju
3	Orkeri	9	0,5292	Tertinggal	0,5740	Tertinggal	0,59687	Tertinggal
4	Poiru	9	0,4083	Sangat tertinggal	0,5053	Tertinggal	0,55568	Tertinggal
5	Bruyadori	10	0,5018	Tertinggal	0,5264	Tertinggal	0,58657	Tertinggal
6	Padaido	11	0,4708	Sangat tertinggal	0,4486	Sangat tertinggal	0,49410	Tertinggal
7	Aimando Padaido	13	0,4860	Sangat tertinggal	0,4807	Sangat tertinggal	0,42018	Sangat tertinggal
8	Oridek	14	0,5253	Tertinggal	0,5418	Tertinggal	0,55944	Tertinggal
9	Biak Timur	26	0,5495	Tertinggal	0,5607	Tertinggal	0,57972	Tertinggal
10	Biak Kota	15	0,5914	Tertinggal	0,5933	Tertinggal	0,61829	Berkembang
11	Samofa	10	0,5448	Tertinggal	0,5839	Tertinggal	0,63100	Berkembang
12	Yendidori	19	0,5028	Tertinggal	0,5622	Tertinggal	0,59177	Tertinggal
13	Biak Utara	16	0,5767	Tertinggal	0,5667	Tertinggal	0,60068	Berkembang
14	Yawosi	8	0,5296	Tertinggal	0,5861	Tertinggal	0,58910	Tertinggal
15	Andey	11	0,5258	Tertinggal	0,5231	Tertinggal	0,54744	Tertinggal
16	Bondifuar	5	0,5541	Tertinggal	0,6054	Berkembang	0,59878	Tertinggal
17	Warsa	20	0,5469	Tertinggal	0,5860	Tertinggal	0,59550	Tertinggal
18	Biak Barat	22	0,5224	Tertinggal	0,5261	Tertinggal	0,53378	Tertinggal
19	Swandiwe	15	0,4860	Sangat tertinggal	0,4824	Sangat tertinggal	0,50995	Tertinggal

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam dokumen “Status IDM Indeks Desa Membangun Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Tahun 2019, 2021, 2023”

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Kabupaten Biak Numfor tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. Dana Desa sebagai wujud implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan kampung di Kabupaten Biak Numfor. Kampung tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan

Tabel II.81 diketahui bahwa terdapat peningkatan alokasi Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat ke 254 kampung di Kabupaten Biak Numfor, dengan jumlah total Rp.149,82 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.185,91 milyar pada tahun 2023. Meningkatnya alokasi Dana Desa ini sejalan dengan meningkatnya nilai IDM yang mencerminkan perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung di Kabupaten Biak Numfor.

Tabel II.81 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun Anggaran	Jumlah Kampung Penerima	Alokasi Dana Desa (Ribu Rupiah)	
2016	254	149.820.407	2023 185.905.817
2017	254	190.896.995	2022 193.396.005
2018	254	180.816.067	2021 206.938.478
2019	254	202.716.131	2020 209.683.456
2020	254	209.683.456	2019 202.716.131
2021	254	206.938.478	2018 180.816.067
2022	254	193.396.005	2017 190.896.995
2023	254	185.905.817	2016 149.820.407

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, dalam dokumen "Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2016-2023"

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM)

Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKAM adalah badan hukum yang didirikan oleh kampung dan/atau bersama kampung-kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2019 terdapat 21 Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) aktif dari total 257 BUMKAM. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 27 BUMKAM yang aktif dari total 257 BUMKAM.

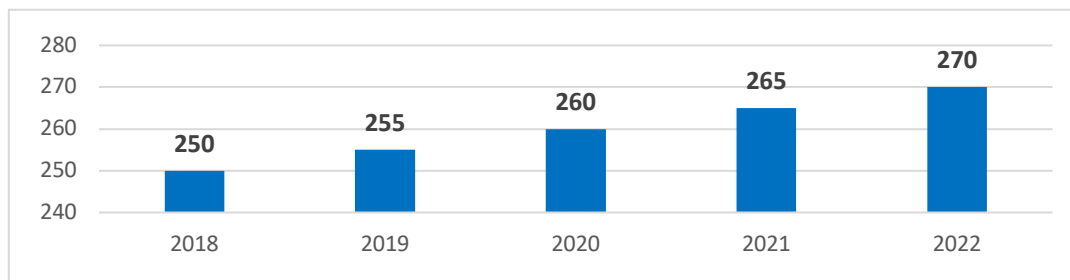
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Penanaman Modal

Penanaman modal memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Di Kabupaten Biak Numfor, investasi berkontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan semakin meningkatnya realisasi investasi, potensi ekonomi daerah dapat lebih tergali, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan daya saing daerah pun semakin kuat. Oleh karena itu, menarik investasi menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan daerah.

Dalam periode 2018-2022, investasi di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, nilai investasi tercatat sebesar 250 miliar rupiah, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 270 miliar rupiah pada tahun 2022. Peningkatan investasi ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah perbaikan sistem perizinan. Pada tahun 2018, proses perizinan investasi memerlukan waktu 10 hari, yang berpotensi menjadi hambatan bagi investor. Namun, melalui berbagai inovasi yang diterapkan dalam sistem administrasi, durasi pengurusan izin investasi dapat dipersingkat secara signifikan hingga hanya 1 hari pada tahun 2020, dengan catatan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Gambar II.57 Nilai Investasi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Penanaman Modal -PTSP, 2023

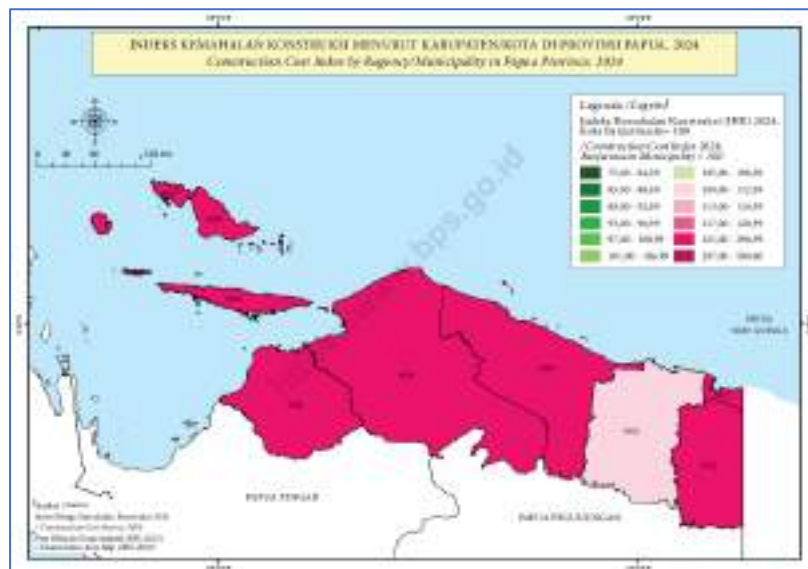
Efisiensi dalam perizinan ini diduga menjadi salah satu pendorong utama peningkatan investasi, karena memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya tanpa harus menghadapi prosedur yang panjang dan berbelit. Selain reformasi birokrasi dalam perizinan, faktor lain seperti potensi ekonomi daerah, infrastruktur pendukung, serta kebijakan strategis pemerintah daerah juga kemungkinan turut berkontribusi terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Biak Numfor. Ke depannya, untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah perlu terus memperkuat ekosistem

investasi, termasuk melalui insentif bagi investor, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan promosi potensi ekonomi daerah kepada calon investor.

2.1.3.7.2 Indeks Kemahalan Konstruksi

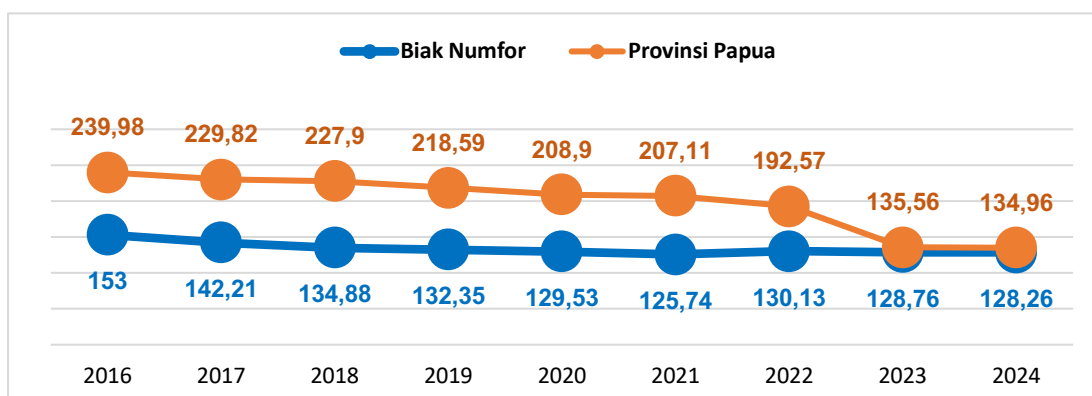
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula harga di daerah tersebut. Berdasarkan Gambar II.58 diketahui bahwa tingkat kesulitan geografis menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Papua memiliki **IKK yang sangat tinggi** meskipun dalam periode 2016-2024 terdapat trend penurunan IKK di Provinsi Papua.

Gambar II.58 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2024



Sumber: BPS RI dalam dokumen “Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024”

Gambar II.59 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua



Sumber: BPS RI dalam dokumen “Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024”

Gambar II.59 menunjukkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Biak Numfor dibandingkan dengan Provinsi Papua. Berdasarkan Gambar II.59 diketahui bahwa nilai IKK Biak Numfor jauh lebih rendah dari nilai IKK Provinsi Papua. Meskipun memiliki kondisi yang fluktuatif, nilai IKK Kabupaten Biak Numfor cenderung mengalami trend penurunan dari 153,00 pada tahun 2016 menjadi 128,26 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan pembangunan dalam 8 (delapan) tahun terakhir berimplikasi pada penurunan harga komoditas atau biaya pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

(dalam proses penyusunan)

2.1.4.1.2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun yang termasuk dalam dokumen kependudukan, meliputi: 1) Biodata penduduk; 2) Kartu keluarga; 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA); 4) Surat keterangan kependudukan; 5) Akta pencatatan sipil.

Tabel II.82 Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017-2024

Rentang Umur		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk 0-17 Tahun	53,72	48,11	56,85	58,93	57,64	65,26	66,12	74,42
2	Penduduk 0-4 Tahun	40,75	32,16	33,14	34,83	31,46	48,79	37,52	44,39

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.83 Persentase Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017-2022

Rentang Umur		Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk 5 Tahun ke Atas	Laki-laki	71,91	87,50	89,91	94,19
		Perempuan	69,18	87,92	89,24	93,73
		Total	70,58	87,71	89,58	93,97

Rentang Umur		Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
2	Penduduk 17 Tahun ke Atas	Laki-laki	73,89	89,47	91,94	95,81
		Perempuan	71,84	88,69	90,65	94,11
		Total	72,90	89,09	91,31	94,97
3	Penduduk Berumur 0-4 Tahun	Laki-laki	37,89	53,36	38,20	61,47
		Perempuan	19,58	36,89	40,84	55,86
		Total	28,74	45,27	39,50	58,73

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Indikator kinerja pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dijelaskan dalam subbab ini mencakup; (1) persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran; serta (2) persentase Penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tabel II.82 menunjukkan persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Biak Numfor tahun 2017-2024. Berdasarkan Tabel II.82 diketahui bahwa terdapat peningkatan trend kepemilikan akte kelahiran pada 2017-2024. Pada tahun 2017 kepemilikan akte kelahiran penduduk berumur 0-17 tahun sebesar 53,72% dan mengalami peningkatan menjadi 74,42% pada tahun 2024. Adapun pada penduduk usia 0-4 tahun cakupan kepemilikan akte kelahiran sebesar 40,75% pada tahun 2017 dan juga mengalami peningkatan menjadi 44,39% pada tahun 2024.

Tabel II.83 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan Tabel II.83 diketahui bahwa terdapat peningkatan persentase penduduk 5 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan penduduk berumur 0-4 tahun yang mempunyai NIK di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mempunyai NIK sebesar 70,58%, mengalami peningkatan menjadi 93,97% pada tahun 2022. Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang mempunyai NIK sebesar 72,90% pada tahun 2019 meningkat menjadi 94,97% pada tahun 2022. Begitupula dengan penduduk berumur 0-4 tahun yang mempunyai NIK pada tahun 2017 sebesar 28,74%, mengalami peningkatan menjadi 58,73% pada tahun 2022.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Konflik Massal

Konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ektrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal. Berdasarkan Tabel II.84 diketahui terdapat penurunan cakupan kampung/kelurahan yang pernah menjadi tempat perkelahian massal di Kabupaten Biak Numfor dari 10 kampung/kelurahan (3,73%) pada tahun 2018 menjadi 3 kampung/kelurahan (1,12%) pada tahun 2024. Dalam hal ini, jenis perkelahian massal yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024 adalah perkelahian antar kelompok masyarakat, perkelahian kelompok masyarakat antar kampung, serta perkelahian kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah. Pada tahun 2024 dari 268 kampung/kelurahan di Kabupaten Biak Numfor, 2 kampung/kelurahan merupakan lokasi perkelahian massal antar kelompok masyarakat, 1 kampung/kelurahan merupakan lokasi perkelahian massal kelompok masyarakat antar kampung, serta 1 kampung/kelurahan merupakan lokasi perkelahian massal kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah.

Tabel II.84 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Kondisi Perkelahian Massal di Kabupaten Biak Numfor

No	Uraian	2018		2021		2024	
		Kampung /Kelurahan	%*	Kampung /Kelurahan	%*	Kampung /Kelurahan	%*
Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir							
1	Antar Kelompok Masyarakat	4	1,49	2	0,75	2	0,75
2	Kelompok Masyarakat Antar Kampung	0	0,00	2	0,75	1	0,37
3	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	0	0,00	1	0,37	0	0,00
4	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	1	0,37	6	2,24	1	0,37
5	Pelajar/Mahasiswa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Antar Suku	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Lainnya	5	1,87	1	0,37	0	0,00
Banyaknya Kampung/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban		10	3,73	11	4,10	3	1,12
1	Meninggal	3	1,12	0	0,00	1	0,37
2	Luka-luka	7	2,61	5	1,87	2	0,75

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018, 2021, 2024 dalam dokumen "Statistik Potensi Desa Provinsi"

*persentase terhadap jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 268 kampung/kelurahan

2.1.4.2.2 Kejadian Tindak Kejahatan

Tabel II.85 menunjukkan banyaknya kampung yang mengalami kejadian tindak kejahatan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2018-2024 berdasarkan jenis tindak kejahatan. Berdasarkan Tabel II.85 diketahui terjadi peningkatan signifikan kondisi keamanan yang ditunjukkan dengan peningkatan cakupan kampung/kelurahan yang aman dari tindak kejahatan yaitu 216 kampung/kelurahan (80,60%) pada tahun 2018 menjadi 238 kampung/kelurahan (88,81%) pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahun 2024 masih terdapat kampung/kelurahan yang menjadi lokasi kejahatan yaitu: pencurian terjadi di 29 kampung/kelurahan, pencurian dengan kekerasan terjadi di 7 kampung/kelurahan, penganiayaan terjadi di 5 kampung/kelurahan dan perjudian di 5 kampung/kelurahan.

Tabel II.85 Banyaknya Kampung/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Biak Numfor

No	Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir	2018		2021		2024	
		Kampung /Kelurahan	%*	Kampung /Kelurahan	%*	Kampung /Kelurahan	%*
1	Pencurian	30	11,19	25	9,33	29	10,82
2	Pencurian dengan Kekerasan	5	1,87	4	1,49	7	2,61
3	Penipuan/penggelapan	9	3,36	6	2,24	2	0,75
4	Penganiayaan	18	6,72	11	4,10	5	1,87
5	Pembakaran	0	0,00	2	0,75	0	0,00
6	Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan	6	2,24	3	1,12	1	0,37
7	Penyalahgunaan/pengedaran narkoba	5	1,87	7	2,61	3	1,12
8	Perjudian	3	1,12	20	7,46	5	1,87
9	Pembunuhan	2	0,75	0	0,00	1	0,37
10	Perdagangan orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Korupsi	1	0,37	1	0,37	2	0,75
12	Tidak ada tindak kejahatan	216	80,60	232	86,57	238	88,81

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018, 2021, 2024 dalam dokumen "Statistik Potensi Desa Provinsi"

*persentase terhadap jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 268 kampung/kelurahan

2.1.4.2.3 Penyelesaian Konflik Massal

Tabel II.86 menunjukkan inisiator penyelesaian perkelahian massal dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2018-2024. Berdasarkan Tabel II.86 diketahui bahwa mayoritas inisiator penyelesaian perkelahian massal di Biak Numfor pada tahun 2024 adalah tokoh masyarakat (28,57%), aparat pemerintah (28,57%), aparat keamanan (28,57%), dan tokoh agama (14,29%). Adapun upaya yang paling banyak dilakukan masyarakat dalam

menjaga keamanan lingkungan adalah pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga.

Tabel II.86 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal dan Upaya Masyarakat Menjaga Keamanan di Kabupaten Biak Numfor

No	Uraian	2018		2021		2024	
		Kampung /Kelurahan	%	Kampung /Kelurahan	%	Kampung /Kelurahan	%
Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi *							
1	Aparat Keamanan	9	42,86	8	50,00	2	28,57
2	Aparat Pemerintah	5	23,81	4	25,00	2	28,57
3	Tokoh Masyarakat	3	14,29	3	18,75	2	28,57
4	Tokoh Agama	3	14,29	1	6,25	1	14,29
5	Lainnya	1	4,76	0	0,00	0	0,00
6	Tidak Ada Inisiator	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Masyarakat Menjaga Keamanan Lingkungan **							
1	Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan	51	19,03	93	34,70	41	15,30
2	Pembentukan/pengaturan regu keamanan	66	24,63	103	38,43	74	27,61
3	Penambahan jumlah anggota hansip/linmas	46	17,16	57	21,27	58	21,64
4	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 jam	50	18,66	55	20,52	38	14,18
5	Pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga	107	39,93	117	43,66	87	32,46

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018, 2021, 2024 dalam dokumen "Statistik Potensi Desa Provinsi"

*persentase terhadap jumlah kampung/kelurahan yang menjadi lokasi perkelahian massal di tahun tersebut

**persentase terhadap jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 268 kampung/kelurahan

2.1.4.3 Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam konteks pembangunan daerah dapat menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk menjelaskan hasil capaian kinerja dari setiap urusan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang terakomodir pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor dan/atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah periode 2023-2026.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Kemampuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan, alokasi jumlah anggaran, maupun dalam implementasi dan pengawasan anggaran menjadi faktor penting keberhasilan kinerja (keuangan) pemerintah, yang antara lain direfleksikan dalam efisiensi dan efektifitas anggaran.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented), fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages), alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas- fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function). Implementasi penganggaran tersebut menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget), meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Penganggaran berbasis kinerja juga berkaitan dengan pengendalian dan optimalisasi aset daerah. Manajemen aset yang baik akan mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam perencanaan pengadaan aset-aset baru (misal mencegah pemborosan dalam pengadaan aset), lebih efisien dan efektif dalam penggunaan aset daerah, khususnya dalam rangka peningkatan layanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2019-2023 akan memberikan gambaran kinerja anggaran, yang direfleksikan dengan laporan realisasi anggaran (LRA). LRA merefleksikan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi penerimaan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Selain sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran akan diperoleh gambaran bagaimana kebijakan belanja pemerintah kota juga kebijakan pembiayaan terkait dengan pemanfaatan surplus atau dalam upaya mengatasi defisit anggaran.

2.2.1 Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024

Evaluasi kinerja keuangan tahun 2019-2023 dapat menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor, dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan selama 5 tahun. Kinerja pelaksanaan APBD mencakup perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Evaluasi kinerja pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah merupakan data strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan pemerintah Kabupaten Biak Numfor terhadap sumber-sumber pendapatan lokal yang dimiliki.

Gambaran perkembangan kinerja pendapatan asli daerah menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, khususnya kebijakan belanja pemerintah. Kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat rasionalitas perkembangan pencapaian pendapatan (asli) daerah dan juga untuk menjadi pertimbangan (prioritas) alokasi di masa mendatang, dalam rangka pencapaian target pendapatan (asli) daerah yang ditetapkan.

Selain evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, kebijakan pembiayaan daerah juga perlu dicermati, mengingat potensi penerimaan dan pengeluaran di masa mendatang. Kebijakan pembiayaan secara singkat terkait dengan upaya pemerintah untuk menutup defisit anggaran ataupun mengoptimalkan surplus yang dimiliki, sehingga bisa berimplikasi pada kewajiban pengeluaran atau adanya penerimaan di masa mendatang.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan). Pendapatan daerah penting dalam struktur APBD. Besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Biak Numfor berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel II.87 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

Uraian	Realisasi Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	2	3	4	5	
PENDAPATAN DAERAH	1,307,652,085,587.91	1,187,830,565,692.80	1,203,784,828,630.98	1,440,494,546,526.67	1,461,957,958,190.43	2,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	111,837,784,374.91	98,422,150,504.18	65,839,462,413.98	95,175,553,249.67	25,685,408,105.42	1,75
Pendapatan Pajak Daerah	12,156,435,053.80	10,065,314,124.00	11,741,111,877.00	15,153,657,722.00	25,685,408,105.42	2,04
Pendapatan Retribusi Daerah	4,102,652,048.00	3,455,329,111.62	3,975,586,947.00	8,088,269,121.00	2,949,747,295.00	1,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,441,356,785.00	1,635,084,859.00	1,900,416,991.00	1,887,784,720.00	1,900,532,809.00	2,06
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94,137,340,488.11	83,266,422,409.56	48,222,346,598.98	70,045,841,686.67	5,798,808,562.42	1,57
PENDAPATAN TRANSFER	1,169,782,158,703.00	1,089,408,415,188.62	1,112,898,555,417.00	1,281,910,309,658.00	1,266,879,027,218.00	2,02
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	901,601,682,984.00	807,291,342,945.00	834,579,603,251.00	939,531,985,515.00	899,554,419,346.00	2,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39,073,874,981.00	43,183,096,525.00	37,627,681,209.00	110,729,139,171.00	49,816,763,302.00	2,05
Dana Alokasi Umum (DAU)	608,602,076,000.00	537,802,482,000.00	532,363,441,000.00	530,431,133,683.00	565,364,762,000.00	1,99
Dana Alokasi Khusus (DAK)	198,746,565,763.00	160,315,110,230.00	205,475,936,922.00	237,881,139,762.00	207,622,458,820.00	2,01
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	55,179,166,240.00	65,990,654,190.00	59,112,544,120.00	60,490,572,899.00	76,750,435,224.00	2,07
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	234,974,767,567.00	256,786,188,066.62	206,938,478,000.00	318,924,781,000.00	342,079,450,000.00	2,08
Dana Otonomi Khusus	32,258,636,567.00	32,258,636,567.62	-	125,528,776,000.00	150,471,601,000.00	2,36
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
Dana Desa	202,716,131,000.00	224,527,551,499.00	206,938,478,000.00	193,396,005,000.00	191,607,849,000.00	1,99
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	33,205,708,152.00	18,330,884,177.00	22,784,515,940.00	23,453,543,143.00	25,245,157,872.00	1,95
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,205,708,152.00	18,330,884,177.00	22,784,515,940.00	23,453,543,143.00	25,245,157,872.00	1,98
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	5,139,800,000.00	7,000,000,000.00	48,595,958,226.00	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	7,000,000,000.00	48,595,958,226.00	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26,032,142,510.00	-	25,046,810,800.00	63,408,683,619.00	169,393,522,867.01	2,45
Pendapatan Hibah	16,156,244,510.00	-	-	39,641,473,516.00	23,096,281,399.00	2,07
Pendapatan Dana Darurat	9,875,898,000.00	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	25,046,810,800.00	23,767,210,103.00	146,297,241,468.01	2,80

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor mengalami rata-rata kenaikan selama periode tahun 2019-2023, sebesar 2,02 persen, yaitu dari Rp. 1.307.652.085.227,91 pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.461.957.958.190,43 pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan, namun pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, akibat kebijakan refocusing anggaran pada saat Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Pendapatan Daerah tahun 2019 tercatat senilai Rp.1.307.652.085.587,91, menurun Rp.119.821.519.895,11 (-9,16 persen) pada tahun 2020 menjadi Rp.1.187.830.565.692,80. Pertumbuhan negatif yang terjadinya selama pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada sektor ekonomi riil dan berimplikasi pada pajak-pajak daerah terkait, yang mempengaruhi pendapatan daerah. Pendapatan Daerah kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.203.784.828.630,98 atau mengalami pertumbuhan positif 1,34 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar II.60 Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Rp. Milyar)

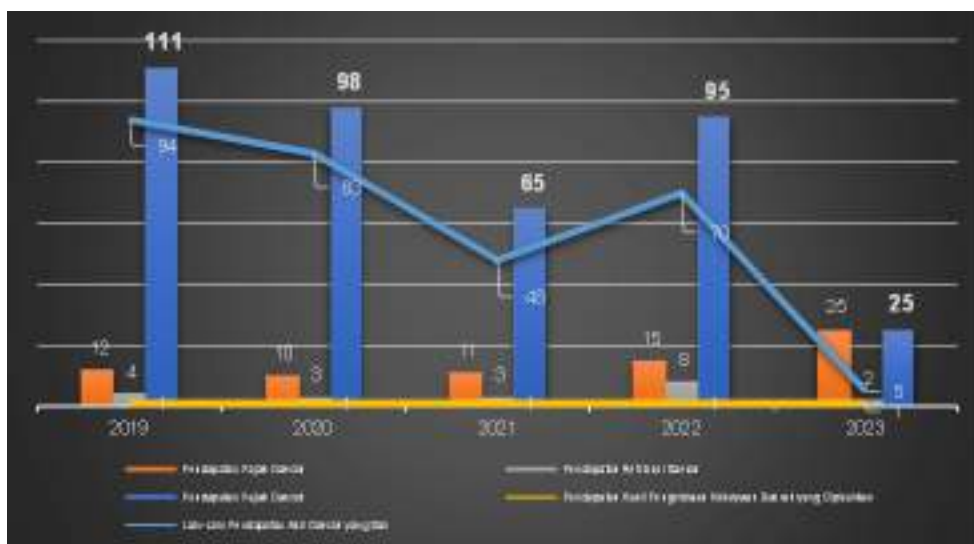


Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Gambar II.60 menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih ditopang oleh Pendapatan Transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan indeks yang dimiliki daerah. Proporsi Pendapatan Transfer cenderung berfluktuasi. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan derajat kemandirian fiskal belum mampu mendanai kegiatan pembangunan daerah. PAD Kabupaten Biak Numfor yang belum mampu menjadi sumber utama dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, memerlukan upaya untuk meningkatkan capaian PAD. Salah satu upaya, yaitu dengan melakukan analisa, inventarisasi dan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga PAD dapat didongkrak dan menjadi sumber pendapatan yang utama dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada peningkatan PAD, untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Proporsi masing-masing (komponen) PAD dapat dilihat pada Gambar II.61.

Gambar II.61 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Rp. Milyar)



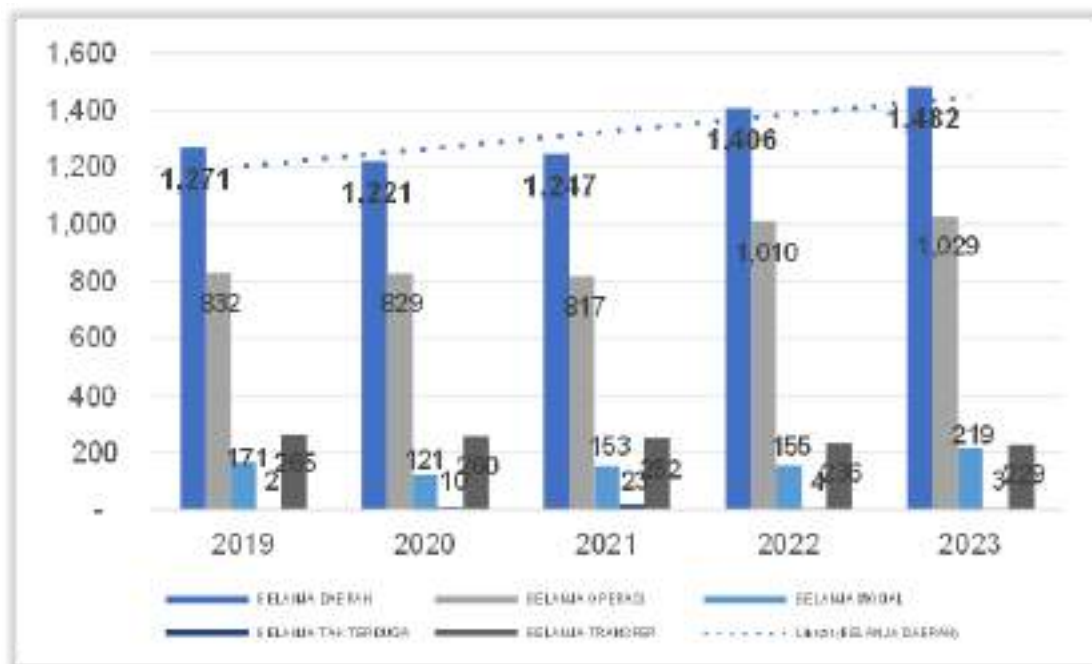
Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Gambar II.61 menunjukkan bahwa komponen PAD yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD adalah Lain-Lain PAD yang Sah dan Pajak Daerah. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi terkecil Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar 22,58 persen (pada tahun 2023) dan terbesar sebesar 84,17 persen pada tahun 2019. Sementara proporsi PAD terkecil adalah 1,76 persen pada tahun 2023 dan 8,55 persen pada tahun 2019. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang masih kurang dari 50 persen, masih harus terus dioptimalkan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek-objek yang ada maupun belum terinventarisir. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus harus dioptimalkan, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (PP 12 tahun 2019). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja selama periode waktu 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar II.62.

Gambar II.62 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Belanja Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, belanja daerah tercatat sekitar 1,271 trilyun rupiah. Nilai belanja ini meningkat menjadi sekitar 1,482 trilyun rupiah pada akhir tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 2,03 persen. Meskipun terlihat mengalami peningkatan, namun pada belanja daerah telah mengalami penurunan pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19. Penurunan belanja daerah pada Tahun 2020 tersebut mencapai 49 milyar rupiah. Dari 4 komponen belanja daerah, proporsi belanja operasional setiap tahunnya tercatat jauh lebih besar dibandingkan belanja transfer, belanja modal dan belanja tak terduga.

Seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan penurunan penerapan level PPKM, kegiatan pembangunan daerah perlahan-lahan bisa kembali dilaksanakan. Meskipun terlihat jauh lebih kecil dibandingkan 3 proporsi belanja lainnya, namun jelas terlihat bahwa selama pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran pada belanja tak terduga pada tahun 2020 dan 2021. Pengalokasian belanja tak terduga dari 2 milyar rupiah menjadi 10 milyar rupiah pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 23 milyar rupiah pada tahun 2021. Kebijakan ini ditempuh bukan hanya oleh pemerintah daerah Biak Numfor, namun kebijakan nasional dan provinsi untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Fokus dari penanggulangan tersebut ditujukan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Dari grafik juga terlihat bahwa proporsi belanja modal mengalami penurunan. Tahun 2020 belanja modal tercatat hanya senilai 121 milyar rupiah, lebih rendah jika dibanding tahun sebelum dan atau setelahnya. Belanja modal mempunyai peran strategis dalam peningkatan PAD untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik yang semakin banyak dan baik (berkualitas menjadi salah faktor penting untuk meyakinkan publik terkait dengan komitmen penyelenggaraan layanan publik, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan-layanan dasar dan wajib. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar di tahun-tahun yang akan datang, untuk peningkatan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan beragam fasilitas layanan publik kepada masyarakat.

Belanja operasi yang besar, sebagian besar terserap pada belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan untuk belanja modal, persentasi terbesar terserap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan proporsi yang paling kecil adalah belanja Tanah. Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.88.

Tabel II.88 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2024

Uraian	Realiasi Tahun (Rp.)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
BELANJA DAERAH	1,271,697,049,550.59	1,221,810,138,508.84	1,247,197,229,534.84	1,406,131,113,752.48	1,482,599,714,844.89
BELANJA OPERASI	832,803,128,200.59	829,926,983,791.84	817,934,648,918.84	1,010,282,648,594.48	1,029,495,177,403.89
Belanja Pegawai	384,413,115,222.80	378,288,827,689.00	409,682,836,690.00	373,107,100,365.00	431,843,584,157.01
Belanja Barang dan Jasa	380,910,503,977.79	364,863,556,102.84	382,269,934,572.84	578,716,286,270.48	506,665,766,512.88
Belanja Bunga	-	-	156,605,556.00	2,153,281,671.00	2,080,595,223.00
Belanja Subsidi	-	-	2,925,175,000.00	-	-
Belanja Hibah	62,842,181,000.00	69,024,600,000.00	22,155,097,100.00	48,701,520,288.00	79,095,191,511.00
Belanja Bantuan Sosial	4,637,328,000.00	17,750,000,000.00	745,000,000.00	7,604,460,000.00	9,810,040,000.00
BELANJA MODAL	171,250,920,150.00	121,240,550,317.00	153,097,212,696.00	155,650,647,918.00	219,484,323,441.00
Belanja Modal - Tanah	2,134,824,000.00	-	4,610,000,000.00	6,313,876,700.00	1,950,000,000.00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	33,876,550,127.00	42,759,227,516.00	35,873,154,194.00	45,438,527,231.00	65,003,742,758.00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	84,020,130,944.00	49,666,828,078.00	82,671,887,502.00	64,201,010,363.00	78,385,346,781.00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,707,159,579.00	28,644,799,030.00	29,921,935,000.00	37,240,066,624.00	69,095,292,048.00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	512,255,500.00	169,695,693.00	20,236,000.00	2,457,167,000.00	2,900,941,854.00
Belanja Modal - Aset Lainnya	-	-	-	-	150,000,000.00
BELANJA TAK TERDUGA	2,100,000,000.00	10,000,000,000.00	23,320,000,000.00	4,072,013,000.00	3,778,098,000.00
Belanja Tak Terduga	2,100,000,000.00	10,000,000,000.00	23,320,000,000.00	4,072,013,000.00	3,778,098,000.00
BELANJA TRANSFER	265,543,001,200.00	260,642,604,400.00	252,845,367,920.00	236,125,804,240.00	229,842,116,000.00
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	265,543,001,200.00	260,642,604,400.00	252,845,367,920.00	236,125,804,240.00	229,842,116,000.00
SURPLUS/DEFISIT	(35,955,036,037.32)	33,979,572,816.04	43,412,400,903.86	(34,363,432,774.19)	20,641,756,654.46

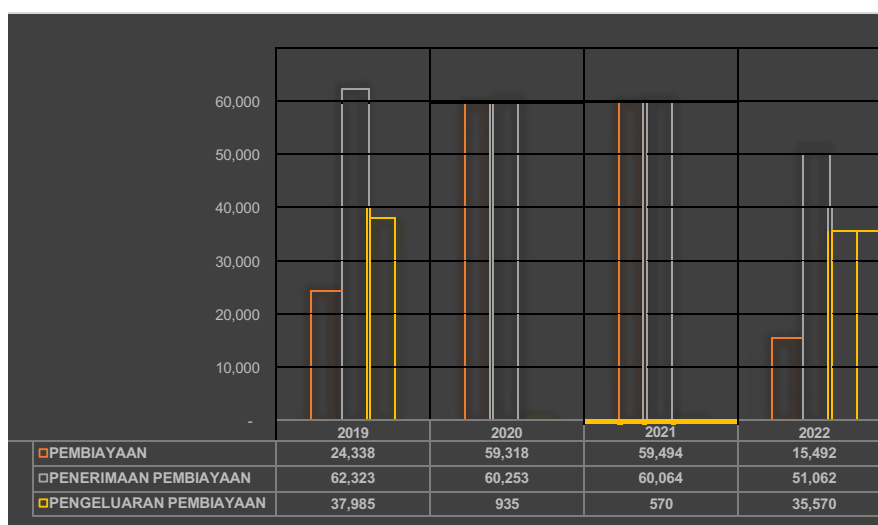
(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah)

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah pada hakekatnya timbul terkait dengan upaya untuk mengatasi defisit anggaran dan juga mengoptimalkan surplus. Dalam situasi terjadi defisit anggaran, pemerintah perlu untuk mencari alternatif untuk mencari tambahan sumber pendanaan guna menutup (membiayai) kekurangan anggaran tersebut, misalnya dengan mencari pinjaman dari pihak ketiga, sementara apabila terjadi surplus anggaran, pemerintah perlu mengupayakan agar surplus yang diperoleh dapat dioptimalkan, misalnya dengan menanamkan pada instrumen investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik daripada hanya disimpan dan tabungan. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur pembiayaan daerah, terdiri dari 2 komponen, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU.

Gambar II.63 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023



Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Tabel II.89 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

URAIAN	REALISASI (Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
PEMBIAYAAN	24,338,511,657.19	59,318,153,194.39	59,494,833,052.35	15,492,286,225.49
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62,323,660,731.19	60,253,853,194.39	60,064,833,052.35	51,062,286,225.49
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	62,323,660,731.19	60,253,853,194.39	25,064,833,052.35	16,062,286,225.49
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37,985,149,074.00	935,700,000.00	570,000,000.00	35,570,000,000.00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	570,000,000.00	570,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	35,000,000,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	37,985,149,074.00	935,700,000.00	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; data diolah)

Dari Gambar II.63, terlihat bahwa Pembiayaan daerah di Kabupaten Biak Numfor Tahun mengalami penurunan dari Rp.62.323.660.731,19 di tahun 2019 menjadi Rp. 51.062.286.225,49 di tahun 2022. Rata-rata perkembangan pembiayaan daerah adalah 1,95 persen. Perkembangan pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir dipengaruhi oleh fluktuasi penerimaan pembiayaan daerah yang didominasi oleh penggunaan SILPA tahun lalu. Pada tahun 2019 SILPA menunjukkan angka Rp.62.323.660.731,19 kemudian menurun pada tahun berikut. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah, disebabkan beberapa pembiayaan, yaitu: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan Pembayaran utang jangka panjang lainnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Biak Numfor, dapat dilihat pada Tabel II.89.

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan bagian dari laporan keuangan suatu daerah yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.

Dalam neraca keuangan Kabupaten Biak Numfor tercatat jumlah aset daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.2.354.867.000,00 dengan jumlah aset daerah pada tahun 2018 senilai Rp.102.300.000,00 yang meningkat menjadi Rp.2.457.167.000,00 pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan aset 3.072,09 persen. Kenaikan jumlah aset ini disebabkan karena penambahan nilai aset tetap pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mempunyai kewajiban terhadap utang belanja pegawai dan uang belanja barang dan jasa. Berdasarkan analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor, dapat disimpulkan Kabupaten Biak Numfor memiliki kemampuan untuk membayar utang-utang, hal ini ditunjukkan dengan neraca daerah Kabupaten Biak Numfor dengan rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Tabel II.90.

Tabel II.90 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lancar (current ratio)	5,07	7,04	1,53	1,46
2	Rasio quick (quick ratio)	4,31	4,90	0,87	2,56
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,02	0,01	0,04	0,02
4	Rasio hutang terhadap modal	0,015	0,007	0,036	0,024

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; data diolah

2.2.1.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran berperan penting dalam pencapaian berbagai tujuan strategis. Proporsi alokasi anggaran diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan, yang diimplementasikan melalui pemberian insentif/kompensasi finansial yang sepadan dengan kinerja pegawai. Anggaran juga perlu difokuskan dalam berbagai kegiatan strategis yang ditunjukkan dengan komposisi belanja modalnya.

Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Proporsi Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Biak Numfor berada pada kisaran Rp. 846.863.741.628,00 hingga Rp. 878.670.677.123,00. Dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur berkisar antara 37,09% hingga 38,58%. Proporsi penggunaan anggaran secara terperinci, dapat dilihat pada Tabel II.91.

Tabel II.91 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019			2020			2021			2022		
		Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Belanja Operasi												
511	Belanja Pegawai	405,867.04	384,413.11	94.71	384,509.75	378,288.82	98.38	388,304.21	409,682.83	105.51	387,041.49	413,711.50	106.89
512	Belanja Barang dan Jasa	387,066.68	380,910.50	98.41	42,861,147.00	36,486,355.00	85.13	46,774,489.00	382,269.93	81.73	612,382.38	532,565.59	86.97
513	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	291.66	156.60	53.69	2,288.62	2,153.28	94.09
514	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	3,000.00	2,925.17	97.51	-	-	-
515	Belanja Hibah	75,385.08	62,842.18	83.36	80,962.00	69,024.60	85.26	26,703.50	22,155.90	82.97	61,676.57	48,701.52	78.96
516	Belanja Bantuan Sosial	4,637.32	4,637.32	100.00	17,750.00	17,750.00	100.00	975.00	745.00	76.41	12,547.21	7,604.46	60.61
52	Belanja Modal	229,956.67	171,250.92	74.47	153,259.83	12,124.55	79.11	173,684.15	153,097.21	88.15	181,046.24	155,681.04	85.99
53	Belanja Tidak Terduga	2,100.00	2,100.00	100.00	10,500.00	10,000.00	95.24	23,353.78	23,320.00	99.86	4,500.00	4,072.01	90.49
54	Belanja Transfer	291,143.92	265,543.00	91.21	254,027.86	260,642.60	102.60	255,713.42	252,845.36	98.88	250,625.86	236,125.80	94.21
Jumlah Belanja dan Transfer		1,396,156.73	1,271,697.04	91.09	1,329,620.92	1,221,810.13	91.89	1,339,770.19	1,247,197.22	93.09	1,512,108.39	1,400,615.21	92.63

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; data diolah

2.2.1.6 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya, yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang, dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

2.2.1.6.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Tahun 2019-2023, terjadi defisit anggaran, dengan defisit terkecil pada tahun 2019, yang secara terinci dapat dilihat pada Tabel II.92. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, sebagaimana Tabel II.93.

2.2.1.6.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Kabupaten Biak Numfor terlihat pada Tabel II.94.

Tabel II.92 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019 (Rp.)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,307,652,085,588	1,187,830,565,693	1,249,291,613,765	1,474,108,393,935	1,517,168,229,210
	<i>Dikurangi realisasi:</i>					
2	Belanja Daerah	1,271,697,049,551	1,221,810,138,509	1,339,770,194,143	1,512,108,393,935	1,653,065,229,210
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37,985,149,074	935,700,000	570,000,000	16,082,432,148	35,570,000,000
Defisit riil		(2,030,113,037)	(34,915,272,816)	(91,048,580,378)	(54,082,432,148)	(171,467,000,000)

Tabel II.93 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya		60,293,547,695	25,338,580,378		49,855,719,000
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		44,550,455,153.55	65,710,000,000		121,611,281,000
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Tabel II.94 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021-2024

No.	Uraian	2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	25,338,580,378		16,082,432,148		49,855,719,000			
2	Pelampauan penerimaan PAD	-		-		-		-	
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-		-		-		-	
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-		-		-		-	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-		-		-		-	

No.	Uraian	2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-	
7	Kegiatan lanjutan	-		-		-		-	

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor, data diolah

Tabel II.95 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
1	PENDAPATAN	1,477,195,665,534	1,491,948,616,860	1,506,849,097,700	1,521,898,583,348	1,537,098,563,852
1:01	Pendapatan Asli Daerah	49,640,291,587	50,117,689,174	50,599,860,737	51,086,854,015	51,578,717,226
1:01:01	Pajak daerah	32,495,348,993	32,820,302,483	33,148,505,508	33,479,990,563	33,814,790,468
1:01:02	Retribusi daerah	10,140,584,091	10,241,989,932	10,344,409,831	10,447,853,930	10,552,332,469
1:01:03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1,900,532,900	1,900,532,900	1,900,532,900	1,900,532,900	1,900,532,900
1:01:04	Lain-lain PAD yang sah	5,103,825,603	5,154,863,859	5,206,412,498	5,258,476,623	5,311,061,389
1:02	Dana Perimbangan	1,427,555,373,947	1,441,830,927,686	1,456,249,236,963	1,470,811,729,333	1,485,519,846,626
1:02:01	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	10,349,726,000	10,453,223,260	10,557,755,493	10,663,333,048	10,769,966,378
1:02:02	Dana alokasi umum	651,120,501,000	657,631,706,010	664,208,023,070	670,850,103,301	677,558,604,334
1:02:03	Dana alokasi khusus/NON FISIK	255,357,233,000	257,910,805,330	260,489,913,383	263,094,812,517	265,725,760,642
1:03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	110,200,000,000	111,302,000,000	112,415,020,000	113,539,170,200	114,674,561,902
1:03:01	Hibah	-				
1:03:02	Dana darurat					
1:03:03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	24,297,866,947	24,540,845,616	24,786,254,073	25,034,116,613	25,284,457,779
1:03:04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	189,390,136,000	191,284,037,360	193,196,877,734	195,128,846,511	197,080,134,976
1:03:05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	186,839,911,000	188,708,310,110	190,595,393,211	192,501,347,143	194,426,360,615

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor;diolah)

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Proyeksi pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2025-2029, secara umum didasarkan pada perkembangan realisasi penerimaan pendapatan periode tahun 2020-2024. Trend pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu yang semakin panjang dapat menggambarkan kemampuan pencapaian penerimaan pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang ada. Namun demikian, penentuan anggaran ini juga mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah, sehingga penentuan anggaran berdasarkan trend relatif kurang tepat; sebagai contoh terkait dengan dana perimbangan, yang penentuan besarnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pada Tahun 2024, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik, yang kemudian berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal.

2.2.2.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan merupakan rencana jangka menengah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan agar kapasitas fiskal daerah mampu menopang upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2025-2029 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan dana perimbangan melalui:

- a. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- b. Peningkatan sistem pelayanan unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil dan pemungut PAD;
- e. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan;
- f. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan;
- h. Pengembangan basis data, identifikasi dan inventarisasi objek dan atau potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan up to date;
- i. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu;

- j. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi;
- k. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029, secara rinci ditampilkan pada Tabel II.96.

2.2.2.2 Belanja Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (money follow program), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi;
- e. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan apada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
- g. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

2.2.2.3 Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan haruslah selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya pada Tahun 2025-2029 berdasarkan asumsi data Tahun 2019-2023. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Biak Numfor merencanakan adanya Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun 2025-2029, dengan diproyeksikan tetap, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,-. Proyeksi Pembiayaan Biak Numfor Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel II.97.

Tabel II.96 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
2	BELANJA	1,519,345,665,534	1,570,558,575,289	1,560,412,139,920	1,550,418,144,456	1,540,575,574,254
2:01	Belanja Tidak Langsung	851,666,224,984	939,189,635,893	935,356,889,918	931,613,446,954	927,958,923,727
2:01:01	Belanja Pegawai	499,785,054,805	569,785,054,805	564,087,204,257	558,446,332,214	552,861,868,892
2:01:02	Belanja Bunga	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
2:01:03	Belanja Subsidi					
2:01:04	Belanja Hibah	69,057,879,400	68,367,300,606	67,683,627,600	67,006,791,324	66,336,723,411
2:01:05	Belanja Bantuan Sosial	9,803,578,000	42,659,522,582	42,659,522,582	42,659,522,582	42,659,522,582
2:01:06	Belanja Bagi Hasil					
2:01:07	Belanja Bantuan Keuangan	270,019,712,779	254,877,757,900	257,426,535,479	260,000,800,834	262,600,808,842
2:01:08	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2:02	Belanja Langsung	667,679,440,550	631,368,939,396	625,055,250,002	618,804,697,502	612,616,650,527
2:02:01	Belanja Pegawai					
2:02:02	Belanja Barang dan Jasa	514,143,071,253	479,367,933,792	474,574,254,454	469,828,511,910	465,130,226,790
2:02:03	Belanja Modal	153,536,369,297	152,001,005,604	150,480,995,548	148,976,185,593	147,486,423,737

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor;diolah

Tabel II.97 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
3	PEMBIAYAAN	42,150,000,000	41,717,100,000	41,288,415,000	40,863,901,710	40,443,517,262
3:01	Penerimaan Pembiayaan	42,720,000,000	42,292,800,000	41,869,872,000	41,451,173,280	41,036,661,547
3:02	Pengeluaran Pembiayaan	570,000,000	575,700,000	581,457,000	587,271,570	593,144,286

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor;diolah

2.2.2.4 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Tabel II.98 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

NO	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan	1,477,195,665,534	1,491,948,616,860	1,506,849,097,700	1,521,898,583,348	1,537,098,563,852
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	16,082,432,148	15,921,607,827	15,762,391,748	15,604,767,831	15,448,720,152
	Total Penerimaan	1,493,278,097,682	1,507,870,224,687	1,522,611,489,448	1,537,503,351,179	1,552,547,284,005
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	851,666,224,984	939,189,635,893	935,356,889,918	931,613,446,954	927,958,923,727
5	Pengeluaran Pembiayaan Kapasitas riil kemampuan keuangan	641,611,872,698	568,680,588,794	587,254,599,530	605,889,904,225	624,588,360,278

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor;diolah

Tabel II.99 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Uraian	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	641,611,872,698.00	568,680,588,793.86	587,254,599,530.31	605,889,904,224.60	624,588,360,277.82
Prioritas I	384,967,123,619	341,208,353,276	352,352,759,718	363,533,942,535	374,753,016,167
Prioritas II	256,644,749,079	227,472,235,518	234,901,839,812	242,355,961,690	249,835,344,111

Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor;diolah

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Biak Numfor sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.100.

Tabel II.100 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Biak Numfor

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A. Kependudukan dan Tenaga Kerja			
1	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	Belum tercapainya pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang cepat	Terbatasnya cakupan layanan pendaftaran penduduk
			Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola administrasi kependudukan
		Belum tercapainya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan sipil	Terbatasnya cakupan layanan dokumen administrasi pencatatan sipil
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi pencatatan sipil
2	Meningkatnya Angka Pengangguran Terbuka dan Masalah Kesejahteraan Tenaga Kerja	Masih terbatasnya akses data kependudukan yang diolah dan disajikan	Terbatasnya akses data akibat pemberlakuan SIAK terintegrasi
		Tindak maksimalnya penempatan tenaga kerja	Kurangnya informasi lowongan pekerjaan ke pencari kerja
		Kurangnya perluasan kesempatan kerja	Keterampilan dan keahlian para pencari kerja masih relatif rendah
		Tingkat perselisihan hubungan industrial masih tinggi	Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan
B. Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga			
1	Belum optimalnya kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan	Disparitas tenaga pendidikan	Masih terdapat kekurangan jumlah guru di semua jenjang pendidikan
			Belum meratanya penempatan guru baik PNS maupun Tenaga Kontrak
			Terbatasnya jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4
			Masih perlunya peningkatan kompetensi bagi guru
		Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan	Masih terdapat rombongan belajar yang melebihi jumlah kelas yang tersedia
			Angka putus sekolah yang cukup tinggi
			Masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami rusak ringan dan rusak berat
			Keterbatasan moda transportasi untuk mengangkut siswa siswi
2			Belum optimalnya pelayanan Promotif dan Preventif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	Masih tingginya angka kesakitan dan kematian	Masih tingginya angka penyakit menular akibat tingginya mobilisasi penduduk
			Penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan (Diabetes dan Hipertensi)
		Prevalensi Stunting masih tinggi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pola konsumsi gizi seimbang
			Masih rendahnya pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri
			Belum semua masyarakat memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak
		Tingginya kesenjangan hasil pengukuran Bayi dan Balita dengan total bayi di wilayah kerja 21 Puskesmas	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa bayi dan balita ke posyandu
			Belum optimalnya kegiatan swiping bayi dan balita ke rumah msyarakat
3	Belum optimalnya pelayanan kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya prestasi olahraga pemuda	Kurangnya pembinaan bagi calon atlit muda
			Kurangnya sarana dan prasaran pendukung olahraga
		Belum optimalnya pemberdayaan wirausaha mandiri	Kurangnya prestasi pemuda terampil
			Kurangnya program dan pelatihan kewirausahaan
C. Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan			
1	Persentase Kemiskinan masih cukup tinggi	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Kurangnya lapangan pekerjaan
			Tingkat pendidikan (SDM) rendah
			Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial
		Belum optimalnya penanganan anak terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi sehingga menjadi miskin
		Belum optimalnya penanganan penyandang disabilitas	Minim akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas
		Belum optimalnya penanganan lanjut usia terlantar	Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar
2	Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan budaya dan aset-aset budaya lokal biak	Belum optimalnya pemberdayaan seniman lokal
			Masih kurang minat pada event seni lokal
			Belum optimalnya dukungan pelaksanaan kesenian budaya diluar daerah
			Pemeiliharaan cagar budaya belum optimal
D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan dan perlindungan anak	Belum optimalnya perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak	Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
			Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
E. Infrastruktur PUPR, Perumahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi			
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum	Belum optimalnya Akses, koneksifitas dan kualitas infrastruktur jalan/ Jembatan	Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik masih belum mencapai target
			Proporsi jalan Provinsi dengan kondisi baik masih belum mencapai target
			Masih terbatasnya prasarana jalan khususnya jalan non status yang menghubungkan sektor unggulan dengan kawasan penunjang di Kabupaten Biak Numfor
		Masih rendahnya capaian SPM bidang PU dan Penataan Ruang (Air bersih dan Air limbah)	Masih rendahnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi
			Terbatasnya layanan air minum (hanya di daerah perkotaan)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pengelolaan pemakaman di Kabupaten Biak Numfor	Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan perdesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni	Masih banyaknya Penduduk yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni
			Masalah legalitas lahan
			Belum Optimalnya pendataan RTLH
		Kurangnya Kegiatan yang mendukung tercapainya akses terutama penanganan Perumahan dan permukiman kumuh	Belum adanya Rencana Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
		Masih rendahnya kualitas lingkungan kawasan permukiman yang prioritas dan permasalahannya di Kota Biak	Belum adanya jumlah rumah susun untuk MBR yang disediakan oleh Pemerintah
4	Belum optimalnya pelayanan perhubungan	Belum optimalnya penyediaan dan penataan fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	Belum memadai infrastruktur di lingkungan pemakaman
			Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan
			Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi terminal
			Kurang Optimalnya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
		Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
5	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Belum terciptanya etika dan budaya birokrasi yang melayani (Good Governance)	Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas
			Belum Optimalnya pelayanan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor
			Terbatasnya infrastruktur media komunikasi dan informasi
			Kompetensi ASN dalam pengelolaan informasi dan komunikasi masih rendah
			Belum terpenuhinya secara merata infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE
F.	Ekonomi, SDA dan Lingkungan	Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur dasar TIK masih kurang	
		Peran kominfo sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Perubahan alur penyedia data
			Kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan
1	Belum meratanya ketersediaan pangan di seluruh kawasan di Kabupaten	Masih kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga	Kurangnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan
			Luasnya halaman pekarangan yang belum dimanfaatkan
2	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/ kelompok nelayan
			Relatif tingginya <i>unreported</i> produksi hasil tangkapan
		Masih rendah dan kurang meratanya tingkat kesejahteraan nelayan	Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan
		Belum optimalnya produksi perikanan	Kurangnya kualitas benih dan induk bermutu
			Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan komoditas perikanan
		Masih rendahnya angka konsumsi ikan	Kurangnya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan
			Adanya opini masyarakat tentang mahalnnya harga ikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya variasi jumlah olahan produk-produk ikan
3	Masih rendahnya daya saing pariwisata, daya saing usaha jasa, pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal, dan kemampuan kelembagaan pariwisata	Kurangnya pengelolaan obyek wisata yang baik, dan rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan local dan terkoneksi antar wilayah	Image pariwisata belum terbentuk, masyarakat belum memahami bagaimana mengelola Kawasan wisata
			Kelompok Sadar Wisata belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
			Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
			Masih adanya beberapa akses jalan menuju obyek wisata yang rusak, Lampu Penerangan Jalan Umum menuju lokasi wisata kurang banyak, dan transportasi menuju lokasi obyek wisata masih terbatas
		Belum optimalnya Kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Terbatasnya SDM pariwisata
			Minimnya <i>street furniture</i> disepanjang jalan menuju obyek wisata
			Belum efektif kinerja kelembagaan dan kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
			Belum adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
			Belum optimal dalam pembinaan dan pendampingan masyarakat
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Promosi wisata hanya dilakukan saat event saja
			Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
4	Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Biak Numfor	Belum optimalnya kegiatan produksi	Berkurangnya lahan pertanian
			Kurangnya tenaga kerja sektor pertanian
		Belum maksimalnya penyuluhan usaha pertanian	Terbatasnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian
			Kelembagaan petani masih didominasi oleh kelas pemula
5	Belum optimalnya perdagangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan gedung metrologi dan pengukuran tera ulang	Kurangnya alat Ukur UTTP
		Belum optimalnya upaya ekspor komoditi unggulan daerah.	Belum adanya jasa / subsidi tol laut
			Belum adanya komoditi unggulan
6	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas industri lokal	Kurangnya pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas produksi
			Kurangnya daya saing produk lokal
			Kurangnya akses terhadap modal usaha
			Belum adanya kawasan sentra industri yang terintegrasi
7	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Lemahnya kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi simpan pinjam masih banyak yang belum memiliki ijin
			Belum adanya regulasi terkait Koperasi
		Rendahnya status koperasi sehat	Pembinaan, fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan status sehat koperasi belum maksimal
		Masih lemahnya kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi	Pengurus dan pegawai koperasi tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengelola koperasi
		Masih Lemahnya kualitas kelembagaan UMKM	Ijin usaha yang belum ada
			Belum adanya regulasi terkait UMKM
		Masih rendahnya kualitas produksi	Kemasan produksi masih belum memenuhi standar berupa stiker mempunyai PRT dan halal
		Masih rendahnya pemasaran UMKM	Persaingan harga jual
			Permintaan konsumen kurang
			Kurang memanfaatkan metode pemasaran online
			Minimnya generasi milenial sebagai pelaku UMKM

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih lemahnya kemampuan kewirausahaan UMKM	Kurangnya jumlah SDM yang kompeten sesuai dengan bidang usaha
8	Belum optimalnya iklim penanaman modal	Masih kurangnya kajian investasi dan peta potensi investasi yang tersedia di Kabupaten Biak Numfor	Belum tersedia kebijakan daerah yang mendasari kajian investasi dan peta potensi investasi
			Minimnya anggaran untuk kegiatan kajian investasi dan peta potensi investasi
		Belum optimalnya regulasi/ kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung peningkatan investasi	Regulasi/kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung peningkatan investasi
9	Belum optimalnya peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup	Belum adanya kajian strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
		Belum Optimalnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kurangnya penanganan limbah B3 yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup
		Belum Optimal Kepatuhan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masih ada pemegang izin yang kurang patuh pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan
		Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga kemasyarakatan perlu dibina untuk peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatnya Pengaduan Lingkungan Hidup	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah
			Belum dilaksanakan penanganan pengolahan sampah secara efektif
		Upaya mitigasi bencana hidrometeorologi belum optimal	Adanya perubahan iklim yang begitu cepat
			Masih terjadinya penggundulan hutan, degradasi habitat, dan alih fungsi lahan
			Pengelolaan data geospasial yang tidak memadai
			Infrastruktur yang belum memadai untuk mitigasi bencana
			Kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta—dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana
			Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup
G. Politik dan Demokrasi			
1	Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
			Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengetahuan politik dalam penyelenggaraan pemilu
		Masih rendahnya kesadaran partai politik untuk menyampaikan program kerja	Kurangnya pertemuan dan diskusi bersama partai politik dalam membahas program-program partai
H. Keamanan, Ketentaman dan Ketertiban Umum			
1	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang Belum Optomal dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah	Kualitas Sumberdaya Manusia Satpol PP masih rendah	Belum tersedianya tenaga PPNS
			Belum optimalnya peran Linmas di setiap Distrik
		Kurangnya koordinasi antas instansi dalam rangka penegakan perda	Lemahnya koordinasi antar instansi baik pemerintah maupun TNI/Polri
			Masih terjadinya pelanggaran terhadap K3
		Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap rencana	Program penanggulangan/ pencegahan bencana belum menjadi prioritas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penanggulangan bencana dan resiko bencana	Kasus bencana kebakaran yang semakin meningkat
I.	Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kampung		
1	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan kampung	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kampung dalam pembangunan	Rendahnya kualitas SDM aparatur kampung
		Rendahnya peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan kampung	Belum aktifnya BUMKAM untuk mendukung terwujudnya Kampung Mandiri
			Pasifnya lembaga masyarakat di kampung
			Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di kampung
J.	Regulasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah		
1	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh BAPPEDA	Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan, antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah	Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, juga Pemerintah Kampung dan DPRD
		Masih rendahnya kualitas data pembangunan	Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan
			Kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan
2	Masih rendahnya kinerja BPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah	Kurangnya tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan perintah daerah
			Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
3	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP	Belum adanya penerapan manajemen risiko
		Belum optimalnya kegiatan pengawasan berbasis risiko	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Belum disusunnya PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) berbasis risiko
			Belum optimalnya pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah
			Belum adanya implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien

Sumber: Hasil Analisis 2025

2.3.2 Isu Strategis Daerah

2.3.2.1 Isu Strategis Internasional

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan

persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (space economy), sebagaimana yang ditampilkan Gambar II.64.

Gambar II.64 Megatren Global 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045 (Bappenas)

Gambar II.65 Risiko Global Jangka Menengah



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Pemetaan isu global yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 memuat beberapa hal terkait tantangan dan peluang yang akan dihadapi selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Isu-isu tersebut perlu dilihat secara kontekstual dengan

menyesuaikan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah. Namun, beberapa upaya mendasar perlu dilakukan mengingat dampaknya yang sudah terasa hingga hari ini. Upaya tersebut antara lain seperti mempersiapkan kualitas SDM yang mumpuni dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan persiapan fondasi pembangunan yang matang, Kabupaten Biak Numfor dapat memanfaatkan serta memitigasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan dari isu-isu global tersebut.

Adapun berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, terdapat 10 (sepuluh) risiko global jangka menengah yang perlu diantisipasi yaitu: (1) cuaca ekstrem; (2) perubahan kritis terhadap ekosistem; (3) biodiversity loss dan gangguan ekosistem; (4) krisis sumber daya alam; (5) misinformasi dan disinformasi; (6) dampak buruk teknologi Ai; (7) involuntary migration; (8) cyber insecurity; (9) polarisasi sosial; serta (10) polusi (sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.65).

2.3.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

2.3.2.2.1 Transformasi Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan Luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa lebih diintensifkan mengingat besarnya sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang.

Gambar II.66 Kesenjangan Antarwilayah



Sumber: RPJPN 2025-2045

Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Berikutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan kerangka implementasi, termasuk kaidah pelaksanaan sebagai panduan.

Transformasi Sosial bertujuan untuk pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan memastikan pelaksanaan transformasi sosial; mengembangkan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi; pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar; serta penerapan perlindungan sosial adaptif.

Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayahnya; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi dan implementasi transformasi digital; pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi (superhub ekonomi nusantara), serta jendela budaya nasional Indonesia; penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju dan menyejahterakan.

Gambar II.67 Tematik Pembangunan Wilayah



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar II.68 Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah



Sumber: RPJPN 2025-2045

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum; penyederhanaan regulasi di daerah dan selaras dengan regulasi Pemerintah serta penghapusan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif; penguatan penindakan tindak pidana korupsi menuju zero corruption; penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna (meaningful participation); penerapan tata kelola partai politik akuntabel dan kaderisasinya efektif yang disertai dengan penerapan sistem integritas partai politik.

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh, baik di tataran nasional maupun daerah dengan penciptaan stabilitas politik, keamanan maupun ekonomi; penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk memperluas dukungan akses bantuan hukum; ketahanan nasional dan demokrasi substansial.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut; mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitasnya; serta meningkatkan implementasi climate smart agriculture yang tahan terhadap perubahan iklim.

Upaya transformasi pembangunan di berbagai wilayah untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai agar keberlanjutan pembangunan daerah dapat terwujud. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pembiayaan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Upaya ini dilakukan baik di sektor publik maupun nonpublik.

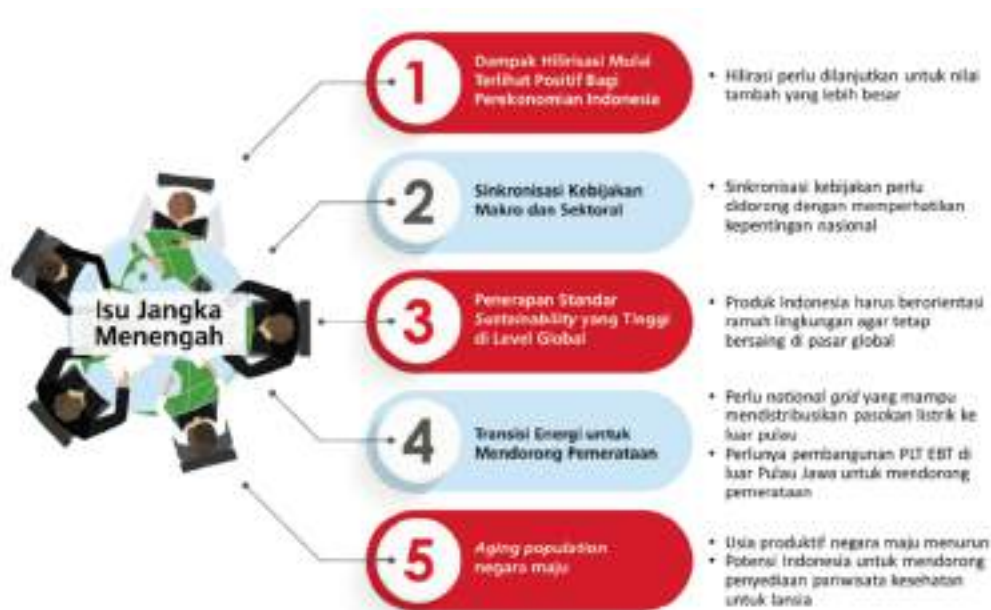
Perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan di sektor publik mencakup perkuatan perencanaan pembiayaan; perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (asset securitization), daur ulang aset (asset recycling), tukar guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (asset value capture). Sementara itu, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan antara lain melalui optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan; pengembangan inovasi skema-skema pembiayaan syariah untuk sektor publik; pengembangan pembiayaan berkelanjutan seperti blue financing, green financing, dan circular financing; dan penguatan penerapan bauran pendanaan (blended finance) yang dapat mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Selain itu, isu dan tantangan pembangunan berdasarkan kewilayahan khususnya Papua dibagi beberapa bidang ditampilkan dalam Tabel II.101.

Tabel II.101 Isu Kewilayahan RPJPN Wilayah Papua

No	Bidang	Isu Kewilayahan
1	Ekonomi	Pada bidang ekonomi, isu di Wilayah Papua berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang belum inklusif di antaranya pengembangan potensi unggulan wilayah dan UMKM.
2	Sosial	Isu bidang sosial yang dihadapi di Wilayah Papua erat kaitannya dengan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk miskin dan ketertinggalan daerah.
3	Sarana dan Prasarana	a. Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah Papua yang masih rendah juga menjadi tantangan pembangunan di Wilayah Papua. b. Potensi energi hidro, energi surya, dan energi angin di Wilayah Papua belum dikembangkan dengan optimal dalam menopang transisi energi. c. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Wilayah Papua masih rendah dan belum merata d. Pembangunan bidang infrastruktur dasar di Wilayah Papua juga belum optimal sehingga memengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi.
4	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	a. Isu bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah Papua sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonomibaru. b. Selain itu, Wilayah Papua menghadapi permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi publik. c. Rendahnya kemandirian fiskal menjadi isu krusial yang menghambat pertumbuhan.
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Isu bidang stabilitas pertahanan dan keamanan Wilayah Papua berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan cakupan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan belum optimal.
6	Sosial Budaya dan Ekologi	a. Dari sisi ketahanan sosial budaya, Wilayah Papua menghadapi isu rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berdampak pada belum optimalnya penataan tanah adat/ulayat b. Terkait dengan ketahanan ekologi, Wilayah Papua dihadapkan pada kondisi risiko bencana tinggi, rendahnya kemandirian pangan, serta belum optimalnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Adapun isu strategis RPJMN 2025-2029 sebagai tahap pertama implementasi RPJPN 2025-2045 terdiri atas: (1) dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia; (2) sinkronisasi kebijakan makro dan sectoral; (3) penerapan standar sustainability yang tinggi di level global; (4) transisi energi untuk mendorong pemerataan; (5) aging population negara maju, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.70.

Gambar II.69 Isu Pembangunan Nasional Jangka Menengah (2025-2029)



Sumber: RPJMN 2025-2029

2.3.2.2.2 Percepatan Pembangunan Papua dalam Kerangka Otsus

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan otonomi khusus skema baru di Provinsi Papua yang dipayungi dengan 3 (tiga) regulasi utama, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang erubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

Regulasi baru penyelenggaraan otonomi khusus Papua mengubah aturan main yang sudah ada dan membutuhkan kapasitas baru bagi pemangku kepentingan di setiap level pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua), mulai dari merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diperlukan sebuah Rencana Induk

Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041. Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan penetapan RIPPP yang tepat sasaran dan disinergikan dengan tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), RPJP 2025-2045, Visi Indonesia 2045 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RIPPP akan menjadi gambaran ukuran dan indikator capaian pembangunan dari lintasan perjalanan (trajectory) maupun tahapan program (milestone) pembangunan nasional dalam rangka Otonomi Khusus tahun 2022 hingga 2041 yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembangunan di Papua pasca berakhirnya periode Otonomi khusus di Wilayah Papua tahun 2041.

Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan amanat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, visi pembangunan Papua 2041 adalah: **“Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”**.

- a. **Papua yang mandiri** adalah Papua yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri.
- b. **Papua yang adil** dicerminkan dari kondisi masyarakat Papua yang memiliki hak yang sama, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan dengan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjamin pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat, melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia; serta mendapatkan perlindungan di depan hukum.
- c. **Papua yang sejahtera** adalah penduduk Papua yang mempunyai taraf kehidupan dan penghidupan yang baik, dalam bidang pelayanan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sedangkan upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui 3 misi pembangunan Papua 2041 sebagai berikut:

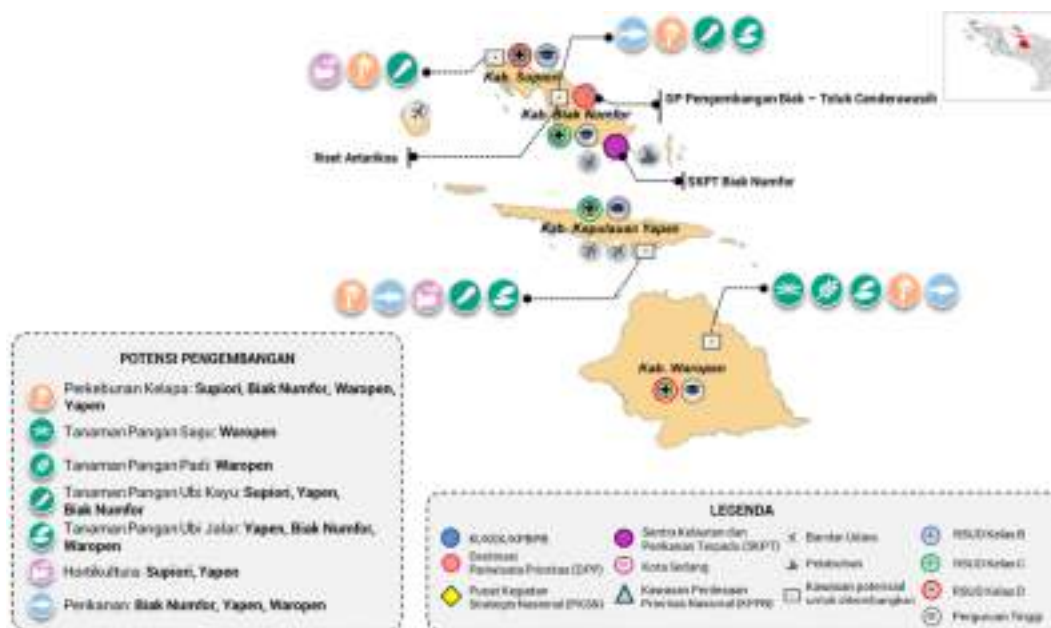
- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk;
- b. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua

Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk;

- c. Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Selain itu, demi Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, & Sejahtera, maka ditetapkan 3 sasaran pembangunan RIPPP diantaranya 1) tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk; 2) tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; dan 3) tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Gambar II.70 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Adat Saireri



Sumber: RIPPP 2022-2041 (2023)

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan yaitu: a) Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; b) Lingkungan Hidup; c) Tata Kelola Pembangunan; d) anah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial. Dalam RIPPP 2022-2041 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif

dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan diantaranya Pengarusutamaan Gender, sosial budaya, transformasi digital, dan resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Saireri diantaranya ialah pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Saireri sebagai sentra kelautan dan perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta riset antariksa.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Papua

Secara umum, Isu Strategis Provinsi Papua berdasarkan RPJPD Papua 2025-2045 terbagi ke dalam 7 kelompok isu, yaitu pendidikan; kesehatan; sosial budaya dan ekologi; ekonomi; infrastruktur dasar dan konektivitas; stabilitas keamanan; serta tata kelola pemerintahan, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.102.

Tabel II.102 Isu Strategis Provinsi Papua Berdasarkan Ranwal RPJPD Papua 2025-2045

Kelompok Isu		Isu Strategis
1	Kesehatan	1. Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi 2. Tingginya prevalensi gizi buruk terutama stunting pada balita 3. Tingginya prevalensi penyakit menular, terutama Tuberkulosis, malaria dan HIV-AIDS 4. Semakin meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan obesitas 5. Rasio tenaga kesehatan yakni tenaga perawat, bidan dan dokter terhadap jumlah penduduk di Provinsi Papua sebelum pembentukan DOB (2022) telah memenuhi standar, namun terdapat ketidakmerataan distribusi 6. Kondisi geografis yang sulit di beberapa Kawasan di Provinsi Papua menyebabkan akses terhadap fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang masih terbatas 7. Provinsi Papua telah memiliki pengalaman menghadapi pandemi Covid-19, namun pasca pandemi tingkat kesiapsiagaan dan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejadian luar biasa/wabah belum diimplementasikan secara berkesinambungan dan multisektoral.
2	Pendidikan	1. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Provinsi Papua tergolong masih rendah yang ditandai dengan rendahnya angka partisipasi sekolah 2. Kompetensi berdasarkan hasil pembelajaran di sekolah secara formal maupun non-formal belum meningkat secara optimal 3. Belum memadainya kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Kelompok Isu		Isu Strategis
		4. Belum memadainya jumlah dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah setempat
3	Sosial Budaya dan Ekologi	1. Belum optimalnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berdampak pada belum optimalnya pendataan tanah adat/ulayat 2. Tingginya risiko bencana baik bencana hidrometeorologi maupun geologi, serta belum optimalnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim 3. Tingginya kerawanan pangan yang ditunjukkan oleh tingginya prevalensi ketidakcukupan pangan
4	Ekonomi	1. Pengembangan ekonomi yang belum inklusif seperti pengembangan potensi unggulan wilayah dan UMKM 2. Rendahnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan wilayah (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata) yang terintegrasi hulu-hilir 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat produksi dan pasar 4. Belum optimalnya pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan Berbasis industri dan pariwisata, serta komoditas unggulan dalam peningkatan kesejahteraan
5	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	1. Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarl wilayah 2. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi EBT 3. Rendahnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital 4. Masih rendahnya pembangunan bidang infrastruktur dasar yang mempengaruhi kualitas SDM dan pembangunan ekonomi
6	Stabilitas Keamanan	1. Perlu ditingkatkannya keamanan dan ketertiban umum sehingga cakupan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan dapat lebih optimal 2. Belum optimalnya stabilitas pertahanan dan keamanan di perairan Papua
7	Tata Kelola Pemerintahan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintahan 2. Belum optimalnya tata kelola Pemerintah, penyelenggaraan pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi publik 3. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah (adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap TKD)

Sumber: RPJPD Papua 2025-2045

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan kondisi permasalahan serta lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Kabupaten Biak Numfor baik secara langsung ataupun tidak langsung, dirumuskan 7 (tujuh) isu strategis pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Ketenteraman dan ketertiban umum serta tindak kriminal masih berlangsung, meskipun dengan frekuensi yang relatif rendah di Kabupaten Biak Numfor
- b. Risiko bencana yang tinggi di Kabupaten Biak Numfor belum sepenuhnya direspons dengan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif dan menyeluruh
- c. Kualitas lingkungan hidup yang belum memadai, termasuk tata kelola hutan dan konservasi yang belum optimal, serta pengelolaan persampahan yang masih kurang efektif, sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan
- d. Infrastruktur dasar serta fasilitas pendukung saat ini belum mampu memberikan layanan yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat
- e. Pendayagunaan sumber daya alam belum dioptimalkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pariwisata dan perikanan
- f. Distribusi dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- g. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Otonomi Khusus belum efektif dan efisien



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Visi ini mencerminkan arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Visi ini harus selaras dengan visi pembangunan nasional serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, arah kebijakan, serta

program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 adalah:

”Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Inklusif & Berkelanjutan Melalui Masyarakat Yang Cerdas, Sehat & Mandiri”

Dari rumusan visi di atas, menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan yang ingin dicapai dari tahun 2025 sampai tahun 2029 adalah menjadikan Kabupaten Biak Numfor menjadi wilayah yang Sejahtera, Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan. Makna pokok visi Biak numfor diuraikan sebagai berikut:

BIAK NUMFOR SEJAHTERA:

Terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik secara materiil maupun spiritual, dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BIAK NUMFOR BERDAYA SAING:

Memiliki kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan inovatif baik pada level nasional maupun Internasional sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, memiliki fondasi ekonomi, sosial, dan teknologi agar mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIAK NUMFOR INKLUSIF:

Terciptanya Biak Numfor yang kondusif bagi setiap individu untuk berkontribusi dan menikmati manfaat pembangunan sosial dan ekonomi, serta memperhatikan keberlanjutan dan kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan. Selain itu, pendekatan pembangunan yang merangkul keberagaman masyarakat, membuka akses dan peluang yang adil, serta memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses dan hasil pembangunan

BIAK NUMFOR BERKELANJUTAN:

Terwujudnya pembangunan Biak numfor yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial agar pembangunan dapat berlangsung terus-menerus dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang.

MELALUI MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT DAN MANDIRI

- **Cerdas:** SDM Kabupaten Biak Numfor dipersiapkan unggul dalam ilmu, kreatif, inovatif, dan adaptif melalui pendidikan berkualitas.
- **Sehat:** Warga memiliki derajat kesehatan yang optimal, akses layanan kesehatan yang merata, dan lingkungan hidup yang bersih.
- **Mandiri:** Masyarakat berdaya dan tidak tergantung, mampu mengelola potensi diri dan daerah, serta siap menghadapi tantangan global.

3.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah strategis dan operasional untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah. Dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), misi dirancang agar dapat diterapkan secara realistis dalam kurun waktu lima tahun.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Biak Numfor 2025-2029 dirumuskan dalam 5 butir, merupakan gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Inklusif & Berkelanjutan Melalui Masyarakat Yang Cerdas, Sehat & Mandiri, yaitu:

1. **MISI 01: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Good Governance) Berbasis Digital.** Misi ini merupakan upaya untuk membangun pemerintahan yang terbuka, jujur, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Misi ini adalah dasar untuk memastikan seluruh pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor berlangsung modern, terbuka, efektif, dan selalu berpihak pada kebutuhan masyarakat, dengan dukungan teknologi digital di semua lini.

2. **MISI 02: Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Sosial Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Kebutuhan Masyarakat.** Misi ini menitikberatkan pada pemenuhan hak dasar, peningkatan SDM, serta perlindungan seluruh kelompok masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Misi ini menjadi fondasi utama menuju SDM unggul di Biak Numfor, agar semua penduduk benar-benar dapat merasakan manfaat pembangunan dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan.
3. **MISI 03: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Kokoh Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan.** Misi ini merupakan fondasi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, serta perlindungan lingkungan secara terpadu dan jangka panjang. Misi ini menegaskan Biak Numfor ingin membangun infrastruktur yang kuat, merata, adaptif, dan berwawasan lingkungan berbasis tata ruang yang matang, sehingga pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan berjalan seimbang dan berkesinambungan.
4. **MISI 04: Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah.** Misi ini menitikberatkan pada strategi memaksimalkan dan memberdayakan seluruh kekayaan sumber daya lokal baik alam, manusia, maupun budaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini menegaskan pembangunan ekonomi Biak Numfor harus bertumpu pada keunggulan daerah sendiri, berorientasi pemberdayaan rakyat, inovasi, keberlanjutan, dan inklusi sosial, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat serta mendukung eksistensi Biak Numfor di era persaingan global.
5. **MISI 05: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Dan Lingkungan.** Misi ini merupakan komitmen untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat, mempererat persatuan, serta melestarikan dan memajukan budaya lokal di tengah dinamika perubahan zaman dan berbagai potensi ancaman, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan hidup. Misi ini ingin memastikan Kabupaten Biak Numfor membangun masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya salut terhadap kekayaan lokal, damai, adil, inklusif, siap menghadapi tantangan, serta menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis bagi seluruh warganya.

Gambar III.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029



3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Biak Numfor periode 2025-2029. Tujuan merujuk pada langkah- langkah strategis yang perlu dilakukan guna mewujudkan visi, mengimplementasikan misi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dalam Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Inklusif & Berkelanjutan Melalui Masyarakat Yang Cerdas, Sehat &

Mandiri. Rumusan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPk		2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 01: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Good Governance) Berbasis Digital													
T1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adapatif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)					52,88	55,00	56,04	57,08	58,12	59,16	60,20
		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)					N/A	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
		Indeks Pelayanan Publik					2,95	3,10	3,38	3,66	3,95	4,23	4,51
		Persentase Capaian SPM Kabupaten (%)					59,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)					87,37	87,87	88,27	88,67	89,07	89,47	89,87
		Indeks BerAkhlak (%)					56,30	57,00	57,56	58,12	58,68	59,24	59,80
S1	Terwujudnya manajemen pemerintahan yang terorganisir, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil	Nilai AKIP					54,27	57,20	60,00	62,80	65,60	68,40	71,20
		Nilai LPPD					2,54 (2023)	2,60	2,68	2,76	2,84	2,92	3,00
		Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)					0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00
		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)					57,86	60,00	60,60	61,20	61,80	62,40	63,00
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)					46,31	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Distrik (%)					N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
S2	Meningkatnya budaya kerja ASN yang adaptif dan inovatif menuju ASN yang Profesionalitas	Indeks Sistem Merit (Nilai)					0,00	0,41	0,49	0,57	0,64	0,72	0,80
		Rata-rata Predikat Kinerja ASN (skor predikat)					Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
S3	Terciptanya sistem pendukung yang optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (skor kepuasan)					N/A	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

- III.8 -

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DPRD secara efektif dan profesional												
S4	Terwujudnya masyarakat desa yang berdaya saing dan mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) (indeks)					0,5799 (2024)	0,60	0,62	0,64	0,66	0,69	0,71
S5	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip yang tertib, terintegrasi, dan sesuai standar guna mendukung efektivitas administrasi dan pelayanan publik	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (indeks)					N/A	5,50	16,40	27,30	38,19	49,09	59,99
S6	Terwujudnya ekosistem pelayanan publik yang modern dan responsif	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi					N/A	3,22	3,28	3,33	3,39	3,44	3,50
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					N/A	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	80,00
		Persentase Desa/Kelurahan terhadap Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler (%)					98,05	98,05	98,24	98,43	98,62	98,81	99,00
S7	Terwujudnya sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (indeks)					72,32	72,50	73,70	74,90	76,10	77,30	78,50
		Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan					N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

- III.9 -

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
S8	Meningkatnya pelayanan publik di tingkat distrik yang profesional, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berorientasi pada mutu pelayanan	Indeks Kualitas Layanan Distrik (indeks)					N/A	77,00	79,40	81,80	84,19	86,59	88,99
T2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Maturitas SPIP					1,8 (2024)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)					1,461	1,498	1,498	1,499	1,499	1,500	1,500
		Indeks Implementasi Perencanaan (%)					N/A	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (opini)					WTP (2024)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
S9	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui pemanfaatan data, informasi, dan hasil riset yang akurat	Persentase capaian target indikator sasaran pembangunan (%)					N/A	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	100,00
		Indeks kapabilitas inovasi (Indeks Daya Saing Daerah)					N/A	2,14	2,19	2,24	2,30	2,35	2,40
		Indeks Pembangunan Statistik (indeks)					1,10	1,13	1,14	1,16	1,17	1,19	1,20
S10	Meningkatnya mutu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	Survey Penilaian Integritas (Nilai)					66,25 (2024)	67,91	68,25	68,59	68,92	69,26	69,60
S11	Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)					1,461	1,498	1,518	1,539	1,559	1,580	1,600
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)					10,00	11,00	11,80	12,60	13,40	14,20	15,00
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)					N/A	5,62	5,69	5,76	5,84	5,91	5,98
MISI 02: Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Sosial Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Kebutuhan Masyarakat													
T3	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan,	Indeks Pembangunan Manusia					74,95	75,32	75,86	76,39	76,93	77,46	78,00

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesehatan, serta perlindungan afirmasi sosial yang terjangkau untuk semua terutama OAP	Indeks Kesejahteraan Sosial (indeks)					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Pembangunan Gender (indeks)					90,96 (2023)	91,41	91,78	92,14	92,51	92,87	93,23
		Indeks Kualitas Keluarga (indeks)					67,12 (2023)*	69,80	70,48	71,16	71,84	72,52	73,20
S12	Meningkatnya intelegualitas, literasi, dan karakter anak usia sekolah, serta pembangunan pemuda yang inklusif dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (tahun)					14,24 (2024)	14,97	15,12	15,27	15,43	15,58	15,73
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)					10,55 (2024)	11,62	11,84	12,06	12,28	12,50	12,72
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)					60,75 (2024)	65,61	67,85	70,09	72,34	74,58	76,82
		Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan (%)					58,46 (2024)	58,92	59,62	60,32	61,01	61,71	62,41
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tingkat :											
		SD					45,30	47,80	50,30	52,80	55,30	57,80	60,30
		SMP					56,77	57,87	58,97	60,07	61,17	62,27	63,37
		SMA					58,46	59,06	59,66	60,26	60,86	61,46	62,06
		SMK					56,86	58,16	59,46	60,76	62,06	63,36	64,66
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi tingkat :											
		SD					42,45	45,35	48,25	51,15	54,05	56,95	59,85
		SMP					55,33	56,83	58,33	59,83	61,33	62,83	64,33
		SMA					51,34	52,94	54,54	56,14	57,74	59,34	60,94
		SMK					49,48	51,68	53,88	56,08	58,28	60,48	62,68

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
S13	Meningkatnya derajat kesehatan, pengentasan stunting, dan keluarga berkualitas	Umur Harapan Hidup (tahun)					68,97 (2024)	70,40	70,78	71,16	71,54	71,92	72,30
		Persentase Capaian SPM Kesehatan (%)					73,72 (2024)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)					75,07 (2024)	82,54	83,41	84,29	85,16	86,04	86,91
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)					33,7 (2023)	16,00	15,64	15,28	14,92	14,56	14,2
		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)					1,28 (2024)	1,40	1,46	1,52	1,58	1,64	1,70
		Indeks Keluarga Sehat (indeks)					0,160	0,168	0,274	0,381	0,487	0,594	0,700
S14	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)					70,71 (2023)	72,12	73,26	74,39	75,52	76,65	77,78
		Indeks Ketimpangan Gender (indeks)					0,448 (2024)	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)					51,46 (2023)	54,03	55,58	57,12	58,66	60,21	61,75
S15	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase penduduk rentan yang memiliki akses terhadap layanan sosial dasar/ PMKS Tertangani (%)					23,47	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00
		Capaian SPM Bidang Sosial (%)					N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sosial (Indeks)					77,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S16	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)					52,2 (2024)*	53,24	54,08	54,91	55,75	56,58	57,42
		Cakupan pembinaan olahraga (%)					N/A	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00
MISI 03: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Kokoh Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan													
T4	Meningkatkan Pembangunan	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)					128,26 (2024)	126,00	124,80	123,60	122,40	121,20	120,00

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan transformasi sosial, ekonomi, serta tata kelola	Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (%)					N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (Skor)					2,00	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
S18	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)					67,63	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
S19	Meningkatnya ketahanan energi yang berkelanjutan	Presentasi penurunan emisi GRK (%)					1,50	1,70	1,72	1,74	1,76	1,78	1,80
S20	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas					0,770	0,770	0,776	0,782	0,788	0,794	0,800
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan transportasi					N/A	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Km/Unit)					N/A	0,088	0,088	0,090	0,092	0,094	0,098
T5	Mengembangkan wilayah secara seimbang dengan pendekatan tata ruang yang terintegrasi dan tahan bencana	Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)					80,00	80,50	68,40	56,30	44,20	32,10	20,00
		Indeks Risiko Bencana (indeks)					138,40 (2024)	138,30	138,26	138,22	138,18	138,14	138,10
S21	Terwujudnya pengelolaan dan pengaturan tata ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)					N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		Persentase Pengawasan dan Penertiban Alih Fungsi Lahan (%)					N/A	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
S22	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)					78,37 (2022)	80,70	81,13	81,55	81,98	82,40	82,83
MISI 04: Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah													
T6	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					2,28 (2024)	3,00	3,68	4,36	5,04	5,72	6,40
		PDRB Per Kapita ADHB (Rp.ribu)					46,470 (2024)	48.794	50.652	52.511	54.370	56.229	58.088
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)					65,02 (2021)*	77,87	78,30	78,72	79,15	79,57	80,00
		Tingkat Kemiskinan (%)					23,45 (2024)	20,00	19,40	18,80	18,20	17,60	17,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					6,86 (2024)	3,40	3,08	2,76	2,44	2,12	1,80
		Indeks Ekonomi Inklusif					N/A	3,40	3,44	3,48	3,52	3,56	3,60
		Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)					7,67 (2024)	8,05	8,44	8,82	9,20	9,59	9,97
S23	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Pebudidaya Perikanan	Nilai Tukar Petani Gabungan (bulan Agustus) (Indeks)*					101,65 (2024)*	101,57	101,99	102,41	102,84	103,26	103,68
		Kontribusi subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK (%)					20,99 (2024)	21,20	21,58	21,96	22,33	22,71	23,09
		Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)					16,31	19,89	20,01	20,13	20,25	20,37	20,49
S24	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (indeks)					49,23 (2024)	52,08	52,86	53,64	54,43	55,21	55,99
S25	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)					0,96	1,01	1,21	1,40	1,60	1,80	2,00
		Rata-rata lama tinggal (hari)					2,00	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
S26	Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)					48,52 (2023)*	48,20	48,96	49,72	50,48	51,24	52,00

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
S27	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Laju pertumbuhan PDRB ADHB per tenaga kerja (%)					9,34	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan ketenagakerjaan					N/A	70,00	76,00	82,00	88,00	94,00	100,00
S28	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian	Persentase Koperasi Aktif (%)					23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)					2,00	2,00	3,20	4,40	5,60	6,80	8,00
T7	Meningkatkan integrasi rantai pasok produksi serta perdagangan domestik	Tingkat Inflasi (%)					3,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Ekspor Barang dan Jasa/Net Ekspor terhadap PDRB (%)					-27,72	-24,95	-17,96	-10,97	-3,98	3,01	10,00
S29	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan (hari)					5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)					145,52 (2023)	145,52	156,42	167,31	178,21	189,10	200,00
S30	Meningkatnya daya saing industri dan distribusi perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)					3,83 (2024)	4,16	4,25	4,34	4,42	4,51	4,60
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)					18,01 (2024)	18,37	18,66	18,95	19,23	19,52	19,81
MISI 05: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Dan Lingkungan													
T8	Meningkatkan ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)					69,31 (2020)*	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
		Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)					67,64 (2023)*	71,98	73,13	74,28	75,44	76,59	77,74
		Indeks Risiko Bencana (indeks)					138,40 (2024)	138,30	138,26	138,22	138,18	138,14	138,10
S31		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (indeks)					N/A	61,00	62,80	64,60	66,40	68,20	70,00

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Indikator Kinerja	Tag_Indikator				Baseline (*kabupaten)	Target Indikator Kinerja					
			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan dalam waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima sampai tiba di lokasi kejadian (%)					N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S32	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)					80,88 (2024)*	82,10	82,76	83,42	84,08	84,74	85,40

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan upaya atau cara untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
MISI 01: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Good Governance) Berbasis Digital								
T1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah							
S1	Terwujudnya manajemen pemerintahan yang terorganisir, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil							
ST1	Penguatan Administrasi Pemerintahan dan Akselerasi Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan penyelenggaraan kewilayahan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Produk Hukum yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan, serta mempermudah akses bagi penyedia barang dan jasa.	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S2	Meningkatnya budaya kerja ASN yang adaptif dan inovatif menuju ASN yang Profesionalitas							
ST2	Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kepegawaian untuk Menciptakan Sistem yang Adil dan Berintegritas	Penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian, termasuk proses rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja, guna menciptakan sistem yang adil dan berintegritas.	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Melalui Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Karier untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier agar pegawai daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi pemerintahan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S3	Terciptanya sistem pendukung yang optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD secara efektif dan profesional							
ST4	Peningkatan Efektivitas Kebijakan Publik melalui Kajian Peraturan, Evaluasi Berbasis Kinerja, dan Penguatan Pengawasan	Optimalisasi Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran DPRD untuk Mendukung Pembangunan Daerah yang Berkualitas	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S4	Terwujudnya masyarakat desa yang berdaya saing dan mandiri							

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST5	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pembangunan Berkelanjutan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Kolaboratif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Swadaya	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S5	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip yang tertib, terintegrasi, dan sesuai standar guna mendukung efektivitas administrasi dan pelayanan publik							
ST6	Pengelolaan Arsip Efektif dan Digitalisasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Keawetan Dokumen Penting	Pengembangan standar pengelolaan arsip yang jelas dan melakukan digitalisasi arsip fisik untuk mempermudah akses dan penyimpanan, serta menjaga keawetan dokumen penting	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S6	Terwujudnya ekosistem pelayanan publik yang modern dan responsif							
ST7	Peningkatan Aksesibilitas Informasi Publik melalui Pengembangan Platform Digital Terintegrasi	Pengadaan dan pemeliharaan platform digital yang terintegrasi untuk menyebarluaskan informasi publik secara efektif, termasuk website, media sosial, dan aplikasi mobile, agar masyarakat mudah mengakses informasi yang relevan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST8	Penguatan Keamanan Informasi melalui Penetapan Standar dan Prosedur Persandian untuk Perlindungan Data yang Optimal	Penetapan standar dan prosedur persandian yang jelas dan komprehensif untuk pengamanan informasi, termasuk jenis algoritma enkripsi yang digunakan dan metodologi implementasi untuk berbagai jenis data	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S7	Terwujudnya sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat							
ST9	Peningkatan Akurasi, Aksesibilitas, dan Pemutakhiran Data Penduduk serta Catatan Sipil melalui Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Layanan Publik	Implementasi sistem yang efektif untuk memastikan data penduduk dan catatan sipil yang terdaftar akurat, lengkap, dan terkini	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pengembangan dan integrasi sistem informasi administrasi kependudukan yang terpusat untuk memastikan data yang konsisten dan dapat diakses oleh berbagai instansi terkait	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST10	Pemanfaatan Satu Data Kependudukan Untuk Kebijakan Publik Responsif dan Tepat Sasaran	Pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan publik mencakup program-program sosial, kesehatan, dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S8	Meningkatnya pelayanan publik di tingkat distrik yang profesional, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berorientasi pada mutu pelayanan							
ST11	Pemberdayaan Kecamatan sebagai Unit Pemerintahan Terdepan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mandiri dan Efektif	Peningkatan kapasitas kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik dengan memberikan otonomi dan sumber daya yang cukup untuk mengelola layanan secara mandiri dan efektif sesuai penugasan kepala daerah	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
T2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan yang transparan, akuntabel dan inovatif							
S9	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui pemanfaatan data, informasi, dan hasil riset yang akurat							
ST12	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan Berbasis Data, Kolaborasi Sektoral, dan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Responsif dan Inklusif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dana desa secara optimal dan sesuai regulasi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST13	Peningkatan Tata Kelola Statistik Sektoral untuk Menjamin Konsistensi dan Akurasi Data dalam Perencanaan Pembangunan	Peningkatan kualitas tata kelola statistik sektoral, mencakup standar pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dapat memastikan konsistensi dan akurasi informasi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST14	Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Pengembangan mekanisme untuk mendistribusikan hasil penelitian dan inovasi kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar hasil penelitian dapat diimplementasikan secara luas dan memberikan dampak positif pada pembangunan daerah	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pengembangan riset dan inovasi yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan kearifan budaya setempat, untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
S10	Meningkatnya mutu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan							
ST15	Penguatan Pengawasan Internal dan Pendampingan untuk Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pemerintahan	Penguatan sistem pengawasan internal yang efektif untuk memantau kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan, guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pelaksanaan program pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan bagi instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S11	Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat							
ST16	Penerapan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Efisien, dan Akuntabel Secara Berkelanjutan dan Terintegrasi	Penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST17	Peningkatan Desentralisasi Fiskal Daerah	Pendataan dan identifikasi potensi pajak baru secara sistematis untuk memperluas basis pajak daerah, serta Pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pajak daerah seperti pajak retribusi pasar, pajak kendaraan, serta pengelolaan objek pajak lainnya	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
MISI 02: Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Sosial Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Kebutuhan Masyarakat								
T3	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan afirmasi sosial yang terjangkau untuk semua terutama OAP							
S12	Meningkatnya intelektualitas, literasi, dan karakter anak usia sekolah, serta pembangunan pemuda yang inklusif dan berdaya saing							
ST18	Penguatan Pendidikan dan Literasi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Semua Tingkat Usia	Peningkatan kemampuan literasi, antara lain kemampuan untuk membaca dan menulis aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Peningkatan partisipasi pendidikan pada anak usia dasar hingga menengah pertama dan atas	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST19	Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Pengembangan Kurikulum Inovatif dan Profesionalisme Tenaga Pendidik untuk Mendukung Kebutuhan Masyarakat Lokal	Pengembangan kurikulum lokal yang berfokus pada keterampilan, seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan digital	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Peningkatan mutu dan distribusi unit layanan, pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan inklusif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pelestarian dan Penguatan Bahasa Daerah melalui Integrasi dalam Sistem Pendidikan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST20	Pendidikan Karakter Multikultural dan Dialog Antaragama	Penguatan Toleransi dan Nilai-Nilai Agama melalui Pendidikan dan Dialog Antar Agama untuk Membangun Masyarakat yang Harmonis	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST21	Peningkatan Akses dan Pelestarian Sumber Daya Literasi untuk Mendorong Pendidikan Inklusif dan Pelestarian Warisan Budaya	Penguatan Budaya Literasi dan Minat Baca Masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pelestarian dan Pengelolaan Naskah Kuno sebagai Warisan Budaya Tak Benda	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S13	Meningkatnya derajat kesehatan, pengentasan stunting, dan keluarga berkualitas							
ST22	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah yang Inklusif dan Berkualitas	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penyediaan peralatan medis yang memadai dan memenuhi standar di puskesmas	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST23	Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Layanan Kesehatan Melalui Pengembangan Tenaga Kesehatan, Standar Kualitas, dan Sistem Distribusi yang Efisien	Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penguatan Sistem Jaminan Kualitas dan Distribusi Produk Kesehatan yang Merata	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penguatan Peran Posyandu dan Kader Kesehatan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penguatan Sistem Kesehatan Rumah Sakit yang Inklusif dan Berkualitas (RSUD)	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penyediaan peralatan medis yang memadai dan memenuhi standar di rumah sakit	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST24	Peningkatan Kesadaran dan Akses terhadap Kesehatan Reproduksi untuk Mendukung Program Keluarga Berencana yang Inklusif	Optimalisasi Keluarga Sejahtera Terencana Dan Kesehatan Reproduksi Berkesinambungan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S14	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak							
ST25	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Kebijakan Gender-Inklusif dan Sistem Perlindungan yang Terintegrasi	Penguatan Sistem Pembangunan Berkesetaraan Gender Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S15	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan inklusif							
ST26	Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi melalui Rehabilitasi Holistik dan Perlindungan Sosial yang Inklusif	Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Pekerja Sosial Untuk Pembangunan Inklusif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
		Sistem Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial yang Komprehensif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S16	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga							
ST27	Pemberdayaan Pemuda Melalui Pengembangan Kepemimpinan dan Dukungan Ekonomi untuk Mewujudkan Kemandirian dan Inovasi	Pemberdayaan Pemuda Melalui Pengembangan Kapasitas Dan Kewirausahaan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST28	Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Atlet Muda untuk Mewujudkan Prestasi Olahraga yang Berkelanjutan	Gerakan Masyarakat Sehat Berolahraga dan Berprestasi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
MISI 03: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Kokoh Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan								
T4	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan transformasi sosial, ekonomi, serta tata kelola							
S17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas							
ST29	Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Inklusif	Optimalisasi Infrastruktur Pengendalian Banjir, Irigasi, dan Air Minum Berbasis Masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah dan Drainase Berbasis Wilayah Terpadu	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST30	Penerapan Standar Bangunan Hijau dan Tata Lingkungan Inklusif untuk Permukiman Berkualitas dan Berkelanjutan	Pembangunan Permukiman Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penerapan Standar Bangunan Berkelanjutan dan Tata Lingkungan yang Aman dan Inklusif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
S18	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan							
ST31	Pembangunan Perumahan Terjangkau dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Peningkatan Ketersediaan dan Aksesibilitas Perumahan Layak Huni bagi Penduduk Miskin, Korban Bencana, atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pengembangan infrastruktur pendukung terpadu (jalan, sanitasi, transportasi) di kawasan pemukiman	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S19	Meningkatnya ketahanan energi yang berkelanjutan							
ST32	Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan untuk Meningkatkan Ketahanan Energi dan Keberlanjutan Lingkungan	Pengembangan berbagai sumber energi listrik terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber energi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S20	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau							
ST33	Pengembangan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi untuk Aksesibilitas dan Keamanan yang Lebih Baik	Peningkatan infrastruktur transportasi yang berkualitas, termasuk jalan, jembatan, bandara, dan terminal, untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi seluruh pengguna	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pengembangan sistem transportasi terintegrasi antara berbagai moda transportasi, untuk menciptakan sistem yang efisien, termasuk penyediaan jalur transportasi umum yang terhubung	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
T5	Mengembangkan wilayah secara seimbang dengan pendekatan tata ruang yang terintegrasi dan tahan bencana							
S21	Terwujudnya pengelolaan dan pengaturan tata ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana							

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST34	Perencanaan Tata Ruang Hijau Berkelanjutan untuk Mewujudkan Lingkungan yang Seimbang dan Berdaya Dukung	Penguatan kebijakan perencanaan tata ruang hijau yang berbasis data dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST35	Penyusunan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam setiap tahapan pembangunan, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait	Pembentukan dan Penguatan Kampung Tangguh Bencana (Kamtana) serta Pelibatan masyarakat dalam pelatihan, simulasi, serta penyusunan peta jalur evakuasi secara partisipatif	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pelatihan evakuasi dan penyelamatan berbasis komunitas, serta memperbarui jalur dan titik kumpul evakuasi sesuai hasil pemetaan partisipatif, serta layanan logistik yang terintegrasi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pengkajian kebutuhan secara cepat dan akurat untuk menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan daerah	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST36	Penguatan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan	Perlindungan terhadap kawasan konservasi melalui penegakan hukum yang lebih ketat, pengelolaan yang berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S22	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup							
ST37	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Pemberdayaan Komunitas dalam Pelestarian Lingkungan	Penguatan Regulasi dan Pengawasan Terintegrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penguatan Kapasitas dan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Inklusivitas dan Kearifan Lokal	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
MISI 04: Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah								
T6	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan							
S23	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Pebudidaya Perikanan							

[illegible]

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST41	Pariwisata Berkelanjutan dengan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Teknologi Digital	Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dengan memprioritaskan pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan keanekaragaman hayati, serta melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan destinasi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST42	Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dan Berdaya Saing	Mendorong Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Infrastruktur Inovatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S26	Terwujudnya berkebudayaan maju							
ST43	Pemberdayaan Masyarakat melalui Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Kebudayaan dan Pelestarian Warisan Lokal	Revitalisasi Budaya Dan Seni Tradisional Berbasis Masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S27	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja							
ST44	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja melalui Sistem Informasi yang Transparan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri	Optimalisasi Sistem Ketenagakerjaan Untuk Produktivitas Dan Penempatan Tenaga Kerja	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S28	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian							
ST45	Meningkatkan Daya Saing Koperasi Melalui Penguatan Akses Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Manajerial	Penguatan Daya Saing Koperasi melalui Akses Pembiayaan, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Pengembangan Jaringan Usaha	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST46	Pemberdayaan UMKM Melalui Akses Pembiayaan, Inovasi Produk, dan Akses Pasar	Pengembangan UMKM Berdaya Saing Dari Pembiayaan Hingga Pasar	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
T7	Meningkatkan integrasi rantai pasok produksi serta perdagangan domestik							

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
S29	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif							
ST47	Peningkatan Daya Tarik Investasi melalui Penyederhanaan Regulasi, Insentif Pajak, dan Infrastruktur Pendukung	Peningkatan kemudahan berinvestasi dan jangkauan promosi penanaman modal	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Penguatan sistem Monev dan Pengendalian Investasi Yang Transparan dan Akuntabel	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S30	Meningkatnya daya saing industri dan distribusi perdagangan							
ST48	Peningkatan Ekosistem Industri Berkelanjutan melalui Kemitraan dan Integrasi Rantai Nilai Agroindustri	Pengembangan rantai nilai agroindustri melalui integrasi antara petani, pengolah, dan distributor, untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas akses pasar.	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST49	Akselerasi Pertumbuhan Usaha Perdagangan melalui Akses Pembiayaan, Pemasaran, dan Pengendalian Inflasi	Percepatan transformasi digital dan efisiensi sistem perdagangan melalui penyederhanaan perizinan usaha berbasis digital, penguatan infrastruktur logistik daerah, serta peningkatan pengawasan distribusi dan mutu produk dengan sistem terintegrasi	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
ST50	Peningkatan Produktifitas pelaku usaha perdagangan domestik	Peningkatan Daya Saing Perdagangan Daerah	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
MISI 05: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Dan Lingkungan								
T8	Meningkatkan ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas							
S31	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat							
ST51	Penguatan Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Publik melalui Edukasi Peraturan Daerah dan Pengawasan yang Efektif	Sosialisasi yang intensif mengenai isi dan pentingnya Perda dan Perkada serta penegakan hukum terhadap pelanggarnya	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S) / Strategi (ST)		Arah Kebijakan	PERIODESASI					LOKUS (Distrik/ Kampung/ Kelurahan/ Kawasan)
			2026	2027	2028	2029	2030	
ST52	Kolaborasi Keamanan Berbasis Komunitas untuk Mewujudkan Ketertiban dan Lingkungan Sosial yang Aman dan Inklusif	Peningkatan Tata Kelola Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
S32	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM							
ST53	Peningkatan Nilai Pancasila dan Ketahanan Sosial Masyarakat	Penguatan Ideologi Pancasila, Budaya Politik Beretika, dan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...
		Peningkatan Daya Tahan Sosial-Ekonomi Masyarakat	●	●	●	●	●	Distrik / Kampung ... / Kelurahan ... / Kawasan ...

3.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pentahapan pembangunan daerah di dalamnya berisi Tema Pembangunan dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Pentahapan pembangunan daerah jangka menengah daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tahap 2026 Penguatan Pondasi Kesejahteraan Berbasis SDM

Tahap 2027 Tahapa Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Lokal

Tahap 2028 Pembangunan Inklusif dan Ketahanan Sosial

Tahap 2029 Akselerasi Infrastruktur dan Tata Kelola Berkelanjutan

Tahap 2030 Perwujudan Kabupaten Biak Numfor Yang SEJAHTERA, BERDAYA SAING, INKLUSIF & BERKELANJUTAN

Tabel III.3 Perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

VISI RPJMD	TEMA TAHUNAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2026-2030				
	TEMA 2026	TEMA 2027	TEMA 2028	TEMA 2029	TEMA 2030
	TEMA PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN
Visi : "Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor Yang SEJAHTERA, BERDAYA SAING, INKLUSIF & BERKELANJUTAN Melalui Masyarakat Yang CERDAS, SEHAT DAN MANDIRI"	Penguatan Pondasi Kesejahteraan Berbasis SDM	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Lokal	Pembangunan Inklusif dan Ketahanan Sosial	Akselerasi Infrastruktur dan Tata Kelola Berkelanjutan	Perwujudan Kabupaten Biak Numfor Yang SEJAHTERA, BERDAYA SAING, INKLUSIF & BERKELANJUTAN

MISI RPJMD	Prioritas 2026	Prioritas 2027	Prioritas 2028	Prioritas 2029	Prioritas 2030
MISI 01: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Good Governance) Berbasis Digital	Penguatan pemerataan layanan pendidikan & kesehatan	Peningkatan SDM unggul	Pemerataan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan	Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan & kesehatan	Terwujudnya masyarakat berpendidikan tinggi, sehat, dan mandiri
	Pengentasan stunting dan perlindungan sosial dasar	Inklusi pendidikan dan pelatihan vokasi	Pemberdayaan perempuan dan anak	Transformasi digital pelayanan	Kualitas manusia unggul secara berkelanjutan
MISI 02: Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Sosial Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Penguatan ekonomi kerakyatan	Daya saing ekonomi lokal dan regional	Ekonomi inklusif dan kreatif berbasis potensi daerah	Penguatan rantai pasok, industri inovatif, dan transformasi digital	Ekonomi inklusif berdaya saing global
	Pengembangan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata	Digitalisasi ekonomi	Peningkatan perlindungan dan literasi pasar kerja	Pengembangan ekosistem investasi	Perekonomian daerah yang berkelanjutan dan adaptif

MISI RPJMD	Prioritas 2026	Prioritas 2027	Prioritas 2028	Prioritas 2029	Prioritas 2030
	Pemberdayaan ekonomi kreatif	Promosi investasi dan ekspor			
MISI 03: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Kokoh Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan	Modernisasi sistem keamanan, tata kelola arsip & informasi	Penguatan kolaborasi sosial dan penanganan konflik	Perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat kelompok rentan	Penguatan sistem perlindungan, jaringan sosial, dan mitigasi bencana	Kehidupan masyarakat harmonis, berketahanan sosial dan budaya
	Penguatan ketahanan sosial dan pengurangan risiko bencana	Pelibatan masyarakat dalam keamanan wilayah	Penguatan kohesi sosial	Peningkatan ketahanan komunitas	Ketentraman masyarakat berlandaskan hukum dan HAM
MISI 04: Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Reformasi tata kelola pemerintahan digital	Transformasi layanan publik terintegrasi	Birokrasi kolaboratif, modern, responsif	Optimalisasi pengawasan internal	Tata kelola pemerintahan terintegrasi, adaptif, berbasis teknologi
	Transparansi dan akuntabilitas birokrasi	Penguatan tata kelola keuangan daerah	Peningkatan kompetensi dan adaptasi birokrasi daerah	Integrasi big data dan tata kelola inovasi	Birokrasi berstandar internasional
	SDM ASN profesional			Digitalisasi administrasi pelayanan publik	
MISI 05: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Dan Lingkungan	Pembangunan infrastruktur dasar ramah lingkungan	Pengembangan infrastruktur energi terbarukan	Peningkatan infrastruktur berkelanjutan	Akselerasi transportasi, perumahan, sanitasi dan sistem tata ruang	Infrastruktur daerah berkelanjutan
	Konektivitas jalan, transportasi, perumahan, air minum	Transportasi terintegrasi	Tata ruang adaptif bencana, pengelolaan RTH	Peningkatan perlindungan kawasan konservasi	Konektivitas daerah yang optimal
					Ketahanan energi dan lingkungan hidup

3.232 Program-program Prioritas Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Perumusan program prioritas juga perlu memperhatikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar III.2 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2025-2029



Tabel III.4 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2025-2029

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur		
				Urusan	Prorgam	
M1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Good Governance) Berbasis Digital					
	Prioritas 1: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	1.Perbaikan SOP Layanan Publik	Perbaikan SOP layanan publik di Kabupaten Biak Numfor diarahkan pada integrasi layanan, penyesuaian prosedur sesuai regulasi, peningkatan profesionalisme, transparansi, serta penguatan sarana dan prasarana. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, mudah, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					OPD YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK	
		4.Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Layanan	Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Biak Numfor merupakan prioritas strategis yang melibatkan pelatihan teknis dan manajerial secara berkelanjutan. Program ini bertujuan menciptakan tenaga aparatur yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		6.Peningkatan Kapasitas SDM ASN	Peningkatan kapasitas SDM ASN di Kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui pelatihan dan diklat yang sistematis serta penegasan komitmen pengabdian jangka panjang. Langkah ini penting untuk menciptakan aparatur pemerintah yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kabupaten Biak Numfor berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga (Contoh pelaksanaan pra musrenbang khusus disabilitas, pra musrenbang khusus perempuan, pra musrenbang khusus adat)	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	8.Perencanaan Pembangunan Berbasis Resiko	Perencanaan pembangunan berbasis risiko di Kabupaten Biak Numfor merupakan pendekatan proaktif yang mengintegrasikan analisis risiko dalam proses perencanaan untuk menciptakan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Pendekatan ini didukung oleh koordinasi antar sektor, penguatan kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang.	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Prioritas 2: Pemanfaatan Teknologi	2.Pemantapan Infrastruktur & Sarpras Mall Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pemantapan dan peningkatan infrastruktur serta sarana prasarana (sarpras) Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
			bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. MPP ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan administrasi dari instansi pusat, daerah, BUMN/BUMD dalam satu gedung untuk memudahkan masyarakat. Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Biak Numfor menyediakan layanan terintegrasi terutama di bidang perizinan usaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). MPP ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dengan proses yang lebih cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit. Selain perizinan usaha, MPP juga melayani administrasi kependudukan, pembayaran pajak, serta layanan dari berbagai instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal lainnya.	BIDANG PENANAMAN MODAL	
				3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
				3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		3.Pemanfaatan Tik & Inovasi Guna Menunjang Layanan Publik	Pemanfaatan TIK dan inovasi digital di Kabupaten Biak Numfor menjadi kunci dalam meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan publik. Dengan dukungan infrastruktur internet yang memadai dan sistem informasi yang terintegrasi, pelayanan publik di Biak Numfor semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		13.Penguatan Layanan Berbasis Aplikasi Dan Teknologi			
		11.Pembangunan Media Center Dalam Rangka Penyebarluasan Informasi Dan Pengawasan	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memprioritaskan pembangunan Media Center sebagai sarana strategis untuk memperkuat penyebaran informasi dan pengawasan publik. Media Center ini dirancang sebagai pusat komunikasi yang terintegrasi, memfasilitasi akses informasi yang cepat, akurat,	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
			dan transparan kepada masyarakat serta mendukung fungsi pengawasan atas pelaksanaan program pemerintah daerah.		
		12.Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis E-Government	Pemerintah daerah juga tengah membangun dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan administrasi dalam satu tempat, sekaligus mendukung transformasi digital pelayanan publik.	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Prioritas 3: Pengelolaan dan penggunaan APBD yang sehat dan berkelanjutan	7.Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Biak Numfor memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, Kejari, KPK, dan masyarakat guna mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		9.Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisiensi anggaran di Kabupaten Biak Numfor merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional, dengan fokus pada pengurangan belanja yang tidak prioritas dan peningkatan pendapatan daerah. Upaya ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas.	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		10.Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi PAD ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keuangan daerah agar mampu mendanai program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri dan berkelanjutan.	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	M2 Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Sosial Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Kebutuhan Masyarakat				
	Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.Peningkatan Kompetensi Guru	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memprioritaskan peningkatan kompetensi guru sebagai bagian penting dari program pembangunan pendidikan periode 2025-2029. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan berkelanjutan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
		14.Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (Kip, Kbp)	Program beasiswa ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendorong pemerataan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Biak Pintar		
		2.Pemberian Beasiswa	Program beasiswa ini dalam rangka untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, tetapi juga mendorong pengembangan kompetensi dan karakter generasi muda Biak Numfor agar mampu bersaing dan berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.		
		3.Perbaikan Sarana/Prasarana	Perbaikan sarana/prasarana pendidikan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor. Fokusnya adalah Pembangunan sekolah & kelas baru, Rehabilitasi fasilitas, Pengadaan sarana pendidikan, Infrastruktur penunjang, Pembangunan Sekolah Rakyat		
		5.Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong partisipasi semesta masyarakat sebagai kunci mewujudkan pendidikan bermutu dan merata bagi seluruh warga. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program pendidikan, seperti musyawarah perencanaan pendidikan, pengawasan pelaksanaan program, serta dukungan terhadap fasilitas pendidikan. selain itu, ini juga juga dalam mendukung program unggulan nasional pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang terdata dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN)		
		6.Penguatan Program Literasi Dan Numerik	Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) untuk mengukur dan memantau kemampuan literasi dan numerasi siswa secara sistematis. Metode pembelajaran Numerasi Gampang Asik dan Menyenangkan (GASING) yang diterapkan di sekolah dasar, bekerja sama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya, terbukti meningkatkan kemampuan berhitung siswa secara signifikan. Pendirian dan pengembangan Rumah Baca di berbagai kampung sebagai pusat belajar yang mendukung peningkatan kemampuan baca tulis anak-anak secara holistik. Pelatihan dan pendampingan guru untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajarkan literasi dan numerasi dengan metode yang efektif dan menarik. Kolaborasi		

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
			dengan berbagai mitra kerja guna memperkuat program literasi dan numerasi serta menyediakan sumber belajar yang memadai.		
		4.Manajemen Penempatan Guru	Manajemen penempatan guru di Biak Numfor diarahkan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, berkualitas, dan tersebar merata sesuai kebutuhan daerah, mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi seluruh anak di Kabupaten Biak Numfor.	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		15.Pemberian Bantuan Study Akhir Bagi Keluarga Tidak Mampu	Bantuan biaya studi akhir bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang sedang menyelesaikan pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar Papua	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	7.Penguatan Mutu Layanan Kesehatan (Puskesmas 24 Jam)	Pelayanan ini mencakup Unit Gawat Darurat (UGD), rawat inap, dan persalinan, sehingga memperkuat akses layanan kesehatan dasar secara menyeluruh. Meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan tenaga medis dan fasilitas pendukung, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar pelayanan berjalan optimal.	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		9.Penguatan Sistem Kesehatan	Kabupaten Biak Numfor terus mendorong akreditasi puskesmas untuk meningkatkan mutu layanan dan memastikan puskesmas berfungsi sebagai pintu utama pelayanan kesehatan primer. Program Integrasi Layanan Primer (ILP) juga diimplementasikan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan berkualitas.		
		10.Penguatan Akses Dan Keterjangkauan Layanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Inovasi	Upaya ini diwujudkan dengan digitalisasi layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk penerapan sistem informasi kesehatan terintegrasi berbasis aplikasi seperti SatuSehat dan ASIK dari Kementerian Kesehatan, yang memungkinkan data kesehatan dapat diakses secara real-time dan layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan aplikasi dan sistem digital ini memperkuat pengumpulan data kesehatan yang akurat, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan.		
		8.Ketersediaan Tenaga Medis Dan Paramedis Di Puskesmas/Pustu/Polindes	Upaya ini bertujuan memastikan pelayanan kesehatan dasar yang prima dan merata hingga pelosok kampung dan kepulauan, mengurangi beban rumah sakit, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan kapan saja dibutuhkan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
		11.Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Dalam rangka implementasi program Integrasi Layanan Primer (ILP) di 21 Puskesmas yang fokus pada layanan promotif dan preventif, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan. Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan di seluruh puskesmas dan khususnya di Kepulauan Numfor, memberikan kemudahan akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya deteksi dini penyakit dan pola hidup sehat. Program ini juga melibatkan edukasi kesehatan yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyakit dan pengelolaan kesehatan keluarga.	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Prioritas 6: Penguatan Perlindungan Sosial	12.Pemberian Bantuan Duka Bagi Keluarga Tidak Mampu	Program pemberian bantuan duka sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada keluarga pasien yang meninggal dunia, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Program ini mencakup penyaluran bantuan duka bagi keluarga pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor, dengan pengurusan jenazah secara gratis mulai dari kamar mayat hingga pemulangan jenazah ke rumah keluarga, termasuk bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan. Fokus pada masyarakat kurang mampu, terutama Orang Asli Papua (OAP), dengan data penerima yang terintegrasi melalui BPJS Kesehatan dan RSUD Biak. Pemerintah daerah juga berencana mengatur program ini dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menjamin kelangsungan bantuan tersebut.	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		16.Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu	Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang merupakan masyarakat miskin atau tidak mampu, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit tanpa biaya langsung. Program ini juga diperkuat dengan kemudahan administrasi, di mana warga cukup membawa KTP saat berobat dan data kepesertaan terus diverifikasi agar tepat sasaran.		
		13.Pemberian Bantuan / Jaminan Bagi Para Pekerja Rentan Dari Keluarga Tidak Mampu	Pemberian jaminan sosial ini meliputi perlindungan kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang sangat terjangkau, sekitar Rp16.800 per bulan, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi pekerja dan keluarganya	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
		17.Pemberian Bantuan Lansia	Bantuan sosial khusus bagi lansia, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) yang kurang mampu, sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan lanjut usia. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, nutrisi dan perlengkapan kebersihan diri, perlengkapan tidur, alat bantu seperti tongkat dan kursi roda, serta dukungan kewirausahaan bagi lansia yang mampu beraktivitas.	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
M3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Kokoh Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan				
	Prioritas 7: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan	1.Pembangunan Kantor Bupati Di Lokasi Baru	Pembangunan kantor Bupati di lokasi baru sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas pemerintahan yang lebih representatif dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif. Pembangunan ini menekankan pentingnya modernisasi infrastruktur pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah.	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2.Penguatan Aksesibilitas Dan Keterjangkauan Mendukung Prioritas Pengembangan	Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan infrastruktur untuk mendukung prioritas pengembangan di lokasi baru, terutama dalam rangka percepatan pembangunan wilayah strategis di Teluk Cenderawasih. Upaya ini meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, dan rumah layak huni yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai distrik dan kampung.	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		3.Penguatan Layanan Transportasi Terintegrasi dan Terpadu Mendukung Prioritas Pembangunan	Pengembangan dan penambahan rute penerbangan, termasuk rute perintis Biak-Numfor-Manokwari-Sorong yang tengah diijazahi untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara yang selama ini terbatas dan mendukung sektor pariwisata serta ekonomi lokal. Pengadaan armada angkutan air, seperti bantuan empat unit bus air dari Kementerian Perhubungan, untuk mempermudah akses transportasi antar pulau di wilayah kepulauan Biak Numfor. Integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara agar layanan transportasi lebih efisien, terjangkau, dan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan.	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
		4.Peningkatan Layanan Air Bersih & Sanitasi	Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kesehatan lingkungan. Melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), pemerintah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di berbagai kampung, terutama di daerah perdesaan dan pinggiran kota,	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
			sehingga akses air minum yang layak dan aman dapat dinikmati secara merata.	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
M4	Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah				
	Prioritas 8: Penguatan Ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	1.Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Bagi Petani	Bantuan ini meliputi bibit berbagai komoditas seperti jagung, cabai, bawang merah, kacang hijau, keladi, sayuran, serta bibit padi varietas unggul untuk mendukung peningkatan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain bibit tanaman, pemerintah juga menyediakan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas petani. Program ini didukung oleh pendampingan penyuluh pertanian dan kolaborasi dengan kelompok tani di berbagai distrik, dengan target membuka lahan pertanian baru hingga puluhan hektare.	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.Pemberian Subsidi Pupuk & Pakan Ternak	Untuk pupuk, pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK kepada petani, khususnya petani Orang Asli Papua (OAP), dengan prioritas pada sembilan komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah sesuai Permentan No. 10 Tahun 2022. Subsidi pupuk ini bertujuan mendukung kelancaran dan kesuburan tanaman guna meningkatkan produksi pangan lokal. Sementara untuk pakan ternak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor telah mengembangkan produksi pakan ternak lokal yang diracik dari bahan baku sumber daya alam setempat. Produksi pakan lokal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pakan impor serta membantu pelaku usaha ternak ayam petelur Orang Asli Papua dalam memenuhi kebutuhan pakan dengan harga lebih terjangkau. Program ini juga mendukung keberlanjutan usaha peternakan dan ketahanan pangan di daerah.		
		2.Pemberian Bantuan Bibit Ternak Bagi Peternak	Pemberian bibit ternak dan pendampingan teknis seperti pemeriksaan kesehatan ternak secara rutin guna memastikan keberhasilan usaha peternakan. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga peternak, memperkuat usaha peternakan lokal, dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor.	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
					MASYARAKAT VETERINER
		4.Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Umkm Prioritas	Pelatihan dan pembinaan bagi UMKM prioritas sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). Program ini mencakup peningkatan pemahaman kewirausahaan, pengembangan produk, manajemen usaha, dan akses pengadaan barang dan jasa pemerintah.	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		5.Pelatihan Lifeskill Dan Kesempatan Kerja Melalui Bursa Tenaga Kerja	Pelatihan kerja disertai sertifikasi kompetensi juga menjadi fokus utama agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang siap pakai dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Pelatihan ini diharapkan berbasis inovasi usaha dan permodalan agar mendorong kemandirian dan tidak bergantung pada perusahaan tertentu.	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		6.Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan ini direncanakan sebagai pelabuhan perikanan terintegrasi internasional dengan kapasitas gedung penyimpanan ekspor yang besar, termasuk fasilitas pabrik es dan cold storage. Lokasi lahan seluas sekitar lima hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan pelabuhan ini. Selain itu, Biak Numfor telah ditetapkan sebagai Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan fasilitas gudang beku ikan berkapasitas 200 ton, memanfaatkan posisi strategisnya di kawasan kepulauan Pasifik. Potensi perikanan lokal, seperti ikan tuna yellow fin berkualitas ekspor, menjadi fokus utama dalam pengembangan pelabuhan ini.	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
				3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
	7.Pengembangan Kawasan Minapolitan		Kawasan minapolitan di Samber dan Auki didukung oleh peningkatan infrastruktur perikanan, penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, serta sinergi dengan program pemerintah pusat seperti pengembangan Kampung Nelayan Modern oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Serta melaksanakan upaya terkait dengan hilirisasi produksi perikanan tangkap (pabriksi pengalengan ikan)	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
				2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	8.Pengembangan Kawasan Pariwisata Premium (Museum Bawah Laut)		Kawasan Pariwisata Premium dengan fokus pada Museum Bawah Laut di perairan Kepulauan Padaido/Aimando, yang meliputi Pulau Nusi, Wundi, Mansorbabo, dan beberapa kampung sekitar. Museum bawah laut ini akan menampilkan berbagai peninggalan bersejarah Perang Dunia II, seperti torpedo net, bangkai mobil, dan pesawat Amerika yang masih terawat di dasar laut. Pengembangan museum ini telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kementerian terkait lainnya, dan sedang dalam proses pengajuan penetapan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Museum bawah laut Biak Numfor diharapkan menjadi destinasi wisata unggulan di Papua, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan nasional dan internasional.	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
				2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	9.Penyediaan Kawasan Khusus Pengembangan Investasi Dan Bisnis		Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik desa (Bumdes) di distrik yang mengelola potensi daerah, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dapat meningkat. Kawasan khusus ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

No	Misi / Prioritas Kabupaten Biak Numfor	Prorgam Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik Kepala Daerah)	Deskripsi Oprasional Prorgam Unggulan Daerah	Indikasi Terhadap Nomenklatur	
				Urusan	Prorgam
			yang terintegrasi, mempermudah proses investasi, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.		
M5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Dan Lingkungan				
	Prioritas 9: Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial	1.Revitalisasi kawasan budaya dan pelestarian warisan budaya	Program ini mencakup pelestarian seni tari tradisional seperti Tari Wor, Snap Mor, dan Yospan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, pemerintah aktif menggelar festival budaya seperti Festival Biak Munara Wampasi (BMW) yang menjadi ajang promosi atraksi budaya lokal sekaligus menarik wisatawan domestik dan mancanegara.	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		3.Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal melalui Program Desa Budaya (Cultural Village)	Melalui Desa Budaya, pemerintah mendorong revitalisasi seni tari tradisional, kerajinan tangan, upacara adat, dan pengelolaan warisan budaya secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Program ini juga selaras dengan visi misi daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis potensi unggulan pariwisata dan budaya, serta mendukung pengembangan kampung wisata yang menjadi prioritas	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional
		2.Pennguatan kapasitas dan kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di wilayah Saereri	Program ini juga fokus pada peningkatan pemahaman tentang peran strategis lembaga adat dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi, sekaligus menjaga harmoni dan keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, pemerintah daerah mendukung fasilitasi seperti pembangunan rumah adat sebagai pusat kegiatan LMA untuk memperkuat kelembagaan adat dan mendukung program-program pembangunan berbasis adat.	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		4.Pelatihan dan penguatan kapasitas lembaga lokal serta forum adat,	Program ini mencakup pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen adat, serta fasilitasi dialog dan komunikasi antara pemerintah dengan lembaga adat untuk memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan dan pelestarian budaya. Penguatan kapasitas ini juga bertujuan meningkatkan peran lembaga adat dalam menjaga harmonisasi sosial, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal.	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
				8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Agar program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana, perlu disesuaikan dengan program nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Jika Program prioritas yang bersumber dari Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati tersebut belum cukup memadai atau dirasa masih kurang untuk menjawab tujuan, dimana tujuan ini menjawab visi dan misi, maka ditambah Program Perangkat Daerah lainnya. Program Perangkat Daerah lainnya tersebut dipilih atau diseleksi yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Sinkronisasi program prioritas dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dirinci pada tabel berikut:

Tabel III.5 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator				
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK	
MISI 01: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Good Governance) Berbasis Digital														
T1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah							Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)						
								Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)						
								Indeks Pelayanan Publik						
								Persentase Capaian SPM Kabupaten (%)						
								Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)						
								Indeks BerAkhlak (%)						
S1	Terwujudnya manajemen pemerintahan yang terorganisir, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil							Nilai AKIP						
								Nilai LPPD						
								Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)						
								Indeks Reformasi Hukum (Indeks)						
								Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)						
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Distrik (%)						
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (indeks)						
							Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Ketresediaan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)						
							Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)						
							Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Disesuaikan dengan konteks daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)						
	Program Perekonomian dan Pembangunan							Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Dokumen Kebijakan Ekonomi/Pembangunan yang Disahkan dan Diimplementasikan (%)					

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
								Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)				
S2	Meningkatnya budaya kerja ASN yang adaptif dan inovatif menuju ASN yang Profesionalitas								Indeks Sistem Merit (Nilai)				
									Rata-rata Predikat Kinerja ASN (skor predikat)				
	Program Kepegawaian Daerah							Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)				
								Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)				
								Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)				
								Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)				
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)				
								Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)				
								Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)				
								Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)				
S3	Terciptanya sistem pendukung yang optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD secara efektif dan profesional								Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (skor kepuasan)				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD (%)				
									Persentase Penetapan Ranperda (%)				
								Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
S4	Terwujudnya masyarakat desa yang berdaya saing dan mandiri								Indeks Desa Membangun (IDM) (indeks)				
	Program Penataan Desa							Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)				
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa							Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)				
	Program Administrasi Pemerintahan Desa							Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)				
									Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)				
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)				
								Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)					
								Meningkatnya partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Kampung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung (skor)				
S5	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip yang tertib, terintegrasi, dan sesuai standar guna mendukung efektivitas administrasi dan pelayanan publik								Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (indeks)				
	Program Pengelolaan Arsip							Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)				
									Tingkat Digitalisasi Arsip (%)				
								Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (%)				
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip							Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)				
S6	Terwujudnya ekosistem pelayanan publik yang modern dan responsif								Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi				
									Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
									Persentase Desa/Kelurahan terhadap Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler (%)				
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)				
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (indeks)				
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kepatuhan ASN terhadap penggunaan sandi/digital signature untuk dokumen elektronik resmi (%)				
S7	Terwujudnya sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (indeks)				
									Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan				
	Program Pendaftaran Penduduk							Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)				
									Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)				
	Program Pencatatan Sipil							Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)				
									Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)				
									Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)				
									Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)				
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (%)				
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan							Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
S8	Meningkatnya pelayanan publik di tingkat distrik yang profesional, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berorientasi pada mutu pelayanan									Indeks Kualitas Layanan Distrik (indeks)				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat distrik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					
								Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di tingkat distrik	Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat distrik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					
								Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di tingkat distrik	Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat distrik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					
								Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di tingkat distrik	Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya kemampuan distrik menjalankan penugasan kepala daerah	Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya kemampuan distrik menjalankan penugasan kepala daerah	Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						Meningkatnya kemampuan distrik menjalankan penugasan kepala daerah	Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)				
T2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan yang transparan, akuntabel dan inovatif								Maturitas SPIP				
									Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)				
									Indeks Implementasi Perencanaan (%)				
									Opini BPK Atas Laporan Keuangan (opini)				
S9	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui pemanfaatan data, informasi, dan hasil riset yang akurat								Persentase capaian target indikator sasaran pembangunan (%)				
									Indeks kapabilitas inovasi (Indeks Daya Saing Daerah)				
									Indeks Pembangunan Statistik (indeks)				
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)				
									Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)				
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)				
								Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)				
								Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator			
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)				
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (%)				
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah							Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)				
									Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)				
									Meringkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
								dalam penyelesaian permasalahan daerah					
								Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)				
								Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)				
								Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (%)				
								Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)				
								Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)				
S10	Meningkatnya mutu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan								Survey Penilaian Integritas (Nilai)				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan							Menurunnya kasus penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)				
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)				
S11	Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat								Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
									Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)				
									Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)				
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)				
									Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)				
								Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)				
									Persentase Penurunan SILPA (%)				
								Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)				
								Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)				
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)				
									Return on Aset (ROA) BUMD (%)				
								Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)				
MISI 02: Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Sosial Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Kebutuhan Masyarakat													
T3	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan afirmasi sosial yang terjangkau untuk semua terutama OAP								Indeks Pembangunan Manusia				
									Indeks Kesejahteraan Sosial (indeks)				
									Indeks Pembangunan Gender (indeks)				
									Indeks Kualitas Keluarga (indeks)				
S12	Meningkatnya intelektualitas, literasi, dan karakter anak usia sekolah, serta pembangunan pemuda yang inklusif dan berdaya saing								Harapan Lama Sekolah (tahun)				
									Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
									Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)				
									Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan (%)				
									Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tingkat :				
									SD				
									SMP				
									SMA				
									SMK				
									Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi tingkat :				
									SD				
									SMP				
									SMA				
									SMK				
	Program Pengelolaan Pendidikan							Meningkatnya Melek Huruf Penduduk	Angka Melek Huruf Penduduk Usia +15 tahun (%)				
								Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APK PAUD (%)				
									APM SD/ sederajat (%)				
									APM SMP/ sederajat (%)				
									APM SMA/ sederajat (%)				
									Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun				
									Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun				
									Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
									Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (%)				
	Program Pengembangan Kurikulum							Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)				
									Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka (%)				
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan							Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (indeks):				
									SD				
									SMP				
									SMA				
									SMK				
									Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)				
									Persentase tenaga kependidikan minimal S1/ sederajat (%)				
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan							Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)				
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra							Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)				
	Program Pengembangan Kurikulum							Meningkatnya keterampilan sosial, komunikasi, empati, dan moral siswa antar pemeluk agama berbeda	Persentase mata pelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis digital dan inovasi				
	Program Pembinaan Perpustakaan							Meningkatnya minat baca pada masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (indeks)				
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno							Meningkatnya penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Cakupan naskah kuno yang terawat dan dilestarikan (%)				
S13	Meningkatnya derajat kesehatan, pengentasan stunting, dan keluarga berkualitas								Umur Harapan Hidup (tahun)				
									Persentase Capaian SPM Kesehatan (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
									Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				
									Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)				
									Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
									Indeks Keluarga Sehat (indeks)				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							Meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 klh)				
									Angka Kematian Bayi (per 1.000 klh)				
									Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (%)				
									Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (%)				
									Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja (%)				
									Persentase Pelayanan Kesehatan Olah raga (%)				
									Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar (%)				
									Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)				
									Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)				
									Prevalensi HIV				
									Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk				
									Persentase Balita Usia 0 - 59 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Lengkap				
									Rasio tenaga perawat terhadap penduduk (persatuan penduduk)				
								Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap penduduk (per 30.000 penduduk)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator				
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan lengkap sesuai standar jenis profesi (%)					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM sesuai standar (%)					
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman							Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman sesuai standar (%)					
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								Meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase elemen akreditasi RS				
											Persentase indikator SPM RS				
											Bed Occupancy Ratio (BOR)				
											Average Length of Stay (ALOS)				
											Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
											Persentase sarana prasarana sesuai standar				
											Tingkat ketersediaan layanan spesialistik				
											Tingkat pencapaian pelayanan promotif/preventif				
											Nilai indikator mutu nasional dan prioritas				
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana pasarana untuk rumah sakit tipe C (%)												
		Program Pengendalian Penduduk							Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) (per penduduk perempuan usia 15-49 tahun)					
									Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19) (per penduduk perempuan usia 15-19 tahun)						

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)							Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)				
									Persentase kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)				
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)				
S14	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak								Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)				
									Indeks Ketimpangan Gender (indeks)				
									Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)				
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (%)				
									Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)				
	Program Perlindungan Perempuan							Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)				
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga							Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)				
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak							Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)				
	Program Pemenuhan Hak Anak							Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (indeks)				
								Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Perlindungan Khusus Anak							eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (indeks)				
S15	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan inklusif								Persentase penduduk rentan yang memiliki akses terhadap layanan sosial dasar/ PMKS Tertangani (%)				
									Capaian SPM Bidang Sosial (%)				
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sosial (Indeks)				
	Program Pemberdayaan Sosial							Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)				
	Program Rehabilitasi Sosial							Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)				
									Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)				
									Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)				
									Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)				
									Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)				
	Program Penanganan Bencana							Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)				
									Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)				
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang terpelihara dan layak (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator			
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
S16	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga								Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)					
									Cakupan pembinaan olahraga (%)					
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)					
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan						Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)					
MISI 03: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Kokoh Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan														
T4	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan transformasi sosial, ekonomi, serta tata kelola								Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)					
									Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (%)					
S17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas								Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (Skor)					
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air						Meningkatnya perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses Masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak (%)					
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						Meningkatnya layanan persampahan regional	Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						Meningkatnya kualitas system drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)					
		Program Pengembangan Permukiman						Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)					

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Penataan Bangunan Gedung							Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)				
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya							Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)				
	Program Penyelenggaraan Jalan							Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kondisi mantap (%)				
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi							Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)				
S18	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan								Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)				
	Program Pengembangan Perumahan							Terpenuhinya rumah layak huni Penduduk Miskin, Korban Bencana, atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)				
									Cakupan unit rumah layak huni yang dibangun (%)				
	Program Kawasan Permukiman							Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)				
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)							Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses listrik (PLN dan nonPLN) (%)				
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)				
	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan							Meningkatnya Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Presentase Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan (%)				
S19	Meningkatnya ketahanan energi yang berkelanjutan								Presentasi penurunan emisi GRK (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan							Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (titik)				
S20	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau								Rasio Konektivitas				
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan transportasi				
									Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Km/Unit)				
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)							Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Kendaraan terhadap Jalan (kendaraan per kilometer)				
									Cakupan pembangunan terminal tipe C (%)				
									Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)				
	Program Pengelolaan Penerbangan							Meningkatnya aksesibilitas layanan transportasi udara	Persentase bandar udara perintis yang berfungsi (%)				
									Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik Datang/Berangkat/Transit (orang)				
	Program Pengelolaan Pelayaran							Meningkatnya aksesibilitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Freight (Volume/Muatan Barang Laut) (%)				
T5	Mengembangkan wilayah secara seimbang dengan pendekatan tata ruang yang terintegrasi dan tahan bencana								Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)				
									Indeks Risiko Bencana (indeks)				
S21	Terwujudnya pengelolaan dan pengaturan tata ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana								Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)				
									Persentase Pengawasan dan Penertiban Alih Fungsi Lahan (%)				
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Rencana Tata Ruang Berkelanjutan (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Penanggulangan Bencana							Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)				
								Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)				
								Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)				
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)				
S22	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)				
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup							Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)				
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (indeks)				
									Indeks Kualitas Udara (indeks)				
									Indeks Kualitas Lahan (indeks)				
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)							Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)				
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)				
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat							Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)				
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat							Meningkatnya kinerja Pemangku kepentingan dalam perlindungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
								dan Pengelolaan lingkungan hidup					
	Program Pengelolaan Persampahan							Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)				
MISI 04: Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah													
T6	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berkeadilan								Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)				
									PDRB Per Kapita ADHB (Rp.ribu)				
									Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)				
									Tingkat Kemiskinan (%)				
									Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
									Indeks Ekonomi Inklusif				
									Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)				
S23	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Pebudidaya Perikanan								Nilai Tukar Petani Gabungan (bulan Agustus) (Indeks)*				
									Kontribusi subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK (%)				
									Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)				
									Peningkatan Produksi Hortikultura (%)				
									Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (hektar)				
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator				
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)				
		Program Perizinan Usaha Pertanian							Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)				
		Program Penyuluhan Pertanian							Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)				
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)				
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan							Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)				
S24	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau								Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (indeks)					
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan							Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rata-rata Konsumsi Kalori (kapita/hari)				
										Rata-rata Konsumsi Protein (kapita/hari)				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor indeks)				
		Program Penanganan Kerawanan Pangan							Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)				
		Program Pengawasan Keamanan Pangan							Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)				
S25	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif								Kontribusi subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)					
									Rata-rata lama tinggal (hari)					

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)				
	Program Pemasaran Pariwisata							Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)				
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)				
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)				
S26	Terwujudnya berkebudayaan maju								Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)				
	Program Pengembangan Kebudayaan							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)				
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)				
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)				
	Program Pembinaan Sejarah							Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal				
S27	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja								Laju pertumbuhan PDRB ADHB per tenaga kerja (%)				
									Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan ketenagakerjaan				
	Program Perencanaan Tenaga Kerja							Terkelolanya informasi tenaga kerja	Tersedianya dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (Ada/tidak)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)				
									Persentase Pencari kerja yang bersertifikasi Kompetensi (%)				
	Program Penempatan Tenaga Kerja							Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)				
									Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)				
									Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)				
	Program Hubungan Industrial							Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)				
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan							Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (orang)				
S28	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian								Persentase Koperasi Aktif (%)				
									Rasio Kewirausahaan Daerah (%)				
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam							Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)				
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)				
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi							Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP yang menjalani penilaian rutin sesuai ketentuan (%)				
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)				
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)				
	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi							Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)	Program Prioritas	Tag Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag Indikator			
		Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)							Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)				
	Program Pengembangan UMKM							Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)				
T7	Meningkatkan integrasi rantai pasok produksi serta perdagangan domestik								Tingkat Inflasi (%)				
									Ekspor Barang dan Jasa/Net Ekspor terhadap PDRB (%)				
S29	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif								Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan (hari)				
									Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)				
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)				
	Program Pelayanan Penanaman Modal							Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)				
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)				
S30	Meningkatnya daya saing industri dan distribusi perdagangan								Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)				
									Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)				
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri							Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri / Kawasan Industri (%)				
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri							Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi (%)				
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional							Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)				
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator			
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)				
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)				
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)				
		Program Pengembangan Ekspor							Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Nilai Ekspor Barang Komoditas Unggulan Daerah (%)				
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)				
MISI 05: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kohesi Sosial Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Dan Lingkungan														
T8	Meningkatkan ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas								Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)					
									Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)					
									Indeks Risiko Bencana (indeks)					
S31	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat								Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (indeks)					
									Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan dalam waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima sampai tiba di lokasi kejadian (%)					
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator			
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
								Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)					
								Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Presentase Satuan Anggota Linmas yang mendapatkan Pembinaan/ Pelatihan (%)					
								Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Presentase Aparatur Satpol PP yang Bersertifikat PPNS (%)					
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran							Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)				
									Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)				
S32	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM								Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)					
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik							Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)				
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							Meningkatnya ketertiban organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktifitas kerukunan umat beragama	Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program kerukunan dari FKUB (%)				
									Meningkatnya akses terhadap pelayanan tempat ibadah	Rasio tempat ibadah terhadap penduduk (per satuan penduduk)				

Misi (M) / Tujuan (T) / Sasaran (S)		Program Prioritas	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indikator			
			Prioritas Daerah	Asta Cita	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)				



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor berisi program-program yang akan diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Bab IV Renstra. Program perangkat daerah berisi indikator dan target kinerja lima tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD. Target kinerja program dan anggaran ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD TA 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian RPJMD. Walaupun demikian, kinerja program TA 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi:

- IV.2 -

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																									
Program Pengelolaan Pendidikan							Meningkatnya Melek Huruf Penduduk	Angka Melek Huruf Penduduk Usia +15 tahun (%)					98,37 (2024)*	98,57	165.26 5.779. 943	98,72	166.09 2.109. 000	98,88	166.92 2.570. 000	99,04	167.75 7.183. 000	99,20	168.59 5.969. 000	99,3 5	169.43 8.949. 000
							Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APK PAUD (%)					23,51 (2023)	24,69		26,33		27,98		29,62		31,27		32,9 1	
								APM SD/ sederajat (%)					74,98 (2023)	78,73		80,23		81,73		83,23		84,73		86,2 3	
								APM SMP/ sederajat (%)					64,69 (2023)	67,92		69,22		70,51		71,81		73,10		74,3 9	
								APM SMA/ sederajat (%)					43,87 (2023)	46,06		47,82		49,57		51,33		53,08		54,8 4	
								Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun					64,45	67,63		70,70		73,77		76,83		79,90		82,9 7	
								Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun					86,18	87,25		88,32		89,39		90,46		91,53		92,6 0	
								Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun					96,29	96,92		97,54		98,15		98,77		99,38		100, 00	
								Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (%)					0,14	0,14		0,14		0,14		0,15		0,15		0,15	

- IV.3 -

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pengembangan Kurikulum							Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)					N/A	35,00	886.096.199	43,00	890.527.000	51,00	894.980.000	59,00	899.455.000	67,00	903.952.000	75,00	908.472.000
							Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka (%)					96,00	96,00		92,80		89,60		86,40		83,20		80,00		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan							Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (indeks):							-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		-
							SD					0,66	0,68		0,71		0,74		0,76		0,79		0,82		
							SMP					0,56	0,59		0,61		0,64		0,66		0,69		0,71		
							SMA					0,72	0,79		0,80		0,81		0,83		0,84		0,85		
							SMK					0,84	0,85		0,86		0,87		0,89		0,90		0,91		
							Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)					42,83	43,89		44,14		44,39		44,65		44,90		45,15		
							Persentase tenaga kependidikan minimal S1/ sederajat (%)					68,83	71,25		72,19		73,13		74,06		75,00		75,94		
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan							Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)					98,28	98,28	-	98,62	-	98,97	-	99,31	-	99,66	-	100,00	-

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra							Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)					70,00	70,00	1.400.000.000	73,00	1.407.000.000	76,00	1.414.035.000	79,00	1.421.105.000	82,00	1.428.211.000	85,00	1.435.352.000
Program Pengembangan Kurikulum							Meningkatnya keterampilan sosial, komunikasi, empati, dan moral siswa antar pemeluk agama berbeda	Persentase mata pelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis digital dan inovasi					N/A	75,00	-	78,00	-	81,00	-	84,00	-	87,00	-	90,00	-
Program Pembinaan Perpustakaan							Meningkatnya minat baca pada masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (indeks)					N/A	52,00	500.000.000	53,60	502.500.000	55,20	505.013.000	56,80	507.538.000	58,40	510.076.000	60,00	512.626.000
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno							Meningkatnya penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Cakupan naskah kuno yang terawat dan dilestarikan (%)					0,00	0,00	-	4,00	-	8,00	-	12,00	-	16,00	-	20,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																									
DINAS KESEHATAN																									
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							Meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 klh)					128,95	96,71	71.623.653.000	83,82	71.981.771.000	70,92	72.341.680.000	58,03	72.703.388.000	45,13	73.066.905.000	32,24	73.432.240.000
								Angka Kematian Bayi (per 1.000 klh)					15,15	14,51		14,18		13,86		13,54		13,22		12,89	
								Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (%)					60 (2024)	65,00		68,00		71,00		74,00		77,00		80,00	

- IV.5 -

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPk	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (%)					61,70	63,00		66,40		69,80		73,20		76,60		80,00		
							Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja (%)					38,00	70,00		74,00		78,00		82,00		86,00		90,00		
							Persentase Pelayanan Kesehatan Olah raga (%)					61,00	70,00		74,00		78,00		82,00		86,00		90,00		
							Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar (%)					62,00	70,00		74,00		78,00		82,00		86,00		90,00		
							Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)					51,96	60,00		62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		
							Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)					N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
							Prevalensi HIV					2,38	2,00		1,96		1,92		1,88		1,84		1,80		
							Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk					19,39	20,00		16,00		12,00		8,00		4,00		0,00		

- IV.6 -

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							Persentase Balita Usia 0 - 59 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Lengkap					55,76 (2023)	58,55		61,84		65,13		68,42		71,71		75,00		
							Rasio tenaga perawat terhadap penduduk (persatuan penduduk)					5,39	5,39		5,91		6,43		6,96		7,48		8,00		
							Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan					5,00	6,00		6,40		6,80		7,20		7,60		8,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					N/A	70,00	4.072.540.427	73,00	4.092.903.000	76,00	4.113.368.000	79,00	4.133.935.000	82,00	4.154.605.000	85,00	4.175.378.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman							Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman					N/A	65,00	150.000.000	70,00	150.750.000	75,00	151.504.000	80,00	152.262.000	85,00	153.023.000	90,00	153.788.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					N/A	80,00	100.000.000	82,00	100.500.000	84,00	101.003.000	86,00	101.508.000	88,00	102.016.000	90,00	102.526.000	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
RSUD																									
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM sesuai standar (%)					97,00	80,00	11.000.000.000	82,00	11.055.000.000	84,00	11.110.275.000	86,00	11.165.826.000	88,00	11.221.655.000	90,00	11.277.763.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							Meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase elemen akreditasi RS					85,00	85,00	138.000.000.000	86,00	138.690.000.000	87,00	139.383.450.000	88,00	140.080.367.000	89,00	140.780.769.000	90,00	141.484.673.000
								Persentase indikator SPM RS					93,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
								Bed Occupancy Ratio (BOR)					71,00	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00	
								Average Length of Stay (ALOS)					4-6	6-8		6-8		6-8		6-9		6-9		6-9	
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					97,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
								Persentase sarana prasarana sesuai standar					52,00	67,00		69,60		72,20		74,80		77,40		80,00	
								Tingkat ketersediaan layanan spesialisistik					100,00	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		100,00	
								Tingkat pencapaian pelayanan promotif/preventif					70,00	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		80,00	
								Nilai indikator mutu nasional dan prioritas					77,00	77,00		77,60		78,20		78,80		79,40		80,00	
							Meningkatnya Sarana dan	Persentase pemenuhan sarana pasarana					52 (2024)	67,00		69,60		72,20		74,80		77,40		80,00	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							Prasarana Kesehatan	untuk rumah sakit tipe C (%)																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
Program Pengelolaan Sumber Daya Air							Meningkatnya perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses Masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)					N/A	45,00	-	45,20	-	45,40	-	45,60	-	45,80	-	46,00	-
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak (%)					68,23 (2024)	68,71	1.000.000.000	69,19	1.005.000.000	69,67	1.010.025.000	70,15	1.015.075.000	70,63	1.020.150.000	71,11	1.025.251.000
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)					44,05 (2024)	47,70	7.000.000.000	50,75	7.035.000.000	53,80	7.070.175.000	56,85	7.105.526.000	59,90	7.141.054.000	62,95	7.176.759.000
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							Meningkatnya kualitas system drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)					N/A	45,00	-	45,20	-	45,40	-	45,60	-	45,80	-	46,00	-
Program Penataan Bangunan Gedung							Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)					N/A	70,00	50.000.000	70,20	50.250.000	70,40	50.501.000	70,60	50.754.000	70,80	51.008.000	71,00	51.263.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya							Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)					N/A	70,00	-	70,20	-	70,40	-	70,60	-	70,80	-	71,00	-
Program Penyelenggaraan Jalan							Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kondisi mantap (%)					46,06 (2024)	46,94	61.294.538.000	48,55	61.601.011.000	50,16	61.909.016.000	51,78	62.218.561.000	53,39	62.529.654.000	55,00	62.842.302.000
Program Pengembangan Jasa Konstruksi							Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)					N/A	10,00	50.000.000	10,20	50.250.000	10,40	50.501.000	10,60	50.754.000	10,80	51.008.000	11,00	51.263.000
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							Meningkatnya Kualitas penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase Penyelesaian Rencana Tata Ruang Berkelanjutan (%)					77,00	80,63	100.000.000	81,10	100.500.000	81,58	101.003.000	82,05	101.508.000	82,53	102.016.000	83,00	102.526.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
Program Pengembangan Permukiman							Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)					N/A	65,00	-	67,00	-	69,00	-	71,00	-	73,00	-	75,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																									
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							Meningkatnya layanan persampahan regional	Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)					N/A	60,00	-	64,00	-	68,00	-	72,00	-	76,00	-	80,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN																									

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pengembangan Perumahan							Terpenuhinya rumah layak huni Penduduk Miskin, Korban Bencana, atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)					N/A	20,00	300.000.000	21,00	301.500.000	22,00	303.008.000	23,00	304.523.000	24,00	306.046.000	25,00	307.576.000
							Cakupan unit rumah layak huni yang dibangun (%)					35,00	35,00		42,00		49,00		56,00		63,00		70,00		
Program Kawasan Permukiman							Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)					5,00	5,00	2.900.000.000	14,00	2.914.500.000	23,00	2.929.073.000	32,00	2.943.718.000	41,00	2.958.437.000	50,00	2.973.229.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)							Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses listrik (PLN dan nonPLN) (%)					99,94	100,00	1.000.000.000	100,00	1.005.000.000	100,00	1.010.025.000	100,00	1.015.075.000	100,00	1.020.150.000	100,00	1.025.251.000
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)					45,00	45,00	-	56,00	-	67,00	-	78,00	-	89,00	-	100,00	-

Program Perangkat Daerah	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							kemampuan menengah																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																									
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)					30 (2024)	35,00	5.228.000.000	38,00	5.254.140.000	41,00	5.280.411.000	44,00	5.306.813.000	47,00	5.333.347.000	50,00	5.360.014.000
							Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)					30 (2024)	35,00		38,00		41,00		44,00		47,00		50,00	
							Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Presentase Satuan Anggota Linmas yang mendapatkan Pembinaan/ Pelatihan (%)					N/A	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00	
							Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Presentase Aparatur Satpol PP yang Bersertifikat PPNS (%)					N/A	0,00		8,40		16,80		25,20		33,60		42,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
Program Penanggulang an Bencana							Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)					25,00	20,00	300.000.000	27,00	301.500.000	34,00	303.008.000	41,00	304.523.000	48,00	306.046.000	55,00	307.576.000
							Meningkatnya penanganan bencana pada	Persentase Penanganan					5,00	5,00		9,00		13,00		17,00		21,00		25,00	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							saat tanggap darurat	Tanggap Darurat Bencana (%)																	
							Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)					10,00	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		60,00	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran							Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)					5,00	10,00	50.000.000	23,00	50.250.000	36,00	50.501.000	49,00	50.754.000	62,00	51.008.000	75,00	51.263.000
						Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)					100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																									
DINAS SOSIAL																									
Program Pemberdayaan Sosial							Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)					45 (2024)	75,00	100.000.000	77,20	100.500.000	79,40	101.003.000	81,60	101.508.000	83,80	102.016.000	86,00	102.526.000
Program Rehabilitasi Sosial							Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					18 (2024)	26,60	650.000.000	31,28	653.250.000	35,96	656.516.000	40,64	659.799.000	45,32	663.098.000	50,00	666.413.000
						Persentase Anak Terlantar yang						24 (2024)	50,00	53,00		56,00		59,00		62,00		65,00			

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)																		
							Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					22 (2024)	52,00		54,80		57,60		60,40		63,20		66,00		
Progam Perlindungan dan Jaminan Sosial						Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)					45 (2024)	52,00	1.200.000.000	55,20	1.206.000.000	58,40	1.212.030.000	61,60	1.218.090.000	64,80	1.224.180.000	68,00	1.230.301.000	
							Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)					42 (2024)	49,00		51,20		53,40		55,60		57,80		60,00		
							Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)					11 (2024)	46,00		47,80		49,60		51,40		53,20		55,00		
Program Penanganan Bencana						Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)					42 (2022)	52,00	-	53,60	-	55,20	-	56,80	-	58,40	-	60,00	-	
							Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar					35 (2022)	40,00		42,60		45,20		47,80		50,40		53,00		

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)																		
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan					100 (2022)	100,00	100.00 0.000	100,0 0	100.50 0.000	100,0 0	101.00 3.000	100,0 0	101.50 8.000	100,0 0	102.01 6.000	100, 00	102.52 6.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																									
DINAS TENAGA KERJA																									
Program Perencanaan Tenaga Kerja							Terkelolanya informasi tenaga kerja					N/A	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)					N/A	65,00	1.430.000.00 0	68,00	1.437.150.00 0	71,00	1.444.336.00 0	74,00	1.451.558.00 0	77,00	1.458.816.00 0	80,0 0	1.466.110.00 0
							Persentase Pencari kerja yang bersertifikasi Kompetensi (%)					67,75	70,00			72,00				74,00				76,00	
Program Penempatan Tenaga Kerja							Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)					3,38	3,38	435.00 0.000	3,39	437.17 5.000	3,40	439.36 1.000	3,41	441.55 8.000	3,42	443.76 6.000	3,43	445.98 5.000
							Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja					0,02	0,02			0,02				0,03				0,03	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							di Sektor Formal (%)																		
							Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)					6,65	6,65		6,66		6,67		6,67		6,68		6,69		
Program Hubungan Industrial							Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)					71,98	71,98	235.00 0.000	73,58	236.17 5.000	75,19	237.35 6.000	76,79	238.54 3.000	78,40	239.73 6.000	80,0 0	240.93 5.000
Program Pengawasan Ketenagakerjaan							Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (orang)					59 (2024)	59,00		63,20	-	67,40	-	71,60	-	75,80	-	80,0 0	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA																									
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggara n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (%)					63,00	66,00	100.00 0.000	66,80	100.50 0.000	67,60	101.00 3.000	68,40	101.50 8.000	69,20	102.01 6.000	70,0 0	102.52 6.000	
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)					67,13	67,50		68,00		68,50		69,00		69,50		70,0 0		

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Perlindungan Perempuan							Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)					45,00	48,00	100.00 0.000	50,00	100.50 0.000	52,00	101.00 3.000	54,00	101.50 8.000	56,00	102.01 6.000	58,0 0	102.52 6.000
Program Peningkatan Kualitas Keluarga							Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)					35,00	45,00	50.000 .000	46,60	50.250 .000	48,20	50.501 .000	49,80	50.754 .000	51,40	51.008 .000	53,0 0	51.263 .000
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak							Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)					35,00	45,00	-	46,60	-	48,20	-	49,80	-	51,40	-	53,0 0	-
Program Pemenuhan Hak Anak							Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (indeks)					30,00	45,00	250.00 0.000	46,40	251.25 0.000	47,80	252.50 6.000	49,20	253.76 9.000	50,60	255.03 8.000	52,0 0	256.31 3.000
Program Perlindungan Khusus Anak							Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan					34,00	40,00	350.00 0.000	42,00	351.75 0.000	44,00	353.50 9.000	46,00	355.27 7.000	48,00	357.05 3.000	50,0 0	358.83 8.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPk	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
						eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Layanan Komprehensif (%)																		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (indeks)					25,00	30,00			32,00		34,00			36,00		38,00		40,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																									
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan						Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rata-rata Konsumsi Kalori (kapita/hari)					1.658	1.666	-	1.753	-	1.840	-	1.927	-	2.013	-	2.100	-	
							Rata-rata Konsumsi Protein (kapita/hari)					51,61	51,87		52,89		53,92		54,95		55,97		57,00		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor indeks)					68,70	73,90	1.110.000.000	78,84	1.115.550.000	83,78	1.121.128.000	88,72	1.126.734.000	93,66	1.132.368.000	98,60	1.138.030.000	
Program Penanganan Kerawanan Pangan						Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)					4,06	3,69	100.000.000	3,33	100.500.000	2,96	101.003.000	2,60	101.508.000	2,23	102.016.000	1,87	102.526.000	
Program Pengawasan Keamanan Pangan						Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)					N/A	70,00	-	72,00	-	74,00	-	76,00	-	78,00	-	80,00	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL																									
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL																									

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pendaftaran Penduduk							Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)					88,36	88,50	496.11 2.080	90,40	498.59 3.000	92,30	501.08 6.000	94,20	503.59 1.000	96,10	506.10 9.000	98,00	508.64 0.000
							Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)					14,71	15,00	17,00		19,00		21,00		23,00		25,00			
Program Pencatatan Sipil							Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					100,00	100,00	450.00 0.000	100,00	452.25 0.000	100,00	454.51 1.000	100,00	456.78 4.000	100,00	459.06 8.000	100,00	461.36 3.000
							Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					70,26	70,50	73,40		76,30		79,20		82,10		85,00			
							Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					46,20	47,00	48,60		50,20		51,80		53,40		55,00			
							Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					55,72	56,00	56,60		57,20		57,80		58,40		59,00			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (%)					75,00	80,00	500.00 0.000	82,00	502.50 0.000	84,00	505.01 3.000	86,00	507.53 8.000	88,00	510.07 6.000	90,00	512.62 6.000
Program Pengelolaan							Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil					75,00	80,00	-	82,00	-	84,00	-	86,00	-	88,00	-	90,00	-

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Profil Kependudukan								Kependudukan (%)																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																									
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG																									
Program Penataan Desa							Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)					60,00	70,00	-	71,00	-	72,00	-	73,00	-	74,00	-	75,00	-
Program Peningkatan Kerja Sama Desa							Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)					60,00	70,00	60.000.000	71,00	60.300.000	72,00	60.602.000	73,00	60.905.000	74,00	61.210.000	75,00	61.516.000
Program Administrasi Pemerintahan Desa							Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)					60,00	70,00	4.069.914.406	71,00	4.090.264.000	72,00	4.110.715.000	73,00	4.131.269.000	74,00	4.151.925.000	75,00	4.172.685.000
								Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)					60,00	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00		75,00	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)					60,00	70,00	1.000.000.000	71,00	1.005.000.000	72,00	1.010.025.000	73,00	1.015.075.000	74,00	1.020.150.000	75,00	1.025.251.000
								Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)					60,00	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00		75,00	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
						Meningkatnya partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Kampung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung (skor)					60,00	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																									
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA																									
Program Pengendalian Penduduk						Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) (per penduduk perempuan usia 15-49 tahun)					3,26	3,18	-	3,12	-	3,06	-	3,01	-	2,95	-	2,89	-	
							Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19) (per penduduk perempuan usia 15-19 tahun)					3,30	2,90		2,70		2,50		2,30		2,10		1,90		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) (%)					52,75	53,00	9.328.788.000	53,50	9.375.432.000	54,00	9.422.309.000	54,50	9.469.421.000	55,00	9.516.768.000	55,50	9.564.352.000	
							Persentase kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)					34,36	32,00				31,65				31,31				30,96

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030					
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)					17,00	17,00	1.150.000.000	18,40	1.155.750.000	19,80	1.161.529.000	21,20	1.167.337.000	22,60	1.173.174.000	24,00	1.179.040.000					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																													
DINAS PERHUBUNGAN																													
Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Kendaraan terhadap Jalan (kendaraan per kilometer)					N/A	0,53	7.800.000.000	0,53	7.839.000.000	0,54	7.878.195.000	0,54	7.917.586.000	0,55	7.957.174.000	0,55	7.996.960.000					
							Cakupan pembangunan terminal tipe C (%)					N/A	40,00				44,00				48,00				52,00		56,00		60,00
							Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)					N/A	78,00				80,00				82,00				84,00		86,00		88,00
Program Pengelolaan Penerbangan						Meningkatnya akseibilitas layanan transportasi udara	Persentase bandar udara perintis yang berfungsi (%)					N/A	50,00	-	52,00	-	54,00	-	56,00	-	58,00	-	60,00	-					
							Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik Datang/Berangkat/ Transit (orang)					248.675	261.109				261108,75				261108,75				261108,75		261.109		
Program Pengelolaan Pelayaran						Meningkatnya akseibilitas	Persentase Peningkatan Freight					104,18 (2023)	104,18	-	105,14	-	106,11	-	107,07	-	108,04	-	109,00	-					

Program Perangkat Daerah	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							layanan transportasi laut	(Volume/Muatan Barang Laut) (%)																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)				N/A	70,00	417.68 4.020	72,00	419.77 2.000	74,00	421.87 1.000	76,00	423.98 0.000	78,00	426.10 0.000	80,0 0	428.23 1.000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (indeks)				1 (2024)	1,00	2.072. 617.46 0	1,10	2.082. 981.00 0	1,20	2.093. 396.00 0	1,30	2.103. 863.00 0	1,40	2.114. 382.00 0	1,50	2.124. 954.00 0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																									
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam							Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)				10,60	11,00	-	11,80	-	12,60	-	13,40	-	14,20	-	15,0 0	-	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)				18,00	20,00	300.00 0.000	22,00	301.50 0.000	24,00	303.00 8.000	26,00	304.52 3.000	28,00	306.04 6.000	30,0 0	307.57 6.000	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi							Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP yang menjalani penilaian rutin sesuai ketentuan (%)				N/A	60,00	-	64,00	-	68,00	-	72,00	-	76,00	-	80,0 0	-	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)					20,00	20,00	1.200.000.000	22,00	1.206.000.000	24,00	1.212.030.000	26,00	1.218.090.000	28,00	1.224.180.000	30,00	1.230.301.000
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)					18,00	20,00	1.000.000.000	22,00	1.005.000.000	24,00	1.010.025.000	26,00	1.015.075.000	28,00	1.020.150.000	30,00	1.025.251.000
Program Penguatan Badan Hukum Koperasi							Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)					5,00	6,00	-	6,80	-	7,60	-	8,40	-	9,20	-	10,00	-
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)							Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)					50,00	52,00	2.500.000.000	53,60	2.512.500.000	55,20	2.525.063.000	56,80	2.537.688.000	58,40	2.550.376.000	60,00	2.563.128.000
Program Pengembangan n UMKM							Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)					1,00	1,00	10.000.000.000	1,30	10.050.000.000	1,60	10.100.250.000	1,90	10.150.751.000	2,20	10.201.505.000	2,50	10.252.513.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																									
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)					45,00	54,00	90.712.000	59,20	91.166.000	64,40	91.622.000	69,60	92.080.000	74,80	92.540.000	80,00	93.003.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pelayanan Penanaman Modal							Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)					80,00	85,00	170.000.000	85,40	170.850.000	85,80	171.704.000	86,20	172.563.000	86,60	173.426.000	87,00	174.293.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)					45,00	50,00	89.288.000	56,00	89.734.000	62,00	90.183.000	68,00	90.634.000	74,00	91.087.000	80,00	91.542.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																									
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																									
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)					48,00	74,00	1.250.000.270	77,20	1.256.250.000	80,40	1.262.531.000	83,60	1.268.844.000	86,80	1.275.188.000	90,00	1.281.564.000
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan							Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)					48,00	79,00	1.450.000.000	81,20	1.457.250.000	83,40	1.464.536.000	85,60	1.471.859.000	87,80	1.479.218.000	90,00	1.486.614.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																									
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraa n Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (%)					N/A	50,00	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-	90,00	-	100,00	-

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																									
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
Program Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi							Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kepatuhan ASN terhadap penggunaan sandi/digital signature untuk dokumen elektronik resmi (%)					90,00	95,00	150.00 0.000	96,00	150.75 0.000	97,00	151.50 4.000	98,00	152.26 2.000	99,00	153.02 3.000	100, 00	153.78 8.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																									
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																									
Program Pengembang n Kebudayaan							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)					1,00	1,00	1.867. 500.00 0	1,00	1.876. 838.00 0	1,00	1.886. 222.00 0	1,00	1.895. 653.00 0	1,00	1.905. 131.00 0	1,00	1.914. 657.00 0
Program Pengembang n Kesenian Tradisional							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)					80,00	80,00	-	81,00	-	82,00	-	83,00	-	84,00	-	85,0 0	-
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)					75,00	75,00	100.00 0.000	76,00	100.50 0.000	77,00	101.00 3.000	78,00	101.50 8.000	79,00	102.01 6.000	80,0 0	102.52 6.000
Program Pembinaan Sejarah							Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal					N/A	70,00	300.00 0.000	72,00	301.50 0.000	74,00	303.00 8.000	76,00	304.52 3.000	78,00	306.04 6.000	80,0 0	307.57 6.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPk	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																									
SEKRETARIAT DAERAH																									
Program Pembinaan Perpustakaan							Meningkatnya minat baca pada masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (indeks)					N/A	52,00	500.00 0.000	53,60	502.50 0.000	55,20	505.01 3.000	56,80	507.53 8.000	58,40	510.07 6.000	60,0 0	512.62 6.000
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno							Meningkatnya penyimpnanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Cakupan naskah kuno yang terawat dan dilestarikan (%)					0,00	0,00	-	4,00	-	8,00	-	12,00	-	16,00	-	20,0 0	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									
SEKRETARIAT DAERAH																									
Program Pengelolaan Arsip							Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)					60,00	60,00	-	66,00	-	72,00	-	78,00	-	84,00	-	90,0 0	-
								Tingkat Digitalisasi Arsip (%)					42,00	68,75		75,00		81,25		87,50		93,75		100, 00	
								Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (%)					N/A	73,33		76,66		80,00		83,33		86,67		90,0 0
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip							Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)					0,00	0,00	-	10,00	-	20,00	-	30,00	-	40,00	-	50,0 0	-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
DINAS PERIKANAN																									

Program Perangkat Daerah	Tag_Program						Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender	Stunting			RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)					96.041	100.843	7.160.000.000	104.674	7.195.800.000	108.506	7.231.779.000	112.337	7.267.938.000	116.169	7.304.278.000	120.000	7.340.799.000
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)					10.463	10.987	4.011.735.000	11.789	4.031.794.000	12.592	4.051.953.000	13.395	4.072.213.000	14.197	4.092.574.000	15.000	4.113.037.000
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan							Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)					46,21	68,00	1.660.516.000	69,40	1.668.819.000	70,80	1.677.163.000	72,20	1.685.549.000	73,60	1.693.977.000	75,00	1.702.447.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																									
DINAS PARIWISATA																									
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)					4,21	4,21	15.119.864.000	5,11	15.195.463.000	6,01	15.271.440.000	6,91	15.347.797.000	7,81	15.424.536.000	8,71	15.501.659.000
Program Pemasaran Pariwisata							Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)					4,00	4,00	5.450.000.000	4,00	5.477.250.000	4,00	5.504.636.000	4,00	5.532.159.000	4,00	5.559.820.000	4,00	5.587.619.000
Program Pengembangann Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)					-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
Program Pengembangan							Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase Pelaku Pariwisata					10,00	10,00	2.743.	10,00	2.757.	10,00	2.771.	10,00	2.785.	10,00	2.799.	10,00	2.813.

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030					
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							pariwisata dan ekonomi kreatif	dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)						871.000		590.000		378.000		235.000		161.000		157.000					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																													
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																													
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)					65,00	67,00	4.600.000.000	68,60	4.623.000.000	70,20	4.646.115.000	71,80	4.669.346.000	73,40	4.692.693.000	75,00	4.716.156.000				
								Peningkatan Produksi Hortikultura (%)					70,00	72,00										73,60		75,20	76,80	78,40	80,00
								Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)					65,00	70,00										72,00		74,00	76,00	78,00	80,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (hektar)					533,2	106,00	6.350.000.000	118,20	6.381.750.000	130,40	6.413.659.000	142,60	6.445.727.000	154,80	6.477.956.000	167,00	6.510.346.000				
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)					65,00	70,00	55.750.000	72,00	56.029.000	74,00	56.309.000	76,00	56.591.000	78,00	56.874.000	80,00	57.158.000				
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)					N/A	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-				

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		P.JPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Perizinan Usaha Pertanian							Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)					N/A	15,00	-	24,00	-	33,00	-	42,00	-	51,00	-	60,00	-
Program Penyuluhan Pertanian							Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)					0,05	0,08	1.353.000.000	0,10	1.359.765.000	0,12	1.366.564.000	0,13	1.373.397.000	0,15	1.380.264.000	0,17	1.387.165.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																									
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan							Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (titik)					N/A	4,00	-	5,20	-	6,40	-	7,60	-	8,80	-	10,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																									
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																									
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)					80,00	82,00	110.000.000	82,60	110.550.000	83,20	111.103.000	83,80	111.659.000	84,40	112.217.000	85,00	112.778.000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)					40,00	40,00	101.100.000	41,00	101.606.000	42,00	102.114.000	43,00	102.625.000	44,00	103.138.000	45,00	103.654.000
Program Stabilisasi Harga Barang							Meningkatnya kelancaran distribusi dan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan					80,00	82,00	1.040.	82,60	1.045.	83,20	1.050.	83,80	1.055.	84,40	1.060.	85,00	1.066.

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pokok Dan Barang Penting (%)						000.000		200.000		426.000		678.000		956.000		261.000	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)				40,00	40,00	115.000.000	41,00	115.575.000	42,00	116.153.000	43,00	116.734.000	44,00	117.318.000	45,00	117.905.000	
Program Pengembangan Ekspor							Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Nilai Ekspor Barang Komoditas Unggulan Daerah (%)				N/A	30,00	-	38,00	-	46,00	-	54,00	-	62,00	-	70,00	-	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)				N/A	30,00	-	40,00	-	50,00	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																									
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																									
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri							Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri / Kawasan Industri (%)				40,00	40,00	10.660.041.000	42,00	10.713.341.000	44,00	10.766.908.000	46,00	10.820.743.000	48,00	10.874.847.000	50,00	10.929.221.000	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri							Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi (%)				50,00	50,00	-	51,00	-	52,00	-	53,00	-	54,00	-	55,00	-	
Program Pengelolaan Sistem							Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap,				70,00	70,00	60.000.000	71,00	60.300.000	72,00	60.602.000	73,00	60.905.000	74,00	61.210.000	75,00	61.516.000	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Informasi Industri Nasional							Akurat, dan Terkini (%)																		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
SEKRETARIAT DAERAH																									
SEKRETARIAT DAERAH																									
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (indeks)					N/A	3,50	32.216.408.000	3,60	32.377.490.000	3,70	32.539.377.000	3,80	32.702.074.000	3,90	32.865.584.000	4,00	33.029.912.000
							Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Ketresediaan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)					100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
							Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)					100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
							Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan Disesuaikan dengan konteks daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)					0,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
Program Perekonomian dan Pembangunan							Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Persentase Dokumen Kebijakan Ekonomi/Pembangunan yang Disahkan dan					N/A	N/A	2.326.464.000	N/A	2.338.096.000	N/A	2.349.786.000	N/A	2.361.535.000	N/A	2.373.343.000	N/A	2.385.210.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							dan pembangunan	Diimplementasikan (%)																	
							Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)				26,67	26,67		27,34		28,00		28,67		29,33		30,00		
SEKRETARIAT DPRD																									
SEKRETARIAT DPRK																									
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD (%)				50,00	100,00	21.040.035.000	100,00	100,00	21.145.235.000	100,00	21.250.961.000	100,00	21.357.216.000	100,00	21.464.002.000	100,00	21.571.322.000
								Persentase Penetapan Ranperda (%)				77,78	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
							Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)				50,00	75,00		76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
PERENCANAAN																									
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)				94,32 (2024)	95,00	6.948.319.000	96,00	6.983.061.000	97,00	7.017.976.000	98,00	7.053.066.000	99,00	7.088.331.000	100,00	7.123.773.000	
								Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan				100,00	100,00	3.769.000.000	100,00	3.787.845.000	100,00	3.806.784.000	100,00	3.825.818.000	100,00	3.844.947.000	100,00	3.864.172.000	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan																	
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030						
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran					
Pembangunan Daerah							dan pembangunan manusia	Pembangunan Manusia (%)																						
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)					100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)					100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
KEUANGAN																														
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																														
Program Pengelolaan Keuangan Daerah							Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)					99,25	87,07	272.74 3.464.680	86,86	274.10 7.182.000	86,64	275.47 7.718.000	86,43	276.85 5.107.000	86,21	278.23 9.383.000	86,00	279.63 0.580.000					
								Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)					11,60	17,71				18,67				19,63				20,58		21,54		22,50
							Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)					90,68	91,00				91,41				91,82				92,23		92,64		93,05

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							Persentase Penurunan SILPA (%)					58,80	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
							Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan					100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
							Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital					84,00	86,00		86,80		87,60		88,40		89,20		90,00		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							Meningkatnya tata kelola aset daerah					2,21	2,75	2.264.072.000	2,80	2.275.392.000	2,85	2.286.769.000	2,90	2.298.203.000	2,95	2.309.694.000	3,00	2.321.242.000	
BADAN PENDAPATAN DAERAH																									
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)					N/A	6,59	954.636.100	6,60	959.409.000	6,61	964.206.000	6,61	969.027.000	6,62	973.872.000	6,63	978.741.000
								Return on Aset (ROA) BUMD (%)				N/A	1,00			1,00				1,00				1,00	
							Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)					N/A	0,00				20,00				40,00			
KEPEGAWAIAN																									
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
Program Kepegawaian Daerah							Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang					100 (2024)	70,00	1.650.000.000	71,00	1.658.250.000	72,00	1.666.541.000	73,00	1.674.874.000	74,00	1.683.248.000	75,00	1.691.664.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi																		
							Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)					100 (2024)	100,00		95,00		90,00		85,00		80,00		75,00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																									
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH																									
Program Penelitian Dan Pengembangan n Daerah							Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)					N/A	70,00	130.000.000	74,00	130.650.000	78,00	131.303.000	82,00	131.960.000	86,00	132.620.000	90,00	133.283.000
							Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)					N/A	80,00		84,00		88,00		92,00		96,00		100,00	
							Meringkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan					N/A	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		100,00	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
						pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)																		
						Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)					N/A	65,00		68,00		71,00		74,00		77,00		80,00		
						Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)					20 (2024)	21,00		21,80		22,60		23,40		24,20		25,00		
						Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (%)					N/A	10,00		14,00		18,00		22,00		26,00		30,00		
						Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)					50 (2024)	51,00		52,20		53,40		54,60		55,80		57,00		

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							penyelesaian permasalahan daerah																		
							Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)					N/A	20,00		24,00		28,00		32,00		36,00		40,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																									
INSPEKTORAT DAERAH																									
INSPEKTORAT																									
Program Penyelenggaraan Pengawasan							Menurunnya kasus penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)					100,00	100,00	2.210.511.539	100,00	2.221.564.000	100,00	2.232.672.000	100,00	2.243.835.000	100,00	2.255.054.000	100,00	2.266.329.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensl	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Indeks)					Level 3 (2024)	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-
UNSUR KEWILAYAHAN																									
KECAMATAN																									
DISTRIK WARSA																									
Program Penyelenggaraan							Meningkatnya kinerja penyelenggaraa	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang					N/A	81,25		82,25		83,25		84,25		85,25		86,25	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							n pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat distrik							20.194 .900		20.296 .000		20.397 .000		20.499 .000		20.601 .000		20.704 .000	
							Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di tingkat distrik					N/A	60,00		66,00		72,00		78,00		84,00		90,0 0		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan					100,00	100,00	26.626 .960	100,0 0	26.760 .000	100,0 0	26.894 .000	100,0 0	27.028 .000	100,0 0	27.163 .000	100,00	27.299 .000	
DISTRIK BONDIFUAR																									
Program Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat distrik					N/A	81,25	5.000. 000	82,25	5.025. 000	83,25	5.050. 000	84,25	5.075. 000	85,25	5.100. 000	86,2 5	5.126. 000	
							Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan					N/A	60,00		66,00		72,00		78,00		84,00		90,0 0		

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PUJK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							dan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di tingkat distrik	tepat waktu di tingkat distrik (%)																	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	7.000.000	100,00	7.035.000	100,00	7.070.000	100,00	7.105.000	100,00	7.141.000	100,00	7.177.000
DISTRIK AIMANDO																									
Program Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							Meningkatnya kinerja penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat distrik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					N/A	81,25	13.107.200	82,25	13.173.000	83,25	13.239.000	84,25	13.305.000	85,25	13.372.000	86,25	13.439.000
							Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di tingkat distrik	Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					N/A	60,00		66,00		72,00		78,00		84,00		90,00	

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	33.740.500	100,00	33.909.000	100,00	34.079.000	100,00	34.249.000	100,00	34.420.000	100,00	34.592.000
DISTRIK SAMOFA																									
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya kemampuan distrik menjalankan penugasan kepala daerah	Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					N/A	50,00	100.000.000	60,00	100.500.000	70,00	101.003.000	80,00	101.508.000	90,00	102.016.000	100,00	102.526.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	150.000.000	100,00	150.750.000	100,00	151.504.000	100,00	152.262.000	100,00	153.023.000	100,00	153.788.000
KELURAHAN BRAMBAKEN																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan					100,00	100,00	220.000.000	100,00	221.100.000	100,00	222.206.000	100,00	223.317.000	100,00	224.434.000	100,00	225.556.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan	pembangunan tingkat distrik (%)																	
KELURAHAN KARANG MULIA																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
KELURAHAN SAMOFA																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
KELURAHAN SNERBO																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
KELURAHAN MANSINYAS																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
KELURAHAN YAFDAS																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
KELURAHAN ANJAREUW																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	220.00 0.000	100,0 0	221.10 0.000	100,0 0	222.20 6.000	100,0 0	223.31 7.000	100,0 0	224.43 4.000	100,00	225.55 6.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
DISTRIK BIAK TIMUR																									
Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya kemampuan distrik menjalankan penugasan kepala daerah	Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					N/A	50,00	20.000 .000	60,00	20.100 .000	70,00	20.201 .000	80,00	20.302 .000	90,00	20.404 .000	100, 00	20.506 .000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	50.000 .000	100,0 0	50.250 .000	100,0 0	50.501 .000	100,0 0	50.754 .000	100,0 0	51.008 .000	100, 00	51.263 .000
DISTRIK BRUYADORI																									
Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya kemampuan distrik menjalankan penugasan kepala daerah	Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					N/A	50,00	32.000 .000	60,00	32.160 .000	70,00	32.321 .000	80,00	32.483 .000	90,00	32.645 .000	100, 00	32.808 .000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	50.000 .000	100,0 0	50.250 .000	100,0 0	50.501 .000	100,0 0	50.754 .000	100,0 0	51.008 .000	100, 00	51.263 .000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
DISTRIK BIAK KOTA																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.250.000	100,00	50.501.000	100,00	50.754.000	100,00	51.008.000	100,00	51.263.000
KELURAHAN FANDOI																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.000.000	100,00	226.125.000	100,00	227.256.000	100,00	228.392.000	100,00	229.534.000	100,00	230.682.000
KELURAHAN BUROKUB																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.000.000	100,00	226.125.000	100,00	227.256.000	100,00	228.392.000	100,00	229.534.000	100,00	230.682.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
KELURAHAN WAUPNOR																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
KELURAHAN MANDALA																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	224.00 0.000	100,0 0	225.12 0.000	100,0 0	226.24 6.000	100,0 0	227.37 7.000	100,0 0	228.51 4.000	100,00	229.65 7.000
KELURAHAN SARAMOM																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
KELURAHAN YENURES																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
KELURAHAN SORIDO																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	225.00 0.000	100,0 0	226.12 5.000	100,0 0	227.25 6.000	100,0 0	228.39 2.000	100,0 0	229.53 4.000	100,00	230.68 2.000
DISTRIK YENDIDORI																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	41.947 .000	100,0 0	42.157 .000	100,0 0	42.368 .000	100,0 0	42.580 .000	100,0 0	42.793 .000	100,00	43.007 .000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
DISTRIK PADAIDO																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	50.739 .900	100,0 0	50.994 .000	100,0 0	51.249 .000	100,0 0	51.505 .000	100,0 0	51.763 .000	100, 00	52.022 .000
DISTRIK BIAK UTARA																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	65.417 .400	100,0 0	65.744 .000	100,0 0	66.073 .000	100,0 0	66.403 .000	100,0 0	66.735 .000	100, 00	67.069 .000
DISTRIK BIAK BARAT																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	30.000 .000	100,0 0	30.150 .000	100,0 0	30.301 .000	100,0 0	30.453 .000	100,0 0	30.605 .000	100, 00	30.758 .000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
DISTRIK NUMFOR BARAT																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	61.871.400	100,00	62.181.000	100,00	62.492.000	100,00	62.804.000	100,00	63.118.000	100,00	63.434.000
DISTRIK YAWOSI																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	39.580.000	100,00	39.778.000	100,00	39.977.000	100,00	40.177.000	100,00	40.378.000	100,00	40.580.000
DISTRIK ANDEY																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	75.000.000	100,00	75.375.000	100,00	75.752.000	100,00	76.131.000	100,00	76.512.000	100,00	76.895.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
DISTRIK SWANDIWE																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	41.008.200	100,00	41.213.000	100,00	41.419.000	100,00	41.626.000	100,00	41.834.000	100,00	42.043.000
DISTRIK ORKERI																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	58.182.000	100,00	58.473.000	100,00	58.765.000	100,00	59.059.000	100,00	59.354.000	100,00	59.651.000
DISTRIK POIRU																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	75.015.400	100,00	75.390.000	100,00	75.767.000	100,00	76.146.000	100,00	76.527.000	100,00	76.910.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
							keputusan pembangunan desa dan kelurahan																		
DISTRIK ORIDEK																									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	48.350.500	100,00	48.592.000	100,00	48.835.000	100,00	49.079.000	100,00	49.324.000	100,00	49.571.000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)					30,00	50,00	121.077.500	56,00	121.683.000	62,00	122.291.000	68,00	122.902.000	74,00	123.517.000	80,00	124.135.000
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik							Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)					48,00	50,00	110.327.500	56,00	110.879.000	62,00	111.433.000	68,00	111.990.000	74,00	112.550.000	80,00	113.113.000

Program Perangkat Daerah	Tag_Program					Outcome Prioritas	Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
	Prioritas Daerah	Prioritas Asta	SPM	Kemiskinan Eks	Gender			Stunting	RPJPD	RIPPP	KLHS		PJPK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
														Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)					40,00	50,00	360.327.500	56,00	362.129.000	62,00	363.940.000	68,00	365.760.000	74,00	367.589.000	80,00	369.427.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktifitas kerukunan umat beragama	Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program kerukunan dari FKUB (%)					40,00	40,00	-	49,00	-	58,00	-	67,00	-	76,00	-	85,00	-
							Meningkatnya akses terhadap pelayanan tempat ibadah	Rasio tempat ibadah terhadap penduduk (per satuan penduduk)					40,00	40,00					49,00		58,00		67,00		76,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial							Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)					35,00	50,00	360.328.088	57,00	362.130.000	64,00	363.941.000	71,00	365.761.000	78,00	367.590.000	85,00	369.428.000

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupatени Biak NUMfor Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Tag_Indikator				Baseline	Target Indikator Kinerja Utama					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)					52,88	55,00	56,04	57,08	58,12	59,16	60,20
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)					N/A	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
Indeks Pelayanan Publik					2,95	3,10	3,38	3,66	3,95	4,23	4,51
Persentase Capaian SPM Kabupaten (%)					59,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)					87,37	87,87	88,27	88,67	89,07	89,47	89,87
Indeks BerAkhlak (%)					56,30	57,00	57,56	58,12	58,68	59,24	59,80
Maturitas SPIP					1,8 (2024)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)					1,461	1,498	1,498	1,499	1,499	1,500	1,500
Indeks Implementasi Perencanaan (%)					N/A	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (opini)					WTP (2024)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Pembangunan Manusia					74,95	75,32	75,86	76,39	76,93	77,46	78,00
Indeks Kesejahteraan Sosial (indeks)					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pembangunan Gender (indeks)					90,96 (2023)	91,41	91,78	92,14	92,51	92,87	93,23
Indeks Kualitas Keluarga (indeks)					67,12 (2023)*	69,80	70,48	71,16	71,84	72,52	73,20
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)					128,26 (2024)	126,00	124,80	123,60	122,40	121,20	120,00
Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (%)					N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator Kinerja Utama	Tag_Indikator				Baseline	Target Indikator Kinerja Utama					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)					80,00	80,50	68,40	56,30	44,20	32,10	20,00
Indeks Risiko Bencana (indeks)					138,40 (2024)	138,30	138,26	138,22	138,18	138,14	138,10
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					2,28 (2024)	3,00	3,68	4,36	5,04	5,72	6,40
PDRB Per Kapita ADHB (Rp.ribu)					46,470 (2024)	48.794	50.652	52.511	54.370	56.229	58.088
Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)					65,02 (2021)*	77,87	78,30	78,72	79,15	79,57	80,00
Tingkat Kemiskinan (%)					23,45 (2024)	20,00	19,40	18,80	18,20	17,60	17,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					6,86 (2024)	3,40	3,08	2,76	2,44	2,12	1,80
Indeks Ekonomi Inklusif					N/A	3,40	3,44	3,48	3,52	3,56	3,60
Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)					7,67 (2024)	8,05	8,44	8,82	9,20	9,59	9,97
Tingkat Inflasi (%)					3,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ekspor Barang dan Jasa/Net Ekspor terhadap PDRB (%)					-27,72	-24,95	-17,96	-10,97	-3,98	3,01	10,00
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)					69,31 (2020)*	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)					67,64 (2023)*	71,98	73,13	74,28	75,44	76,59	77,74
Indeks Risiko Bencana (indeks)					138,40 (2024)	138,30	138,26	138,22	138,18	138,14	138,10

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Biak Numfor ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Angka Melek Huruf Penduduk Usia +15 tahun (%)					98,37 (2024)*	98,57	98,72	98,88	99,04	99,20	99,35
APK PAUD (%)					23,51 (2023)	24,69	26,33	27,98	29,62	31,27	32,91
APM SD/ sederajat (%)					74,98 (2023)	78,73	80,23	81,73	83,23	84,73	86,23
APM SMP/ sederajat (%)					64,69 (2023)	67,92	69,22	70,51	71,81	73,10	74,39
APM SMA/ sederajat (%)					43,87 (2023)	46,06	47,82	49,57	51,33	53,08	54,84
Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun					64,45	67,63	70,70	73,77	76,83	79,90	82,97
Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun					86,18	87,25	88,32	89,39	90,46	91,53	92,60
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun					96,29	96,92	97,54	98,15	98,77	99,38	100,0 0
Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (%)					0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)					N/A	35,00	43,00	51,00	59,00	67,00	75,00
Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka (%)					96,00	96,00	92,80	89,60	86,40	83,20	80,00
Indeks Pemerataan Guru (indeks):							0,00	0,00	0,00	0,00	
SD					0,66	0,68	0,71	0,74	0,76	0,79	0,82
SMP					0,56	0,59	0,61	0,64	0,66	0,69	0,71
SMA					0,72	0,79	0,80	0,81	0,83	0,84	0,85
SMK					0,84	0,85	0,86	0,87	0,89	0,90	0,91
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)					42,83	43,89	44,14	44,39	44,65	44,90	45,15
Persentase tenaga kependidikan minimal S1/ sederajat (%)					68,83	71,25	72,19	73,13	74,06	75,00	75,94
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)					98,28	98,28	98,62	98,97	99,31	99,66	100,0 0

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)					70,00	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00
Persentase mata pelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis digital dan inovasi					N/A	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00
Tingkat Kegemaran Membaca (indeks)					N/A	52,00	53,60	55,20	56,80	58,40	60,00
Cakupan naskah kuno yang terawat dan dilestarikan (%)					0,00	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
DINAS KESEHATAN											
Angka Kematian Ibu (per 100.000 klh)					128,95	96,71	83,82	70,92	58,03	45,13	32,24
Angka Kematian Bayi (per 1.000 klh)					15,15	14,51	14,18	13,86	13,54	13,22	12,89
Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (%)					60 (2024)	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00
Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (%)					61,70	63,00	66,40	69,80	73,20	76,60	80,00
Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja (%)					38,00	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
Persentase Pelayanan Kesehatan Olah raga (%)					61,00	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar (%)					62,00	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)					51,96	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)					N/A	100,0 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0 0
Prevalensi HIV					2,38	2,00	1,96	1,92	1,88	1,84	1,80
Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk					19,39	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00	0,00
Persentase Balita Usia 0 - 59 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Lengkap					55,76 (2023)	58,55	61,84	65,13	68,42	71,71	75,00
Rasio tenaga perawat terhadap penduduk (persatuan penduduk)					5,39	5,39	5,91	6,43	6,96	7,48	8,00
Rasio Puskesmas terhadap penduduk (per 30.000 penduduk)					5,00	6,00	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPk		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan lengkap sesuai standar jenis profesi (%)					N/A	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman sesuai standar (%)					N/A	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)					N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
RSUD											
Persentase SDM sesuai standar (%)					97,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
Persentase elemen akreditasi RS					85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
Persentase indikator SPM RS					93,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
Bed Occupancy Ratio (BOR)					71,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
Average Length of Stay (ALOS)					4-6	6-8	6-8	6-8	6-9	6-9	6-9
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					97,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
Persentase sarana prasarana sesuai standar					52,00	67,00	69,60	72,20	74,80	77,40	80,00
Tingkat ketersediaan layanan spesialistik					100,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00
Tingkat pencapaian pelayanan promotif/preventif					70,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Nilai indikator mutu nasional dan prioritas					77,00	77,00	77,60	78,20	78,80	79,40	80,00
Persentase pemenuhan sarana pasarana untuk rumah sakit tipe C (%)					52 (2024)	67,00	69,60	72,20	74,80	77,40	80,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)					N/A	45,00	45,20	45,40	45,60	45,80	46,00
Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak (%)					68,23 (2024)	68,71	69,19	69,67	70,15	70,63	71,11
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)					44,05 (2024)	47,70	50,75	53,80	56,85	59,90	62,95
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)					N/A	45,00	45,20	45,40	45,60	45,80	46,00
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)					N/A	70,00	70,20	70,40	70,60	70,80	71,00
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)					N/A	70,00	70,20	70,40	70,60	70,80	71,00
Persentase jalan kondisi mantap (%)					46,06 (2024)	46,94	48,55	50,16	51,78	53,39	55,00
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)					N/A	10,00	10,20	10,40	10,60	10,80	11,00
Persentase Penyelesaian Rencana Tata Ruang Berkelanjutan (%)					77,00	80,63	81,10	81,58	82,05	82,53	83,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN											
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)					N/A	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)					N/A	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Persentase penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)					N/A	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
Cakupan unit rumah layak huni yang dibangun (%)					35,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00
Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)					5,00	5,00	14,00	23,00	32,00	41,00	50,00
Persentase rumah tangga dengan akses listrik (PLN dan nonPLN) (%)					99,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)					45,00	45,00	56,00	67,00	78,00	89,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)					30 (2024)	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)					30 (2024)	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00
Presentase Satuan Anggota Linmas yang mendapatkan Pembinaan/ Pelatihan (%)					N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
Presentase Aparatur Satpol PP yang Bersertifikat PPNS (%)					N/A	0,00	8,40	16,80	25,20	33,60	42,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)					25,00	20,00	27,00	34,00	41,00	48,00	55,00
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)					5,00	5,00	9,00	13,00	17,00	21,00	25,00
Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)					10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)					5,00	10,00	23,00	36,00	49,00	62,00	75,00
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
DINAS SOSIAL											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)					45 (2024)	75,00	77,20	79,40	81,60	83,80	86,00
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					18 (2024)	26,60	31,28	35,96	40,64	45,32	50,00
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					24 (2024)	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					22 (2024)	52,00	54,80	57,60	60,40	63,20	66,00
Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)					45 (2024)	52,00	55,20	58,40	61,60	64,80	68,00
Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)					42 (2024)	49,00	51,20	53,40	55,60	57,80	60,00
Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)					11 (2024)	46,00	47,80	49,60	51,40	53,20	55,00
Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)					42 (2022)	52,00	53,60	55,20	56,80	58,40	60,00
Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)					35 (2022)	40,00	42,60	45,20	47,80	50,40	53,00
Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang terpelihara dan layak (%)					100 (2022)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
DINAS TENAGA KERJA											
Tersedianya dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (Ada/tidak)					N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)					N/A	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00
Persentase Pencari kerja yang bersertifikasi Kompetensi (%)					67,75	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)					3,38	3,38	3,39	3,40	3,41	3,42	3,43
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)					0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)					6,65	6,65	6,66	6,67	6,67	6,68	6,69
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)					71,98	71,98	73,58	75,19	76,79	78,40	80,00
Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (orang)					59 (2024)	59,00	63,20	67,40	71,60	75,80	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA											
Persentase Anggaran Responsif Gender (%)					63,00	66,00	66,80	67,60	68,40	69,20	70,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)					67,13	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)					45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)					35,00	45,00	46,60	48,20	49,80	51,40	53,00
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)					35,00	45,00	46,60	48,20	49,80	51,40	53,00
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (indeks)					30,00	45,00	46,40	47,80	49,20	50,60	52,00
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)					34,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (indeks)					25,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN											
Rata-rata Konsumsi Kalori (kapita/hari)					1.658	1.666	1.753	1.840	1.927	2.013	2.100
Rata-rata Konsumsi Protein (kapita/hari)					51,61	51,87	52,89	53,92	54,95	55,97	57,00
Skor Pola Pangan Harapan (skor indeks)					68,70	73,90	78,84	83,78	88,72	93,66	98,60
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)					4,06	3,69	3,33	2,96	2,60	2,23	1,87
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)					N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)					88,36	88,50	90,40	92,30	94,20	96,10	98,00
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)					14,71	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00
Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					70,26	70,50	73,40	76,30	79,20	82,10	85,00
Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					46,20	47,00	48,60	50,20	51,80	53,40	55,00
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)					55,72	56,00	56,60	57,20	57,80	58,40	59,00
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)					75,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)					75,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG											
Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPk		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung (skor)					60,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA											
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (per penduduk perempuan usia 15-49 tahun)					3,26	3,18	3,12	3,06	3,01	2,95	2,89
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) (per penduduk perempuan usia 15-19 tahun)					3,30	2,90	2,70	2,50	2,30	2,10	1,90
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) (%)					52,75	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	55,50
Persentase kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)					34,36	32,00	31,65	31,31	30,96	30,62	30,27
Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)					17,00	17,00	18,40	19,80	21,20	22,60	24,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
DINAS PERHUBUNGAN											
Rasio Kendaraan terhadap Jalan (kendaraan per kilometer)					N/A	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55
Cakupan pembangunan terminal tipe C (%)					N/A	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)					N/A	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
Persentase bandar udara perintis yang berfungsi (%)					N/A	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik Datang/Berangkat/Transit (orang)					248.675	261.109	261108,75	261108,75	261108,75	261108,75	261.109

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Peningkatan Freight (Volume/Muatan Barang Laut) (%)					104,18 (2023)	104,18	105,14	106,11	107,07	108,04	109,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)					N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Indeks SPBE (indeks)					1 (2024)	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH											
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)					10,60	11,00	11,80	12,60	13,40	14,20	15,00
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)					18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
Persentase KSP/USP yang menjalani penilaian rutin sesuai ketentuan (%)					N/A	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)					20,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)					18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)					5,00	6,00	6,80	7,60	8,40	9,20	10,00
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)					50,00	52,00	53,60	55,20	56,80	58,40	60,00
Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor (%)					1,00	1,00	1,30	1,60	1,90	2,20	2,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)					45,00	54,00	59,20	64,40	69,60	74,80	80,00
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)					80,00	85,00	85,40	85,80	86,20	86,60	87,00
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)					45,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
Rasio Wirausaha Pemuda (%)					48,00	74,00	77,20	80,40	83,60	86,80	90,00
Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)					48,00	79,00	81,20	83,40	85,60	87,80	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
Persentase kelengkapan data statistik sektoral yang valid dan terverifikasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (%)					N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Tingkat kepatuhan ASN terhadap penggunaan sandi/digital signature untuk dokumen elektronik resmi (%)					90,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)					80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)					75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal					N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
SEKRETARIAT DAERAH											
Tingkat Kegemaran Membaca (indeks)					N/A	52,00	53,60	55,20	56,80	58,40	60,00
Cakupan naskah kuno yang terawat dan dilestarikan (%)					0,00	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
SEKRETARIAT DAERAH											
Tingkat Ketersediaan Arsip (%)					60,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00
Tingkat Digitalisasi Arsip (%)					42,00	68,75	75,00	81,25	87,50	93,75	100,00
Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (%)					N/A	73,33	76,66	80,00	83,33	86,67	90,00
Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)					0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
DINAS PERIKANAN											
Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)					96.041	100.843	104.674	108.506	112.337	116.169	120.000
Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)					10.463	10.987	11.789	12.592	13.395	14.197	15.000
Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)					46,21	68,00	69,40	70,80	72,20	73,60	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
DINAS PARIWISATA											
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)					4,21	4,21	5,11	6,01	6,91	7,81	8,71
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)					-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)					10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN											
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)					65,00	67,00	68,60	70,20	71,80	73,40	75,00
Peningkatan Produksi Hortikultura (%)					70,00	72,00	73,60	75,20	76,80	78,40	80,00
Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)					65,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (hektar)					533,2	106,00	118,20	130,40	142,60	154,80	167,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)					65,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)					N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)					N/A	15,00	24,00	33,00	42,00	51,00	60,00
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)					0,05	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (titik)					N/A	4,00	5,20	6,40	7,60	8,80	10,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
Persentase rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)					80,00	82,00	82,60	83,20	83,80	84,40	85,00
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)					40,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)					80,00	82,00	82,60	83,20	83,80	84,40	85,00
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)					40,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
Persentase Nilai Ekspor Barang Komoditas Unggulan Daerah (%)					N/A	30,00	38,00	46,00	54,00	62,00	70,00
Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)					N/A	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri / Kawasan Industri (%)					40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi (%)					50,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)					70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perekonomian dan SDA (%)											
KEUANGAN											
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)					99,25	87,07	86,86	86,64	86,43	86,21	86,00
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)					11,60	17,71	18,67	19,63	20,58	21,54	22,50
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)					90,68	91,00	91,41	91,82	92,23	92,64	93,05
Persentase Penurunan SILPA (%)					58,80	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)					84,00	86,00	86,80	87,60	88,40	89,20	90,00
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)					2,21	2,75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH											
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)					N/A	6,59	6,60	6,61	6,61	6,62	6,63
Return on Aset (ROA) BUMD (%)					N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)					N/A	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
KEPEGAWAIAN											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)					100 (2024)	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)					100 (2024)	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)					100 (2024)	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)					N/A	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)					100 (2024)	100,0 0	95,00	90,00	85,00	80,00	75,00
Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)					100 (2024)	100,0 0	95,00	90,00	85,00	80,00	75,00
Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)					100 (2024)	100,0 0	95,00	90,00	85,00	80,00	75,00
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)					100 (2024)	100,0 0	95,00	90,00	85,00	80,00	75,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH											
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)					N/A	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)					N/A	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,0 0
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)					N/A	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,0 0
Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)					N/A	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)					20 (2024)	21,00	21,80	22,60	23,40	24,20	25,00
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unqqulan Daerah (%)					N/A	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPk		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)					50 (2024)	51,00	52,20	53,40	54,60	55,80	57,00
Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)					N/A	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH											
INSPEKTORAT											
Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Indeks)					Level 3 (2024)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
DISTRIK WARSA											
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					N/A	81,25	82,25	83,25	84,25	85,25	86,25
Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					N/A	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BONDIFUAR											
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					N/A	81,25	82,25	83,25	84,25	85,25	86,25
Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					N/A	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK AIMANDO											
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh distrik (skor kepuasan)					N/A	81,25	82,25	83,25	84,25	85,25	86,25
Persentase pelayanan administrasi dasar yang diselesaikan tepat waktu di tingkat distrik (%)					N/A	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK SAMOFA											
Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN BRAMBAKEN											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN KARANG MULIA											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN SAMOFA											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN SNERBO											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN MANSINYAS											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN YAFDAS											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN ANJAREUW											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BIAK TIMUR											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BRUYADORI											
Persentase penyelesaian penugasan dari kepala daerah pada distrik (%)					N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BIAK KOTA											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN FANDOI											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN BUROKUB											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN WAUPNOR											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BIAK UTARA											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BIAK BARAT											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK NUMFOR BARAT											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK YAWOSI											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK ANDEY											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK SWANDIWE											

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK ORKERI											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK POIRU											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK ORIDEK											
Persentase Kampung yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat distrik (%)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)					30,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	80,00
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)					48,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	80,00
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)					40,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	80,00
Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program kerukunan dari FKUB (%)					40,00	40,00	49,00	58,00	67,00	76,00	85,00

Indikator Kinerja	Tag_Indiktr				Base Line (2023*/ 2024)	Target Indikator Kinerja Daerah					
	RPJPD	RIPPP	KLHS	PJPK		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio tempat ibadah terhadap penduduk (per satuan penduduk)					40,00	40,00	49,00	58,00	67,00	76,00	85,00
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)					35,00	50,00	57,00	64,00	71,00	78,00	85,00



BAB V PENUTUP

5.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi setiap kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Biak Numfor dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029;
- c. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja perangkat daerah setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas

program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala OPD serta disahkan oleh Bupati.

- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor;
- e. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor;
- f. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, DPRD Kabupaten Biak Numfor, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Biak Numfor akan menjadi kabupaten yang bangkit, aman, mandiri, sejahtera dan beriman.

5.2 PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2025-2029 perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dan sinergi berbagai sumber pendanaan, secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Optimalisasi sinergi pemanfaatan sumber pendanaan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, memastikan efektivitas program prioritas, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan berbagai sumber dan skema pendanaan inovatif, termasuk skema blended financing, kerja sama dengan sektor

swasta, serta pemanfaatan dana sosial. Dengan pendekatan ini, penganggaran untuk pencapaian prioritas pembangunan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan selaras dengan tahapan pembangunan.

5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi RPJMD adalah proses penting untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja pembangunan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan strategi yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus, pengendalian dan evaluasi menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa alokasi dana Otsus benar-benar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Melalui proses ini, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik semata, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, penguatan kapasitas masyarakat adat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi tidak hanya menjadi alat manajemen pembangunan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada OAP dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

5.4 PERUBAHAN RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Perubahan RPJMD Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029 dapat dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. perubahan yang mendasar, mencakup antara lain: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional; dan
- d. merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

5.5 PARTISIPASI PUBLIK

Partisipasi publik memiliki peran krusial dalam menciptakan pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, partisipatif, dan inklusif. Dengan komunikasi publik yang efektif dan berkeadilan, kebijakan serta program pembangunan dapat lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok adat, serta kelompok rentan lainnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan. Prinsip dasar partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi RPJMD Kabupaten Biak Numfor mencakup tiga aspek utama:

- a. **Struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah** yang objektif, akuntabel, inovatif, profesional, serta berorientasi pada keberagaman dan inklusivitas.
- b. **Penyediaan informasi yang akurat, transparan, mudah diakses, relevan, menarik**, serta disajikan dalam berbagai format agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.
- c. **Keterlibatan aktif seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan secara demokratis**, dalam proses komunikasi kebijakan dengan pendekatan yang berbasis data valid serta metode komunikasi yang adaptif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial-budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor.



VISI PEMBANGUNAN BIAK NUMFOR 2025-2029:

"Mewujudkan Kabupaten
Biak Numfor yang Sejahtera,
Berdaya Saing, Inklusif dan
Berkelanjutan Melalui
Masyarakat yang Cerdas,
Sehat dan Mandiri"

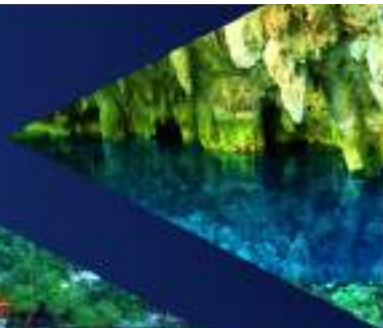


MARKUS OKTOVIANUS MANSNEBRA, S.H., M.M.

Bupati Biak Numfor

JIMMY CARTER RUMBARAR KAPISSA

Wakil Bupati Biak Numfor



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2025**

